



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2025-2029



BUPATI BANGKA SELATAN

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan prinsip terarah, terintegrasi, efektif, efisien, dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan kondisi daerah;
- b. bahwa untuk menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah, dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2014 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 17), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 5 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

dan

BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun berpedoman pada RPJP Nasional.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RJPMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra-PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal2

- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW, dan RPJMN.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi:
 - a. Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra PD; dan
 - b. Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD;

BAB III SISTEMATIKA RPJMD

Pasal3

Sistematika penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum Daerah;
- c. Visi, Misi, dan program prioritas pembangunan Daerah;
- d. program perangkat daerah dan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- e. penutup.

Pasal 4

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.

BABIV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan perencanaan RPJMD; dan
 - b. pelaksanaan RPJMD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan perencanaan RPJMD;
 - b. pelaksanaan RPJMD; dan
 - c. hasil RPJMD.
- (4) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (5) Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 19 Agustus 2025

BUPATI BANGKA SELATAN,



Diundangkan di Toboali
pada tanggal 19 Agustus 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

HEFI NURANDA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 1
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG:(1.3 / 2025)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2025-2029 dapat disusun dengan baik. Dokumen ini merupakan langkah awal dalam merumuskan arah dan strategi pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan, guna mewujudkan visi dan misi pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan.

RPJMD Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan daerah. Dokumen ini memuat berbagai program dan kegiatan yang dirancang untuk menjawab tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada, dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip *good governance*, partisipasi masyarakat, serta keberlanjutan lingkungan.

Proses penyusunan dokumen ini tidak lepas dari dukungan dan kontribusi berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), akademisi, pelaku usaha, organisasi masyarakat, hingga masyarakat secara umum. Partisipasi aktif dari seluruh pihak telah memperkaya substansi dan kualitas dokumen ini, sehingga diharapkan dapat menjadi acuan yang komprehensif dalam mencapai tujuan pembangunan daerah.

RPJM Daerah ini telah melalui berbagai tahapan penting, mulai dari penyusunan rancangan awal, konsultasi publik, musrenbang, rancangan, rancangan akhir, penyesuaian dengan dokumen perencanaan lain, hingga proses fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dokumen ini juga memuat arah kebijakan pembangunan daerah, strategi pencapaian tujuan dan sasaran, indikator kinerja utama, serta kerangka pendanaan yang mendukung keterpaduan antar sektor dan perangkat daerah

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga RPJMD Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2025-2029 dapat menjadi landasan yang kuat dalam mewujudkan pembangunan daerah agar menuju "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bangka Selatan Yang Adil, Makmur, Lestari dan Berkeadaban 2029"

Toboali, 19 Agustus 2025

BUPATI BANGKA SELATAN,

H. RIZA HERDAVID, S.T., M.Tr.IP



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum	I-3
1.3. Hubungan Antar Dokumen.....	I-7
A. Hubungan RPJMD dengan RPJM Nasional	I-7
B. Hubungan RPJMD dengan RPJPD, Renstra, RKPD dan Renja PD ...	I-7
C. Hubungan RPJMD dengan RTRW Kabupaten Bangka Selatan.....	I-8
1.4. Maksud dan Tujuan	I-9
1.5. Sistematika Penulisan	I-10
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH	II-1
2.1. Aspek Geografi dan Demografi	II-1
A. Posisi dan Peran Strategis Kabupaten Bangka Selatan	II-1
B. Potensi Sumber Daya Alam.....	II-4
C. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.....	II-13
D. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan	II-14
E. Lingkungan Hidup Berkualitas.....	II-18
F. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim.....	II-20
G. Demografi.....	II-23
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-29
A. Kesejahteraan Ekonomi.....	II-29
B. Kesehatan Untuk Semua	II-36
C. Pendidikan Berkualitas yang Merata.....	II-40
D. Perlindungan Sosial yang Adaptif	II-42
E. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	II-43
F. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif	II-45

2.3. Aspek Daya Saing Daerah	II-47
A. Daya Saing Sumber Daya Manusia Daerah	II-47
B. Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi.....	II-48
C. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru.....	II-54
D. Transformasi Digital	II-54
E. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	II-56
F. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi .	II-56
G. Stabilitas Ekonomi Makro	II-59
2.4. Aspek Pelayanan Umum	II-64
A. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	II-64
B. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh dan Demokrasi Substansial.....	II-66
C. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gantar Kawasan	II-70
D. Standar Pelayanan Minimal.....	II-71
E. Kerjasama Daerah.....	II-73
2.5. Gambaran Keuangan Daerah	II-103
A. Kinerja Keuangan Daerah Masa Lalu.....	II-103
B. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	II-112
C. Kerangka Pendanaan	II-117
2.6. Permasalahan dan Isu Strategis	II-120
A. Permasalahan Pembangunan	II-120
B. Isu Strategis.....	II-128
C. Penetapan Isu Strategis.....	II-149
BAB III VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	III-1
3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.....	III-1
A. Visi dan Misi.....	III-1
B. Tujuan dan Sasaran Pembangunan	III-5
3.2. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	III-10
A. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah.....	III-10
B. Program Prioritas Pembangunan Daerah	III-16
3.3. Tahapan dan Tema Pembangunan Daerah.....	III-36
A. Tahapan dan Tema Pembangunan	III-36

	3.4. Arah Pembangunan Kewilayahan	III-38
BAB IV	PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.....	IV-1
	4.1 Program Perangkat Daerah	IV-1
	4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	IV-42
	A. Indikator Kinerja Utama.....	IV-42
	B. Indikator Kinerja Daerah	IV-48
BAB V	PENUTUP	V-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan Antar Dokumen Perencanaan.....	I-8
Gambar 2.1	Arah Pembangunan Kabupaten Bangka Selatan dalam RPJMN Tahun 2025-2029	II-2
Gambar 2.2	Peta Administrasi Kabupaten Bangka Selatan	II-3
Gambar 2.3.	Peran Strategis Kabupaten Bangka Selatan sebagai Simpul Konektivitas Kepulauan	II-4
Gambar 2.4	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Bangka Selatan.....	II-6
Gambar 2.5	Peta Deliniasi PPN Lada Putih Kabupaten Bangka Selatan.....	II-8
Gambar 2.6	Peta Daerah Potensi Penangkapan Ikan Kabupaten Bangka Selatan	II-11
Gambar 2.7	Peta Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK) Bangka Selatan	II-12
Gambar 2.8	Peta Key Tourism Area (KTA) di Wilayah Kabupaten Bangka Selatan	II-13
Gambar 2.9	Peta Rawan Bencana Kabupaten Bangka Selatan	II-21
Gambar 2.10	Luas Areal Panen Kabupaten Bangka Selatan	II-22
Gambar 2.11	Peta Sebaran Penduduk Tahun 2024	II-25
Gambar 2.12	Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Belitung, dan Nasional Tahun 2020 – 2024	II-30
Gambar 2.13	Posisi Relatif Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bangka Selatan terhadap Kabupaten Lainnya di Bangka Belitung Tahun 2024.....	II-30
Gambar 2.14	Persentase Penduduk Miskin Nasional, Provinsi dan Kabupaten Tahun 2020-2024	II-32
Gambar 2.15	PDRB per Kapita ADHB Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020 – 2024	II-33
Gambar 2.16	Perbandingan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah) Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Belitung, dan Nasional Tahun 2020 – 2023	II-33

Gambar 2.17	Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Belitung, dan Nasional Tahun 2020 – 2024	II-35
Gambar 2.18	Tren Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Nasional, Provinsi dan Kabupaten Tahun 2020-2024	II-36
Gambar 2.19	Usia Harapan Hidup Nasional, Provinsi dan Kabupaten Tahun 2020 2024	II-37
Gambar 2.20	Grafik Angka Kematian Ibu Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020-2024.....	II-38
Gambar 2.21	Pravelensi Stunting Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020-2023 ..	II-38
Gambar 2.22	Harapan Lama Sekolah Nasional, Provinsi dan Kabupaten Tahun 2020-2024.....	II-41
Gambar 2.23	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020-2024.....	II-43
Gambar 2.24	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Nasional, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021-2024 .	II-45
Gambar 2.25	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Nasional, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020-2024	II-46
Gambar 2.26	Tingkat Partisipasi Perempuan dalam Angkatan Kerja Nasional, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020-2024	II-47
Gambar 2.27	Rasio Ketergantungan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2019-2023	II-48
Gambar 2.28	PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020 – 2024	II-50
Gambar 2.29	Persentase Rasio PDRB Tahun 2020-2024	II-51
Gambar 2.30	Persentase Penduduk Yang mengakses Internet atau Pernah Menggunakan Internet Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020-2024.....	II-55
Gambar 2.31	Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) di Nasional, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten Bangka Selatan dari tahun 2022-2024	II-55
Gambar 2.32	Pertumbuhan Infrastruktur Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020-2024.....	II-58
Gambar 2.33	Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020 – 2024	II-60

Gambar 2.34	Trend Laju Inflasi Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020 – 2023	II-61
Gambar 2.35	Rasio Intermediasi Sektor Keuangan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020 – 2023.....	II-63
Gambar 2.36	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Provinsi dan Kabupaten Tahun 2020-2024.....	II-65
Gambar 2.37	Indeks Integritas Nasional Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021-2024.....	II-66
Gambar 2.38	Perkembangan Realisasi Pendapatan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020 – 2024.....	II-106
Gambar 2.39	Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bangka Selatan 2020-2024.....	II-107
Gambar 2.40	Perkembangan Realisasi Pembiayaan Kabupaten Bangka Selatan 2020-2024.....	II-108
Gambar 2.41	Grafik Perkembangan Proporsi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020-2023.....	II-115
Gambar 2.42	Rata-Rata Proporsi Belanja Daerah tahun 2020-2025.....	II-115
Gambar 2.43	Grafik Tingkat Kemiskinan Ekstrem di Tingkat Global (1820—2015)..	II-135
Gambar 2.44	Isu Strategis Kabupaten Bangka Selatan.....	II-154
Gambar 3.1	Visi Misi Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2025-2029.....	III-3
Gambar 3.2	Identifikasi SWOT Misi I Mewujudkan Pembangunan Sosial Yang Inklusif.....	III-11
Gambar 3.3	Identifikasi SWOT Misi II Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan Melalui Penyediaan Infrastruktur yang Andal.....	III-12
Gambar 3.4	Identifikasi SWOT Misi III Mewujudkan Tata Kelola Yang Berintegritas, Inovatif dan Adaptif.....	III-13
Gambar 3.5	Identifikasi SWOT Misi IV Mewujudkan Stabilitas Kewilayahan yang Berkualitas dan Berketahanan Ekologi.....	III-14
Gambar 3.6	Arah Pembangunan Kewilayahan Kabupaten Bangka Selatan Berdasarkan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029.....	III-39

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perhitungan <i>Location Quotient</i> (LQ) Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024.....	II-5
Tabel 2.2	Data Produktivitas Tanaman Pangan Tahun 2024	II-7
Tabel 2.3	Produksi dan Pertumbuhan Sektor Perikanan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020-2024.....	II-9
Tabel 2.4	Data Komoditas Hasil Perikanan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020 – 2024.....	II-10
Tabel 2.5	Status Daya Dukung Pangan di Kabupaten Bangka Selatan	II-14
Tabel 2.6	Status Daya Dukung Air di Kabupaten Bangka Selatan.....	II-14
Tabel 2.7	Konsumsi Listrik Perkapita Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020 s.d. 2024.....	II-15
Tabel 2.8	Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020 s.d. 2024	II-15
Tabel 2.9	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020 s.d. 2024	II-16
Tabel 2.10	Potensi Kolong Penyediaan Air Baku Wilayah Sungai Bangka di Kabupaten Bangka Selatan	II-16
Tabel 2.11	Kapasitas Air Baku Kabupaten Bangka Selatan 2020 - 2024.....	II-17
Tabel 2.12	Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Bersih Perpipaan (%) Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020 – 2024.....	II-18
Tabel 2.13	Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020 s.d. 2024	II-18
Tabel 2.14	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%) Tahun 2020 – 2024...	II-19
Tabel 2.15	Pengelolaan Sampah Timbulan Sampah Terolah difasiltasi Pengolahan Sampah (%) Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020 – 2024.....	II-19
Tabel 2.16	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT) Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020 – 2024	II-20
Tabel 2.17	Indeks Resiko Bencana (IRB) Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 s.d. 2024.....	II-20
Tabel 2.18	Kejadian Bencana Alam di Kabupaten Bangka Selatan dari Tahun 2020-2024.....	II-21
Tabel 2.19	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten	

	Bangka Selatan Tahun 2024.....	II-23
Tabel 2.20	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020 – 2024.....	II-24
Tabel 2.21	Jumlah Penduduk Kabupaten Bangka Selatan Menurut Kecamatan Tahun 2020 – 2024.....	II-24
Tabel 2.22	Rasio Jenis Kelamin dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2012-2023.....	II-25
Tabel 2.23	Rasio Ketergantungan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2014-2024 ...	II-26
Tabel 2.24	Proyeksi Penduduk Kabupaten Bangka Selatan Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2025-2030 (Ribu).....	II-28
Tabel 2.25	Parameter Hasil Proyeksi Penduduk Kabupaten Bangka Selatan 2025-2030.....	II-29
Tabel 2.26	Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional, Provinsi dan Kabupaten Tahun 2020-2024.....	II-34
Tabel 2.27	Persentase Orang Terduga Tuberkulosis (TBC) Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020-2024	II-39
Tabel 2.28	Angka Pengobatan Lengkap (Complete Rate) Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020-2024.....	II-39
Tabel 2.29	Angka Keberhasilan Pengobatan (Success Rate) Semua Kasus TBC Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020-2024.....	II-40
Tabel 2.30	Rata-rata Lama Sekolah Nasional, Provinsi dan Kabupaten Tahun 2020-2024	II-41
Tabel 2.31	Persentase Literasi Membaca dan Numerasi Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2022-2024.....	II-42
Tabel 2.32	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas Yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2022-2024.....	II-42
Tabel 2.33	Persentase Potensi konflik Yang terselesaikan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021-2024.....	II-44
Tabel 2.34	Nilai dan Kontribusi PDRB ADHK (2010) Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020 – 2024	II-52
Tabel 2.35	Nilai dan Kontribusi PDRB ADHB Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020 – 2024	II-53
Tabel 2.36	Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020 – 2024 (Milyar Rupiah)	II-56
Tabel 2.37	Indeks Infrastruktur Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020-2024	II-58

Tabel 2.38	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak.....	II-58
Tabel 2.39	Persentase Desa Mandiri Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020-2024.....	II-59
Tabel 2.40	Penegakan Perda Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020-2024	II-68
Tabel 2.41	Persentase Capaian Aksi HAM Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020-2024	II-69
Tabel 2.42	Perkembangan Angka Kriminalitas Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020-2024	II-69
Tabel 2.43	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020-2024	II-70
Tabel 2.44	Capaian Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020-2024.....	II-77
Tabel 2.45	Capaian Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021-2024.....	II-71
Tabel 2.46	Daftar Kerjasama Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024	II-73
Tabel 2.47	Realisasi APBD Tahun 2020 - 2024.....	II-104
Tabel 2.48	Neraca Daerah Tahun 2020-2024	II-109
Tabel 2.49	Analisis Rasio Likuiditas dan Rasio Solvabilitas Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020 - 2022.....	II-111
Tabel 2.50	Proporsi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020-2024.....	II-114
Tabel 2.51	Realisasi Belanja Aparatur Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2019-2023.....	II-116
Tabel 2.52	Surplus/Defisit Riil dan Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020-2023.....	II-117
Tabel 2.53	Proyeksi Kerangka Pendanaan Tahun 2026-2030.....	II-119
Tabel 2.54	Hasil Analisis ICOR (Incremental Capital Output Ratio) Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020-2023	II-126
Tabel 2.55	Perumusan Isu-Isu Strategis RPJMD Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020-2024.....	II-155
Tabel 3.1	Keterkaitan antara Visi dan Misi dengan Isu Strategis	III-4
Tabel 3.2	Keselarasan Misi RPJPD Kabupaten Bangka Selatan 2025-2045 dan RPJMD Kabupaten Bangka Selatan 2025-2029.....	III-4
Tabel 3.3	Rumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bangka Selatan	

	Tahun 2025-2029	III-7
Tabel 3.4	Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Stategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2025-2029	III-16
Tabel 3.5	Perumusan Program Prioritas RPJMD Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2025-2029	III-22
Tabel 3.6	Keterkaitan Antara Program Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional	III-28
Tabel 3.7	Keterkaitan Antara Program Strategis Nasional, Program Prioritas Daerah dan Agenda Prioritas Kepala Daerah.....	III-31
Tabel 3.8	Pentahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Bangka Selatan 2025-2029	III-36
Tabel 3.9	Tema Pembangunan RPJMD Kabupaten Bangka Selatan 2025-2029	III-37
Tabel 4.1	Program Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan	IV-2
Tabel 4.2	Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan	IV-43
Tabel 4.3	Sinkronisasi Indikator Makro Daerah dengan Indikator RPJMN dan RPJMD Prov Kepulauan Bangka Belitung	IV-48
Tabel 4.3	Indikator Kinerja Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.....	IV-49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah merupakan wujud penyelenggaraan pelayanan pemerintahan yang diamanatkan kepada daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Artinya, pemerintah daerah sesuai dengan karakteristik dan kemampuannya, menyikapi pembangunan sebagai bentuk penyerahan urusan pemerintahan dalam wilayah kewenangannya. Penyelenggaraan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerangka pembangunan nasional. Pembangunan daerah dalam pelaksanaannya harus bersinergi dan mendukung terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Dalam konteks yang lebih implementatif pembangunan daerah mendukung tujuan pembangunan nasional dengan cara mengurangi ketimpangan antar wilayah, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi yang merata. Dengan mengoptimalkan potensi lokal dan meningkatkan kesejahteraan di tingkat daerah, pembangunan daerah membantu menciptakan pemerataan akses terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan lain sebagainya. Selain itu, dengan memperkuat kemandirian ekonomi daerah, pembangunan daerah turut berkontribusi pada perekonomian nasional. Dalam konteks ini, pembangunan daerah bukan hanya fokus pada kebutuhan lokal, tetapi juga mendukung pencapaian tujuan besar negara, seperti kesejahteraan sosial, keadilan ekonomi, dan kemajuan secara keseluruhan.

Dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu menyusun rencana pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah tersebut, disusun secara berjangka meliputi: (i) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahunan, (ii) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahunan, dan (iii) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahunan.

Oleh karena itu, dengan telah dilaksanakannya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2029 serta dilantiknya kepala daerah terpilih maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 2025-2029.

Dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Dengan demikian, visi dan misi serta program prioritas kepala daerah terpilih akan selaras dengan arah, kebijakan umum, dan prioritas pembangunan dokumen perencanaan di atasnya serta menjiwai seluruh muatan RPJMD Kabupaten Bangka Selatan Periode 2025-2029 dan harus dioperasionalkan oleh seluruh perangkat daerah sesuai kewenangannya.

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, RPJMD disusun dengan menggunakan empat pendekatan perencanaan pembangunan, meliputi pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratis dalam penyusunan RPJMD menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yang tercermin dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) RPJMD. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dimaksudkan bahwa RPJMD disusun dengan memperhatikan harapan masyarakat diseluruh kabupaten/kota, mengarah pada percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat. Adapun pendekatan politik dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.

Melalui pendekatan perencanaan tersebut, dokumen RPJMD ini disusun secara komprehensif dan terpadu yang bertujuan untuk menciptakan sinergi antar sektor, dan koordinasi antara pemangku kepentingan. Sehingga pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dijabarkan dari visi dan misi kepala daerah terpilih dapat terwujud melalui strategi, kebijakan dan program pembangunan yang adaptif, inovatif, dan inklusif sesuai dengan kebutuhan/kepentingan masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel. Disamping itu, arah pembangunan daerah harus memperhatikan

komitmen terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs) sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017. Pembangunan berkelanjutan menuntut adanya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pemerataan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, penyusunan RPJMD juga diarahkan untuk mengarusutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam seluruh tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan daerah.

RPJMD Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2025–2029 disusun dengan berpedoman pada RPJMN 2025–2029 yang berorientasi pada pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Visi Pembangunan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2025–2029 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bangka Selatan Yang Adil, Makmur, Lestari dan Berkeadaban 2029”. Visi tersebut selaras dengan pencapaian Asta Cita yang dijabarkan kedalam 4 (empat) misi yakni (1) Mewujudkan Pembangunan Sosial yang Inklusif, (2) Mewujudkan Pertumbuhan dan Produktivitas Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan, (3) Mewujudkan Tata Kelola Yang Berintegritas, Inovatif dan Adaptif, dan (4) Mewujudkan Stabilitas Kewilayahan yang Berkualitas dan Berketahanan Ekologi. Disamping itu, RPJMD ini juga menjadi pedoman daerah dalam mewujudkan sinergi pembangunan antara Kabupaten Bangka Selatan dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan memastikan bahwa arah kebijakan, strategi, dan target kinerja pembangunan Kabupaten Bangka Selatan berkontribusi secara langsung terhadap pencapaian sasaran pembangunan provinsi, sekaligus mengakomodasi isu strategis, permasalahan, serta potensi unggulan daerah secara efektif, terukur, dan berkelanjutan.

1.2 DASAR HUKUM

Dasar hukum yang digunakan sebagai dasar penyusunan RPJMD Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2025–2029 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di

- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6757);
 10. Undang-undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6987);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4593) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 - 2034;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2014 Nomor 6);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 17), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 5 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024 Nomor 7);

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa perencanaan pembangunan daerah harus saling terintegrasi dan sinergi dengan perencanaan pembangunan nasional. Untuk itu, RPJMD Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya sebagai berikut:

A. Hubungan RPJMD dengan RPJM Nasional

Penyusunan RPJMD berpedoman pada RPJMN sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Hal tersebut dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan nasional, arah kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah.

B. Hubungan RPJMD dengan RPJPD, Renstra, RKPD dan Renja PD

Penyusunan RPJMD Kabupaten Bangka Selatan berpedoman pada RPJPD yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 - 2045. RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan tahap pertama dari perencanaan pembangunan jangka panjang daerah yakni Tahun 2025-2029.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RenstraPD). Renstra-PD merupakan rencana kerja 5 (lima) tahunan yang menjabarkan perencanaan kerja dan kinerja tahunan perangkat daerah untuk menunjang pencapaian visi, misi dan sasaran pembangunan jangka menengah sebagaimana termuat dalam RPJMD serta penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota. Penjabaran rencana tahunan perangkat daerah termuat dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) setiap tahun selama 5 (lima) tahun.

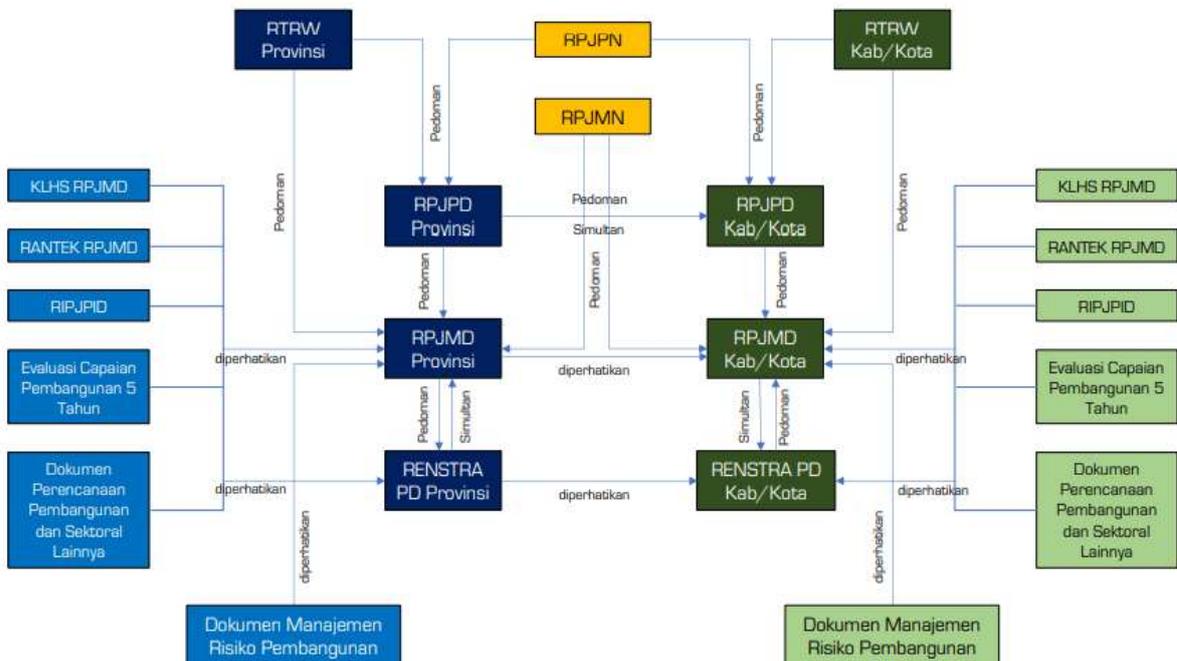
Selanjutnya, RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai perencanaan tahunan daerah. RKPD menjadi acuan bagi setiap perangkat daerah dalam menyusun Renja PD. Dalam

pelaksanaannya di tahunan, RPJMD melalui RKPD menjadi dasar penyusunan Rancangan APBD setiap tahun selama 5 (lima) tahun.

C. Hubungan RPJMD dengan RTRW Kabupaten Bangka Selatan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Bangka Selatan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Bangka Selatan Tahun 2014-2034, yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2014-2034 melalui penyelerasan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bangka Selatan dengan rencana struktur dan rencana pola pemanfaatan ruang.

Secara diagramatis hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1.
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

RPJMD Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2025–2029 disusun dengan maksud:

1. Sebagai arah pembangunan jangka menengah Kabupaten Bangka Selatan pada periode tahun 2025–2029;
2. Sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan baik di lingkungan pemerintahan, masyarakat, dunia usaha/swasta dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah selama lima tahun kedepan;
3. Sebagai tolok ukur keberhasilan kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
4. Sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi misi dan program Kepala Daerah terpilih;
5. Sebagai instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam mengendalikan penyelenggaraan prioritas pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Adapun tujuan Penyusunan Dokumen RPJM Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2025–2029 sebagai berikut:

1. Menjabarkan visi, misi dan program Kepala Daerah Kabupaten Bangka Selatan sehingga diperoleh tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
2. Menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Kabupaten Bangka Selatan;
3. Menjadi pedoman penyusunan RKPD Kabupaten Bangka Selatan setiap tahun sebagai dasar penyusunan APBD;
4. Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan melalui sinergitas dan koordinasi masing-masing pelaku pembangunan;
5. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah dengan pemerintah pusat;

6. Mewujudkan partisipasi pemangku kepentingan pembangunan daerah secara proporsional dan profesional;
7. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
8. Menjaga pemerataan pembangunan yang berkelanjutan antar sektor dan antar wilayah di Kabupaten Bangka Selatan secara efisien dan efektif.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan RPJMD.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

Menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, aspek pelayanan umum serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, kondisi dan kinerja pengelolaan keuangan daerah 5 (lima) tahun terakhir sebagai dasar untuk merancang kerangka pendanaan untuk membiayai pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan serta memuat permasalahan pembangunan dan isu strategis pembangunan daerah kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini memuat visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Bangka Selatan terpilih serta penjelasan tujuan, sasaran serta indikator kinerja tujuan dan sasaran pembangunan. Disamping itu juga memuat berbagai strategi dan arah kebijakan yang dipilih untuk menguatkan pencapaian tujuan dan sasaran melalui program-program pembangunan yang ditetapkan.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Pada bab ini berisi seluruh program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah yang disertai dengan indikator program, target dan pagu indikatif program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Selain itu, memuat kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang berisikan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKD).

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

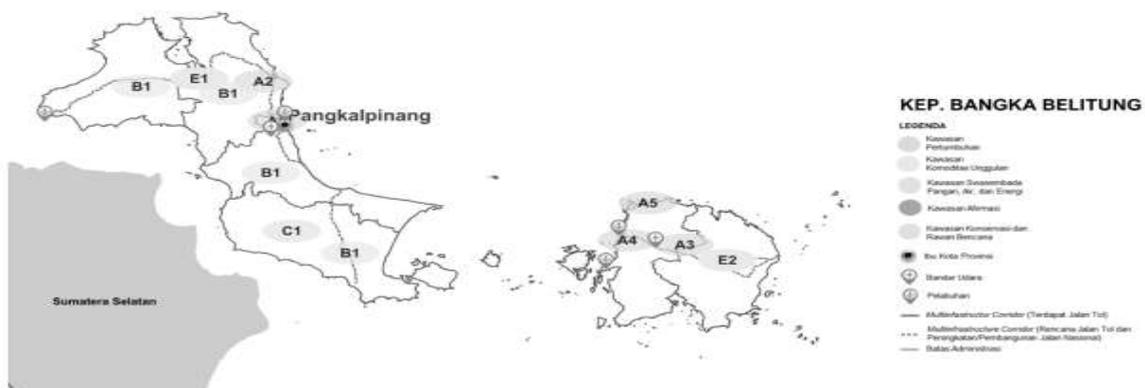
A. Posisi dan Peran Strategis Kabupaten Bangka Selatan

Kabupaten Bangka Kabupaten Bangka Selatan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terletak di bagian Selatan Pulau Bangka. Secara geografis Kabupaten Bangka Selatan terletak pada 2° 26' 27" sampai 3° 5' 56" Lintang Selatan dan 107° 14' 31" sampai 105° 53' 09" Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Bangka Selatan memiliki luas lebih kurang 3.607,08 Km² atau 360.708 Ha Selatan yang terdiri dari 8 Kecamatan, 3 kelurahan dan 50 desa serta 163 dusun/lingkungan dengan Peta Administrasi pada Gambar 2.2. Adapun batas-batas administrasi Kabupaten Bangka Selatan sebagai berikut :

- sebelah barat berbatasan dengan Selat Bangka dan Laut Jawa;
- sebelah timur berbatasan dengan Selat Gaspar;
- sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa; dan
- sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sungai Selan dan Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah.

Kabupaten Bangka Selatan memiliki keunggulan geografis strategis karena lokasinya berada dekat dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI I). Hal tersebut Hal ini secara tidak langsung menjadikan Kabupaten Bangka Selatan terhubung dengan sejumlah simpul penting diantaranya ibuKota Jakarta, sekaligus membuka konektivitas dengan Pulau Kalimantan, Jawa, Sumatera dan kawasan di Kepulauan Riau bahkan memiliki peluang besar untuk mengembangkan outlet untuk ekspor maupun pembukaan jalur pelayaran akses ke pusat pasar dan kawasan perdagangan internasional yang potensial. Selaras dengan visi RPJPD Kabupaten Bangka Selatan sebagai gerbang ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Maju dan Berkelanjutan, pembangunan kewilayahan pada periode I RPJMD Tahun 2025-2029 diarahkan pada kebijakan penguatan infrastruktur dalam menunjang pengembangan kawasan-kawasan strategis dan cepat tumbuh yang mampu memperkuat peran dan posisi Bangka Selatan baik secara regional, nasional maupun global.

Dalam RPJMN Periode 2025–2029, Kabupaten Bangka Selatan merupakan satu-satunya Kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diarahkan sebagai kawasan swasembada pangan. Bangka Selatan memiliki potensi besar sebagai lumbung pangan bagi Provinsi Bangka Belitung maupun skala nasional. Dengan lahan pertanian yang luas dan subur, sumber daya alam yang melimpah, serta berbagai program pemerintah yang menunjang pembangunan dalam sektor pertanian, perikanan, dan peternakan, Kabupaten Bangka Selatan dapat berkontribusi signifikan dalam ketahanan pangan. Disamping itu, juga Kabupaten Bangka Selatan diarahkan menjadi kawasan dengan komoditas unggulan timah, bauksit dan lada serta menjadi salah satu kawasan transmigrasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



KEP. BANGKA BELITUNG

<p>A. Kawasan Pertumbuhan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan Perkotaan Pangkalpinang 2. Kawasan Pengembangan Industri Pangkalpinang-Sungailiat 3. Kawasan Pariwisata Unggulan Belitung 4. Kawasan Perkotaan Tanjungpandan 5. KEK Tanjung Kelayang 	<p>C. Kawasan Swasembada Pangan</p> <p>Swasembada Pangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bangka Selatan
<p>B. Kawasan Komoditas Unggulan</p> <p>Timah, Bauksit, dan Lada</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bangka (Kab. Bangka Barat, Kab. Bangka, Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka Selatan) 	<p>E. Kawasan Konservasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. TN Gunung Maras 2. Geopark Belitung

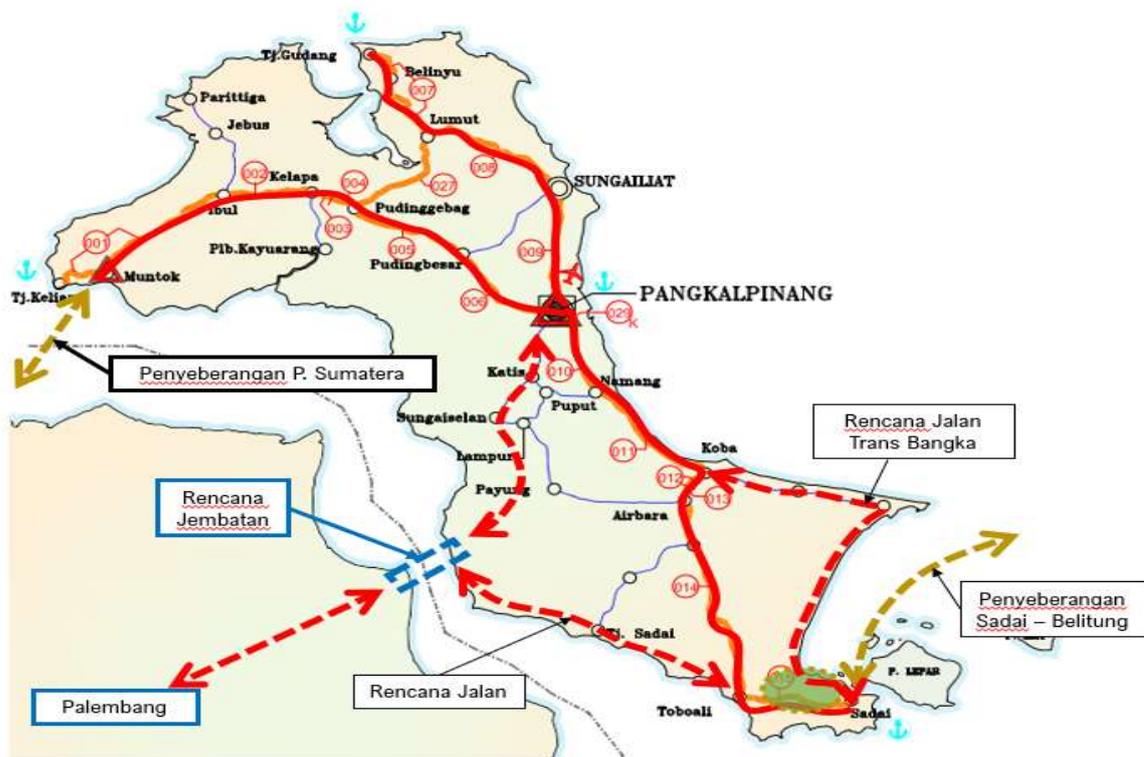
Sumber : RPJMN Tahun 2025-2029

Gambar 2.1
Arah Pembangunan Kabupaten Bangka Selatan dalam RPJMN Tahun 2025–2029



Gambar 2.2
 Peta Administrasi Kabupaten Bangka Selatan

Secara kewilayahan, Kabupaten Bangka Selatan memiliki peran strategis sebagai simpul konektivitas kepulauan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kondisi tersebut akan menguntungkan dalam meningkatkan efisiensi biaya logistik dalam pergerakan barang dan jasa dengan dukungan infrastruktur yang memadai seperti jaringan jalan yang terkoneksi dengan Kawasan Industri dan Pelabuhan Sadai sebagai gerbang ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Disamping akan diperkuat dengan adanya rencana pembukaan jalan trans Bangka dan rencana pembangunan jembatan penghubung Pulau Bangka dan Pulau Sumatera. Selain itu, sektor-sektor strategis di Kabupaten Bangka Selatan yakni pertanian, perkebunan, perikanan dan pertambangan cukup berpengaruh dalam mendukung perekonomian secara regional.



Gambar 2.3
Peran Strategis Kabupaten Bangka Selatan sebagai Simpul Konektivitas Kepulauan

B. Potensi Sumber Daya Alam

Kabupaten Bangka Selatan, memiliki berbagai potensi sumber daya alam yang cukup melimpah. Berdasarkan Analisis *Location Question* (LQ) 3 (tiga) potensi unggulan sumber daya alam di Kabupaten Bangka Selatan yakni:

- 1) Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan nilai *Location Quotient* (LQ)

sebesar 2,11;

2) Sektor Pertambangan dan Penggalian dengan nilai *Location Quotient* (LQ) sebesar 2,00;

3) Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Pariwisata) dengan nilai *Location Quotient* (LQ) sebesar 0,84 atau mendekati 1.

Tabel 2.1
Perhitungan *Location Quotient* (LQ) Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024

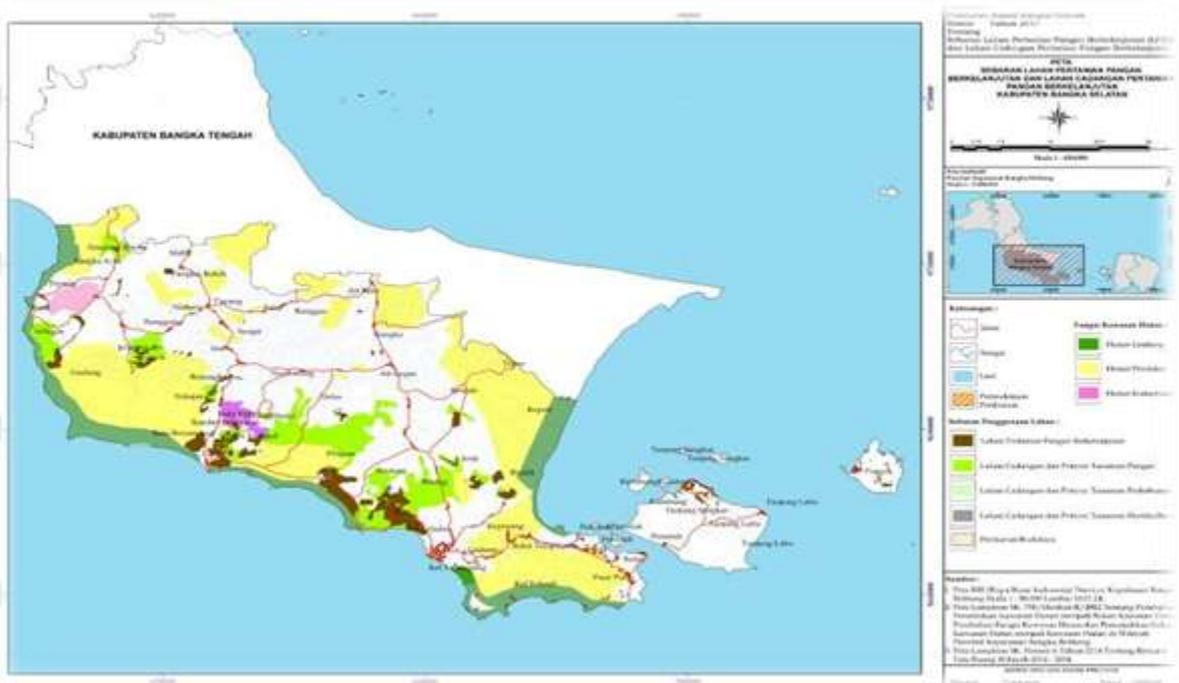
LAPANGAN USAHA	PDRB ADHB Tahun 2024				LQ		Sektor Basis	Sektor Non Basis	Multiplier Effect	
	Kab. Basel	(%)	Prov. Babel	(%)	Nilai	B/NB				
A	Pertanian	5.151,66	42,83	21.786,46	20,27	2,11	B	2.714	2.438	0,90
B	Pertambangan & Penggalian	1.814,02	15,08	8.112,12	7,55	2,00	B	906	908	1,00
C	Industri Pengolahan	596,94	4,96	22.141,52	20,60	0,24	nB	-1.881	2.477	-1,32
D	Listrik & Gas	8,28	0,07	117,59	0,11	0,63	nB	-5	13	-2,70
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	2,17	0,02	21,20	0,02	0,92	nB	0	2	-11,99
F	Konstruksi	963,27	8,01	9.784,12	9,10	0,88	nB	-132	1.095	-8,33
G	Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor	1.352,36	11,24	16.515,36	15,36	0,73	nB	-496	1.848	-3,73
H	Transportasi & Pergudangan	120,95	1,01	5.219,08	4,85	0,21	nB	-463	584	-1,26
I	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	327,44	2,72	3.490,85	3,25	0,84	nB	-63	391	-6,18
J	Informasi & Komunikasi	90,21	0,75	2.527,21	2,35	0,32	nB	-193	283	-1,47
K	Jasa Keuangan & Asuransi	66,79	0,56	2.111,37	1,96	0,28	nB	-169	236	-1,39
L	Real Estat	414,47	3,45	3.649,57	3,39	1,01	B	6	408	66,85
M,N	Jasa Perusahaan	18,28	0,15	325,95	0,30	0,50	nB	-18	36	-2,01
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial	651,52	5,42	5.890,11	5,48	0,99	nB	-8	659	-87,41
P	Jasa Pendidikan	317,75	2,64	3.361,10	3,13	0,84	nB	-58	376	-6,45
Q	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	81,63	0,68	1.458,11	1,36	0,50	nB	-82	163	-2,00
R,S,T,U	Jasa Lainnya	51,26	0,43	993,10	0,92	0,46	nB	-60	111	-1,86
TOTAL PDRB		12.028,98	100	107.504,82	100					

Sumber: BPS, 2025 (Diolah)

Potensi sektor unggulan pertanian salah satunya berasal dari komoditas tanaman pangan. Tanaman Pangan merupakan tanaman pada kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan. Kawasan tanaman pangan di Kabupaten Bangka Selatan ditetapkan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 686/SK-PG.03.03/XII/2019 Tentang Lahan Baku Sawah (LBS) nasional tahun 2019 adalah

seluas 13.399,15 hektar yang tersebar di semua Kecamatan yang ada Kabupaten Bangka Selatan terkecuali Kecamatan Tukak Sadai.

Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2014-2034 serta Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, bahwa kawasan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Bangka Selatan ditetapkan dengan luas 35.000 (tiga puluh lima ribu) Hektar, terdiri dari Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 15.869,34 (lima belas ribu delapan ratus enam puluh Sembilan koma tiga puluh empat) Hektar dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 19.130,66 (sembilan belas ribu seratus tiga puluh koma enam puluh enam) Hektar. Hingga Tahun 2023, dari keseluruhan luas lahan LP2B di Kabupaten Bangka Selatan baru dimanfaatkan sebesar 46,28 persen sehingga potensi pengembangan sektor pertanian masih cukup besar untuk mendukung kebijakan Bangka Selatan sebagai lumbung pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



Gambar 2.4
Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Bangka Selatan

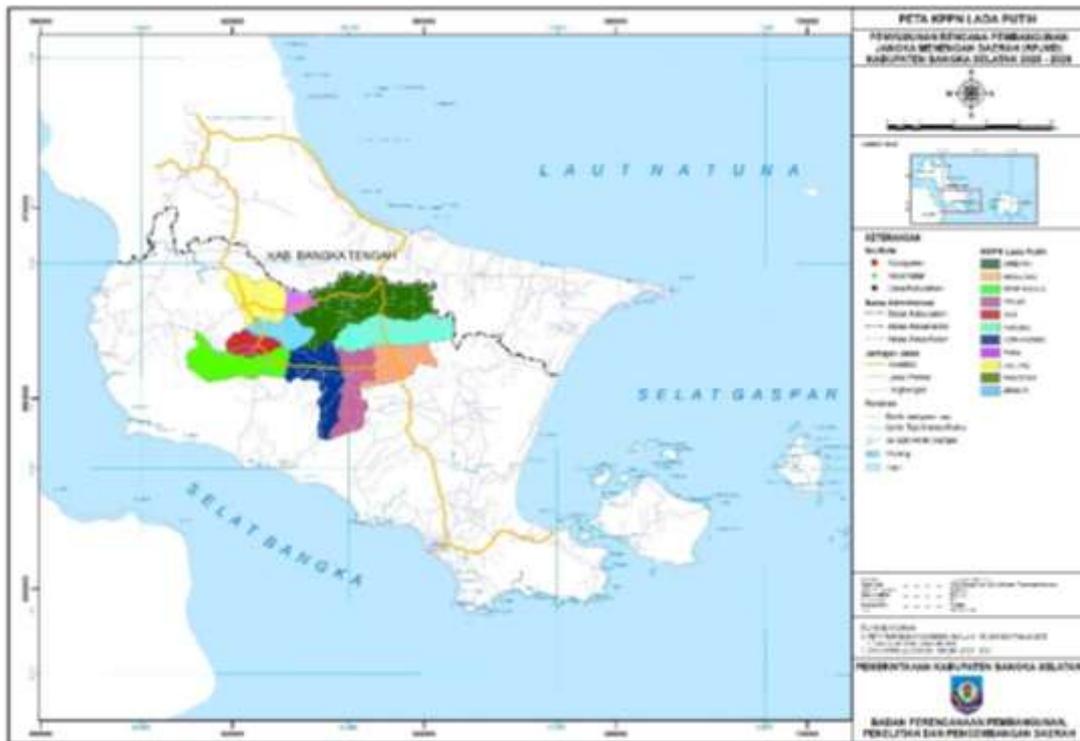
Potensi komoditas tanaman pangan dan Komoditas Perkebunan di Kabupaten Bangka Selatan meliputi jenis tanaman padi sawah, padi ladang, jagung, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar, talas, lada, karet, kelapa, kopi, kelapa sawit dan kakao. Berikut data produktivitas tanaman pangan dan perkebunan Tahun 2022-2024:

Tabel 2.2
Data Produktivitas Tanaman Pangan dan Perkebunan Tahun 2024

Jenis Tanaman	2022			2023			2024		
	Luas Lahan Panen (Ha)	Total Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton) / Luas Lahan Panen (Ha)	Luas Lahan Panen (Ha)	Total Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton) / Luas Lahan Panen (Ha)	Luas Lahan Panen (Ha)	Total Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton) / Luas Lahan Panen (Ha)
Tanaman Pangan									
Padi Sawah	4.438,5	20.198,18	4,55	4562,5	21.410,52	4,69	7.091,00	30.977,18	4,37
Padi Ladang	772,5	1.026	1,33	528,5	689,2	1,30	636,55	880,15	1,38
Jagung	152,2	380,91	2,5	55,23	301,12	5,45	46,90	129,79	2,77
Kacang Tanah	23,45	58,26	2,48				5,30	8,34	1,57
Ubi Kayu	317,45	5.096,5	16,05				168,55	2.304,08	13,67
Ubi Jalar	17,35	74,15	4,27	20,4	111,7	5,5	14,70	68,48	4,66
Talas	17,30	112,31	6,49				3,30	22,55	6,83
Perkebunan									
Lada	20.177,40	13.468,93	0,67	16.665,00	8.226,49	0,49	13.831,50	3.893,06	0,28
Karet	20.866,50	11.657,89	0,56	19.173,50	9.470,20	0,49	17.982,00	7.781,80	0,43
Kelapa	981,50	638,85	0,65	966,50	650,42	0,67	924,50	550,82	0,60
Kopi	13,50	0,59	0,04	58,00	3,94	0,07	107,00	4,34	0,04
Kelapa Sawit	25.712,00	45.951,88	1,79	26.908,00	47.479,47	1,76	27.413,75	48.038,11	1,75
Kakao	19,10	11,82	0,62	18,00	10,39	0,58	16,00	3,35	0,21

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Selatan, 2025

Perkebunan adalah salah satu sektor yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan, baik pada lahan basah dan atau lahan kering. Kawasan perkebunan di Kabupaten Bangka Selatan direncanakan seluas 159.449,31 hektar yang tersebar di semua Kecamatan. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2014-2034, peruntukan perkebunan di Kabupaten Bangka Selatan diarahkan untuk pengembangan komoditi kelapa sawit, karet dan lada. Kelapa Sawit, Karet dan Lada merupakan Komoditas Perkebunan utama di wilayah Kabupaten Bangka Selatan, sedangkan Kelapa, Pinang, Kopi, Kakao, Jambu Mente, Aren, Cengkeh merupakan komoditas potensial untuk di kembangkan. Selain itu, Kabupaten Bangka Selatan juga memiliki kawasan perkebunan lada yang potensial yang terletak pada Kawasan Pedesaan Prioritas Nasional (KPPN) Lada Putih di 11 Desa di Kecamatan Airgegas dan Payung.



Gambar 2.5
Peta Deliniasi PPN Lada Putih Kabupaten Bangka Selatan

Potensi tanaman hortikultura meliputi jenis tanaman buah-buahan dan sayuran. Berdasarkan data produksi tanaman hortikultura Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024, jenis tanaman buah-buahan memiliki produksi panen yang lebih tinggi dibandingkan dengan produksi tanaman sayuran. Produksi buah - buahan adalah sebesar 7.394 ton dan Produksi Sayuran berupa Cabai Keriting, Cabai Rawit, Tomat, Kacang Panjang, Ketimun, Terung, adalah sebesar 1.472,66 ton. Kawasan hortikultura di Kabupaten Bangka Selatan direncanakan seluas 8.462,35 hektar yang tersebar di semua kecamatan yang ada Kabupaten Bangka Selatan terkecuali Kecamatan Tukak Sadai.

Kontribusi dari Hasil Kehutanan dan Penebangan Kayu pada Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga berlaku Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024 kurang lebih sebesar 111,89 Miliar Rupiah atau sekitar 0,1 dari distribusi Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga berlaku Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024 kurang lebih sebesar 11,36 Triliun Rupiah. Sub sektor kehutanan merupakan salah satu penyumbang tingginya kontribusi sektor pertanian di Kabupaten Bangka Selatan. Potensi kehutanan di Bangka Selatan didukung dengan luasnya Kawasan hutan produksi. Berdasarkan SK Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup di Kabupaten Bangka Selatan, Kawasan hutan produksi tetap direncanakan seluas 103.975,62 hektar.

Disamping potensi komoditas pertanian, perkebunan dan kehutanan, Kabupaten Bangka Selatan memiliki potensi pengembangan komoditas perikanan tangkap maupun budidaya. Hal ini dikarenakan wilayah Kabupaten Bangka Selatan dikelilingi dan berbatasan langsung dengan laut sehingga memiliki sumberdaya laut yang relatif besar dan potensial untuk dikembangkan. Hampir seluruh Kecamatan di Kabupaten Bangka Selatan berbatasan dengan laut kecuali Kecamatan Payung sehingga 7 (tujuh) dari 8 (delapan) Kecamatan di Kabupaten Bangka Selatan masing-masing berperan dalam produksi komoditi perikanan. Komoditi perikanan yang dihasilkan baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi seperti ikan Kerapu, Kakap Merah, Udang, Cumi-cumi, Sirip Ikan Hiu dan lain-lain.

Tabel 2.3
Produksi dan Pertumbuhan Sektor Perikanan
Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020-2024

Jenis	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Perikanan Tangkap	Produksi (Ton)	39.184,00	40.252,26	40.700,33	42.437,76	41.019,62
	Pertumbuhan (%)	1,3	2,72	1,11	2,85	-3,34%
Perikanan Budidaya	Produksi (Ton)	826,948	1.231,47	2.078,80	1.291,68	1.479,47
	Pertumbuhan (%)	188,18	48,91	6,88	-37,86	14,54%
Pengolahan	Produksi (Ton)	3.991,00	3.994,00	4.101,00	5.226,40	1.019,61
	Pertumbuhan (%)	0,48	0,075	2,6	27,44	-80,49%
Komoditas Perikanan	Total Produksi (Ton)	44.001,95	45.477,83	46.880,13	48.955,84	43.518,70
	Pertumbuhan (%)	2,47	3,35	3,08	3,19	-11,11%

Sumber: Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Bangka Selatan, 2025

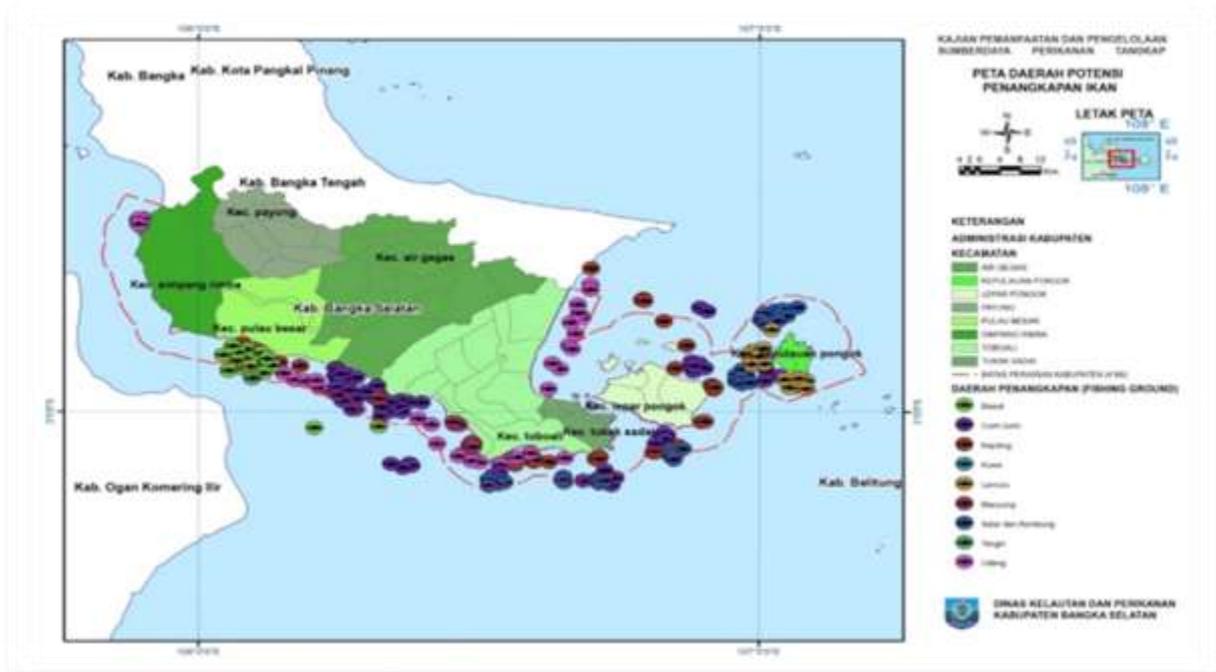
Produksi perikanan budidaya ditopang oleh produksi budidaya udang vaname yang dilakukan secara intensif di tambak-tambak yang dimiliki oleh beberapa Perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Bangka Selatan. Potensi pengembangan budidaya udang vaname juga masih sangat potensial untuk dikembangkan karena hingga saat ini masih terdapat beberapa Perusahaan yang belum optimal dalam produksi budidaya udang tersebut. Selain itu, masyarakat juga dapat didorong untuk melakukan budidaya udang vaname secara semi/intensif di lahan yang mereka miliki dengan pengembangan klaster budidaya udang vaname menggunakan media bioflok. Adapun untuk budidaya ikan air tawar, dapat dilakukan dengan optimalisasi program kampung perikanan budidaya yang berpusat di Desa Rias.

Tabel 2.4
Data Komoditas Hasil Perikanan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020 - 2024

KOMODITAS	2020	2021	2022	2023	2024	Keterangan
Rajungan (<i>Portunus pelagicus</i>)	6.174.377	6.755.153	6.652.851	5.834.880	5.613.541	Segar/Ekspor
Kembung (<i>Rastrelliger faughni</i>)	3.231.334	3.053.755	2.915.312	3.464.193	2.532.126	Segar
Japuh (<i>Dussumieria acuta</i>)	3.827.525	2.471.287	2.045.216	2.429.903	2.417.688	Bahan Ikan asin
Cumi-cumi (<i>Loligo chinensis</i>)	3.257.451	2.466.511	2.373.073	2.462.587	2.447.101	Segar/Ekspor
Siro (<i>Amblygaster sirm</i>)	3.367.228	2.232.797	1.738.257	2.205.661	2.030.430	Bahan Ikan asin
Bawal Putih (<i>Pampus argenteus</i>)	2.239.109	2.198.958	2.063.383	2.607.270	1.871.882	Segar
Bawal Hitam (<i>Parastromateus niger</i>)	2.178.539	2.159.283	2.036.924	2.651.023	1.911.808	Segar
Kuniran; Biji Nangka (<i>Parupeneus cyclostomus</i>)	2.381.718	2.131.306	1.926.180	1.740.931	1.715.936	Bahan Ikan asin
Total	26.657.281	23.469.050	21.751.196	23.396.448	20.540.512	

Sumber: Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Bangka Selatan, 2025

Data produksi perikanan laut tahun 2020–2024 menunjukkan kecenderungan menurun pada hampir semua komoditas utama, meskipun beberapa di antaranya mengalami fluktuasi di tengah periode. Rajungan sebagai komoditas terbesar sempat mencapai puncak produksi 6,75 juta kg pada 2021 namun terus menurun hingga 5,61 juta kg pada 2024. Kembung dan Japuh memperlihatkan pola serupa, yakni penurunan dari tahun awal, meski Kembung sempat meningkat pada 2023 dan Japuh relatif stabil di level rendah sejak 2022. Komoditas cumi-cumi cenderung stabil di kisaran 2,3–3,2 juta kg, sementara Siro, Bawal Putih, dan Bawal Hitam memperlihatkan fluktuasi tajam dengan penurunan signifikan pada 2024. Adapun Kuniran konsisten mengalami penurunan dari 2,38 juta kg pada 2020 menjadi hanya 1,71 juta kg di 2024. Secara umum, tren ini mengindikasikan adanya tekanan terhadap stok sumber daya ikan dan potensi berkurangnya hasil tangkap, yang perlu diantisipasi melalui pengelolaan perikanan yang lebih berkelanjutan.



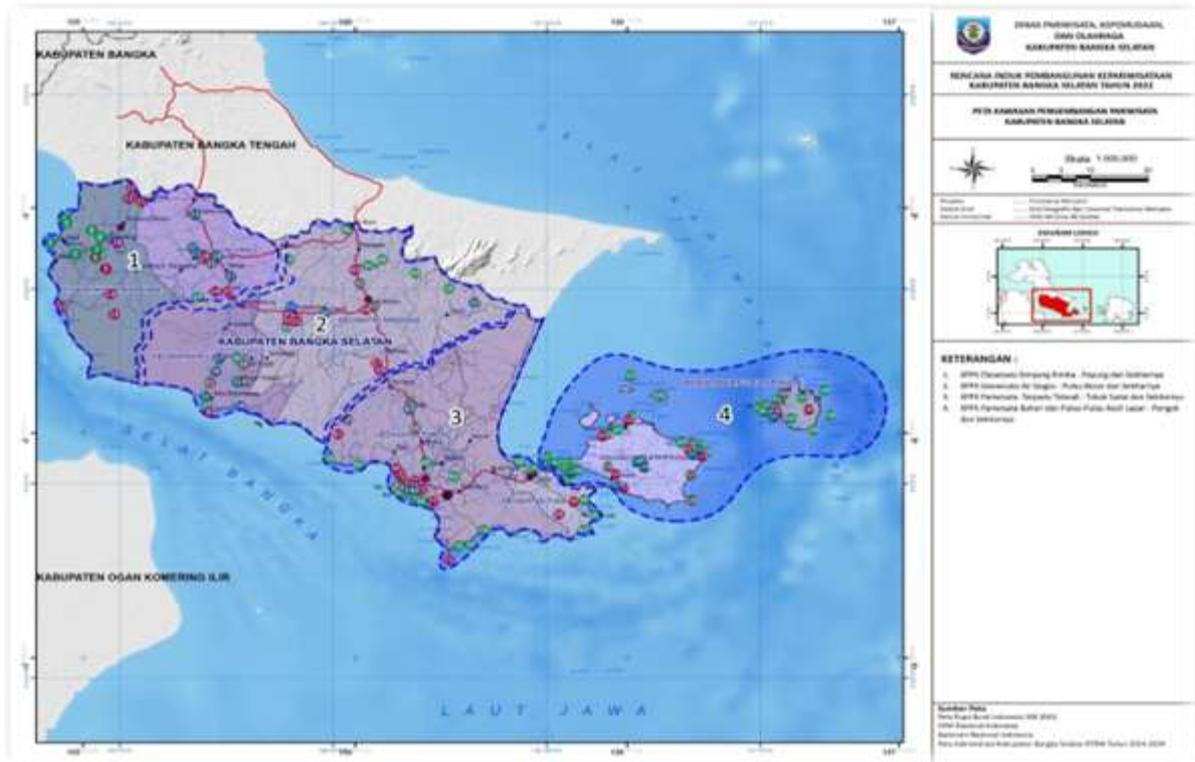
Gambar 2.6
Peta Daerah Potensi Penangkapan Ikan Kabupaten Bangka Selatan

Sektor pertambangan merupakan salah satu sektor basis di Kabupaten Bangka Selatan dengan komoditas unggulan yakni timah. Selain timah, daerah ini juga memiliki potensi untuk bahan tambang lainnya seperti pasir kuarsa dan batu granit. Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 46.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dimana luasan total yang direncanakan di Kabupaten Bangka Selatan yakni sebesar 7.466,03 hektar. Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian pada Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga berlaku Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024 kurang lebih sebesar 1,81 Triliun Rupiah atau sekitar 15,08 persen dari distribusi Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga berlaku Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024.

Selanjutnya, potensi sumber daya alam yang juga merupakan salah satu keunggulan komparatif di Kabupaten Bangka Selatan yakni potensi sektor pariwisata. Potensi Objek Destinasi Tujuan Wisata (ODTW) di Kabupaten Bangka Selatan terdiri dari wisata alam, wisata bahari, wisata budaya, wisata tirta, wisata sejarah dan wisata agro yang tersebar di beberapa Kecamatan yang ada di Kabupaten Bangka Selatan dan direncanakan seluas 919,70 hektar. Berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2022, Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK) Bangka Selatan terdiri atas:

- 1) KPPK Ekowisata Simpang Rimba-Payung dan sekitarnya;

- 2) KPPK Geowisata Airgegas-Pulau Besar dan sekitarnya;
- 3) KPPK Rekreasi Edukatif Toboali-Tukak Sadai dan sekitarnya; dan
- 4) KPPK Pariwisata Sejarah Bahari Lepar-Pongok dan sekitarnya.



Gambar 2.7
Peta Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK) Bangka Selatan

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Bangka Belitung Tahun 2023-2044 terdapat 2 (dua) KTA di Kabupaten Bangka Selatan yakni KTA Toboali – Lepar dan KTA Batu Betumpang. Jenis wisata yang menjadi prioritas dalam pengembangan kedua KTA tersebut yakni wisata alam, budaya dan buatan. Pengembangan KTA Toboali-Lepar terbagi menjadi 2 Sub KTA yaitu Sub KTA Kepulauan Kelapan & sekitarnya dan Sub KTA Toboali-Lepar serta Sub KTA Batu Betumpang. Sub KTA Kepulauan Kelapan dan sekitarnya, memiliki 3 (tiga) DTW prioritas yaitu DTW Prioritas Pulau dan Perairan Kelapan, DTW Prioritas Pantai Lampu, dan DTW Prioritas Desa Adat Kumbung. Sub KTA Toboali-Lepar merupakan kawasan yang memiliki wisata sejarah seperti wisata sejarah Benteng Toboali, serta kegiatan wisata pesisir Tanjung Ketapang, dengan DTW berupa Wisata Alam Batu Belimbing, Pantai Merbau, Pantai Kelisut, Pantai Batu Kapur, Pantai Nek Aji, dan Pantai Batu Kodok. Sedangkan Sub KTA Batu Betumpang diarahkan pada pengembangan Agro Edu Tourism dengan potensi wisata agro dan pantai.



Gambar 2.8
Peta Key Tourism Area (KTA) di Wilayah Kabupaten Bangka Selatan

C. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Kapasitas daya tampung lingkungan hidup dapat diidentifikasi dari aspek kemampuan lahan dan daya tampung air dalam bentuk sebaran kualitas air. Daya dukung lingkungan hidup meliputi daya dukung pangan, air, dan lahan. Daya dukung lahan dijelaskan dalam daya dukung lahan terbangun dan fungsi lindung. Kabupaten Bangka Selatan secara keseluruhan memiliki daya dukung lahan terbangun sebesar 56,1. Jika dikaitkan dengan klasifikasi DDLB, daya dukung lahan terbangun di Kabupaten Bangka Selatan termasuk kategori baik (>3). Hasil tersebut menunjukkan bahwa ruang ruang untuk pengembangan aktivitas atau kegiatan pembangunan masih dapat dilakukan karena nilai daya dukung yang masih dalam kategori baik. Tentunya dengan potensi lahan terbangun yang masih cukup luas dengan daya dukung kategori baik maka kebutuhan ruang untuk mengakomodir bertambahnya jumlah penduduk dan aktivitas masyarakat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan masih dapat terpenuhi.

Berdasarkan data status daya dukung pangan di Kabupaten Bangka Selatan, dari total 8 (delapan) kecamatan, terdapat dua kecamatan, yakni Payung dan Tukak Sadai, yang menunjukkan daya dukung pangan terlampaui. Sedangkan 6 (enam) kecamatan lainnya berada diatas rata-rata 90 persen belum terlampaui. Kondisi tersebut disebabkan adanya perbedaan konsentrasi penggunaan lahan dan jumlah penduduk.

Tabel 2.5
Status Daya Dukung Pangan di Kabupaten Bangka Selatan

Kecamatan	Belum Melampaui		Melampaui		Total
	ha	%	ha	%	
Air Gegas	96,273.35	97,67	2,296.68	2,33	98,570.03
Kepulauan Pongok	4,686.58	98,70	61.73	1,30	4,748.31
Lepar	21,968.59	97,04	670.11	2,96	22,638.70
Payung	-	0	39,153.25	100,00	39,153.25
Pulaubesar	31,959.90	97,45	836.30	2,55	32,796.20
Simpang Rimba	62,625.21	97,39	1,678.32	2,61	64,303.53
Toboali	71,841.40	93,39	5,084.82	6,61	76,926.22
Tukak Sadai	-	0	21,571.76	100,00	21,571.76
Total	286,618.58	79,46	74,089.42	20,54	360,708.00

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Bangka Selatan, 2024

Daya Dukung Air berbasis grid di Kabupaten Bangka Selatan didominasi kelas belum melampaui. Hanya sebagian kecil yang sudah terlampaui di Kecamatan Air Gegas yaitu persentase sebesar 0,3%, atau sekitar 266,14 hektar. Maka dari itu strategi pengelolaan air yang bijak dan langkah-langkah konservasi perlu dipertimbangkan untuk mengatasi tantangan daya dukung air di Bangka Selatan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Tabel 2.6
Status Daya Dukung Air di Kabupaten Bangka Selatan

Kecamatan	Belum Melampaui		Melampaui		Total
	Ha	%	Ha	%	
Air Gegas	98,303.89	99,73	266,14	0,27	98,570.03
Kepulauan Pongok	4,748.31	100,00	-	-	4,748.31
Lepar	22,638.70	100,00	-	-	22,638.70
Payung	39,153.25	100,00	-	-	39,153.25
Pulaubesar	32,796.20	100,00	-	-	32,796.20
Simpang Rimba	64,303.53	100,00	-	-	64,303.53
Toboali	76,926.22	100,00	-	-	76,926.22
Tukak Sadai	21,571.76	100,00	-	-	21,571.76
Total	360,441.86	99,92	266,14	0,08	360,708.00

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Bangka Selatan, 2024

D. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

Gambaran kondisi ketahanan energi di Kabupaten Bangka Selatan ditunjukkan melalui indikator konsumsi listrik perkapita (Kwh). Konsumsi Listrik Perkapita merupakan perbandingan total jumlah energi listrik yang digunakan, dibagi dengan jumlah penduduk dalam periode satu tahun. ini menunjukkan rata-rata konsumsi listrik tiap penduduk. Listrik merupakan kebutuhan primer masyarakat Indonesia. Seluruh aspek keseharian manusia sangat bergantung pada energi listrik. Oleh karena itu, konsumsi listrik juga menjadi salah

satu tolak ukur kesejahteraan suatu Kabupaten/kota. Konsumsi Listrik Perkapita Kabupaten Bangka Selatan mengalami peningkatan kurun waktu 5 tahun (2020 – 2024). Pada tahun 2020 sebesar 536,655977 kwh/kapita, terus mengalami kenaikan sebesar 731,492750 kWh/kapita pada tahun 2024. Peningkatan ini dikarenakan beberapa faktor diantaranya peningkatan jumlah penduduk, peningkatan pendapatan masyarakat dan peningkatan aktivitas ekonomi.

Tabel 2.7
Konsumsi Listrik Perkapita Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020 s.d. 2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Konsumsi Listrik	104,294796	130,285646	137,767918	146,396414	158.060222
Jumlah Penduduk	194.342	200.325	205.253	210.344	216.079
Konsumsi Listrik Perkapita	536,655977	650,371376	671,210252	695,985690	731,492750

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024 (diolah)

Selanjutnya, kondisi **ketahanan pangan** di Kabupaten Bangka Selatan dapat ditunjukkan melalui indikator indeks ketahanan pangan yang pengukurannya dilakukan oleh Badan Pangan Nasional. Penilaian IKP dilihat dari turunan tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Bangka Selatan mengalami peningkatan dalam kurun waktu 5 tahun pada tahun 2020-2024. Pada tahun 2020 IKP Kabupaten Bangka Selatan sebesar 81,89, terus mengalami kenaikan secara perlahan hingga 83,38 pada tahun 2022. Pada tahun 2023 IKP Kabupaten Bangka Selatan mengalami penurunan menjadi 82,94 dan meningkat kembali pada tahun 2024 sebesar 84,87. Namun demikian, nilai IKP Bangka Selatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Bangka Selatan berada di peringkat ke 124 dari 514 kabupaten/kota se-Indonesia.

Tabel 2.8
Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020 s.d. 2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	56,03	71,14	71,71	73,22	71,21
Kabupaten Bangka Selatan	81,89	81,93	83,38	82,94	84,87

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2024

Kondisi ketahanan pangan pada level individu diukur dengan indikator *Prevalence of Undernourishment (PoU)* atau prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan. Semakin tinggi prevalensi ketidakcukupan pangan, maka semakin tinggi persentase penduduk yang mengonsumsi makanan, tetapi kurang dari kebutuhan energinya. Semakin rendah nilai Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan semakin baik dengan metode pengukuran total konsumsi kalori rumah tangga dibagi jumlah anggota rumah tangga. Peningkatan persentase *Prevalence of Undernourishment (PoU)* di Kabupaten Bangka Selatan dari tahun 2020 sampai 2024 dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni jumlah penduduk miskin, jumlah produksi beras, dan pengeluaran per kapita makanan.

Tabel 2.9
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*)
Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020 s.d. 2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
POU (%)	9,32	12,10	15,86	13,08	10,95

Sumber : Badan Pangan Nasional, 2024

Gambaran terkait **ketahanan air** di Kabupaten Bangka Selatan ditunjukkan dengan ketersediaan air khususnya untuk air baku dan akses rumah tangga perkotaan terhadap air bersih perpipaan. Ketersediaan infrastruktur pengelolaan sumber daya air menjadi salah satu program prioritas pemerintah untuk pembangunan ekonomi dan peningkatan daya saing. Pengelolaan sumber daya air yang dilakukan pemerintah diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan air baku dan irigasi. Penambahan volume air yang bisa ditampung akan memberi pengaruh terhadap luasan areal irigasi yang diairi. Salah satu yang menjadi faktor penting dalam pengelolaan sumber daya air adalah sungai. Sungai-sungai di Kabupaten Bangka Selatan masuk ke dalam Wilayah Sungai Bangka.

Tabel 2.10
Potensi Kolong Penyediaan Air Baku Wilayah Sungai Bangka di Kabupaten Bangka Selatan

No	Nama Kolong	Koordinat		Kecamatan	Kapasitas m ³ /det
		X	Y		
1	Kolong Kunitit	3°0'8.143"S	106°29'13.531"E	Toboali	0,05
2	Kolong Ramadan	3°1'31.549"S	106°37'50.51"E	Tukak Sadai	0,05
3	Kolong Bikang	2°49'19.006"S	106°25'35.063"E	Toboali	0,03
4	Kolong ta	3°0'30.3"S	106°29'57.37"E	Toboali	0,04
5	Kolong Mendo	3°0'30.3"S	106°29'57.37"E	Mendo	0,1
6	Embung Jernang	2°47'14.91"S	106°10'31.66"E	Toboali	0,02

No	Nama Kolong	Koordinat		Kecamatan	Kapasitas m ³ /det
		X	Y		
7	Kolong Kelubi	3°3'25.403"S	106°29'57.37"E	Toboali	0,1
8	Kolong Pumpung	2°56'55.188"S	106°27'10.842"E	Toboali	0,12
9	Kolong Hijau	2°35'44.38"S	106°45'6.881"E	Air Gegas	0,02
10	Kolong Renge	3°1'6.079"S	106°29'39.627"E	Toboali	0,02
11	Interkoneksi Kolong Bangka Selatan	2°58'23.951"S	106°28'27.705"E	Toboali	0,6
Jumlah					1,15

Wilayah Sungai Bangka memiliki potensi sumber daya air permukaan yang cukup signifikan, khususnya yang berasal dari kolong—yakni bekas galian tambang timah yang telah berubah fungsi menjadi tampungan air alami maupun buatan. Berdasarkan data yang tersedia, kapasitas potensial penyediaan air baku dari kolong di wilayah ini mencapai 1,15 meter kubik per detik (m³/det). Potensi ini seharusnya dapat dimanfaatkan sebagai alternatif strategis dalam menjamin ketersediaan air baku untuk keperluan domestik, pertanian, industri, maupun konservasi lingkungan. Namun demikian, hingga saat ini tingkat pemanfaatan aktual dari potensi tersebut baru mencapai sekitar 0,6 m³/det, atau hanya sekitar 52% dari total kapasitas yang tersedia. Sehingga masih terdapat gap sebesar 0,55 m³/det yang belum termanfaatkan secara optimal. Stagnasi ini menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir belum terjadi peningkatan signifikan dalam pengembangan infrastruktur pengambilan, distribusi, atau pemrosesan air baku dari sumber tersebut.

Tabel 2.11
Kapasitas Air Baku Kabupaten Bangka Selatan 2020 - 2024

No.	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Air Baku	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

Sumber: Balai Wilayah Sungai Bangka, 2024 (diolah)

Berdasarkan data Capaian Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Bersih Perpipaan (%) dari tahun 2020 s.d 2024 diketahui terus mengalami kenaikan. Hal tersebut dikarenakan adanya peningkatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) diberbagai desa di Kabupaten Bangka Selatan melalui program pamsimas dan peningkatan sambungan rumah tangga perkotaan yang mengakses air bersih perpipaan di Kecamatan Toboali dan Kecamatan Payung. Pada tahun 2020, capaian akses rumah tangga terhadap air bersih perpipaan berada pada angka 17,12%. Angka ini kemudian meningkat secara bertahap hingga mencapai 28,89% pada tahun 2024.

Tabel 2.12
Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Bersih Perpipaan (%)
Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020 – 2024

NO.	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Air Bersih Perpipaan	17,12	14,94	22,31	28,89	28,89*

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2024

E. Lingkungan Hidup Berkualitas

Keberlanjutan pembangunan didukung dengan terjaganya sumber daya alam dan lingkungan hidup berkualitas. Gambaran kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup berkualitas ditunjukkan dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman, dan Pengelolaan Timbunan Sampah. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Selatan, pada tahun 2020 s.d. tahun 2023 terus menurun dan dibawah target nasional. Tidak tercapainya IKLH disebabkan adanya penurunan kualitas lingkungan yaitu kualitas udara, kualitas air dan kualitas lahan. Namun demikian, pada tahun 2024 nilai IKLH kabupaten Bangka Selatan meningkat dan melampaui target nasional. Secara keseluruhan nilai IKLH Bangka Selatan meningkat disebabkan semakin baiknya nilai IKA dan IKU yang mengindikasikan kinerja pengendalian kualitas udara dan air di Kabupaten Bangka Selatan yang semakin baik. Sedangkan nilai indikator kualitas lahan masih diangka 38,60 persen yang memerlukan perhatian serius dari Pemerintah Daerah dengan jumlah luasan lahan kritis yang masih cukup tinggi di Kabupaten Bangka Selatan.

Tabel 2.13
Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020 s.d. 2024

Komponen Indeks	2020	2021	2022	2023	2024
IKA	68,30	60,69	54,76	55,71	59,05
IKU	93,00	89,35	89,44	89,7	93,74
IKL	64,07	41,73	41,74	36,86	38,60
IKLH	74,02	68,14	65,95	65,36	68,62

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Selatan, 2025

Penyediaan akses terhadap sanitasi masyarakat menjadi salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi karena sangat erat kaitannya dengan kondisi lingkungan dan berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%) di Kabupaten Bangka Selatan menunjukkan trend peningkatan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Masifnya pembangunan infrastruktur sanitasi aman yang dibangun baik melalui APBD Kabupaten, APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun APBN serta Dana Alokasi Khusus seperti Pembangunan Jamban sehat, sistem pengelolaan air limbah

domestik setempat (SPALDS) individual menjadi salah satu penyebab semakin meningkatkan persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman. Selain itu, adanya edukasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh kader-kader kesehatan setempat turut memberi andil kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam menyediakan sanitasi aman di lingkungan rumah tinggalnya masing-masing.

Tabel 2.14
Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%) Tahun 2020 – 2024

NO.	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Akses Sanitasi	1,68	0,12	3,09	3,02	3,05

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2025

Selanjutnya kondisi pengelolaan persampahan di Kabupaten Bangka Selatan ditunjukkan dengan indikator timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah terus mengalami kenaikan dan pada Tahun 2024 sebanyak 70,22 % sampah terkelola pada fasilitas pengolahan sampah. Meskipun demikian masih terdapat 29,78 % sampah yang belum terkelola secara optimal dan menjadi perhatian serius pemerintah mengingat jumlah penduduk yang terus bertambah yang berpotensi menambah jumlah timbulan sampah yang tidak terkelola sehingga akan mengganggu kualitas lingkungan hidup kedepannya.

Tabel 2.15
Pengelolaan Sampah Timbulan Sampah Terolah difasiltasi Pengolahan Sampah (%)
Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020 – 2024

NO	INDIKATOR	2020		2021		2022		2023		2024	
		CAPAIAN		CAPAIAN		CAPAIAN		CAPAIAN		CAPAIAN	
		Ton / tahun	%	Ton / tahun	%	Ton / tahun	%	Ton/ Tahun	%	Ton/Tahun	%
1	Timbunan Sampah	28.935,59	-	29.247,45	-	29.966,94	-	30.710,22	-	31.547,53	-
2	Pengurangan Sampah	1.162,09	4,02	5.331,58	18,23	6.155,42	20,54	5.728,49	18,65	5.954,99	18,88
3	Penanganan Sampah	12.077,85	41,74	12.982,84	44,39	13.775,10	45,97	15.461,40	50,35	16.198,70	51,35
4	Sampah Terkelola	13.234,93	45,76	18.322,81	62,65	19.933,58	56,52	21.189,89	69,00	22.153,69	70,22
5	Sampah Tidak Terkelola	15.695,66	54,24	10.924,64	37,35	10.033,36	33,48	9.520,33	31,00	9.393,84	29,78

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Selatan, 2025

Secara umum pengelolaan persampahan rumah tangga di Kabupaten Bangka Selatan terbagi menjadi 2 (dua) kategori yakni melalui petugas sampah yang difasiltasi oleh KSM Sampah pada lingkungan setempat serta petugas truk angkutan sampah dan pengelolaan sampah konvensional yakni langsung dibuang ke kebun/lahan kosong/laut/sungai atau kolong.

Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Selatan, terjadi kenaikan jumlah proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Meningkatnya jumlah layanan penuh pengumpulan sampah tersebut salah satunya semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarang dan semakin bertambahnya jangkauan pelayanan trayek truk angkutan sampah.

Tabel 2.16
Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)
Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020 – 2024

NO	Indikator	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah (%)	28	29	30	31	35

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Selatan, 2025

F. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Kabupaten Bangka Selatan merupakan daerah **rawan bencana** karena menjadi salah satu kabupaten dengan resiko bencana tinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan data nilai IRB, selama 5 (lima) tahun terakhir Kabupaten Bangka Selatan selalu berada pada kategori tinggi. Sedangkan berdasarkan nilai IKD, hingga saat ini Bangka Selatan masih termasuk ke dalam kategori daerah dengan ketahanan rendah.

Tabel 2.17
Indeks Resiko Bencana (IRB)
Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 s.d. 2024

No.	Daerah Kerawanan	Indikator	2021	2022	2023	2024
1.	Bangka Selatan	IRB	180,40	179,12	179,37	179,68
		IKD	0,29	0,33	0,32	0,28

Sumber: BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2024

Tercatat dari tahun 2020-2024 telah terjadi 50 kali kejadian bencana alam di Kabupaten Bangka Selaatn. Dari mulai Cuaca Ekstrem (Angin Kencang, Angin Puting Beliung, Sambaran Petir), Banjir (Air Meluap dan Banjir Rob), dan Kebakaran (Kebakaran Hutan dan Lahan).

Tabel 2.18
Kejadian Bencana Alam di Kabupaten Bangka Selatan dari Tahun 2020-2024

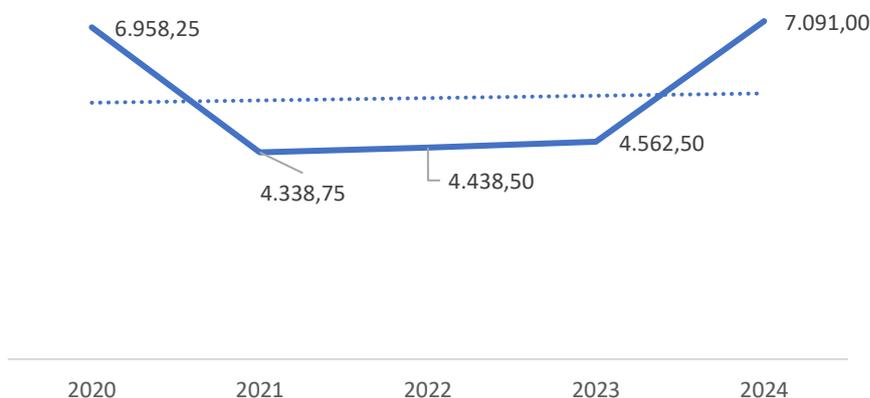
No.	Tahun	Kejadian bencana	Daerah (Desa/Kelurahan)	Jumlah kejadian
1.	2020	1. Angin Puting Beliung 2. Tersambar Petir	1. Desa Rias, Desa Irat, Kelurahan Toboali, Kelurahan Teladan, Kelurahan Tanjung Ketapang 2. Kelurahan Teladan	7
2.	2021	1. Cuaca Ekstrem (Angin Puting Beliung, Angin Kencang dan Tersambar Petir) 2. Banjir (Air Meluap dan Banjir Rob)	1. Kelurahan Teladan, Desa Pergam, Desa Malik, Kelurahan Tanjung Ketapang, Desa Delas, Desa Sidoharjo, Desa Tepus. Gadung. Dan Desa Jelutung II 2. Kelurahan Tanjung Ketapang. Desa Rajik, Desa Permis, Desa Sebagian	9
3.	2022	1. Cuaca Ekstrem (Angin Puting Beliung dan Tersambar Petir) 2. Banjir (Banjir Rob)	1. Desa Penutuk, Desa Nangka, Desa Delas, Desa Airgegas, Desa Pasir Putih, Desa Ranggung, Desa Nangka. Desa Sidoharjo 2. Desa Rajik, Desa Sebagian	10
4.	2023	1. Cuaca Ekstrem (Angin Puting Beliung, Angin Kencang, dan Tersambar Petir. 2. Kebakaran (Kebakaran Hutan dan Lahan)	1. Desa Rias, Desa Jeriji, Desa Kepoh, Kel Tanjung Ketapang, Kelurahan Teladan. Desa Tukak, Desa Permis. Desa Sidoharjo, Desa Nangka 2. Desa Paku, Desa Sengir, Desa Irat	17
5.	2024	1. Bencana Alam (Banjir, Tersambar Petir, Angin Puting Beliung, Tertimpa Pohon) 2. Bencana Sosial (Kebakaran)	1. Desa Airbara, Kelurahan Toboali, Desa Gadung, dan Desa Kepoh 2. Kecamatan Toboali, Kelurahan Teladan, desa permis	7

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Selatan, 2025



Gambar 2.9
Peta Rawan Bencana Kabupaten Bangka Selatan

Selain itu, adanya **fenomena perubahan iklim** secara global juga berpengaruh terhadap kondisi sumber daya alam bahkan menimbulkan dampak bagi kehidupan manusia. Fenomena pemanasan global di mana terjadi peningkatan gas rumah kaca pada lapisan atmosfer berlangsung untuk jangka waktu tertentu. Peningkatan emisi GRK di Kabupaten Bangka Selatan paling dominan disebabkan oleh faktor penggunaan lahan, pertanian dan persampahan. Meskipun demikian emisi GRK lainnya seperti GRK peternakan, limbah cair dan energi juga menjadi faktor-faktor yang cukup berpengaruh. Terjadi peningkatan penggunaan lahan pertanian seiring dengan semakin meningkatkannya pertumbuhan sektor pertanian di Kabupaten Bangka Selatan mempengaruhi siklus karbon dan pelepasan GRK. Pada Tahun 2024, tercatat luas areal panen di Kabupaten Bangka Selatan sebesar 7.091 Ha meningkat 55,42 % dari tahun sebelumnya. Disamping itu, berdasarkan penggunaannya, dominasi penggunaan lahan di Kabupaten Bangka Selatan yakni APL seluas 226.886,39 Ha, HP seluas 103.951,85 Ha, HL seluas 25.740 Ha dan TWA seluas 3.146, 39 Ha. Semakin tinggi terjadinya perubahan lahan maka semakin besar pengaruhnya terhadap peningkatan GRK sebagai akibat pelepasan CO₂ dan N₂O dari tanah, penggunaan pupuk dan pestisida dari aktivitas pertanian serta pelepasan metana (CH₄) dari hewan ternak dan pelepasan N₂O dari kotoran hewan akibat aktivitas peternakan yang berkembang. Disamping pengaruh penggunaan bahan bakar fosil pada kendaraan-kendaraan yang dapat meningkatkan pemanasan global.



Gambar 2.10
Luas Areal Panen Kabupaten Bangka Selatan

G. Demografi

Kondisi Demografi, suatu daerah secara umum tercermin melalui Jumlah Penduduk dan Struktur Umur Penduduk, Dinamika dan Laju Pertumbuhan Penduduk, serta Distribusi atau Sebaran Penduduk. Pada tahun 2024 jumlah penduduk Kabupaten Bangka Selatan sebesar 208.491 jiwa, dengan jenis kelamin laki - laki berjumlah 107.425 jiwa dan perempuan berjumlah 101.066 jiwa.

Tabel 2.19
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
0 - 4	8.673	8.266	16.939
5 - 9	7.881	7.561	15.442
10 -14	8.420	8.009	16.429
15 - 19	9.155	8.465	17.620
20 - 24	9.290	8.658	17.948
25 - 29	9.187	8.702	17.889
30 - 34	9.166	8.773	17.939
35 - 39	9.171	8.767	17.938
40 - 44	8.327	7.798	16.125
45 - 49	7.425	7.045	14.470
50 - 54	6.450	5.954	12.404
55 - 59	5.254	4.815	10.069
60 - 64	3.992	3.491	7.483
65 - 69	2.528	2.241	4.769
70 - 74	1.346	1.296	2.642
75 +	1.160	1.225	2.385
Jumlah	107.425	101.066	208.491

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Selatan, 2025

Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kabupaten Bangka Selatan selama 5 (lima) tahun terakhir bersifat fluktuatif. Kebijakan Pemerintah daerah untuk menekan laju pertumbuhan penduduk dengan adanya program Keluarga Berencana (KB) belum berjalan dengan baik. Pada tahun 2020 pertumbuhan penduduk Kabupaten Bangka Selatan di angka 7,23 persen atau dalam kriteria LPP tinggi, di tahun 2020 terjadi Penurunan Pertumbuhan Penduduk sebesar 3,08 persen namun senantiasa mengalami penurunan sampai dengan tahun 2022 diangka 2,46 persen atau namun masih dalam kriteria LPP cepat. Sedangkan pada tahun 2023 mengalami kenaikan kembali diangka 2,48 persen dan pada tahun 2024 terjadi penurunan pertumbuhan jumlah penduduk sebesar 2,36 persen akan tetapi masih dalam LPP kriteria cepat.

Tabel 2.20
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020 – 2024

Kecamatan	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Payung	4,77	1,93	1,61	1,75	1,57
Pulau Besar	7,1	2,94	2,17	2,31	2,08
Simpang Rimba	9,65	3,98	3,36	4,28	3,20
Toboali	7,57	3,3	2,98	2,77	2,87
Tukak Sadai	8,38	3,31	2,86	2,41	2,75
Airgegas	7	3,06	1,91	1,76	1,81
Lepar	4,07	2	1,24	0,68	1,2
Kepulauan Pongok	5,69	1,46	-0,9	1,4	-0,92
Bangka Selatan	7,23	3,08	2,46	2,48	2,36

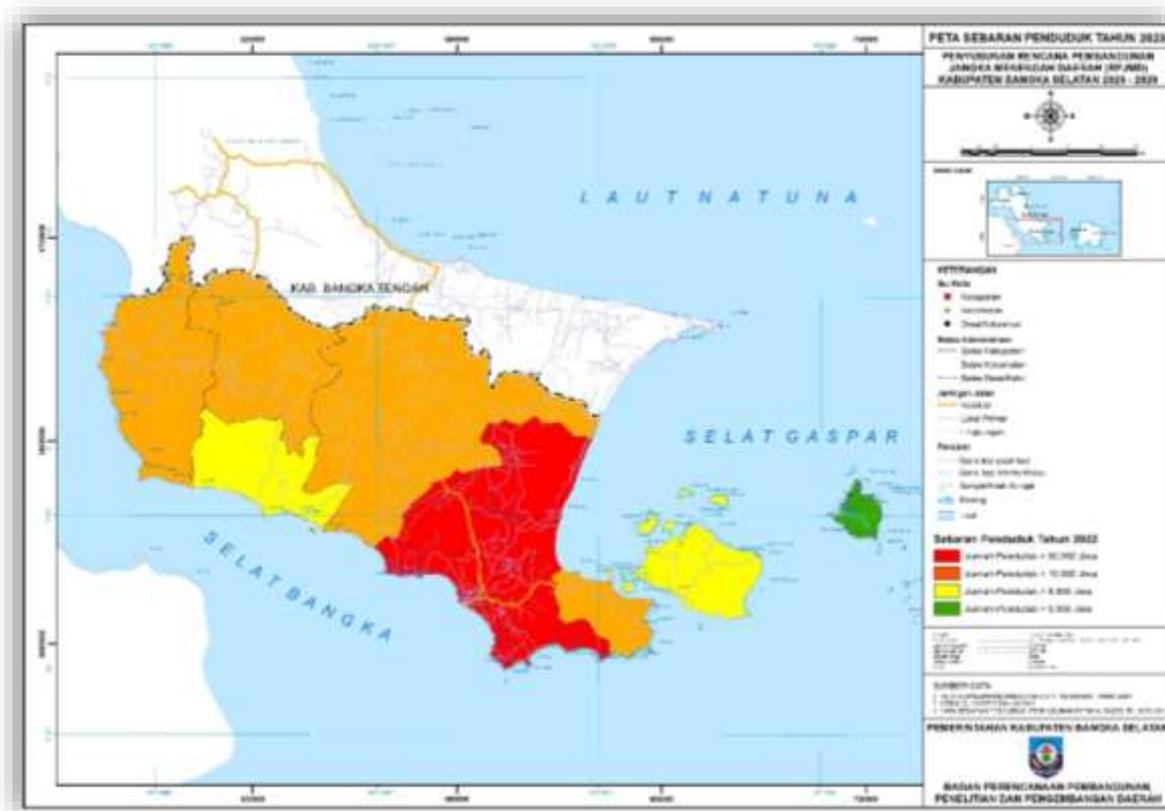
Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan, 2024

Berdasarkan distribusi atau sebaran penduduk pada tahun 2024 jumlah penduduk yang paling banyak berada di wilayah Kecamatan Toboali sebagai ibu Kota Kabupaten Bangka Selatan yaitu sebanyak 85.572 jiwa dengan luas wilayah 1.460,34 km², diikuti Kecamatan Aigegas dengan jumlah penduduk 44.544 jiwa, Kecamatan Simpang Rimba sebanyak 26.674 jiwa, Kecamatan Payung berjumlah 22.296 jiwa, Kecamatan Tukak Sadai berjumlah 14.163 jiwa, diikuti Kecamatan Pulau Besar sebanyak 10.258 jiwa, Kecamatan Lepar sebanyak 8.271 jiwa dan jumlah penduduk paling sedikit berada di wilayah Kecamatan Kepulauan Pongok dengan jumlah penduduk sebanyak 4.301 jiwa dengan luas wilayah 89,67 km².

Tabel 2.21
Jumlah Penduduk Kabupaten Bangka Selatan Menurut Kecamatan Tahun 2020 – 2024

Kecamatan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Payung	20.595	20.993	21.331	21.704	22.296
Pulau Besar	9.317	9.591	9.799	10.025	10.258
Simpang Rimba	23.128	24.048	24.857	25.920	26.674
Toboali	75.859	78.366	80.702	82.938	85.572
Tukak Sadai	12.595	13.012	13.384	13.707	14.163
Airgegas	40.835	42.084	42.888	43.644	44.544
Lepar	7.833	7.990	8.089	8.144	8.271
Kepulauan Pongok	4.180	4.241	4.203	4.262	4.301
Jumlah	194.342	200.325	205.253	210.344	216.079

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan, 2025



Gambar 2.11
Peta Sebaran Penduduk Tahun 2024

Rasio jenis kelamin dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah penduduk pria dan jumlah penduduk wanita pada suatu daerah dan pada waktu tertentu, yang biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk pria per 100 wanita. Sedangkan kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk rata-rata yang menempati wilayah seluas 1 km², berikut Rasio Jenis Kelamin dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Bangka Selatan dari Tahun 2012-2023:

Tabel 2.22
Rasio Jenis Kelamin dan Kepadatan Penduduk
Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2012-2023

Tahun	Luas Wilayah	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km)	Rasio Jenis Kelamin
2012	3.607,08	50	107,55
2013	3.607,08	51	107,78
2014	3.607,08	53	107,80
2015	3.607,08	54	108,01
2016	3.607,08	55	108,04
2017	3.607,08	56	108,19
2018	3.607,08	57	108,17

Tahun	Luas Wilayah	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km)	Rasio Jenis Kelamin
2019	3.607,08	58	108,37
2020	3.607,08	59	108,19
2021	3.607,08	55	107,00
2022	3.607,08	55	107,00
2023	3.607,08	56	106,00
2024	3.607,08	60	107,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Selatan, 2025

Pada tahun 2024, angka Dependency Ratio untuk Kabupaten Bangka Selatan adalah sebesar 42,75 persen yang artinya bahwa dari 100 penduduk usia produktif menanggung sebanyak 43 orang penduduk usia non produktif, angka *Dependency Ratio* pada tahun 2024 menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya, yang berarti bahwa menurunnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi di tahun 2024. Selain itu bahwa angka *Dependency Ratio* laki-laki lebih tinggi dibandingkan angka *Dependency Ratio* perempuan, yang berarti bahwa beban tanggungan penduduk perempuan usia produktif lebih rendah dibandingkan laki-laki.

Tabel 2.23
Rasio Ketergantungan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2014-2024

JUMLAH PENDUDUK USIA						
TAHUN	URAIAN	PENDUDUK USIA KETERGANTUNGAN			USIA PRODUKTIF	RASIO KETERGANTUNGAN(%)
		<15 tahun	>64 tahun	JUMLAH	15-64 tahun	
2014	Laki-laki	23.184	2.953	26.137	58.377	44,77
	Perempuan	21.791	2.419	24.210	54.789	44,19
	Jumlah (L+P)	44.975	5.372	50.347	113.166	44,49
2015	Laki-laki	26.606	2.815	29.421	55.000	53,49
	Perempuan	25.039	2.152	27.191	52.462	51,83
	Jumlah (L+P)	51.645	4.967	56.612	107.462	52,68
2016	Laki-laki	24.500	3.107	27.607	57.801	47,76
	Perempuan	22.814	2.489	25.303	54.580	46,36
	Jumlah (L+P)	47.314	5.596	52.910	112.381	47,08
2017	Laki-laki	25.708	2.943		59.986	47,76

JUMLAH PENDUDUK USIA						
TAHUN	URAIAN	PENDUDUK USIA KETERGANTUNGAN			USIA	RASIO KETERGANTUNGAN(%)
		<15 tahun	>64 tahun	JUMLAH	15-64 tahun	
				28.651		
	Perempuan	23.911	2.526		56.910	46,45
	Jumlah (L+P)	49.619	5.469	55.088	116.896	47,13
2018	Laki-laki	24.117	3.354	27.471	63.412	43,32
	Perempuan	22.465	2.754	25.219	60.556	41,65
	Jumlah (L+P)	46.582	6.108	52.690	123.968	42,50
2019	Laki-laki	24.292	3.737	28.029	65.220	42,98
	Perempuan	22.707	3.141	25.848	62.136	41,60
	Jumlah (L+P)	46.999	6.878	53.877	127.356	42,30
2020	Laki-laki	27.363	3.567	30.930	69.118	44,75
	Perempuan	25.405	3.223	28.628	65.666	43,60
	Jumlah (L+P)	52.768	6.790	59.558	134.784	44,19
2021	Laki-laki	28.199	3.805	32.004	71.065	45,03
	Perempuan	26.142	3.542	29.684	67.752	43,92
	Jumlah (L+P)	54.341	7.347	61.688	138.637	44,50
2022	Laki-laki	26.372	5.370	31.742	74.504	46,60
	Perempuan	24.506	5.008	29.514	70.601	41,80
	Jumlah (L+P)	50.878	10.378	61.256	145.105	42,20
2023	Laki-laki	28.576	5.241	33.817	74.560	45,40
	Perempuan	26.549	3.865	30.414	71.553	42,50
	Jumlah (L+P)	55.125	9.106	64.231	146.113	43,96
2024	Laki-laki	28.434	5.086	33.520	78.041	42,95
	Perempuan	26.304	4.889	31.193	73.325	42,54
	Jumlah (L+P)	54.738	9.975	64.713	151.365	42,75

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan, 2025

Dari hasil Proyeksi Penduduk kelompok umur Kabupaten Bangka Selatan dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2030 di dominasi Kolompok umur 0 – 59 Tahun yang berkisar 18,04 – 12,77 ribu jiwa penduduk, sedangkan dari umur 60 – 75+ hanya berkisar 2,56 – 9,86 ribu jiwa penduduk.

Tabel 2.24
Proyeksi Penduduk Kabupaten Bangka Selatan Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2025-2030 (Ribu)

Umur	2025	2026	2027	2028	2029	2030
0-4	18,04	17,98	17,92	17,86	17,79	17,73
5-9	14,75	15,21	15,67	16,20	16,89	17,99
10-14	16,18	15,98	15,85	15,71	15,42	14,73
15-19	17,45	17,25	16,99	16,69	16,41	16,15
20-24	17,92	17,87	17,80	17,71	17,58	17,42
25-29	17,90	17,91	17,92	17,92	17,91	17,87
30-34	17,83	17,78	17,76	17,78	17,79	17,81
35-39	18,10	18,13	18,07	17,93	17,79	17,68
40-44	16,43	16,77	17,14	17,49	17,76	17,92
45-49	14,79	15,08	15,35	15,61	15,89	16,19
50-54	12,77	13,12	13,48	13,82	14,14	14,46
55-59	10,46	10,85	11,23	11,60	11,96	12,31
60-64	7,91	8,32	8,72	9,11	9,49	9,86
65-69	5,17	5,58	5,98	6,39	6,79	7,18
70-74	2,85	3,10	3,40	3,72	4,06	4,41
75+	2,56	2,74	2,93	3,13	3,36	3,62
Total	211,11	213,68	216,18	218,64	221,01	223,32

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Selatan, 2025

Berdasarkan Parameter Hasil Proyeksi Penduduk Kabupaten Bangka Selatan pada tahun 2025 sampai dengan tahun 2030 jumlah total Penduduk Laki-laki selalu lebih banyak dari Perempuan walaupun tidak signifikan, pada tahun 2025 jumlah penduduk Laki-laki sebanyak 108.676 Orang dan perempuan sebanyak 102.438 Orang sedangkan diakhir tahun proyeksi jumlah penduduk Laki-laki sebanyak 114.000 Orang dan 108.000 Orang Perempuan di Tahun 2030 dengan angka *dependency ratio* yang meningkat di angka 41,63 % pada tahun 2030.

Tabel 2.25
Parameter Hasil Proyeksi Penduduk Kabupaten Bangka Selatan 2025–2030

PARAMETER	2025	2030
(1)	(2)	(3)
PENDUDUK		
Laki-Laki (000)	108,68	114,41
Perempuan (000)	102,44	108,92
Total (000)	211,11	223,32
<i>Sex Ratio (%)</i>	106,09	105,04
Komposisi Umur (%)		
0–14	23,20	22,59
15–64	71,79	70,61
65+	5,01	6,81
<i>Dependency Ratio (%)</i>	39,29	41,63
FERTILITAS		
<i>Total Fertility Rate (TFR)¹</i>	2,11	2,10
MORTALITAS		
<i>Infant Mortality Rate (IMR)¹</i>	19,82	18,10

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Selatan, 2025

2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

A. Kesejahteraan Ekonomi

Kondisi Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Bangka Selatan digambarkan salah satunya dengan indikator kesejahteraan ekonomi, yakni Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, PDRB Per Kapita, Laju Inflasi, Indeks Gini/Indeks Ketimpangan Pendapatan, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Indeks Pembangunan Manusia. Pada periode 2020 hingga 2023, laju pertumbuhan ekonomi di Bangka Selatan menunjukkan fluktuasi yang signifikan, dengan angka tertinggi mencapai 3,69 persen pada tahun 2023. Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi menurun tajam hingga -1,9 persen akibat dampak pandemi Covid - 19. Meskipun mengalami penurunan pada tahun tersebut, pertumbuhan ekonomi Bangka Selatan menunjukkan pemulihan yang solid pada tahun 2021 menjadi 3,61 persen, tetapi mengalami penurunan kembali pada tahun 2022 menjadi 3,07 persen. Sebagai perbandingan, laju pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung dan Nasional juga terpengaruh oleh pandemi, dengan Bangka Belitung menunjukkan penurunan yang lebih tajam pada tahun 2020. Pada tahun 2024, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Selatan mencatatkan angka sebesar

0,90 persen, angka pertumbuhan ekonomi tersebut masih terbilang positif jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota lainnya di provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Gambar 2.12
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Belitung, dan Nasional Tahun 2020 – 2024



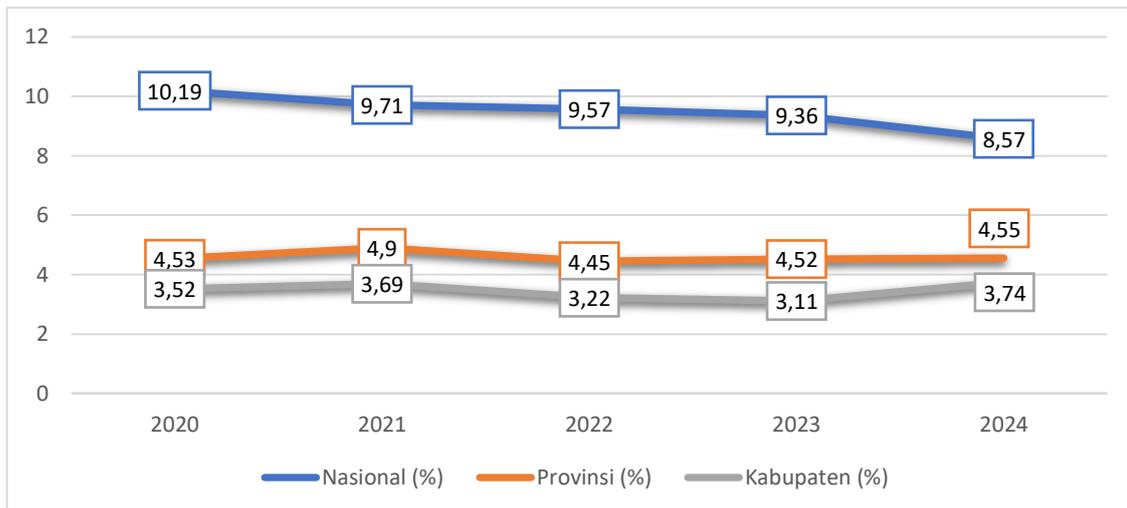
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bangka Belitung, 2025

Gambar 2.13
Posisi Relatif Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bangka Selatan terhadap Kabupaten Lainnya di Bangka Belitung Tahun 2024

Kondisi kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi di Kabupaten Bangka Selatan

selain dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi juga dapat terlihat dari kondisi kemiskinan. Kemiskinan merupakan ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non-makanan. Sedangkan penduduk miskin adalah penduduk yang berada di bawah suatu batas atau disebut sebagai garis kemiskinan. Dan garis kemiskinan merupakan nilai rupiah yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik kebutuhan hidup minimum makanan maupun kebutuhan hidup minimum non-makanan. Penduduk miskin secara Nasional dalam periode 2020 sampai 2024 terus menurun dengan capaian di tahun 2024 sebesar 8,57 persen, sedangkan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten Bangka Selatan dalam periode yang sama bersifat fluktuatif. Kondisi kemiskinan di Kabupaten Bangka Selatan masih cukup baik jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir karena konsisten berada pada posisi paling rendah.

Selanjutnya, jika dilihat dari tren persentase penduduk miskin di Kabupaten Bangka Selatan dalam periode 2020 sampai 2024 menggambarkan kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2020 dan 2021 angka kemiskinan meningkat menjadi 3,52 persen dan 3,69 persen hal ini dikarenakan selama dua tahun tersebut dampak pandemi global Covid-19, adanya kebijakan Pemerintah dalam pembatasan pergerakan dan aktivitas masyarakat berdampak pada penurunan pendapatan masyarakat dan diiringi penurunan perekonomian secara nasional dan global yang secara signifikan berpengaruh secara langsung pada peningkatan jumlah penduduk miskin. Namun di tahun 2022 dan 2023 tingkat kemiskinan di Kabupaten Bangka Selatan mulai menurun menjadi 3,22 persen dan 3,11 persen, hal ini disebabkan kondisi perekonomian yang mulai membaik. Sedangkan pada tahun 2024 tingkat kemiskinan di Kabupaten Bangka Selatan kembali meningkat menjadi 3,74 persen akibat menurunnya aktivitas pertambangan timah yang selama ini menjadi komoditas utama mata pencarian masyarakat di Bangka Selatan. Selain, terjadi penurunan kondisi perekonomian secara global dan nasional yang juga berdampak pada menurunnya pertumbuhan ekonomi lokal dan semakin tingginya angka kemiskinan masyarakat.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Gambar 2.14
Persentase Penduduk Miskin
Nasional, Provinsi dan Kabupaten Tahun 2020-2024

PDRB Per Kapita ADHB Kabupaten Bangka Selatan selama tahun 2020-2023 mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, nilai PDRB per kapita tercatat sebesar Rp 40.562.869,80 dan mengalami peningkatan secara bertahap tiap tahunnya, dan menjadi Rp 55.249.848,32 pada tahun 2023. Rata-rata Pertumbuhan PDRB perkapita Kabupaten Bangka selatan sebesar 8,47 persen. Pertumbuhan PDRB perkapita pada tahun 2021 mengalami kenaikan cukup signifikan yakni sebesar 20,48 persen, selanjutnya pada tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 7,73 persen dan di tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 4,49 persen. Jika dibandingkan PDRB per kapita ADHB Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Belitung, dan Nasional pada tahun 2020 hingga 2023 menunjukkan kecenderungan meningkat. Kabupaten Bangka Selatan mencatatkan peningkatan PDRB per kapita dari 40,56 juta rupiah pada tahun 2019 menjadi 55,25 juta rupiah pada tahun 2023, meskipun pertumbuhannya sedikit lebih lambat dibandingkan dengan Bangka Belitung yang naik dari 52,02 juta rupiah menjadi 67,88 juta rupiah, dan lebih lambat lagi apabila dibandingkan dengan tingkat nasional pada periode waktu yang sama, dimana pada tahun 2020 PDB per kapita sebesar 57,20 juta rupiah meningkat tajam menjadi 75,00 juta rupiah pada tahun 2023. Peningkatan yang lebih tajam di tingkat provinsi dan nasional dibandingkan dengan Kabupaten Bangka Selatan menunjukkan adanya kesenjangan ekonomi yang cukup signifikan antara daerah dengan rata-rata provinsi dan nasional. Sehingga meskipun Kabupaten Bangka Selatan mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif, tetapi diperlukan upaya yang lebih intensif dan terarah untuk mengakselerasi pertumbuhannya agar mendekati tingkat PDRB per kapita di provinsi dan nasional.



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Selatan, 2025

Gambar 2.15.
PDRB per Kapita ADHB Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020 – 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Gambar 2.16
Perbandingan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)
Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Belitung, dan Nasional Tahun 2020 – 2024

Tingkat Pengangguran Terbuka sebagai indikator utama ketenagakerjaan yang sering digunakan sebagai indikator keberhasilan dalam menangani masalah ketenagakerjaan khususnya pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka secara Nasional dalam periode

2020 sampai 2024 memiliki tren positif dengan penurunan di tahun 2024 sebesar 4,91 persen. Demikian halnya dengan angka pengangguran di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten Bangka Selatan dari tahun 2020 sampai 2023 yang menunjukkan tren penurunan. Namun pada tahun 2024, terjadi kenaikan angka pengangguran terbuka seiring dengan terjadinya perlambatan kondisi perekonomian baik secara nasional maupun regional.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Bangka Selatan pada tahun 2020 sebesar 5,42 persen sedangkan pada tahun 2024 menurun menjadi sebesar 4,94 persen. Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota se Provinsi Kabupaten Bangka Belitung tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Bangka Selatan pada tahun 2024 menempati urutan ke-2 tertinggi dari 7 Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diatas TPT Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta target nasional. Tingginya persentase TPT di Kabupaten Bangka Selatan salah satunya disebabkan adanya penutupan dua perusahaan pengelolaan sawit serta minimnya investasi pada sektor-sektor lapangan usaha yang dapat menyerap banyak tenaga kerja. Disamping itu, perlu adanya perhatian dari pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan sektor-sektor non formal yang bisa menyerap tenaga kerja di Kabupaten Bangka Selatan.

Tabel 2.26
Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional, Provinsi dan Kabupaten Tahun 2020-2024

No	Nasional/Provinsi/Kabupaten	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Nasional	7,07	6,49	5,86	5,32	4,91
2	Prov. Kepulauan Bangka Belitung	5,25	5,03	4,77	4,56	4,63
3	Kabupaten Bangka Selatan	5,42	5,29	5,09	4,84	4,94

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Indeks Gini. Dalam lima tahun terakhir, Indeks Gini baik di Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Belitung tercatat menunjukkan ketimpangan moderat, sementara untuk Nasional Indeks Gini menunjukkan ketimpangan tinggi. Capaian Indeks Gini Kabupaten Bangka Selatan dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan ketimpangan dalam distribusi pendapatan tidak begitu besar. Hal ini diakibatkan tidak beragamnya aktivitas perekonomian yang menjadi sumber pendapatan masyarakat. Indeks Gini Kabupaten Bangka Selatan sebesar 0,187 yang berada dibawah nilai indeks gini provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

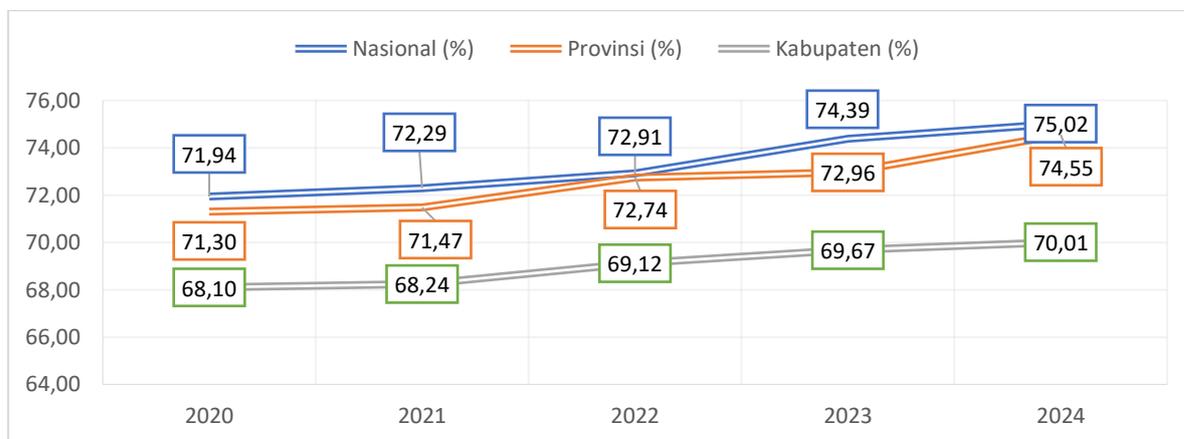


Gambar 2.17
Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Belitung, dan Nasional Tahun 2020 – 2024

Indeks Modal Manusia secara Nasional pada tahun 2023 terealisasi sebesar 0,53. Sedangkan target dari Indikator Utama Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 di tahun 2025 sebesar 0,56 dan 2045 sebesar 0,73. Pada level Kabupaten/Kota hingga saat ini belum dilakukan pengukuran oleh Badan Pusat Statistik. Namun demikian sebagai salah satu indikator untuk mengukur daya saing sumber daya manusia pada Indikator Utama Pembangunan RPJPD Kabupaten Bangka Selatan untuk yang kemudian diturunkan kedalam indikator tujuan RPJMD Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2025-2029 telah ditargetkan Indeks Modal Manusia Kabupaten Bangka Selatan yakni sebesar 0,50 di tahun 2025 dan 0,65 di tahun 2045.

Selain Indeks Modal Manusia, terdapat Indikator lainnya yang berkaitan dengan aspek kesejahteraan masyarakat yakni Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran yang dapat menjelaskan tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh suatu daerah. Pada tahun 2020 terjadi perubahan metode perhitungan terhadap salah satu indikator pendukung IPM yaitu Usia Harapan Hidup (UHH) dengan menggunakan metode long form. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bangka Selatan di tahun 2020 sebesar 68,10 persen, sedangkan pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 68,24 persen, kemudian ditahun 2022 sebesar 69,12 persen, untuk di tahun 2023 IPM Kabupaten Bangka Selatan

dengan capaian 69,67 persen. Dan untuk tahun 2024 IPM Kabupaten Bangka Selatan untuk pertama kali mencapai angka diatas 70 persen dengan capaian 70,01 persen dengan kategori tinggi. Peningkatan tersebut menandakan bahwa pencapaian kinerja kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Bangka Selatan semakin membaik setiap tahunnya.

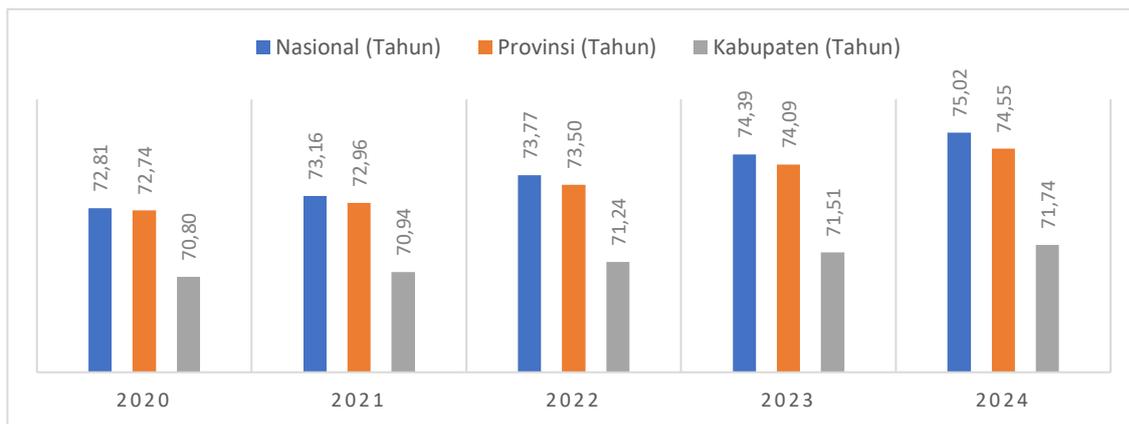


Sumber : Badan Pusat Statistik RI, 2025

Gambar 2.18
Tren Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Nasional, Provinsi dan Kabupaten
Tahun 2020-2024

B. Kesehatan untuk Semua

Kesehatan untuk Semua di Kabupaten Bangka Selatan diukur dengan kinerja Usia harapan Hidup (UHH) yang didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. UHH juga dapat digunakan untuk menggambarkan derajat kesehatan masyarakat. Usia Harapan Hidup di Kabupaten Bangka Selatan selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang positif ditandai dengan terjadi peningkatan nilai UHH setiap tahunnya. Pada Tahun 2020 UHH di Kabupaten Bangka Selatan sebesar 70,80 dan meningkat menjadi 71,74 tahun pada tahun 2024. Semakin meningkatnya Usia Harapan Hidup di Kabupaten Bangka Selatan menandakan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Untuk mempertahankan dan meningkatnya Usia Harapan Hidup perlu diupayakan dengan budaya Perilaku/Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Bangka Selatan. Namun demikian, nilai UHH Kabupaten Bangka Selatan masih menempati urutan terakhir jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam lima tahun terakhir ini.



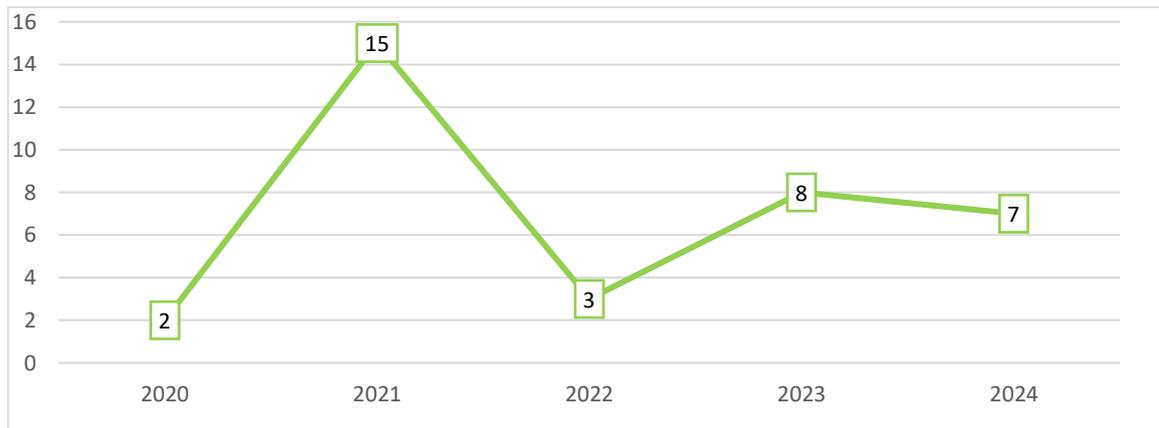
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Gambar 2.19
Usia Harapan Hidup Nasional, Provinsi dan Kabupaten Tahun 2020 2024

Angka Kematian Ibu di Kabupaten Bangka Selatan terus menurun dalam beberapa tahun terakhir. Angka Kematian Ibu tahun 2024 mengalami tren membaik dari sebelumnya Dimana pada tahun 2023 terjadi 8 kasus kematian ibu saat melahirkan dan turun menjadi 7 kasus pada tahun 2024 dari 2.747 kelahiran hidup. Kasus kematian Ibu terbanyak terjadi di Kecamatan Air Gegas sebanyak 3 kasus dan pada 4 (empat) kecamatan lainnya yakni Kecamatan Payung, Pulau Besar, Lepar Pongok dan Kepulauan Pongok tidak terjadi kasus kematian Ibu saat melahirkan. Penyebab terjadinya kasus kematian ibu antara lain hipertensi, perdarahan, infeksi masa nifas dan lain sebagainya.

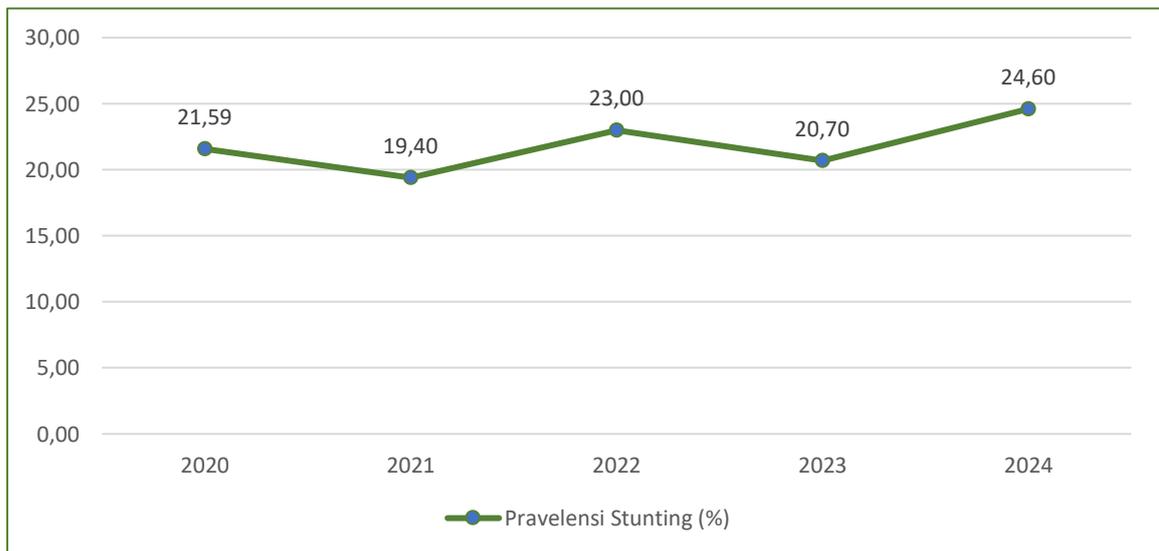
Prevalensi Stunting di Kabupaten Bangka Selatan masih belum menunjukkan angka yang baik jika dibandingkan dengan target provinsi maupun nasional. Pada Tahun 2022 terjadi kenaikan angka prevalensi stunting sebesar 3,6 persen dari 19,4 persen pada tahun 2021 menjadi 23 persen. Sedangkan pada tahun 2023 Angka Prevalensi Stunting di Kabupaten Bangka Selatan mengalami penurunan sebesar 2,30 persen menjadi 20,70 persen pada tahun 2023. Meskipun angka tersebut masih jauh dari target nasional yakni diangka 14 % secara kinerja pelaksanaan program penurunan stunting di Kabupaten Bangka Selatan sudah cukup baik berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya. Oleh karena itu, masih diperlukan upaya-upaya yang komprehensif dan pelibatan seluruh stakeholder dalam pelaksanaan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bangka Selatan pada lima tahun kedepan. Beberapa faktor yang menjadi penyebab gizi buruk yang berdampak pada kasus stunting antara lain masalah ekonomi, sanitasi, pendidikan orang tua, dan perilaku orang tua. Faktor

ekonomi terutama kemiskinan menjadi salah satu determinan yang menjadi akar penyebab kasus stunting disamping ketidakmampuan dalam mengakses fasilitas kesehatan.



Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangka Selatan, 2025

Gambar 2.20
Grafik Angka Kematian Ibu Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020-2024



Gambar 2.21
Prevalensi Stunting Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020-2024

Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis di Kabupaten Bangka Selatan sesuai standar pada tahun 2024 di Kabupaten Bangka Selatan adalah 118 persen. Persentase ini mengalami peningkatan sebesar dibandingkan tahun 2023. Sedangkan Angka Pengobatan Lengkap (Complete Rate) pada tahun 2024 di Kabupaten Bangka Selatan sebesar 4,4 % yang sebelumnya pada tahun 2023 sebesar 63,20 % menjadi 67,60 % pada tahun 2024.

Tabel 2.27
Persentase Orang Terduga Tuberkulosis (TBC) Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Orang Terduga TBC Yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	65,04 %	49,36 %	112,05 %	64,92 %	118 %

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangka Selatan, 2025

Tabel 2.28
Angka Pengobatan Lengkap (*Complete Rate*) Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Pengobatan Lengkap (<i>Complete Rate</i>) Semua Kasus TBC	54,30 %	78,00 %	70,70 %	63,20 %	67,60 %

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangka Selatan, 2025

Selanjutnya Angka Keberhasilan Pengobatan (*Success Rate*) Semua Kasus TBC/Tuberkulosis mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2024, angka keberhasilan pengobatan TBC sebesar 70,30 persen, persentase ini menurun jika dibandingkan dengan Tahun 2020 yang berhasil mencapai angka 92,20 persen. hal tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat bahwa obat Tuberkulosis/TBC harus tuntas diminum setiap hari selama 6 bulan, namun sebagian besar pasien TBC tidak melakukan pengobatan sesuai standar sehingga Angka Keberhasilan Pengobatan (*Success Rate*) Semua Kasus TBC/Tuberkulosis Kabupaten Bangka Selatan cenderung menurun, Oleh karena itu, diperlukan peningkatan Promosi Kesehatan di wilayah Fasyankes agar pemahaman masyarakat tentang tatacara pengobatan TBC/Tuberkulosis berjalan dengan benar.

Tabel 2.29
Angka Keberhasilan Pengobatan (Success Rate) Semua Kasus TBC Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Pengobatan Lengkap Keberhasilan Pengobatan (<i>Success Rate</i>) Semua Kasus TBC	92,20 %	85,10 %	84,70 %	80,40 %	78,30 %

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangka Selatan, 2025

Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) Kabupaten Bangka Selatan setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 cakupan jaminan kesehatan penerima bantuan iuran (PBI) dan Non PBI berjumlah 116.107 orang atau dengan persentase 63,80 persen. Selanjutnya pada tahun 2021 cakupan jaminan kesehatan penerima bantuan iuran (PBI) dan Non PBI berjumlah 129.041 orang atau sebesar 64,70 persen, setelah itu di tahun 2022 cakupan jaminan kesehatan penerima bantuan iuran (PBI) dan Non PBI berjumlah 194.293 orang atau sebesar 96,20 persen dan Cakupan jaminan kesehatan penerima bantuan iuran (PBI) dan Non PBI pada tahun 2023 berjumlah 201.421 Orang atau sebesar 97,30 persen. Sedangkan di tahun 2024 cakupan jaminan kesehatan penerima bantuan iuran (PBI) dan Non PBI berjumlah 213.202 Orang dengan persentase 98 persen.

C. Pendidikan Berkualitas yang Merata

Selain kinerja Kesehatan, Pendidikan Berkualitas yang Merata menjadi salah satu kinerja pemerintah dalam aspek kesejahteraan masyarakat. Kinerja Pendidikan ditunjukkan melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Literasi Membaca dan Numerasi, Proporsi Penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi dan Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi. Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Bangka Selatan pada tahun 2024 yaitu 6,93 tahun bermakna bahwa secara Rata-rata, penduduk Kabupaten Bangka Selatan baru menyelesaikan pendidikan setingkat kelas 6 Sekolah Dasar (SD) atau sederajat dan belum mencapai kelas 1 Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat. Angka tersebut masih jauh dibandingkan dengan nilai RLS Nasional yakni Rata-rata penduduk 15 tahun ke atas di Indonesia mampu menyelesaikan pendidikan hingga kelas 3 SMP atau 8,85 tahun pada tahun 2024. Kondisi ini disebabkan tingkat pendidikan penduduk dimasa lalu yang memang rendah dan belum banyaknya ketersediaan lapangan pekerjaan formal di Kabupaten Bangka Selatan yang mensyaratkan pendidikan yang tinggi. Disamping

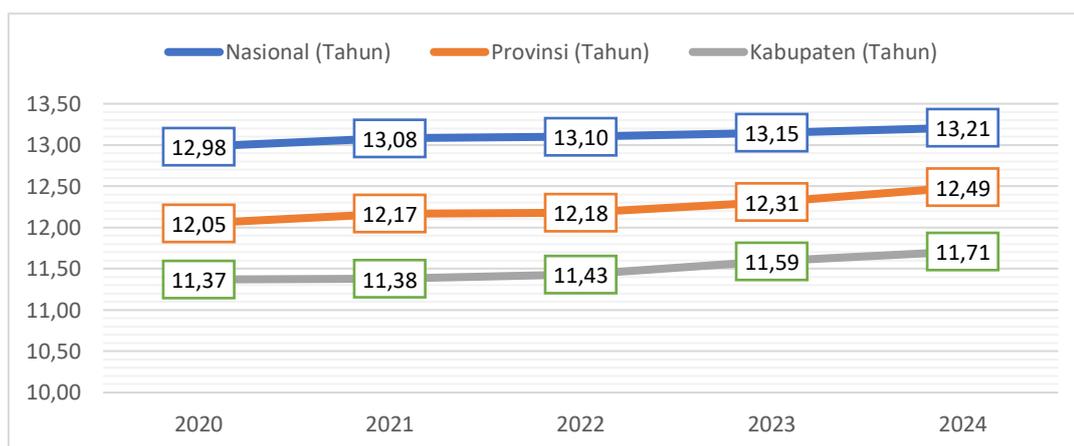
itu, penduduk Kabupaten Bangka Selatan yang berpendidikan tinggi juga cenderung untuk bekerja dan berdomisili diluar Kabupaten Bangka Selatan.

Tabel 2.30
Rata-rata Lama Sekolah Nasional, Provinsi dan Kabupaten Tahun 2020-2024

No	Nasional/Provinsi/Kabupaten	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Nasional	8,48	8,54	8,69	8,77	8,85
2	Prov. Kepulauan Bangka Belitung	8,06	8,08	8,11	8,25	8,33
3	Kabupaten Bangka Selatan	6,67	6,71	6,89	6,91	6,93

Sumber : Badan Pusat Statistik RI, 2025

Harapan Lama Sekolah (HLS) menunjukkan tren positif di Kabupaten Bangka Selatan dalam 5 tahun terakhir. Terjadi peningkatan dari angka HLS dari tahun 2020 ke tahun 2024 sebesar 0,34, dari 11,37 tahun pada tahun 2020 meningkat menjadi 11,71 tahun pada tahun 2024. Hal tersebut mengindikasikan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat Kabupaten Bangka Selatan terhadap pentingnya bersekolah dan diharapkan juga peran serta semua pihak baik itu Pemerintah, Swasta dan seluruh Stakeholder untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Bangka Selatan dalam upaya menjadikan Bangka Selatan sebagai daerah dengan daya saing tinggi terutama dalam aspek sumber daya manusianya.



Sumber: Badan Pusat Statistik RI, 2025

Gambar 2.22
Harapan Lama Sekolah Nasional, Provinsi dan Kabupaten Tahun 2020-2024

Capaian literasi dan numerasi di Kabupaten Bangka Selatan terus menunjukkan perkembangan yang positif setiap tahunnya. pada tahun 2023 Literasi Membaca SD/Sederajat, Literasi Membaca SMP/Sederajat dan Numerasi SD/Sederajat mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal ini menandakan bahwa Program Pengelolaan

Pendidikan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah untuk ke 3 (tiga) Indikator tersebut berjalan dengan baik, namun terdapat 1 (satu) Indikator yaitu Numerasi SMP/Sederajat yang mengalami penurunan dikarenakan kurang meratanya daya tangkap anak dalam memahami bilangan, pemecahan masalah, pengukuran, statistik, dan kemampuan untuk menginterpretasikan data dalam bentuk grafik. Namun di tahun 2024 ke 4 (empat) Indikator tersebut mengalami kenaikan yang cukup signifikan, manandakan keberhasilan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Literasi dan Numerasi di Kabupaten Bangka Selatan.

Tabel 2.31
Persentase Literasi Membaca dan Numerasi Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2022-2024

No.	Indikator	2022	2023	2024
1	Literasi Membaca SD/Sederajat	51,39	71,95	61,06
2	Numerasi SD/Sederajat	41,99	56,81	53,39
3	Literasi Membaca SMP/Sederajat	62,96	66,53	67,95
4	Numerasi SMP/Sederajat	53,72	48,82	59,79

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Selatan, 2025

Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi Kabupaten Bangka Selatan pada tahun 2023 terjadi peningkatan proporsi sebesar 1,35 persen dari 4,68 persen pada tahun 2022 menjadi 6,03 persen di tahun 2023, dan kembali meningkat di tahun 2024 sebesar 0,68 persen menjadi 6,71 persen atau sebanyak 10.650 orang.

Tabel 2.32
Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas Yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2022-2024

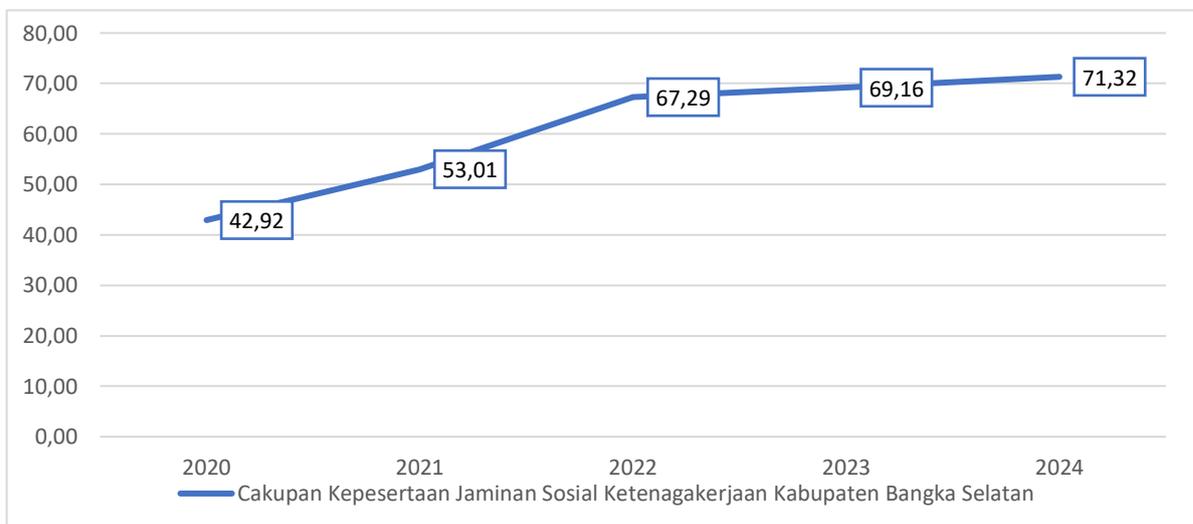
No.	Indikator	Tahun		
		2022	2023	2024
1	Jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi	7.327	9.506	10.650
2	Jumlah penduduk 15 tahun ke atas	156.513	157.559	158.665
3	Proporsi Penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi	4,68	6,03	6,71

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Selatan, 2025

D. Perlindungan Sosial yang Adaptif

Kondisi Perlindungan Sosial di Kabupaten Bangka Selatan ditunjukkan dengan semakin meningkatnya cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Pada tahun 2020 cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) sebanyak 42,92 persen. Kondisi tersebut semakin meningkat setiap tahunnya hingga pada Tahun 2024

meningkat 71,32 persen. Hal ini dipengaruhi oleh faktor meningkatnya pendapatan pekerja informal dan penduduk yang bekerja di pemerintahan, bertambahnya jumlah perusahaan aktif BPJS ketenagakerjaan, tersedianya perangkat hukum yang mengatur ketenagakerjaan dengan baik, serta adanya pengawasan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Bangka Selatan. Tentunya hal tersebut menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan baik terutama pada perusahaan-perusahaan swasta di Kabupaten Bangka Selatan.



Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2025

Gambar 2.23
Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020-2024

Persentase penyandang disabilitas yang bekerja dalam sektor formal di Kabupaten Bangka Selatan tahun 2020-2024 mengalami peningkatan yang artinya tidak adanya perbedaan hak antara seorang penyandang disabilitas dan pekerja normal untuk bekerja di sektor formal di Kabupaten Bangka Selatan. Pada Tahun 2020 terdapat 0,073 persen penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal, dan meningkat menjadi 0,12 persen pada Tahun 2024.

E. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Peran Nilai-Nilai Etika, Spiritual, Keagamaan dan Kebudayaan menjadi investasi dalam pembangunan masa depan dan peradaban bangsa, sehingga diharapkan dapat memperkuat jati diri dan karakter bangsa, mempererat persatuan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kinerja penguatan nilai spiritual dan etika dalam membangun pondasi dan karakteristik kerukunan sosial di Kabupaten Bangka Selatan tercermin dari persentase

potensi konflik yang terselesaikan yang terus meningkat. Meskipun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir di Kabupaten Bangka Selatan sangat minim terjadi konflik sosial. Namun demikian friksi-friksi sosial merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat terhindarkan dalam hidup dengan keanekaragaman budaya, suku, agama dan ras. Berdasarkan data, diketahui angka persentase penyelesaian konflik di Kabupaten Bangka Selatan terus meningkat. Pada Tahun 2020 kasus konflik sosial yang terselesaikan sebesar 60 persen dan meningkat menjadi 83,33 persen pada Tahun 2024. Akan tetapi potensi konflik yang belum terselesaikan harus menjadi perhatian utama bagi pemerintah daerah maupun seluruh elemen masyarakat lainnya agar tidak menjadi gangguan dan ancaman perpecahan dan merusak kerukunan masyarakat yakni dengan tetap mengutamakan pengamalan nilai-nilai spiritual dan budaya yang melekat pada masyarakat serta memperkuat kerukunan antar suku, agama maupun ras yang ada di Kabupaten Bangka Selatan.

Tabel 2.33
Persentase Potensi konflik Yang Terselesaikan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021-2024

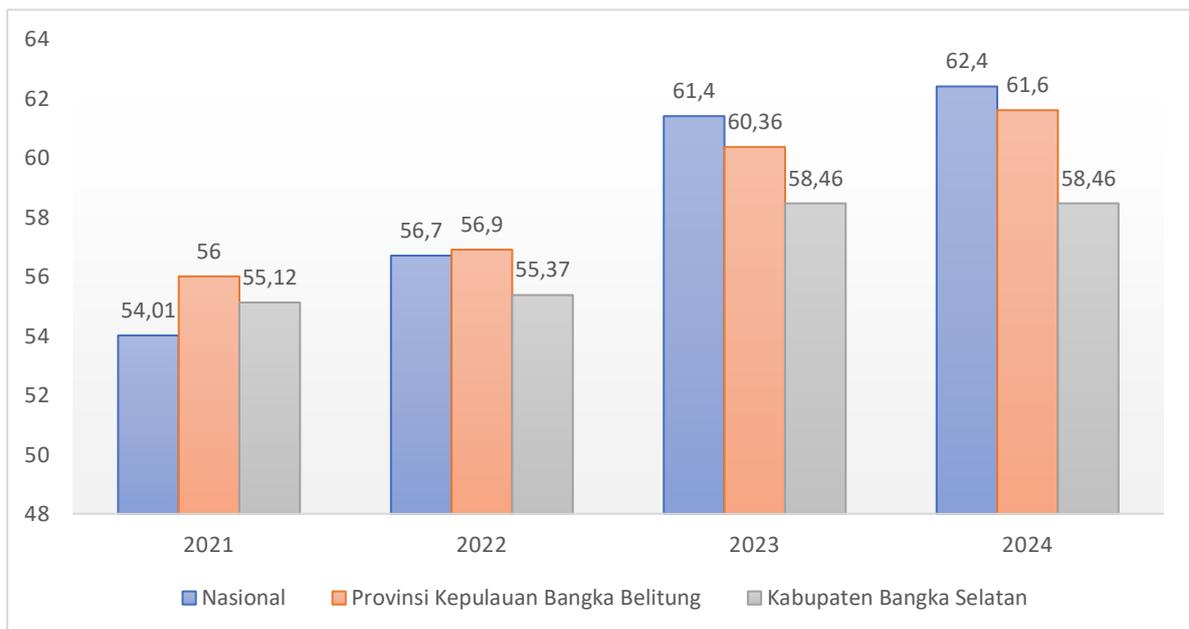
No	Indikator	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kasus yang ditangani	5	24	12	6
2	Jumlah kasus yang terselesaikan	3	14	3	5
3	Persentase Potensi konflik yang terselesaikan	60,00	58,33	25,00	83,33

Sumber: Bangkesbangpol Kabupaten Bangka Selatan, 2024

Sedangkan kinerja pembangunan kebudayaan yang diukur dengan Indeks Pembangunan Kebudayaan di Kabupaten Bangka Selatan tidak bisa dilakukan perhitungan dikarenakan banyak indikator yang belum atau tidak bisa dihitung, dari 31 indikator hanya 2 indikator yang bisa dihitung yaitu indeks Persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi dan Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi. Kedua indikator tersebut merupakan bagian dari Dimensi warisan budaya, kedepannya kedua indikator tersebut yang akan di kembangkan atau menjadi tolak ukur dalam pencapaian Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) di Kabupaten Bangka Selatan.

F. Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender dan Masyarakat Inklusif

Salah satu pendekatan penting dalam pembentukan sumber daya manusia berkarakter adalah pendekatan keluarga. Kinerja pembangunan keluarga di Kabupaten Bangka Selatan ditunjukkan dengan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga). Dari tahun 2021 sampai 2023 iBangga Kabupaten Bangka Selatan mengalami peningkatan. Hal tersebut dikarenakan meningkatnya nilai sejumlah indikator pendukung seperti kualitas legalitas dan struktur, kualitas ketahanan fisik, kualitas ketahanan ekonomi, kualitas ketahanan sosial psikologi, serta kualitas ketahanan sosial budaya. Pada Tahun 2024, nilai iBangga Kabupaten Bangka Selatan ditetapkan sama dengan tahun sebelumnya dikarenakan adanya beberapa kendala teknis sehingga tidak dapat dilakukan perhitungan. Namun demikian nilai iBangga Kabupaten Bangka Selatan masih dalam kategori cukup baik-berkembang dengan skor 58,46.



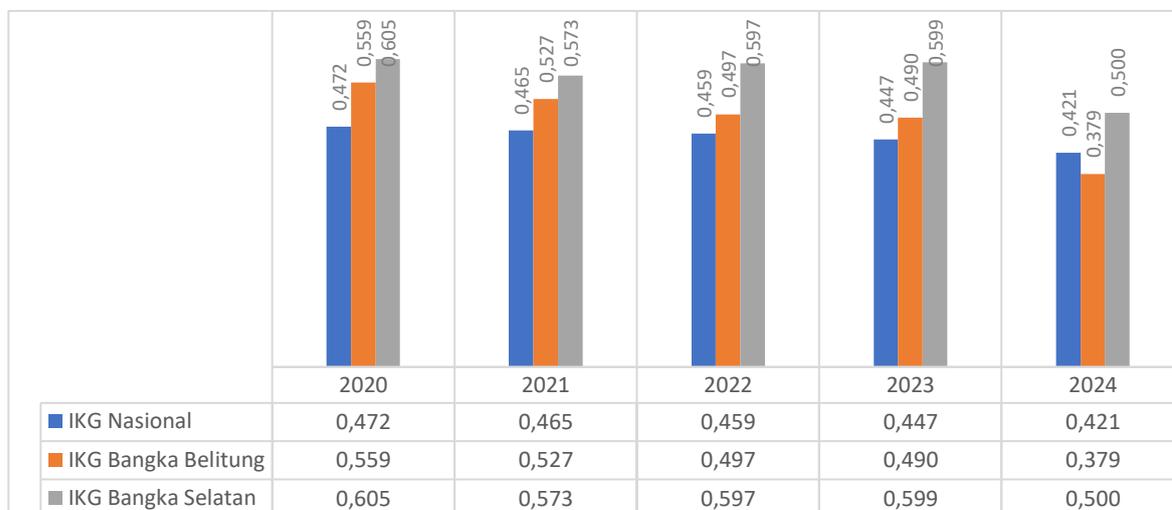
Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangka Selatan, 2025

Gambar 2.24

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Nasional, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021-2024

Pembangunan sumber daya manusia yang berwawasan gender dan memperhatikan kebutuhan kelompok rentan dilaksanakan untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Bangka Selatan dari Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 terlihat fluktuatif namun cenderung turun jika dibandingkan dengan nilai di awal tahun 2020, ini artinya kesenjangan antar laki-laki dan perempuan semakin menurun dan membaik dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain perbaikan dimensi pemberdayaan

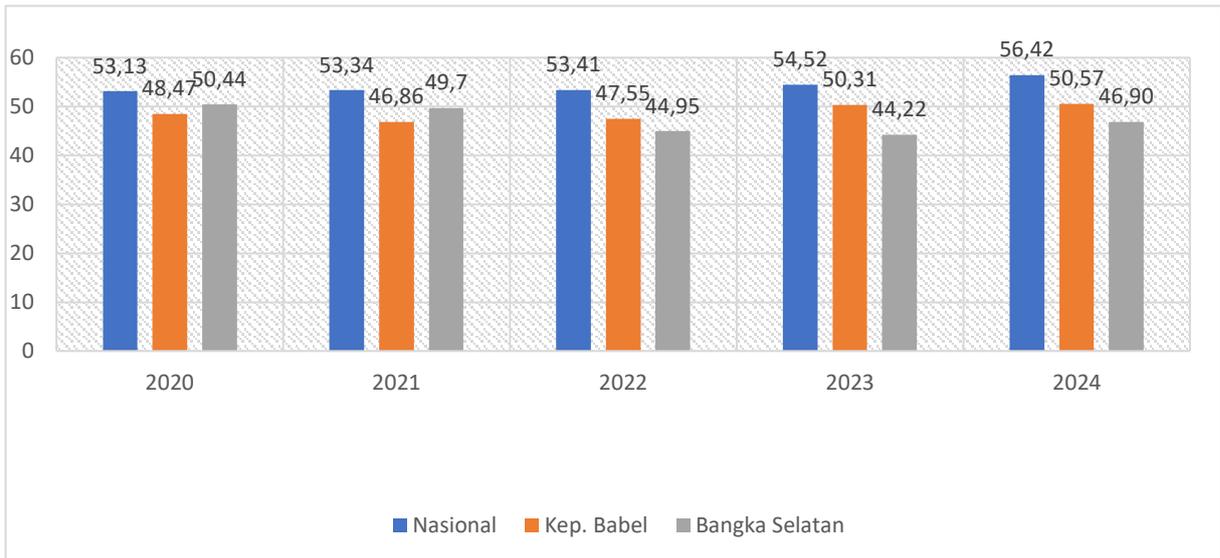
dipengaruhi oleh perbaikan indikator persentase anggota legislatif perempuan meningkat lebih tinggi di bandingkan laki laki, perbaikan dimensi pasar tenaga kerja dipengaruhi oleh perbaikan indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan meningkat lebih tinggi di bandingkan dengan laki laki.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2025

Gambar 2.25
Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Nasional, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020-2024

Sedangkan tingkat partisipasi perempuan bekerja di Kabupaten Bangka Selatan dari tahun 2020 sampai dengan 2024 memiliki tren penurunan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tugas pengasuhan, kurangnya layanan pengasuhan anak, serta minimnya lapangan pekerjaan yang menyediakan posisi untuk perempuan. Pada Tahun 2024, naik menjadi 46,90. Nilai TPAK Perempuan Kabupaten Bangka Selatan masih dibawah angka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional yang mengindikasikan peran perempuan yang berpartisipasi dalam angkatan kerja belum begitu besar dimana laki-laki masih mendominasi sebagai pencari nafkah/penghasilan.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2025

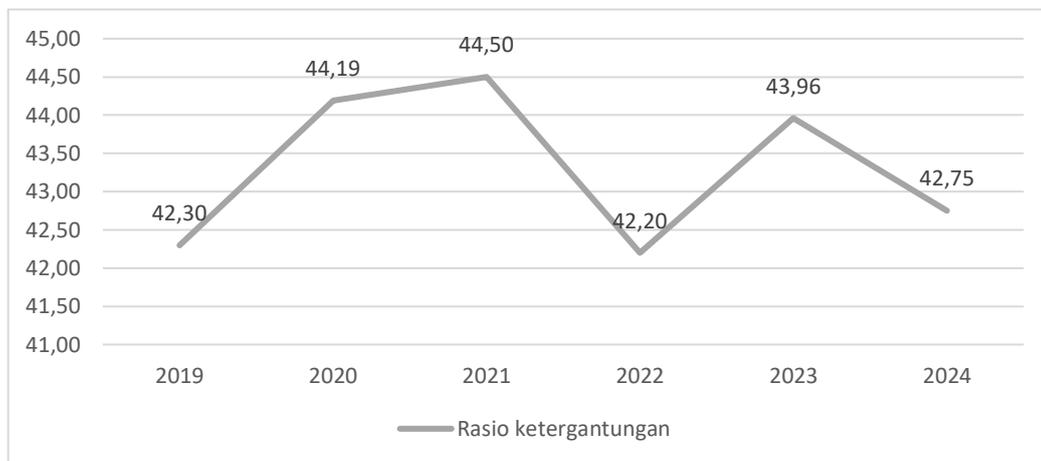
Gambar 2.26
Tingkat Partisipasi Perempuan dalam Angkatan Kerja Nasional, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020-2024

2.3 ASPEK DAYA SAING DAERAH

A. Daya Saing Sumber Daya Manusia

Aspek daya saing daerah salah satunya dilihat dari kinerja pembangunan daerah dalam meningkatkan daya saing sumber daya manusia. Pada pembahasan aspek kesejahteraan masyarakat sebelumnya telah digambarkan terkait kondisi Pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Bangka Selatan melalui indikator Indeks Pembangunan Manusia serta target Indeks Modal Manusia pada Tahun 2025. Disamping itu, kinerja pembangunan sumber daya manusia sebagai pendorong aspek daya saing daerah ditunjukkan dengan indikator angka ketergantungan. Angka ketergantungan merupakan perbandingan antara jumlah penduduk umur 0 hingga 14 tahun dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15 tahun hingga 64 tahun (angkatan kerja). Indikator rasio ketergantungan merupakan salah satu indikator demografi yang penting, selain itu indikator tersebut juga digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu wilayah. Semakin tingginya besaran rasio ketergantungan maka menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Pada Tahun 2024, angka ketergantungan di Kabupaten Bangka Selatan sebesar 42,75 persen yang

mengindikasikan beban penduduk usia produktif masih sangat tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan. Secara jangka Panjang, tingginya angka ketergantungan ini akan berpotensi berpengaruh pada perlambatan kondisi perekonomian disebabkan semakin banyaknya jumlah usia tidak produktif sehingga tidak mampu menggerakkan perekonomian sebagai salah satu faktor produksi.



Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan, 2025

Gambar 2.27
Rasio Ketergantungan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020-2024

B. Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

Selanjutnya kinerja aspek daya saing daerah ditunjukkan dengan perkembangan struktur perekonomian di Kabupaten Bangka Selatan. Dimana keberlanjutan sektor-sektor ekonomi tersebut ditopang oleh Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi. Iptek adalah fondasi utama dalam meningkatkan daya saing daerah. Kabupaten Bangka Selatan mulai mengintegrasikan teknologi dalam berbagai sektor, terutama di bidang pertanian dan industri pengolahan. pemanfaatan teknologi pertanian modern seperti sistem irigasi otomatis dan pemupukan berbasis teknologi membantu petani meningkatkan hasil panen secara signifikan. Penggunaan mesin dan perangkat teknologi dalam industri pengolahan timah dan makanan juga meningkatkan efisiensi dan kualitas produk.

Sedangkan Inovasi menjadi faktor pendorong yang tidak kalah penting dalam upaya meningkatkan daya saing. Kabupaten Bangka Selatan mulai mendorong para pelaku usaha untuk berinovasi, baik dalam produk maupun layanan. Misalnya, pengembangan produk makanan khas lokal dengan sentuhan modern, seperti mengemas makanan tradisional dalam bentuk yang lebih menarik untuk menarik perhatian wisatawan. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan sektor swasta dalam bentuk inkubator bisnis atau

program akselerator pun sedang digalakkan. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, para pengusaha muda diberdayakan untuk menciptakan solusi baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar, baik dalam konteks lokal maupun global.

Produktivitas ekonomi di Kabupaten Bangka Selatan tergambarkan dengan meningkatnya kinerja PDRB terutama pada sektor-sektor basis yang menjadi penopang perekonomian Kabupaten Bangka Selatan seperti pertambangan, pertanian, serta sektor lain yang berpotensi dapat meningkatkan kondisi perekonomian yakni dari sektor pariwisata dapat berkontribusi lebih besar terhadap PDRB. Dari tahun 2020 hingga tahun 2024, nilai dan kontribusi PDRB ADHB maupun ADHK di berbagai lapangan usaha Kabupaten Bangka Selatan menunjukkan tren meningkat. Diketahui dari PDRB ADHB maupun ADHK terdapat tiga sektor dengan kontribusi terbesar di Kabupaten ini. Ketiga sektor tersebut adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; sektor pertambangan dan penggalian; dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran; dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Selain itu, kebijakan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan pada rencana pembangunan daerah kedepannya perlu menjaga kelestarian lingkungan dengan melakukan pengawasan terhadap aktivitas industri, pariwisata dan kegiatan penambangan.

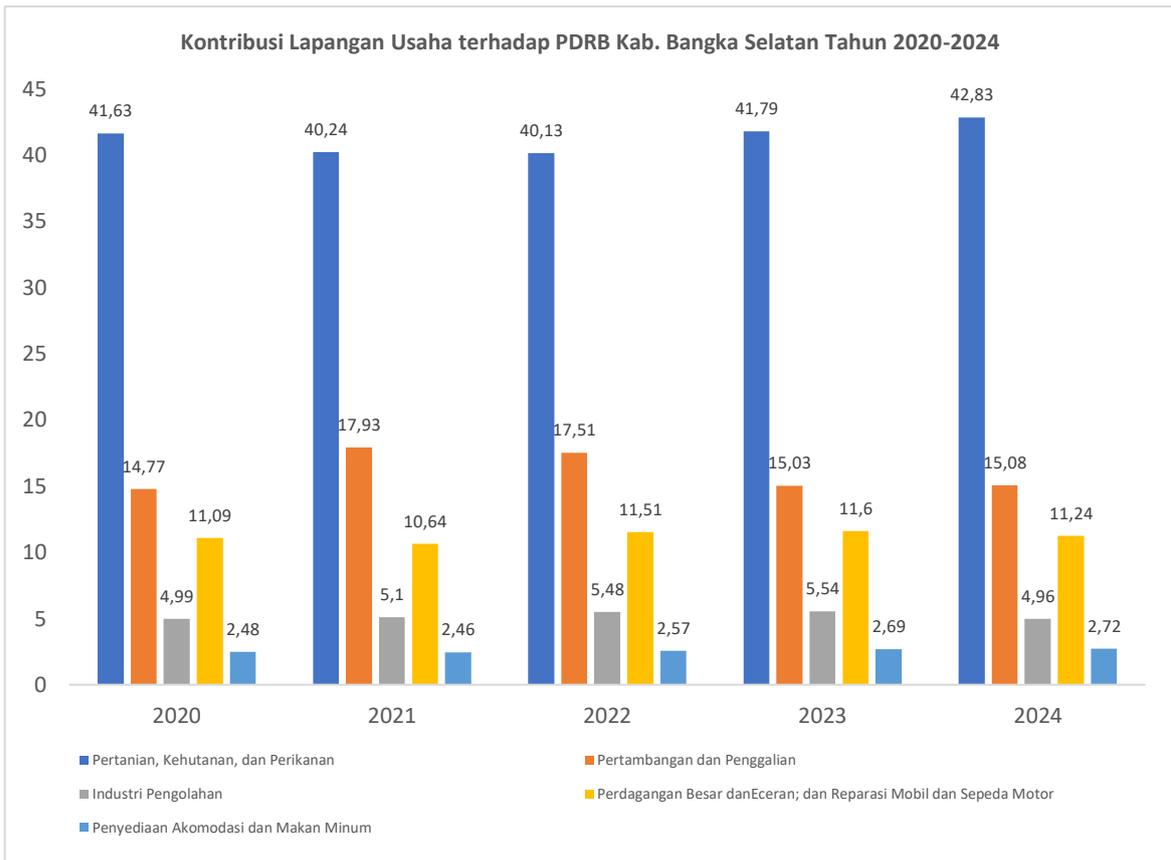
Berdasarkan data PDRB ADHK, terlihat adanya dinamika yang signifikan dalam struktur dan kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap total PDRB. Pada tahun 2020, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbang nilai PDRB sebesar 2.499,18 miliar rupiah atau 41,26 persen dari total PDRB. Angka ini menunjukkan kontribusi sektor tersebut besar, meski dari tahun ke tahun kontribusinya sedikit menurun menjadi 39,92 persen pada tahun 2023., dengan nilai 2.678,18 miliar rupiah. Selanjutnya berdasarkan data PDRB ADHB, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tetap menjadi kontributor terbesar terhadap PDRB, dengan kontribusi relatif yang stabil meskipun nilainya meningkat dari 3.613,48 miliar rupiah pa tahun 2020 menjadi 4.379,16 miliar rupiah pada tahun 2023. Hal ini mencerminkan pertumbuhan yang konsisten dalam produksi dan keberlanjutan sektor ini di daerah. Dalam kurun waktu yang sama, sektor perdagangan, industri pengolahan, pariwisata, serta pertambangan dan penggalian memiliki peran penting dalam PDRB Kabupaten Bangka Selatan.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Selatan, 2025

Gambar 2.28
PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020 – 2024

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB ADHB Kabupaten Bangka Selatan yang ditunjukkan dengan rasio PDRB per jenis lapangan usaha dominan pada tahun 2024 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yaitu sebesar 5.151.658,50 (juta rupiah) atau mencapai 42,83 persen (angka ini meningkat dari 41,67 persen di tahun 2023). Selanjutnya lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 1.814.018,67 (juta rupiah) atau 15,08 persen (menurun dari 15,25 persen di tahun 2023). Kemudian lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 1.352.356,52 (juta rupiah) atau 11,24 persen (menurun dari 11,57 persen di tahun 2023). Peranan ekonomi lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan masih mendominasi dan cenderung naik atau trennya positif pada tahun 2023 dan 2024 sehingga merupakan sektor yang paling diandalkan ketika sektor lainnya mengalami perlambatan. Demikian halnya dengan beberapa sektor lainnya ada yang cenderung meningkat dan ada juga yang mengalami penurunan.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Selatan, 2025

Gambar 2.29
Persentase Rasio PDRB Tahun 2020-2024

Tabel 2.34
Nilai dan Kontribusi PDRB ADHK (2010) Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020 – 2024

No	Kategori Lapangan Usaha	PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.499.178,70	41,26	2.506.575,60	39,93	2.575.845,20	39,82	2.678.926,80	39,95	2.749.741,00	40,64
B	Pertambangan dan Penggalian	1.223.691,10	20,20	1.320.480,00	21,04	1.312.796,30	20,29	1.321.758,70	19,71	1.275.800,20	18,85
C	Industri Pengolahan	280.636,90	4,63	294.089,00	4,69	316.285,60	4,89	331.142,20	4,94	295.280,10	4,36
D	Pengadaan Listrik, Gas	4.106,70	0,07	4.336,10	0,07	4.323,10	0,07	4.464,40	0,07	4.646,80	0,07
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	996,6	0,02	1.028,20	0,02	1.067,80	0,02	1.071,70	0,02	1.113,70	0,02
F	Konstruksi	478.021,30	7,89	493.935,00	7,87	489.384,00	7,57	518.453,40	7,73	516.961,40	7,64
G	Perdagangan Besar dan Eceran; dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	592.002,20	9,77	622.026,40	9,91	688.985,30	10,65	699.626,90	10,43	700.941,20	10,36
H	Transportasi dan Pergudangan	43.240,40	0,71	47.280,80	0,75	52.202,90	0,81	56.768,60	0,85	59.384,40	0,88
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	121.088,70	2,00	132.570,60	2,11	146.783,20	2,27	160.358,20	2,39	165.888,30	2,45
J	Informasi dan Komunikasi	48.077,30	0,79	52.142,90	0,83	57.326,30	0,89	62.531,50	0,93	67.065,00	0,99
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	29.751,90	0,49	31.807,60	0,51	33.980,80	0,53	38.426,30	0,57	38.667,40	0,57
L	Real Estate	194.863,00	3,22	202.992,20	3,23	213.310,20	3,30	221.181,30	3,30	228.902,60	3,38
M	Jasa Perusahaan	7.118,10	0,12	7.343,70	0,12	8.059,70	0,12	8.296,70	0,12	8.778,40	0,13
N	Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	324.424,50	5,36	339.972,10	5,42	340.998,00	5,27	355.049,70	5,29	387.847,20	5,73
O	Jasa Pendidikan	148.583,80	2,45	152.224,10	2,43	157.010,20	2,43	171.690,60	2,56	186.253,50	2,75
P	Rasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	40.391,50	0,67	45.795,90	0,73	46.760,10	0,72	50.725,40	0,76	51.222,20	0,76
Q	Jasa lainnya	21.703,10	0,36	22.197,90	0,35	23.924,90	0,37	25.879,60	0,39	27.950,30	0,41
PDRB ADHK		6.057.876	100	6.276.798	100	6.469.044	100	6.706.352	100	6.766.443,80	100
		6,05 (Triliun)		6,27 (Triliun)		6,46 (Triliun)		6,70 (Triliun)		6,76 (Triliun)	

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Selatan, 2025

Tabel 2.35
Nilai dan Kontribusi PDRB ADHB Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020 – 2024

No	Kategori Lapangan Usaha	PDRB ADHB 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.613.475,90	41,63	3.934.221,50	40,24	4.289.766,20	40,13	4.740.369,00	41,79	5.151.658,50	42,83
B	Pertambangan dan Penggalian	1.282.300,20	14,77	1.753.273,70	17,93	1.871.676,80	17,51	1.704.811,50	15,03	1.814.018,70	15,08
C	Industri Pengolahan	432.979,10	4,99	498.882,20	5,10	585.873,70	5,48	628.384,30	5,54	596.937,80	4,96
D	Pengadaan Listrik, Gas	7.223,50	0,08	7.617,50	0,08	7.719,50	0,07	7.992,10	0,07	8.281,70	0,07
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	1.724,30	0,02	1.815,60	0,02	1.908,00	0,02	1.977,30	0,02	2.174,30	0,02
F	Konstruksi	791.544,40	9,12	837.361,40	8,57	874.551,80	8,18	959.315,40	8,46	963.265,90	8,01
G	Perdagangan Besar dan Eceran; dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	962.319,60	11,09	1.040.472,30	10,64	1.231.015,50	11,51	1.315.538,00	11,60	1.352.356,50	11,24
H	Transportasi dan Pergudangan	71.294,60	0,82	80.809,60	0,83	94.796,40	0,89	112.868,60	0,99	120.946,60	1,01
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	215.217,00	2,48	240.093,20	2,46	274.288,80	2,57	305.552,50	2,69	327.435,20	2,72
J	Informasi dan Komunikasi	62.114,40	0,72	68.345,90	0,70	76.011,30	0,71	83.908,10	0,74	90.214,20	0,75
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	44.710,60	0,52	49.767,40	0,51	57.410,60	0,54	65.723,70	0,58	66.788,00	0,56
L	Real Estate	325.020,90	3,74	342.195,00	3,50	370.084,60	3,46	393.137,80	3,47	414.467,50	3,45
M	Jasa Perusahaan	13.314,50	0,15	13.978,00	0,14	16.023,50	0,15	17.284,70	0,15	18.282,10	0,15
N	Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	527.594,40	6,08	555.484,20	5,68	567.898,70	5,31	593.992,30	5,24	651.519,40	5,42
O	Jasa Pendidikan	234.146,60	2,70	246.244,70	2,52	258.621,60	2,42	287.638,70	2,54	317.745,30	2,64
P	Rasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	58.492,70	0,67	68.865,70	0,70	72.322,00	0,68	79.812,20	0,70	81.627,00	0,68
Q	Jasa lainnya	35.602,00	0,41	36.745,10	0,38	40.993,50	0,38	45.801,50	0,40	51.259,50	0,43
	PDRB ADHB	8.679.075	100	9.776.173	100	10.690.963	100	11.344.108	100	12.028.978,10	100
		8,67 (Triliun)		9,77 (Triliun)		10,69 (Triliun)		11,34 (Triliun)		12,02 (Triliun)	

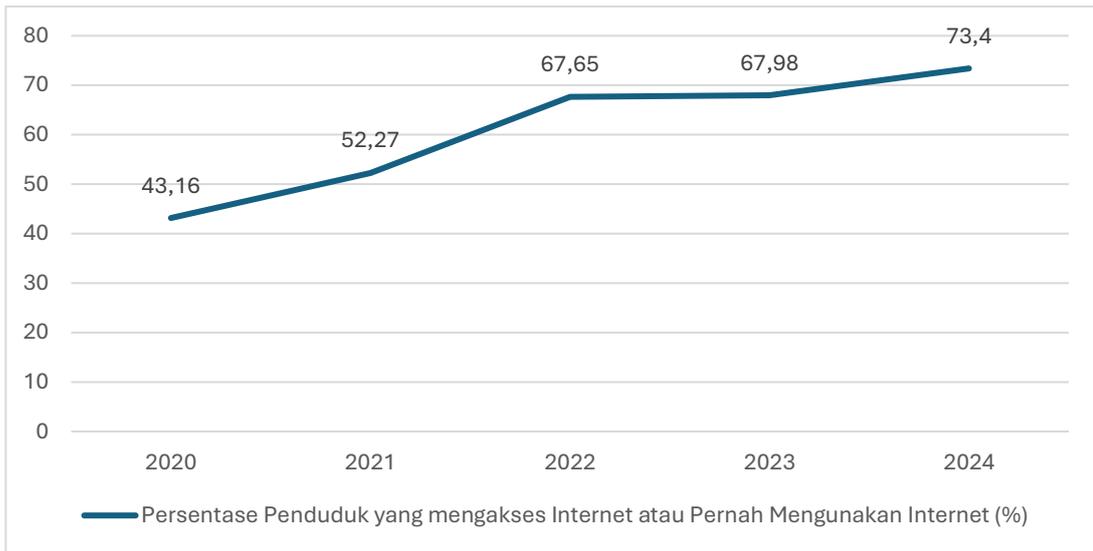
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Selatan, 2025

C. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru sebagai salah satu transformasi ekonomi dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun tetap sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan di Kabupaten Bangka Selatan dapat dilaksanakan dengan menerapkan konsep pembangunan sektor pariwisata yang berkelanjutan, peningkatan pertanian organik dan penggunaan energi terbarukan serta pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sambil menjaga kelestarian ekosistem laut.

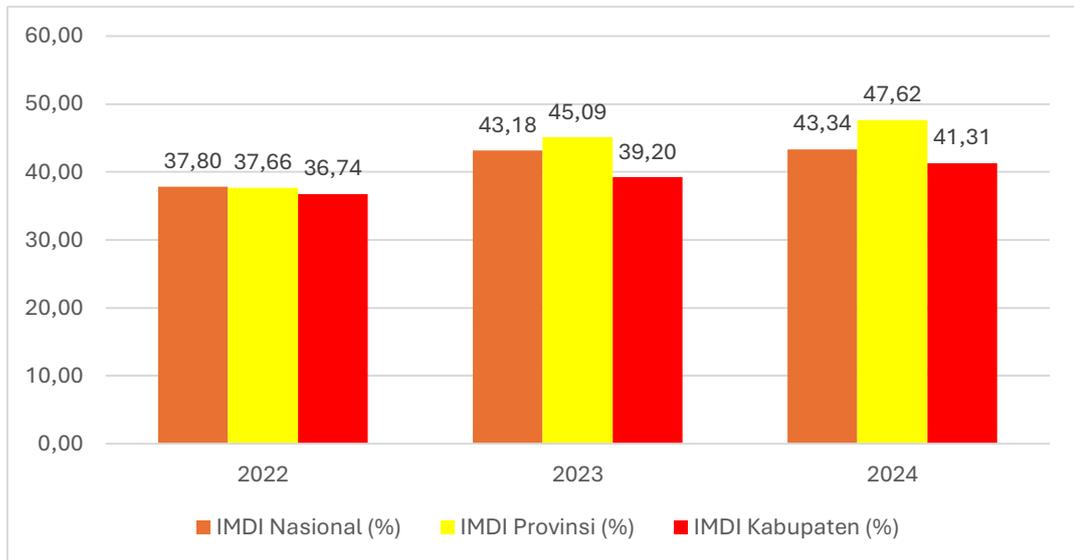
D. Transformasi Digital

Transformasi Digital di Kabupaten Bangka Selatan ditunjukkan dengan Persentase Penduduk yang mengakses Internet atau Pernah Menggunakan Internet. Persentase penduduk yang mengakses internet atau pernah menggunakan internet di Kabupaten Bangka Selatan dari tahun 2020 sampai 2024 terus meningkat, hal ini sangat wajar dikarenakan pada saat ini hampir seluruh platform digital, penggunaan sosial media dan aplikasi perbankan non tunai/e-money serta e-commerce mengharuskan menggunakan internet sebagai penghubungnya. Pada tahun 2020 Persentase Penduduk yang mengakses Internet atau Pernah Menggunakan Internet di Kabupaten Bangka Selatan sebesar 43,16 persen dan meningkat menjadi 73,40 persen di tahun 2024. Selain persentase penduduk yang mengakses internet atau pernah menggunakan internet, terdapat juga Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) yang dihitung oleh Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPTIK) Kementerian Komunikasi dan Informatika, IMDI adalah pengukuran tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital. IMDI diukur setiap tahunnya dengan metode penghitungan empat pilar, yaitu: Pilar infrastruktur dan ekosistem, Pilar keterampilan, Pilar pemberdayaan, Pilar pekerjaan. IMDI Kabupaten Bangka Selatan terus mengalami tren kenaikan dari tahun 2022-2024 akan tetapi IMDI Kabupaten Bangka Selatan memiliki nilai indeks paling kecil diantara Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Oleh karena itu perlu dilakukan percepatan transformasi digital linear dengan peningkatan akses, penggunaan teknologi, dan inovasi layanan publik, dengan dukungan investasi infrastruktur, program literasi digital, dan kolaborasi multi-pihak.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Selatan, 2025

Gambar 2.30
Persentase Penduduk Yang mengakses Internet atau Pernah Menggunakan Internet
Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020-2024



Sumber: BPPTIK Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, 2025

Gambar 2.31
Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) di Nasional, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
dan Kabupaten Bangka Selatan dari tahun 2022-2024

E. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Pembentukan modal tetap bruto merupakan indikator yang menggambarkan investasi ekonomi dalam bentuk aset tetap seperti pembangunan gedung, infrastruktur, dan alat produksi. Secara domestik, PMTB berperan penting dalam menciptakan keterhubungan antarwilayah melalui pembangunan sarana transportasi, energi, telekomunikasi, dan kawasan industri. Peningkatan investasi di sektor-sektor ini tidak hanya mempercepat distribusi barang dan jasa di dalam negeri, tetapi juga memperkuat efisiensi rantai pasok nasional, sehingga menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih terintegrasi dan inklusif. Integrasi ekonomi domestik ini memperkecil kesenjangan antarwilayah, memperluas akses pasar bagi pelaku usaha lokal, dan memperkuat daya saing daerah tertinggal. Sementara itu, dalam konteks global, PMTB yang diarahkan pada sektor strategis seperti industri manufaktur berorientasi ekspor, teknologi informasi, dan energi berkelanjutan akan meningkatkan daya saing produk nasional di pasar internasional. Hal ini memungkinkan suatu negara untuk masuk ke dalam rantai nilai global (*global value chain*) melalui penguatan kapasitas produksi, peningkatan kualitas barang dan jasa, serta efisiensi biaya logistik.

Jika dilihat dari perkembangan nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto dalam struktur PDRB ADHK Kabupaten Bangka Selatan menurut pengeluaran dalam kurun lima tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan yang positif. Pada tahun 2020, nilai PMTB Kabupaten Bangka Selatan tercatat sebesar Rp 1.496,36 miliar, dan meningkat menjadi Rp 1.586,93 miliar pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan adanya pertumbuhan investasi fisik di wilayah tersebut selama lima tahun terakhir, dengan kenaikan nominal sebesar Rp 90,57 miliar atau tumbuh sekitar 6,05% secara kumulatif. Meskipun pertumbuhan tersebut terkesan moderat, tren ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bangka Selatan tetap mempertahankan arah investasi yang positif, meskipun menghadapi tantangan ekonomi akibat pandemi COVID-19 dan perlambatan ekonomi global yang turut mempengaruhi dinamika investasi daerah.

Tabel 2.36
Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020 – 2024
(Milyar Rupiah)

	2020	2021	2022	2023	2024
Pembentukan Modal Tetap Bruto	1.496,36	1.525,49	1.572,43	1.610,78	1.586,93

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

F. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Perkotaan dan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat ditandai dengan pertumbuhan pembangunannya sangat pesat jika dibandingkan dengan wilayah lainnya yang nantinya dapat turut mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan wilayah lain di sekitarnya. Beberapa strategi dalam memfokuskan tujuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan telah menetapkan beberapa kawasan Perkotaan dan pedesaan menjadi kawasan pengembangan strategis dengan tematik pembangunan tertentu. Dalam RTRW Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2014-2034 telah ditetapkan beberapa Kawasan Strategis Kabupaten diantaranya Kawasan Perkotaan Toboali, Kawasan Industri Sadai, Kawasan Perkotaan Baru Batu Betumpang, Kawasan Pedesaan Prioritas Nasional Lada Putih di Air Gegas. Hal ini didasari dalam upaya agar pengembangan kawasan cepat tumbuh tersebut mendapatkan investasi yang lebih masif dari berbagai sektor dan sumber pendanaan.

Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan turut mendukung dalam pengembangan sektor ekonomi lokal secara inklusif di perkotaan dan pedesaan yang sesuai dengan potensi dan keunggulan daerahnya masing-masing. Dukungan teknis dan pendampingan juga turut diberikan kepada pengusaha lokal, petani, nelayan dan kelompok masyarakat lainnya di perkotaan dan pedesaan dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan produktivitas. Dukungan kepada UMKM di perkotaan dan pedesaan diberikan melalui penyediaan akses modal, pelatihan keterampilan, bantuan teknis, dan promosi pasar. Pengembangan pusat-pusat pelayanan dan perdagangan di perkotaan dan pedesaan untuk memberikan akses mudah terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, perbankan, dan kebutuhan konsumen lainnya.

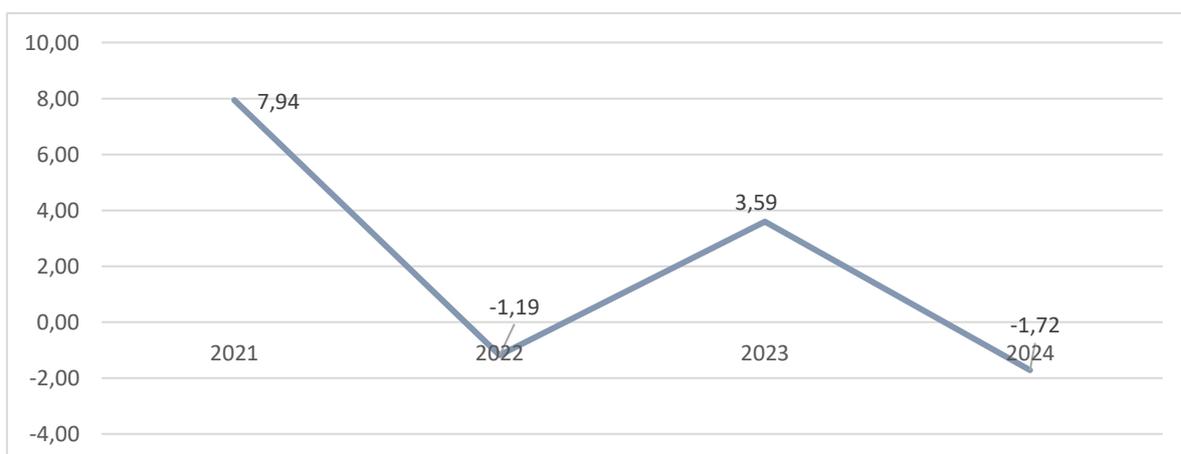
Langkah Kabupaten Bangka Selatan dalam pengembangan perkotaan dan pedesaan yang diharapkan dapat menjadi pusat perkembangan ekonomi baru dan menjadi daya ungkit pengembangan kawasan di sekitarnya dilakukan dengan menyediakan dan meningkatkan kualitas fasilitas dan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan sanitasi di perkotaan dan pedesaan. Selain itu Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan telah berupaya dengan memperkuat perkotaan dan pedesaan melalui pembangunan infrastruktur baik di perkotaan maupun pedesaan, termasuk jaringan jalan, transportasi umum, air bersih, sanitasi, listrik, dan telekomunikasi. Perkembangan pembangunan perkotaan dan pedesaan yang inklusif dan berkelanjutan dapat diukur melalui beberapa indikator seperti Indeks Infrastruktur/Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur, Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Persentase Desa Mandiri, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

Indeks Infrastruktur Kabupaten Bangka Selatan di atas, Indeks Infrastruktur Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi dengan peningkatan tertinggi pada tahun 2021 namun sempat menurun sebesar 7,94. Kondisi ini dapat terjadi dikarenakan penurunan capaian kondisi jalan mantap disebabkan banyak jalan di Kabupaten Bangka Selatan mengalami penurunan kualitas. Pada tahun 2023 tumbuh sebesar 3,59 seiring peningkatan capaian kualitas infrastruktur pekerjaan umum dan perhubungan, walaupun di tahun 2024 menurun hingga -1,72.

Tabel 2.37
Indeks Infrastruktur Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Infrastruktur	58,05	66,00	64,80	68,39	66,67

Sumber: Lakip DPUPR, Lakip Dinas Perhubungan Tahun, 2025 (diolah)



Gambar 2.32
Pertumbuhan Infrastruktur Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020-2024

Selain indeks infrastruktur, kinerja pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi ditandai dengan persentase rumah tangga dengan akses hunian layak. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak di Kabupaten Bangka Selatan pada tahun 2023 baru mencapai 16,03%. Hal ini dikarenakan masih banyaknya hunian rumah di Kabupaten Bangka Selatan yang menggunakan Asbes sehingga kriteria Ketahanan Bangunan yang Mumpuni tidak terpenuhi sebagai Hunian Layak.

Tabel 2.38
Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak

NO	URAIAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	BANGKA SELATAN	22,56	14,87	16,94	16,02	14,7

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2024

Pembangunan desa menjadi fokus utama dalam upaya mencapai kesetaraan dan kesejahteraan. Salah satu dampak penting dari Indeks Desa Mandiri adalah peningkatan kualitas hidup masyarakat desa. Dengan memperhatikan aspek-aspek seperti kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, IDM dapat membantu mengarahkan upaya pembangunan desa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menciptakan lapangan kerja yang lebih baik. Kabupaten Bangka Selatan sendiri memiliki 50 (lima puluh) desa yang tersebar di 8 (delapan) Kecamatan. Sampai dengan tahun 2024, Persentase Desa Mandiri di Kabupaten Bangka Selatan naik cukup signifikan dari yang hanya 4% di tahun 2020 menjadi 28% di tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan geliat pembangunan di Kabupaten Bangka Selatan cukup memberikan terhadap perkembangan perdesaan di Kabupaten Bangka Selatan.

Tabel 2.39
Persentase Desa Mandiri Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020-2024

NO	TAHUN	JUMLAH DESA			JUMLAH	PERSENTASE DESA MANDIRI TERHADAP JUMLAH SELURUH DESA (%)
		MANDIRI	MAJU	BERKEMBANG		
1	2020	2	13	35	50	4%
2	2021	2	19	29	50	4%
3	2022	3	23	24	50	6%
4	2023	4	28	18	50	8%
5	2024	14	22	14	50	28%

Sumber: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi, 2024

G. Stabilitas Ekonomi Makro

Stabilitas ekonomi makro merupakan faktor utama dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di suatu daerah Kabupaten Bangka Selatan sebagai bagian dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menghadapi berbagai tantangan dan peluang dalam menjaga stabilitas fiskal, moneter dan sektor keuangan. Salah satu indikator utama dalam menilai stabilitas ekonomi makro adalah kesinambungan fiskal yang tercermin dalam rasio pajak daerah terhadap PDRB. Pajak daerah menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah yang berperan dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik. rasio pajak daerah terhadap PDRB dapat memberikan gambaran mengenai kontribusi pajak daerah dalam perekonomian Kabupaten Bangka Selatan. Rasio pajak daerah terhadap PDRB Kabupaten Bangka Selatan menunjukkan tren yang bervariasi dari tahun ke tahun. Rasio pajak daerah pada Tahun 2020 terhadap PDRB sebesar 0,32%, menunjukkan kontribusi pajak daerah yang masih relatif kecil dalam perekonomian daerah. Tahun 2021 Rasio meningkat menjadi 0,46%,

Rasio Tahun 2022 menunjukkan peningkatan yang signifikan mencapai 0,60%, di tahun 2023 Rasio mengalami penurunan menjadi 0,45%. Dan di tahun 2024 Rasio mengalami penurunan Kembali menjadi 0,40%. Rasio pajak daerah terhadap PDRB Kabupaten Bangka Selatan menunjukkan peningkatan dari tahun 2020 hingga 2022, tetapi mengalami penurunan pada tahun 2023 dan 2024. Penurunan rasio pada 2(dua)tahun tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kebijakan fiskal, kondisi ekonomi, atau perubahan dalam penerimaan pajak daerah. Oleh karena itu, diperlukan strategi untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah secara berkelanjutan agar dapat mendukung pembangunan daerah dengan lebih optimal.

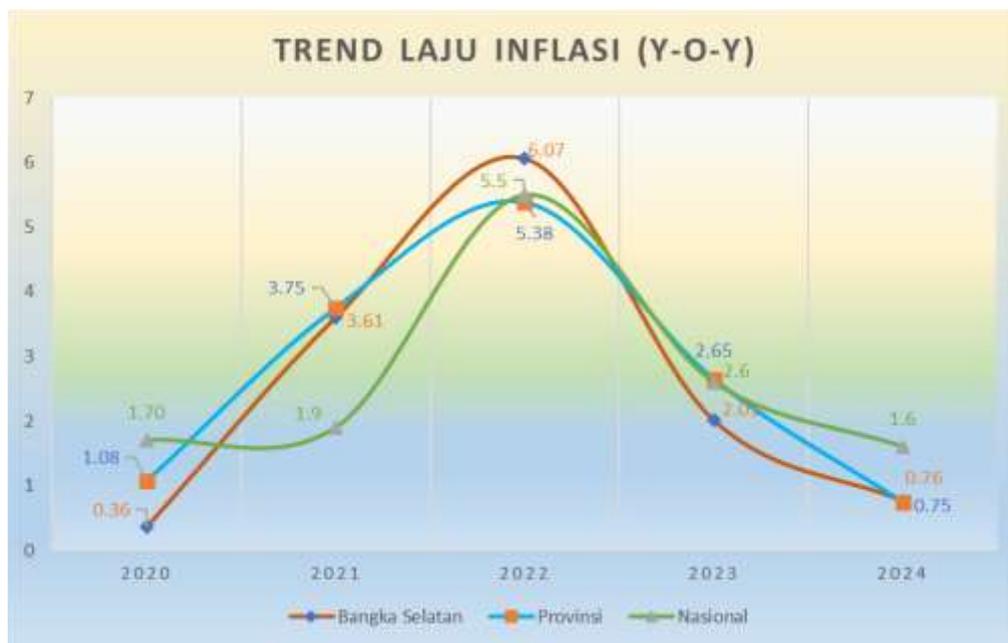


Sumber: BPS Kabupaten Bangka Selatan dan Bakuda, 2024 (diolah)

Gambar 2.33
Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020 – 2024

Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mencerminkan tingkat kenaikan harga barang dan jasa dalam suatu periode tertentu. Inflasi yang terlalu tinggi dapat berdampak negatif terhadap daya beli masyarakat, sedangkan inflasi yang terlalu rendah atau deflasi juga dapat mengindikasikan lemahnya permintaan dalam perekonomian. Kabupaten Bangka Selatan mengalami dinamika inflasi yang cukup signifikan dalam kurun waktu empat tahun terakhir, yakni dari tahun 2020 hingga 2023. Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan tidak melakukan penghitungan laju inflasi sehingga laju inflasi berpatokan dengan Kota Pangkalpinang sebagai kota penghitungan laju inflasi terdekat dari Kabupaten Bangka Selatan. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, tren inflasi Kabupaten Bangka Selatan menunjukkan adanya fluktuasi yang cukup signifikan. Dari kondisi inflasi rendah di tahun 2020, kemudian melonjak pada 2021 dan mencapai puncaknya pada 2022, sebelum akhirnya menurun kembali di tahun 2023 dan 2024. Fluktuasi ini mencerminkan dinamika ekonomi

daerah yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Secara rata-rata, tingkat inflasi di Kabupaten Bangka Selatan selama tahun 2020 -2024 adalah sebesar 2.56 persen, lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sebesar 2.72 persen dan Nasional sebesar 2,66 persen selama periode yang sama.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Gambar 2.34
Trend Laju Inflasi Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020 – 2024

Rasio intermediasi merupakan ukuran yang digunakan untuk mengukur kemampuan sistem keuangan dalam mengalokasikan dana dari pihak yang memiliki dana (surplus) ke pihak yang membutuhkan dana (defisit). Rasio intermediasi Kabupaten Bangka Selatan meningkat secara fluktuatif dari tahun 2020 hingga 2024. Rasio intermediasi tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 109,15 persen, sedangkan rasio intermediasi terendah terjadi pada tahun 2022 sebesar 67,50 persen. Peran intermediasi ini sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, meningkatkan inklusi keuangan, dan memberikan akses pembiayaan yang lebih luas kepada sektor produktif. Upaya intensif pemerintah daerah dan lembaga keuangan untuk menanggulangi dampak pandemi COVID-19 dan memanfaatkan kemajuan teknologi digital dalam rangka memperkuat ekosistem keuangan lokal. Intermediasi keuangan di sini berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan para penyimpan dana dengan pihak-pihak yang membutuhkan modal guna mendorong pemulihan dan pertumbuhan ekonomi, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kerjasama strategis antara pemerintah daerah dengan sektor swasta juga menjadi kunci keberhasilan dalam mengembangkan intermediasi keuangan. Inisiatif berupa pemberian kredit usaha dengan bunga ringan dan skema pembiayaan berbasis digital telah berhasil membuka akses modal bagi pelaku usaha, khususnya di sektor pertanian dan perikanan. Program-program inovatif ini tidak hanya membantu mengatasi hambatan pendanaan, tetapi juga mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing usaha lokal. Pendekatan kolaboratif ini memperlihatkan komitmen bersama untuk menciptakan ekosistem keuangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan

Meski banyak kemajuan yang dicapai, tantangan dalam transformasi sektor keuangan tetap ada. Keterbatasan infrastruktur digital di beberapa wilayah menghambat adopsi penuh teknologi keuangan, sehingga investasi lebih lanjut pada infrastruktur TIK menjadi hal yang mendesak. Selain itu, tingkat kemandirian fiskal daerah yang masih bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat mengindikasikan perlunya upaya peningkatan pendapatan asli daerah. Tantangan-tantangan tersebut mendorong perlunya sinergi lebih kuat antara sektor publik dan swasta untuk mengoptimalkan potensi intermediasi keuangan di Bangka Selatan.

Momentum transformasi sektor keuangan di Kabupaten Bangka Selatan selama periode 2020-2024 menawarkan prospek optimis. Dengan penguatan infrastruktur digital, peningkatan literasi keuangan, dan sinergi yang lebih erat antara berbagai pemangku kepentingan, diharapkan intermediasi keuangan akan semakin berperan strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Transformasi ini tidak hanya berdampak positif pada sektor ekonomi, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, serta menyiapkan pondasi yang lebih kokoh untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan.



Gambar 2.35
Rasio Intermediasi Sektor Keuangan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020 – 2023

Inklusi keuangan merupakan salah satu tujuan penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Inklusi keuangan memungkinkan masyarakat memiliki akses yang lebih baik terhadap jasa keuangan. Inklusi keuangan di Kabupaten Bangka Selatan selama periode 2020 hingga 2024 mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah daerah, perbankan, dan lembaga keuangan lainnya untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses terhadap layanan keuangan formal. Hal ini sejalan dengan target nasional yang menetapkan tingkat inklusi keuangan mencapai 90% pada tahun 2024, sebagaimana dicanangkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan telah mengambil langkah-langkah konkret dalam memperkuat inklusi keuangan melalui pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). TPAKD memiliki peran penting dalam mengidentifikasi kendala yang dihadapi masyarakat dalam mengakses layanan keuangan serta merancang solusi yang tepat guna. Salah satu program unggulan yang telah diterapkan adalah pengembangan layanan keuangan berbasis digital yang lebih mudah diakses oleh masyarakat, terutama di wilayah pedesaan.

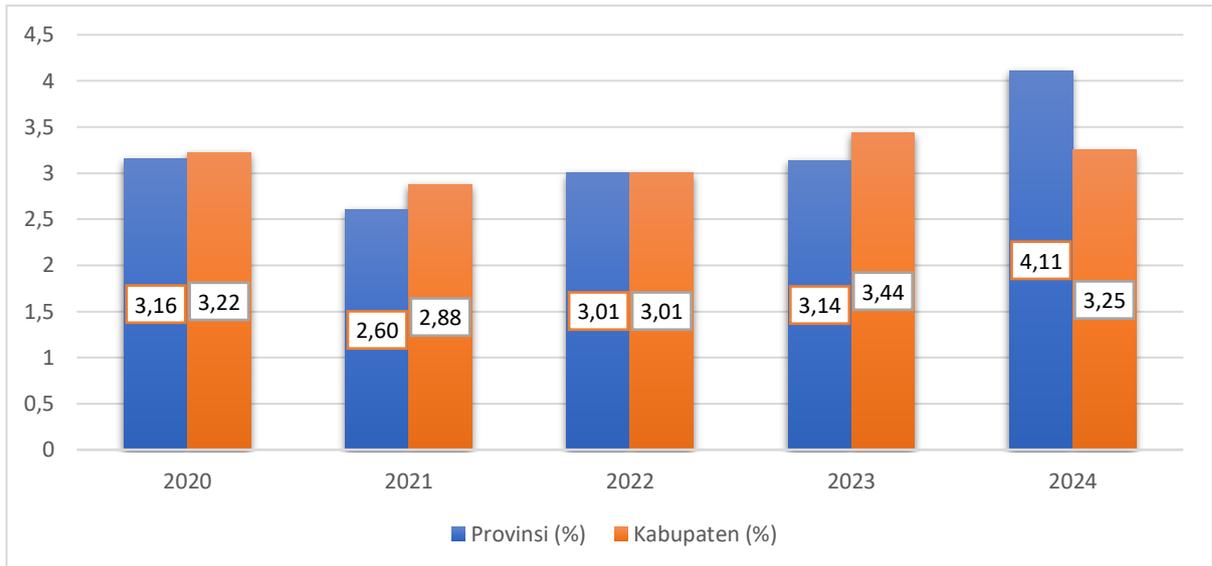
Selain itu, regulasi daerah juga telah disusun untuk mendukung ekosistem keuangan yang inklusif. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah Peraturan Bupati Bangka Selatan

Nomor 10.A Tahun 2024 tentang Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumsel Babel Tahun Anggaran 2024. Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat permodalan bank daerah agar lebih mampu memberikan layanan keuangan kepada masyarakat, termasuk dalam bentuk kredit usaha rakyat (KUR) dan pinjaman berbasis syariah. Perbankan, koperasi dan lembaga keuangan mikro (LKM) juga turut serta dalam memperkuat inklusi keuangan di Kabupaten Bangka Selatan. Pemerintah daerah terus memberikan pendampingan dan pelatihan kepada koperasi dan LKM agar mereka dapat menyediakan layanan keuangan yang lebih baik dan aman bagi masyarakat, terutama di sektor usaha kecil dan menengah (UMKM). Inklusi keuangan di Kabupaten Bangka Selatan dapat semakin berkembang dengan dukungan berbagai pihak, baik dari sektor pemerintahan, perbankan, maupun masyarakat itu sendiri. Dengan meningkatnya akses dan pemanfaatan layanan keuangan, kesejahteraan masyarakat Bangka Selatan dapat meningkat secara berkelanjutan, sejalan dengan visi nasional untuk menciptakan ekosistem keuangan yang inklusif dan berdaya saing.

2.4 ASPEK PELAYANAN UMUM

A. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Pelayanan umum merupakan salah satu kewajiban yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah guna memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Salah satu kinerja pelayanan umum yang dilakukan oleh pemerintah daerah ditunjukkan dengan indikator indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten Bangka Selatan selama 5 (lima) tahun terakhir bersifat fluktuatif. Pada tahun 2020 nilai SPBE Provinsi sebesar 3,16 dan Kabupaten Bangka Selatan sebesar 3,22. Sementara untuk tahun 2021 terjadi penurunan indeks SPBE Provinsi dan Kabupaten, dengan capaian indeks SPBE Provinsi sebesar 2,60 dan Kabupaten sebesar 2,88. Selanjutnya pada tahun 2022 dan 2023 nilai SPBE meningkat dari tahun sebelumnya.. Pada Tahun 2024, nilai SPBE kabupaten mengalami penurunan menjadi 3,25. Hal ini dikarenakan di tahun 2024 banyak instrumen pendukung SPBE yang mengalami penurunan salah satunya Domain Tata Kelola SPBE dan Domain Manajemen SPBE yang belum maksimal serta ada beberapa titik penggunaan internet mengalami blankspot yang dikarenakan alat yang dipergunakan mengalami kerusakan sehingga perlu menjadi prioritas pembangunan daerah lima tahun kedepan.

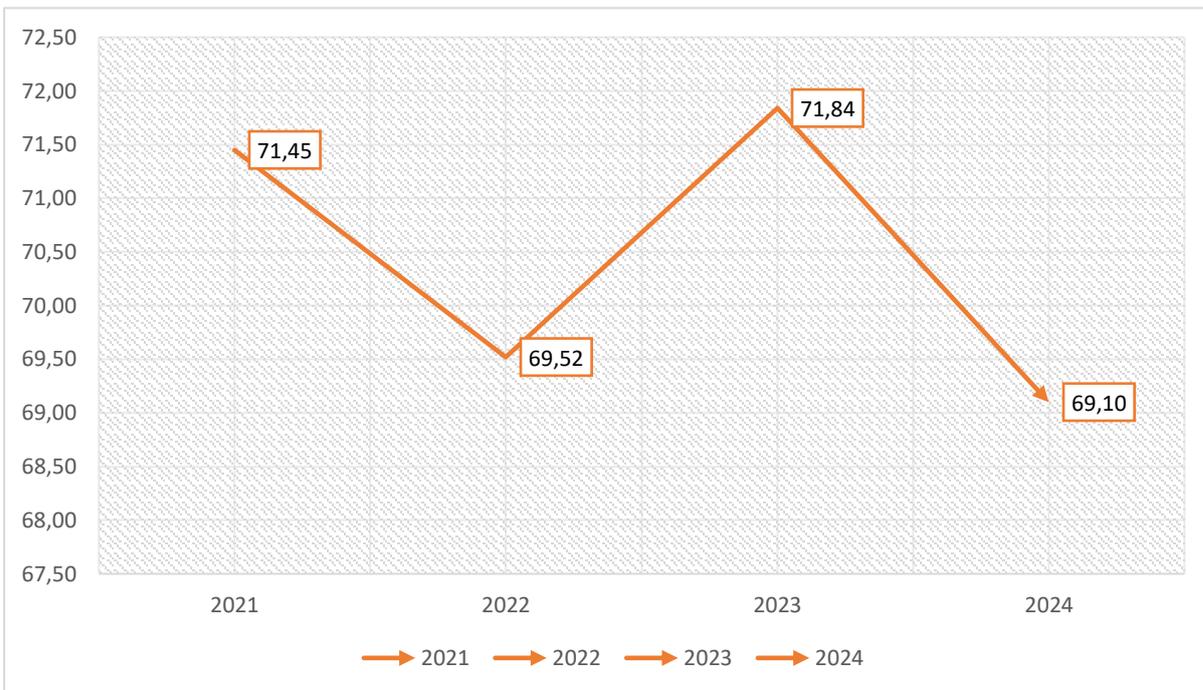


Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka Selatan, 2025

Gambar 2.36
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Provinsi dan Kabupaten Tahun 2020-2024

Indeks Pelayanan Publik (IPP) merupakan salah satu instrumen penting dalam menilai kualitas pelayanan publik, baik di tingkat pusat maupun daerah. Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Bangka Selatan selama 3 (tiga) tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2022 realisasi IPP Kabupaten Bangka Selatan sebesar 3,44 atau dalam kategori B-dan meningkat pada tahun 2024 menjadi 3,92 namun tetap dengan kategori B. Capaian kinerja tersebut mengindikasikan pelaksanaan pelayanan publik di Kabupaten Bangka Selatan yang semakin baik.

Selanjutnya salah satu alat ukur kinerja pelayanan publik adalah Indeks Integritas Nasional. Kabupaten Bangka Selatan mulai terdaftar dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) sebagai bagian dari Indeks Integritas Nasional pada tahun 2021, dengan nilai 71,50. Selanjutnya terjadi penurunan pada Tahun 2024 menjadi 69,10. Hal tersebut disebabkan masih belum lengkapnya data yang pada saat survei dilaksanakan disamping terjadinya penurunan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pesta demokrasi pada Tahun 2024.



Sumber: Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Selatan, 2025

Gambar 2.37
Indeks Integritas Nasional Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021-2024

B. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh dan Demokrasi Substansial

Di tingkat daerah pembangunan Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh dan Demokrasi Substansial digunakan beberapa tolak ukur ketercapaiannya melalui beberapa indikator antara lain indikator Reformasi Hukum dan indikator persentase penegakan perda. Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan tahun 2024 adalah 87.58 dengan kategori A (SANGAT BAIK). Adapun rincian hasil penilaian adalah sebagai berikut :

No	Variabel dan Indikator	Bobot	Nilai
I	Tingkat koordinasi Kementerian Hukum an HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi/Memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi	25	23.2
1	Pengajuan permohonan pengharmonisasian sesuai dengan: UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Permenkumham Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan perundang-undangan yang dibentuk di daerah oleh perancang peraturan perundang- undangan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PP.02.01 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemanjapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah	18	16.2

No	Variabel dan Indikator	Bobot	Nilai
a	Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah	6	6
b	Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	6	5.1
c	Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang berasal dari Kepala Daerah	6	5.1
2	Tingkat kehadiran pimpinan tinggi pemrakarsa, kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum, dan/atau DPRD di daerah dalam rapat pengharmonisasian yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan baik secara langsung atau online	7	7
II	Kompetensi perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter) yang berkualitas	25	18.6
1	Kebijakan pembinaan Perancang peraturan perundang- undangan	7	4.2
2	Keikutsertaan pejabat perancang peraturan perundang- undangan dalam kegiatan pengembangan kompetensi	6	6
3	Pengembangan kompetensi perancang peraturan perundang- undangan melalui kegiatan pelatihan fungsional Perancang	12	8.4
III	Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reuiu	30	19.1
1	Kebijakan tentang analisis dan evaluasi peraturan perundang- undangan yang sudah berlaku (existing) di tingkat daerah dalam rangka re-regulasi atau deregulasi	8	6
2	Proporsi jumlah peraturan perundang- undangan di daerah yang berhasil di evaluasi sesuai target pada satu tahun sebelum tahun penilaian	10	5
3	Tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang- undangan di daerah	6	3
4	Tingkat keterlibatan pejabat fungsional Analis Hukum dalam melakukan analisis dan evaluasi PUU eksiting/yang sudah berlaku di Tingkat daerah dalam rangka re-regulasi dan deregulasi	6	5.1
IV	Penataan Database Peraturan Perundang-undangan	20	17
1	Pengelolaan JDIIH terintegrasi sesuai dengan Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum	20	17
NILAI PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM		100	77,9
NILAI TOTAL PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM			87,58

Penyelesaian pelanggaran perda di Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020-2024 secara keseluruhan sudah diangka 100% kecuali pada tahun 2022 dan 2023. Dapat diartikan bahwa secara umum seluruh pelanggaran perda yang terjadi di Kabupaten Bangka Selatan dapat diselesaikan atau ditegakkan. Adapun jenis pelanggaran perda yang terjadi di Kabupaten

Bangka Selatan antara lain adalah penertiban pelajar/gepeng, penertiban PEKAT, penertiban kafe dan PSK, serta penertiban reklame. Sedangkan perda yang dilanggar adalah terdiri dari:

- Penertiban PKL Perda Nomor 21 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum;
- Perda Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pelarangan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
- Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pelarangan Pelacuran;
- Perda Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembinaan PKL; dan
- Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Tabel 2.40
Penegakan Perda Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020-2024

TAHUN	JUMLAH PELANGGARAN PERDA (KASUS)	JUMLAH PENEGAKAN PERDA (KASUS)	PERSENTASE PENEGAKAN PERDA (%)
2020	9	9	100
2021	8	8	100
2022	12	7	58
2023	15	14	93
2024	18	18	100

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan, 2024

Selanjutnya Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) juga menjadi tolak ukur pembangunan Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh dan Demokrasi Substansial. Pelaksanaan Aksi HAM di daerah, termasuk Kabupaten Bangka Selatan, diawasi melalui berbagai indikator yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti hak-hak perempuan, anak, penyandang disabilitas, kelompok minoritas, serta kebebasan sipil dan politik. Pemerintah daerah diharapkan untuk memastikan bahwa hak-hak ini dihormati dan dilindungi melalui kebijakan, program, dan kegiatan yang ada. Kabupaten Bangka Selatan berhasil memperoleh nilai 63,6 dalam pelaksanaan Aksi HAM 2024. Nilai ini diperoleh setelah melalui evaluasi menyeluruh terhadap implementasi program-program yang mendukung pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.

Berdasarkan Persentase Capaian Aksi HAM Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020-2024 masih terdapat banyak tantangan dalam implementasi Aksi HAM yang perlu diatasi. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain adalah masih adanya ketimpangan akses terhadap layanan publik di daerah terpencil, serta perlunya penguatan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang terkait dengan HAM di tingkat lokal. Kabupaten Bangka Selatan

harus berkomitmen untuk terus meningkatkan pelaksanaan Aksi HAM dengan memperkuat kerja sama antara pemerintah daerah, masyarakat, serta berbagai pihak lainnya. Dengan adanya evaluasi yang terus menerus dan pembaruan kebijakan yang berbasis pada hak asasi manusia.

Tabel 2.41
Persentase Capaian Aksi HAM Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020-2024

TAHUN	PERSENTASE CAPAIAN
2020	N/A
2021	55,07
2022	54,96
2023	67,14
2024	63,6

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Selatan, 2025

Selain itu, Angka kriminalitas turut menjadi salah satu indikator pembangunan hukum di kabupaten Bangka Selatan. Angka Kriminalitas di Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020-2024 dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain, faktor ekonomi dan faktor sosial. Jumlah tindak kriminal yang tertangani dalam penghitungan indikator ini berasal dari data Kepolisian Resor Bangka Selatan. Selanjutnya jumlah penduduk yang digunakan dalam penghitungan angka kriminalitas Kabupaten Bangka Selatan adalah berasal dari rilis data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Selatan. Angka kriminalitas di Kabupaten Bangka terlihat semakin membaik dalam kurun waktu 2020-2023 yang menunjukkan bahwa kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat semakin baik. Namun kembali meningkat pada tahun 2024, menurut rilis dari Kepolisian Resort Bangka Selatan bahwa penyebab tingginya kasus kejahatan konvensional diklaim menjadi penyumbang terbanyak naiknya angka kriminalitas. Kondisi ini diduga kuat turut dipengaruhi oleh kondisi perekonomian yang kurang begitu baik di sepanjang tahun 2024 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel 2.42
Perkembangan Angka Kriminalitas Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020-2024

TAHUN	JUMLAH KRIMINALITAS YANG DITANGANI (KASUS)	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)	ANGKA KRIMINALITAS
2020	199	198.189	10,04
2021	148	200.325	7,39
2022	146	205.253	7,11
2023	137	210.344	6,51
2024	194	216.079	8,98

Sumber: Kepolisian Resort Bangka Selatan dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Selatan, 2024

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan alat untuk mengukur perkembangan demokrasi Indonesia sehingga diperoleh acuan untuk menyusun program pembangunan politik baik untuk pemerintah pusat maupun daerah. Pengukuran ini merupakan kerja bersama instansi pemerintah yaitu Kemenkopohukam, BPS, Bappenas, Kemendagri, serta Pemerintah Daerah. Selama empat belas tahun penghitungan IDI, status kondisi demokrasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lebih banyak berada pada kategori sedang. Secara umum perkembangan demokrasi di Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan tren ke arah yang positif. Hal ini cukup menggambarkan bagaimana kondisi Indeks Demokrasi Indonesia di Kabupaten Bangka Selatan, karena selama ini perhitungan IDI hanya dilakukan di tingkat provinsi. Dalam RPJPD Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2025-2029, IDI Kabupaten Bangka Selatan ditargetkan "Sedang" di tahun 2025 dengan nilai 74.11 dan 76.21 pada tahun 2029.

C. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gantar Kawasan

Kinerja ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gantar kawasan ditunjukkan dengan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD). IDSD Kabupaten Bangka Selatan terus mengalami kenaikan dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir yang dapat menjadi referensi utama bagi pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis bukti, bagi akademisi dalam penciptaan dan perluasan pengetahuan, dan bagi pelaku usaha dalam pengambilan keputusan strategis. Dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor penentu daya saing seperti lingkungan yang kondusif, sumber daya manusia yang kompetitif, efisiensi pasar, serta ekosistem inovasi—para pemangku kepentingan dapat mengoptimalkan potensi daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Tabel 2.43
Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020-2024

TAHUN	NILAI IDSD
2020	2.7040
2021	2,6974
2022	2,65
2023	3,18
2024	3,42

Sumber: BRIN, 2024

Setiap urusan pemerintahan daerah berkorelasi langsung dengan kualitas pelayanan umum yang dirasakan oleh masyarakat. Untuk itu, capaian Indikator Kinerja Kunci selama 5 (lima)

tahun terakhir menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan umum dapat dilihat pada Tabel 2.44.

D. Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah kepada seluruh warga negara secara merata. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa daerah memiliki kewajiban menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dengan menjamin pemenuhan hak dasar masyarakat. Disamping itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib menyelenggarakan 6 (enam) jenis pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial). Penerapan SPM menjadi instrumen hukum untuk memastikan hak konstitusional warga terpenuhi, sehingga tidak ada masyarakat yang tertinggal dari layanan publik secara minimal. Adapun capaian penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bangka Selatan dalam kurun waktu Tahun 2021-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.45
Capaian Standar Pelayanan Minimal
Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021-2024

No	Urusan	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	Pendidikan	69,01	62,05	63,17	57,09
2	Kesehatan	58,94	89,45	90,77	89,47
3	Pekerjaan Umum	61,27	76	76,66	77,74
4	Perumahan Rakyat	50	50	94,29	100
5	Trantibumlinmas	51,54	93,89	88,32	93,02
6	Sosial	50,67	63,4	72,37	91,08

Sumber: LPPD Kabupaten Bangka Selatan

Berdasarkan tabel diatas, tantangan terbesar Kabupaten Bangka Selatan dalam penerapan standar pelayanan minimal yakni dalam pemenuhan akses dan peningkatan kualitas pelayanan urusan pendidikan. Terjadi penurunan yang cukup signifikan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, dimana berdasarkan data jenis layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada urusan pendidikan, berdasarkan data pada Tahun 2024 indikator kinerja Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Kesetaraan masih dibawah 50 %. Kedua

indikator tersebut yang menyebabkan secara agregat kinerja layanan urusan Pendidikan di Kabupaten Bangka Selatan pada Tahun 2024 berada di kategori “Belum Tuntas”.

Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Kesehatan pada Tahun 2024 sebesar 89,47 % dengan kategori “Tuntas Madya”. Capaian kinerja ini menunjukkan adanya intervensi yang efektif dalam peningkatan layanan Kesehatan. Namun demikian, tren capaian penerapan SPM di Kabupaten Bangka Selatan dari Tahun 2021 hingga 2024 cenderung stagnan pada kisaran 89-90 %, hal tersebut mengindikasikan perlunya quality improvement dengan meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan.

Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Pekerjaan Umum pada Tahun 2024 berada pada kategori “Tuntas Pratama” dengan nilai sebesar 77,74 %. Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat tren capaian meningkat setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan akses air minum, sanitasi, dan infrastruktur dasar. Namun demikian capaian SPM urusan Pekerjaan Umum ini masih jauh dibawah target 100 % sehingga masih memerlukan banyak intervensi kebijakan dalam pemerataan pembangunan pada seluruh wilayah di Kabupaten Bangka Selatan.

Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Perumahan Rakyat pada Tahun 2024 sebesar 100 % dengan kategori “Tuntas Paripurna”. Hal ini menunjukkan keberhasilan program rumah layak huni atau stimulan perumahan rakyat yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Meski demikian, capaian 100% harus dijaga secara berkelanjutan melalui evaluasi kualitas hunian, integrasi dengan infrastruktur dasar lainnya, serta pengendalian tata ruang agar terwujud peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkeadilan dan berkelanjutan.

Selanjutnya, capaian indeks penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) Kabupaten Bangka Selatan pada tahun 2024 sebesar 93,02 % dengan kategori “Tuntas Utama” menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam penyelenggaraan pelayanan dasar di bidang penegakan ketenteraman, perlindungan masyarakat, serta kesiapsiagaan menghadapi gangguan keamanan dan bencana. Capaian ini merefleksikan keberhasilan pemerintah daerah dalam membangun kelembagaan yang responsif, koordinasi yang kuat dan sigap, serta melaksanakan program pencegahan dan penanggulangan bencana secara efektif.

Indeks capaian penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan sosial di Kabupaten Bangka Selatan pada Tahun 2024 sebesar 91,08 % atau berada pada kategori “Tuntas Utama” yang mengindikasikan keberhasilan pemerintah daerah dalam pemenuhan layanan dasar

bagi masyarakat rentan, termasuk penyandang masalah kesejahteraan sosial, anak terlantar, disabilitas, dan fakir miskin. Niali capaian tersebut juga mengindikasikan efektivitas intervensi program sosial, mulai dari rehabilitasi PMKS, bantuan sosial berbasis data, hingga penyediaan fasilitas dan layanan pendukung yang inklusif bagi masyarakat di Kabupaten Bangka Selatan.

E. Kerjasama Daerah

Kerja sama Pemerintah Daerah (KSD) adalah kesepakatan antara pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan bersama. KSD bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah juga dimaksudkan sebagai sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyeraskan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antardaerah, daerah dengan pihak ketiga, dan daerah dengan pemerintah daerah atau lembaga di luar negeri serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi, dan kapasitas fiskal daerah. Adapun Kerja Sama yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan sebagaimana disampaikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.46
Daftar Kerjasama Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024

NO.	URAIAN	TENTANG	SKPD PENANGGUNG JAWAB
01.	KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN DAN UNIVERSITAS GADJAH MADA	KERJASAMA DALAM PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	BPPPPD
02.	KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA UNIVERSITAS SRIWIJAYA DAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN	TENTANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	SETDA
03.	KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN DENGAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG (ITB)	TENTANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
04.	KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN DENGAN PT.POS INDONESIA(PERSERO) KANTOR POS PANGKALPINANG	TENTANG PENYELENGGARAAN JASA LAYANAN PENGIRIMAN BARANG DAN JASA LAYANAN KEUANGAN.	BAKUDA

NO.	URAIAN	TENTANG	SKPD PENANGGUNG JAWAB
05.	KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN POLITIK PAHLAWAN 12 KABUPATEN BANGKA SELATAN	TENTANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BANGKA SELATAN MELALUI KEGIATAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI.	SETDA
06.	KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA INSTITUT SAINS DAN BISNIS ATMA LUHUR DAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN	TENTANG KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN MASYARAKAT	SETDA
07.	KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG DAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN	TENTANG KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN ILMU PENGETAHUNAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA	SETDA
08.	KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN DAN INSTITUT AGAMA ISLAM ABDURRAHMAN SIDDIK	KERJASAMA PENINGKATAN MUTU PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI	SETDA
09.	KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN DAN BANK SUMSEL BABEL	SINERGITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SETDA
10.	KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN DAN INSTITUT AGAMA ISLAM TAZKIA	PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT	SETDA
11.	NOTA KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN DENGAN UNIVERSITAS INDONESIA	TENTANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	DISKOMINFO
12.	KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD" YOGYAKARTA DAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN	TENTANG KERJA SAMA DALAM PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	SETDA
13.	KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN	SINERGITAS PEMBANGUNAN ANTAR DAERAH PERBATASAN	SETDA
14.	KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG DAN KABUPATEN BANGKA SELATAN	KERJASAMA PEMBANGUNAN DAERAH	SETDA
15.	KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN	KERJASAMA PEMBANGUNAN DAERAH	SETDA

NO.	URAIAN	TENTANG	SKPD PENANGGUNG JAWAB
16.	KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH DAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN	KERJASAMA PEMBANGUNAN DAERAH	SETDA
17.	KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN DAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.	KERJA SAMA ANTAR DAERAH	BKPSDMD
18.	NOTA KESEPAKATAN ANTARA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN KANTOR CABANG PANGKAL PINANG	TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN BANGKA SELATAN	SETDA
19.	NOTA KESEPAKATAN ANTARA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN KANTOR CABANG PANGKALPINANG DAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN	OPTIMALISASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL	SETDA
20.	NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN DAN BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BANGKA SELATAN	FASILITASI PENYUSUNAN DATA STATISTIK	SETDA
21.	NOTA KESEPAKATAN ANTARA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN	TENTANG SINERGI PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN	PEMKAB BASEL
22.	PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN DENGAN BALAI SERTIFIKASI ELEKTRONIK BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA	TENTANG PEMANFAATAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK PADA SISTEM ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN	DISKOMINFO
23.	NOTA KESEPAKATAN ANTARA KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN.	FORUM KERJASAMA PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH.	BAKUDA
24.	NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN DAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	TENTANG OPTIMALISASI TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	SETDA
26.	NOTA KESEPAKATAN ANTARA PT. PLN (PERSERO DENGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN	TENTANG SINERGI PELAYANAN PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN DAN PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK DI KABUPATEN BANGKA SELATAN	SETDA

Dari tabel diatas, Kabupaten Bangka Selatan telah melakukan Kerjasama dengan berbagai Instansi / Lembaga, baik Lembaga Pemerintahan, Swasta maupun Perguruan Tinggi dengan rentang waktu 1 – 5 tahun. Adapun bentuk Kerjasama Daerah Kabupaten Bangka Selatan tahun 2024 meliputi :

1. Kerja sama Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Pengembangan Sumber Daya, dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
2. Kerja sama Penyelenggaraan Jasa Layanan Pengiriman Barang Dan Jasa Layanan Keuangan.
3. Kerja sama Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pengabdian Masyarakat di Kabupaten Bangka Selatan Melalui Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
4. Kerja sama Sinergitas Pembangunan Daerah.
5. Kerja sama Sinergitas Pembangunan antar Daerah Perbatasan.
6. Kerja sama dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial ketenagakerjaan Di Kabupaten Bangka Selatan.
7. Kerja sama Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional.
8. Kerja sama Fasilitasi Penyusunan Data Statistik.
9. Kerja sama Sinergi Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
10. Kerja sama Pemanfaatan Sertifikat Elektronik Pada Sistem Elektronik.
11. Kerja sama Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.
12. Kerja sama Optimalisasi Tugas Dan Fungsi Pelayanan Hukum Dan Hak Asasi Manusia.
13. Kerjasama Sinergi Pelayanan Publik Dalam Penyelenggaraan Dan Penyediaan Tenaga Listrik.

Tabel 2.44
Capaian Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020-2024

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja					Sumber Data	Ket
			2020	2021	2022	2023	2024		
URUSAN WAJIB									
1	Pendidikan	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam PAUD	101,16%	87,77%	92,22%	89,60%	81,52%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7 - 12 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar	110,59%	94,03%	99,31%	100%	106,80%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13 - 15 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah Pertama	75,77%	67,26%	91,69%	95,25%	71,47%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan	12,49%	7,96%	14,61%	26,92%	22,24%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2	Kesehatan	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	0,06%	0,06%	0,10%	0,95%	0,71%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

Tabel 2.44
Capaian Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020-2024

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja					Sumber Data	Ket
			2020	2021	2022	2023	2024		
		Persentase Rumah Sakit Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota Yang Terakreditasi	50%	50%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	78,05%	64,44%	82,77%	87,34%	68,71%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Persentase Ibu Bersalin Mendapat Pelayanan Persalinan	92,47%	73,96%	89,71%	97,18%	70,12%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	98,10%	78,71%	91,55%	100%	73,58%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	72,37%	55,40%	79,78%	72,79%	75,47%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	89,68%	73,19%	96,81%	94,73%	99,86%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

Tabel 2.44
Capaian Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020-2024

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja					Sumber Data	Ket
			2020	2021	2022	2023	2024		
		Persentase Orang Usia 15 – 59 Tahun Mendapatkan Skrinning Kesehatan Sesuai Standar	69,02%	79,90%	82,57%	92,30%	95,76%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Keatas Mendapatkan Skrinning Kesehatan Sesuai Standar	57,46%	74,15%	77,05%	83,07%	83,97%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Persentase Penderita Hipertensi Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	55,63%	79,09%	84,03%	98,40%	97,62%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Persentase Penderita DM Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	101,33%	108,14%	105,87%	100%	100%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Persentase ODGJ Berat Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar	101,96%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Persentase Orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan TBC Sesuai Standar	65,04%	49,36%	112,05%	64,92%	100%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

Tabel 2.44
Capaian Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020-2024

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja					Sumber Data	Ket
			2020	2021	2022	2023	2024		
		Persentase Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar	90,18%	80,10%	95,72%	100%	100%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
3	Pekerjaan Umum	Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir Yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir Di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	0%	0%	0%	0%	0%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan	Tidak Terdapat WS Kewenangan Kab. Bangka Selatan, Yang Ada WS Kewenangan Provinsi Yaitu WS Bangka
		Rasio Luas Kawasan Permukiman Sepanjang Pantai Rawan Abrasi, Erosi dan Akresi Yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengaman Pantai di Ws Kewenangan Kabupaten/Kota	0%	0%	0%	0%	0%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan	Tidak Terdapat WS Kewenangan Kab. Bangka Selatan, Yang Ada WS Kewenangan Provinsi Yaitu WS Bangka
		Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Yang Di Layani Oleh Jaringan Irigasi	30,98%	33,26%	33,86%	39,28%	13,88%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan	Tidak Terdapat WS Kewenangan Kab. Bangka Selatan, Yang Ada WS Kewenangan Provinsi Yaitu WS Bangka

Tabel 2.44
Capaian Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020-2024

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja					Sumber Data	Ket
			2020	2021	2022	2023	2024		
		Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga di Seluruh Kabupaten/Kota	72,27%	81,41%	82,40%	83,04%	73,29%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan	Perhitungan Berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 ttg Penerapan Standar Pelayanan Minimal
		Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	80%	88,86%	89,80%	91,10%	91,68%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan	
		Rasio Kepatuhan IMB Kabupaten/Kota	100,00%	100%	100%	100%	0%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan	
		Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	65,60%	76,60%	66,67%	70,03%	70,58%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan	
		Rasio Tenaga Operator/ Teknisi / Analisis Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	100%	100%	100%	100%	0%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan	

Tabel 2.44
Capaian Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020-2024

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja					Sumber Data	Ket
			2020	2021	2022	2023	2024		
		Rasio Proyek Yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya Tanpa Kecelakaan Konstruksi	0%	0%	0%	0%	0%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan	Tahun 2024 Kabupaten Bangka Selatan Belum Tersedia Proyek Yang Menjadi Kewenangan Pengawasan Yang Berhubungan Dengan Kecelakaan Konstruksi
4	Perumahan Rakyat	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	0%	0%	0%	0%	0%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kab. Bangka Selatan Tidak Terdapat Kawasan Rawan Bencana
		Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	0%	0%	0%	100%	0%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kab. Bangka Selatan Tidak Terdapat Kawasan Rawan Bencana
		Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha Di Kabupaten/Kota Yang Ditangani	32,42%	68,44%	68,44%	0%	0%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Adanya Pembaruan SK Terkait Penetapan Kawasan Kumuh Pada Tahun 2024, Sehingga Belum Dilakukan Penanganan Terhadap Permukiman Kumuh
		Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	8,15%	7,24%	6,67%	6,49%	5,13%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	

Tabel 2.44
Capaian Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020-2024

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja					Sumber Data	Ket
			2020	2021	2022	2023	2024		
		Jumlah Perumahan Yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	0,73%	95,22%	100%	100%	0,14%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Surat Keterangan
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Satuan Polisi Pamong Praja	
		Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	32,69%	57,50%	67,21%	80,33%	80,70%	Satuan Polisi Pamong Praja	
		Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	2.136	1.090 Orang	51,35%	63,16%	72,08%	Satuan Polisi Pamong Praja	

Tabel 2.44
Capaian Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020-2024

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja					Sumber Data	Ket
			2020	2021	2022	2023	2024		
		Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	336	152 Orang	1,23%	3,58%	8,16%	Satuan Polisi Pamong Praja	
		Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.475	963 Orang	100%	100%	100%	Satuan Polisi Pamong Praja	
		Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	Satuan Polisi Pamong Praja	
		Waktu Tanggap (Response Time) Penanganan Kebakaran	15 Menit	15 Menit	15,5 Menit	18 Menit	14,11 Menit	Satuan Polisi Pamong Praja	
6	Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Diluar Panti (Indikator SPM)	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

Tabel 2.44
Capaian Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020-2024

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja					Sumber Data	Ket
			2020	2021	2022	2023	2024		
		Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
7	Tenaga Kerja	Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan Yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja	100%	85,71%	100%	100%	100%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	8,10%	20,67%	1,03%	1,89%	0,92%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	219,04%	230,38%	208,89%	177511477799,95%	188901279437,12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan	29,54%	26,21%	33,33%	29,49%	30,49%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

Tabel 2.44
Capaian Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020-2024

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja					Sumber Data	Ket
			2020	2021	2022	2023	2024		
		Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	0%	8%	22,39%	22,90%	18,88%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG Pada Belanja Langsung APBD	0,88%	0,25%	0,36%	0,31%	0,43%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Persentase Anak Korban Kekerasan Yang Ditangani Instansi Terkait Kabupaten/Kota	0,03%	0,01%	0,01%	100%	100%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, Termasuk TPPPO (Per 100.000 Penduduk Perempuan)	7,42	3,08	3,01	6,86	17	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
9	Pangan	Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya Cadangan Beras dan/atau Jagung Sesuai Kebutuhan)	30,84%	37%	37,84%	43,51%	18,34%	Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan	

Tabel 2.44
Capaian Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020-2024

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja					Sumber Data	Ket
			2020	2021	2022	2023	2024		
10	Pertanahan	Persentase Pemanfaatan Tanah Yang Sesuai Dengan Peruntukan Tanahnya Diatas Izin Lokasi Dibandingkan Dengan Luas Izin Lokasi Yang Diterbitkan	100%	100%	100%	100%	93,68%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan	
		Persentase Penetapan Tanah Untuk Pemabangunan Fasilitas Umum	27,49%	100%	0%	0%	0%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan	Surat Keterangan
		Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	80,19%	91,87%	95,30%	36,87%	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan	
		Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) Yang Siap Diredistribusikan Yang Berasal Dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	100%	100%	21,52%	100%	5,47%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan	
		Tersedianya Tanah Untuk Masyarakat	0%	0%	0%	0%	0%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan	Surat Keterangan

Tabel 2.44
Capaian Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020-2024

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja					Sumber Data	Ket
			2020	2021	2022	2023	2024		
		Penanganan Sengketa Tanah Garapan Yang Dilakukan Melalui Mediasi	100%	100%	100%	0%	0%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan	Surat Keterangan
11	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	74,018	68,145	65,954	65,356	68,621	Dinas Lingkungan Hidup	Perhitungan IKLH Menggunakan Perhitungan Yang Baru Berdasarkan Permen LH Nomor 27 Tahun 2021
		Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota	67,46%	65,44%	66,03%	71,34%	70,22%	Dinas Lingkungan Hidup	
		Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang Diterbitkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	66%	23,08%	20%	20%	34,38%	Dinas Lingkungan Hidup	
12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Perekaman KTP Elektronik	99,23%	99,13%	97,07%	97,97%	99,21%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

Tabel 2.44
Capaian Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020-2024

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja					Sumber Data	Ket
			2020	2021	2022	2023	2024		
		Persentase Anak Usia 0 – 17 Tahun Kurang 1 (satu) Hari Yang Memiliki KIA	46,73%	65,12%	65,67%	68,93%	69,72%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		Kepemilikan Akta Kelahiran	85,23%	92,49%	98,04%	99,77%	99,80%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		Jumlah Peraangkat Daerah (PD) Yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama	39,29%	50%	48,28%	46,87%	15%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	0%	0%	0%	0%	0%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Surat Keterangan
		Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	4,65%	5,71%	108,33%	29,17%	20%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	

Tabel 2.44
Capaian Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020-2024

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja					Sumber Data	Ket
			2020	2021	2022	2023	2024		
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	TFR (Angka Kelahiran Total)	1,74	1,92	1,92	1,44	0,23	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalancee Rate/MCPR)	76,73%	76,30%	82,04%	83,78%	83,64%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Persentase Kebutuhan Ber KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	9,72%	4,98%	10,08%	4,67%	3,41%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
15	Perhubungan	Rasio Konektivitas Kabupaten	0,504	0,504	0,516	0,534	0,541	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan	
		Kinerja Lalu Lintas Kabupaten	0,44	0,44	0,44	0,5	0,72	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan	

Tabel 2.44
Capaian Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020-2024

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja					Sumber Data	Ket
			2020	2021	2022	2023	2024		
16	Komunikasi dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) Yang Terhubung Dengan Akses Internet Yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Persentase Layanan Publik Yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	92,86%	89,89%	92,13%	92,31%	93,33%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	42,76%	64,20%	73,61%	91,31%	95%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Meningkatnya Koperasi Yang Berkualitas	33,33%	36,56%	58%	57,84%	51,61%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
		Meningkatnya Usaha Mikro Yang Menjadi Wirausaha	15,63%	100%	100%	99,42%	98,33%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	

Tabel 2.44
Capaian Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020-2024

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja					Sumber Data	Ket
			2020	2021	2022	2023	2024		
18	Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investasi Di Kabupaten/Kota	17,28%	13,84%	31,54%	125,87%	-19%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,	
19	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	0,26%	4,04%	4,85%	3,46%	3,15%	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	
		Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan Dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	0,56%	0,68%	1,60%	23,74%	32,13%	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	
		Peningkatan Prestasi Olahraga	0	1 Medali	50 Medali	151 Medali	1 Medali	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	
20	Statistik	Persentase Perangkat Daerah (PD) Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika	

Tabel 2.44
Capaian Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020-2024

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja					Sumber Data	Ket
			2020	2021	2022	2023	2024		
		Persentase Perangkat Daerah (PD) Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Evaluasi Pembangunan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
21	Persandian	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	0%	20%	40%	50,23%	52%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
22	Kebudayaan	Terlestarinya Cagar Budaya	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
23	Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	6,87%	9,05%	14,90%	15,07%	62,22 (Sedang)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	188,46	208,09	0,29	0,3	79,48 (Sedang)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	

Tabel 2.44
Capaian Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020-2024

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja					Sumber Data	Ket
			2020	2021	2022	2023	2024		
24	Kearsipan	Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti Yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional (Psl 40 dan 59 UU 43/2009)	500	544,75	46,89	62,31%	100%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Rakyat	0	677,67	9,83	0	4,69%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
URUSAN PILIHAN									
25	Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi (Sumber Data : One Data KKP)	102,21%	103,68%	106,73%	113,09%	75,47%	Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan	

Tabel 2.44
Capaian Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020-2024

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja					Sumber Data	Ket
			2020	2021	2022	2023	2024		
26	Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Manca Negara Per Kebangsaan	-90,52%	-81,82%	6150%	-85,60%	-66,67%	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	
		Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara Yang Datang Ke Kabupaten/Kota	-57,42%	0,23%	26,10%	2,31%	-7,40%	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	
		Tingkat Hunian Akomodasi	3810,88%	10412,59%	17,71%	21,26%	20,99%	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	
		Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Harga Berlaku	286.481	320,54	3,46%	3,68%	2,72%	Kabupaten Bangka Selatan Dalam Angka Tahun 2023	

Tabel 2.44
Capaian Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020-2024

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja					Sumber Data	Ket
			2020	2021	2022	2023	2024		
		Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	1,96%	1,42%	2,64%	2,62%	2,68%	Badan Keuangan Daerah	
27	Pertanian	Produktivitas Pertanian Per Hektar Per Tahun	382,35%	396,92%	406,52%	434,09%	435,64%	Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan	
		Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	0%	-77,13%	310,13%	-75%	-65,19%	Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan	
28	Energi Sumber Daya Mineral	Persentase Perusahaan Pemanfaatan Panas Bumi Yang Memiliki Izin di Kabupaten/Kota	0%	0%	0%	0%	0%		Bukan Kewenangan Kabupaten Melainkan Kewenangan Provinsi

Tabel 2.44
Capaian Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020-2024

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja					Sumber Data	Ket
			2020	2021	2022	2023	2024		
29	Perdagangan	Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Izin Sesuai Dengan Ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	25,72%	25,68%	26,30%	54,61%	66,66%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
		Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	74,02%	79,55%	81,33%	46,18%	116,59%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Surat Keterangan
		Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah Yang Berlaku	10,42%	10,39%	12,68%	15,12%	18,24%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
31	Perindustrian	Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten/Kota	24,89%	-2,91%	11,40%	3,33%	5,42%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	

Tabel 2.44
Capaian Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020-2024

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja					Sumber Data	Ket
			2020	2021	2022	2023	2024		
		Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turun Indikator Pembangunan Industri Dalam RIPIN Yang Ditetapkan Dalam RPIK	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Surat Keterangan
		Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah Yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait	0%	100%	100%	100%	100%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
		Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah Yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait	0%	0%	0%	0%	0%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Tidak Ada Pengajuan IPIU Selama Tahun 2024
		Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Yang Lokasinya Di Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Untuk Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) belum ada pengajuan selama Tahun 2024

Tabel 2.44
Capaian Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020-2024

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja					Sumber Data	Ket
			2020	2021	2022	2023	2024		
		Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap dan Terkait	Ada (100%)	Ada (100%)	Ada (100%)	Ada (100%)	Ada (100%)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
32	Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Pegawai Diluar Guru dan Tenaga Kesehatan	17,14%	14,48%	12,86%	10,33%	14,06%		
		Rasio PAD	0,58%	0,65%	5,94%	6,54%	7,59%		
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 1 Atau Rintisan	Level 1 Atau Rintisan	Level 2	Level 2 (3,0820)	Level 2 (3,0820)		
		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 2 Plus	Level 2 Plus	Level 2	Level 2 (2,44)	Level 2 (2,610)		

Tabel 2.44
Capaian Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020-2024

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja					Sumber Data	Ket
			2020	2021	2022	2023	2024		
		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi Transfer Expenditures)	82,49%	69,88%	64,91%	62,04%	72,47%		
		Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	3 WTP	4 WTP	5 WTP		
33	Pengadaan	Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi Yang Dibawa Ke Tahun Berikutnya Yang Ditandatangani Pada Kuartal Pertama	12,50%	0%	0%	0%	0%		
		Persentase Jumlah Pengadaan Yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	2,99%	19,73%	36,54%	68,89%	93,02%		
		Rasio Nilai Belanja Yang Dilakukan Melalui Pengadaan	19,08%	33,13%	54,04%	94,12%	11,79%		
		Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Daerah				59,70%	-96,38%		

Tabel 2.44
Capaian Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020-2024

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja					Sumber Data	Ket
			2020	2021	2022	2023	2024		
34	Kepegawaian	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	380,22%	394,30%	4,99%	84,10%	84,40%		
		Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	6,87%	22,01%	83,53%	22,18%	24,07%		
		Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	56,72%	20%	25,44%	16,51%	16,74%		
35	Manajemen Keuangan	Deviasi Realisasi Belanja Terhadap Belanja Total Dalam APBD	15,15%	0,96%	14,94%	1,08%	8,69%		
		Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD	23,27%	1,61%	1,02%	0,98%	25,21%		
		Assets Management	Ada	Ada	0,83%	Ada	Ada		
		Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	5,38%	0,37%	Ada	6,11%	2,37%		

Tabel 2.44
Capaian Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020-2024

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja					Sumber Data	Ket
			2020	2021	2022	2023	2024		
36	Transparansi dan Partisipasi Publik	Informasi Tentang Sumber Daya Yang Tersedia Untuk Pelayanan (Information On Resources Available To Frontline Service Delivery Units)	93,68%	95,09%	8,56%	95,26%	91,08%		
		Akses Publik Terhadap Informasi Keuangan Daerah (Public Acces To Fiscal Information)	33,33%	83,33%	91,39%	83,33%	83,33%		

Sumber: LPPD Kabupaten Bangka Selatan 2020-2024

2.5 GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mendefinisikan keuangan daerah sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Analisis pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan fungsi pemerintahan termasuk kegiatan pembangunan. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah dapat terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan daerah berkaitan erat dengan sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dengan ruang lingkup meliputi kebijakan keuangan daerah pada pengelolaan pendapatan daerah, pengelolaan belanja daerah dan pengelolaan pembiayaan daerah sehingga dapat membiayai strategi pembangunan melalui program dan kegiatan sesuai dengan visi dan misi kepala daerah terpilih.

A. KINERJA KEUANGAN DAERAH MASA LALU

Analisis terhadap kinerja keuangan periode sebelumnya merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan dalam memproyeksikan perencanaan pembangunan daerah di masa mendatang, khususnya dalam memproyeksikan target kinerja keuangan periode mendatang. Berdasarkan hasil analisis kinerja keuangan tahun sebelumnya, dapat diketahui berapa rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah, yang dapat dijadikan ukuran dalam penentuan target keuangan daerah.

Kinerja Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan tahun 2021-2026 ditujukan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah, mengalokasikan belanja daerah secara efektif dan efisien serta mengalokasikan dana pada pembiayaan untuk menutup defisit anggaran. Struktur APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dalam hal pendapatan daerah lebih kecil dari belanja daerah (anggaran defisit), sumber-sumber pembiayaan untuk menutupnya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, penggunaan cadangan, penerimaan pinjaman, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan

piutang. Sementara itu, jika pendapatan lebih besar dari dari belanja daerah (anggaran surplus), maka penggunaan surplus diutamakan untuk pembayaran pokok utang, investasi, pemberian pinjaman dan pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.

Berdasarkan realisasi pendapatannya, total pendapatan daerah di Kabupaten Bangka Selatan dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan besaran yang fluktuatif, yang ditunjukkan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,30 persen per tahun. Pada tahun 2020, total pendapatan daerah di Kabupaten Bangka Selatan tercatat Rp.743.795.776.513,18 dan berfluktuasi hingga tahun 2024 dengan besaran Rp.896.190.230.131,80 Sementara itu, total belanja tercatat sebesar Rp.791.089.295.192,00 meningkat menjadi sebesar Rp.948.537.967.087,00 pada tahun 2024. Selanjutnya dilihat dari pembiayaan daerah, besaran pembiayaan netto di Kabupaten Bangka Selatan tercatat menunjukkan besaran fluktuatif yang ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan 562,51 persen per tahun. Pada tahun 2020, besaran pembiayaan netto Rp. 54.459.271.530,39 yang kemudian besarnya menjadi Rp 56.959.271.530,39. pada tahun 2024. Tabel Realisasi APBD Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 2.47
Realisasi APBD Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PENDAPATAN					
	A. Pendapatan Asli Daerah	50.213.605.545,44	63.333.020.971,49	60.968.988.332,34	69.429.607.118,47	68.054.717.103,80
	B. Pendapatan Transfer	662.439.138.232,74	781.628.650.491,60	942.148.611.546,00	981.814.465.534,00	820.363.789.572,00
	C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	31.143.032.735,00	33.849.377.389,00	24.034.034.316,00	8.903.163.708,00	7.771.723.456,00
	JUMLAH PENDAPATAN	743.795.776.513,18	878.811.048.852,09	1.027.151.634.194,34	1.060.147.236.360,47	896.190.230.131,80
2	BELANJA					
	A. Belanja Operasi	578.246.981.871,00	537.006.640.809,00	624.800.306.389,20	758.535.186.656,00	730.042.410.369,00
	B. Belanja Modal	152.883.416.249,00	149.560.776.358,00	196.394.636.110,00	278.143.940.329,91	110.550.018.362,00
	C. Belanja Tak Terduga	8.199.716.919,00	16.269.280.948,00	3.356.746.340,00	3.541.091.000,00	907.170.000,00
	D. Belanja Transfer	51.759.180.153,00	109.142.992.256,00	107.591.405.653,00	122.572.588.771,00	107.038.368.356,00
	JUMLAH BELANJA	791.089.295.192,00	811.979.690.371,00	932.143.094.492,20	1.162.792.806.756,91	948.537.967.087,00
	SURPLUS/DEFISIT	(47.293.518.678,82)	66.831.358.481,09	95.008.539.702,14	(102.645.570.396,44)	(52.347.736.955,20)
3	PEMBIAYAAN					
	A. Penerimaan Pembiayaan	50.224.209.422,42	2.680.690.743,60	69.293.702.828,00	162.302.242.530,83	56.959.271.530,39
	B. Pengeluaran Pembiayaan	-	-	2.000.000.000,00	4.000.000.000,00	2.500.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	50.224.209.422,42	2.680.690.743,60	67.293.702.828,00	158.302.242.530,83	54.459.271.530,39
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN(SILPA)	2.930.690.743,60	69.512.049.224,69	162.302.242.530,14	55.656.672.134,39	2.111.534.575,19

Sumber: Badan Keuangan Daerah, Bappelitbangda (data diolah), 2024

Kinerja Pelaksanaan Pendapatan Daerah. Dalam rentang waktu tahun 2020 hingga 2024, komponen pendapatan transfer memiliki komposisi yang paling besar dibandingkan dengan komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan lain-lain pendapatan yang sah. Berdasarkan rata-rata kontribusinya, pendapatan transfer memiliki rata-rata kontribusi sebesar 91,26 persen dari total pendapatan Kabupaten Bangka Selatan, sementara rata-rata kontribusi PAD tercatat sebesar 6,40 persen, dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar 2,35 persen. Selanjutnya, berdasarkan rata-rata pertumbuhannya, komponen PAD memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 0,42 persen. Sama halnya dengan komponen PAD perkembangan pendapatan transfer juga menunjukkan besaran fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,43 persen per tahun. Sementara itu, komponen lain-lain pendapatan yang sah tercatat menunjukkan kecenderungan menurun yang ditandai dengan rata-rata penurunan sebesar 27,15 persen.

Pada tahun 2020 besaran PAD Kabupaten Bangka Selatan sebesar Rp 50.213.605.545,44 yang kemudian berfluktuasi menjadi Rp 68.968.988.332,34 pada tahun 2024. Dilihat dari komponen pembentuknya, seluruh komponen pembentuk PAD menunjukkan kecenderungan meningkat. Pendapatan Pajak Daerah menunjukkan rata-rata pertumbuhan tertinggi kedua dibandingkan tiga komponen PAD lainnya, yakni dengan besaran 10,43 persen per tahun. Pada tahun 2020, komponen pendapatan ini tercatat sebesar Rp 19.304.657.505,00 dan berfluktuasi pada tahun 2024 menjadi Rp 27.346.660.275,00. Komponen pendapatan retribusi daerah memiliki penurunan sebesar 12,46 persen per tahun sekaligus menjadi komponen PAD dengan rata-rata pertumbuhan terendah dalam lima tahun terakhir, pada tahun 2020 komponen pendapatan ini tercatat sebesar Rp 14.205.782.347,34 dan berfluktuasi menjadi Rp 5.329.897.716,00 di tahun 2024.

Selanjutnya, komponen pendapatan hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan menunjukkan rata-rata pertumbuhan sebesar 10,09 persen per tahun. Komponen dengan rata-rata pertumbuhan tertinggi ketiga dalam struktur PAD Kabupaten Bangka Selatan ini tercatat sebesar Rp 4.221.759.899,10 di tahun 2020 dan bertumbuh menjadi Rp 6.620.277.861,36 di tahun 2024. Terakhir, komponen lain-lain PAD yang sah tercatat memiliki jumlah nominal terbesar dalam struktur APBD Kabupaten Bangka Selatan, yakni sebesar Rp 12.481.405.794,00 di tahun 2018 dan menunjukkan trend fluktuatif sampai tahun 2024 menjadi Rp 5.757.412.849,1 atau dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 35,90 persen per tahun sekaligus menjadi komponen dengan rata-rata pertumbuhan tertinggi dalam struktur PAD Kabupaten Bangka Selatan. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah Kabupaten Bangka Selatan

dalam kurun waktu tahun 2020-2024 menunjukkan peningkatan dari sebesar Rp. 743.795.776.513,18 pada tahun 2020, menjadi Rp. 829.191.650.693,52 pada tahun 2024. Secara rinci perkembangan pendapatan daerah per tahun tercantum pada gambar berikut.



Sumber: Badan Keuangan Daerah, Bappelitbangda (data diolah), 2024

Gambar 2.38
Perkembangan Realisasi Pendapatan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020 – 2024

Perkembangan proporsi unsur-unsur pendapatan daerah terhadap total pendapatan daerah tercantum pada gambar berikut.



Sumber: Badan Keuangan Daerah 2024, Bappelitbangda (diolah kembali)

Kinerja Pelaksanaan Belanja Daerah. Belanja Daerah merupakan kewajiban Pemerintah Daerah sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja yang yang boleh dibayarkan. Kebijakan pengelolaan belanja daerah dimaksudkan untuk menjamin agar seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dan prioritas pembangunan yang dialokasikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dapat dibiayai dengan APBD. Disamping itu kebijakan pengelolaan belanja daerah yang efisien, efektif, transparan, akuntabel serta meningkatkan penetapan prioritas alokasi anggaran menjadi fokus utama dalam era keterbatasan sumber pendanaan saat ini.

Kebijakan belanja daerah pada dasarnya merupakan upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti peningkatan kualitas pelayanan dan pemenuhan kebutuhan prasarana pendidikan, kesehatan serta prasarana pendukung peningkatan perekonomian masyarakat. Sesuai dengan Mandatory Spending, diamanatkan untuk pemenuhan belanja Pendidikan 20%, belanja Kesehatan 10%, belanja Alokasi Dana Desa 10% dan belanja Infrastruktur sebesar 25%, oleh karenanya Pemerintah Daerah tahun ketahun terus berupaya untuk memenuhi dan mempertahankan sesuai dengan ketentuan tersebut. Perkembangan belanja daerah Kabupaten Bangka Selatan menunjukkan angka yang fluktuatif dalam kurun waktu tahun 2020-2024. Pada tahun 2021 total Belanja Daerah sebesar Rp. 739,330,115,039.00, meningkat menjadi sebesar Rp. 948.537.967.087,00 pada tahun 2024.

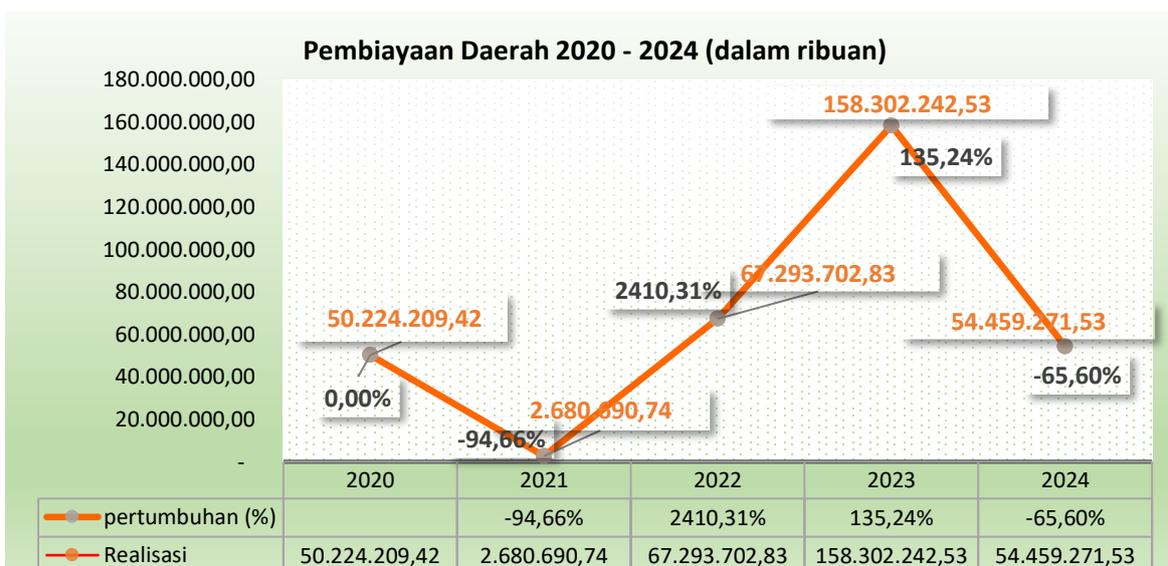


Sumber: Badan Keuangan Daerah, 2024, Bappeda (diolah)

Gambar 2.39
Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bangka Selatan 2020-2024

Pembiayaan Daerah disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Adapun pembiayaan daerah tersebut terdiri dari:

1. Penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu; Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; Penerimaan Piutang Daerah dan Penerimaan Kembali Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.
2. Penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu; Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; Penerimaan Piutang Daerah dan Penerimaan Kembali Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.



Sumber: Badan Keuangan Daerah, Bappelitbangda (data diolah), 2024

Gambar 2.40

Perkembangan Realisasi Pembiayaan Kabupaten Bangka Selatan 2020-2024

Penerimaan masih didominasi oleh SiLPA tahun sebelumnya, namun besarnya SiLPA tahun sebelumnya perkembangannya fluktuatif cenderung mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa penyusunan perencanaan pembangunan di Bangka Selatan sudah baik, namun harus lebih ditingkatkan agar besaran SiLPA setiap tahun dapat terus mengalami penurunan. Beberapa komponen pembiayaan lain masih cukup rendah meskipun cukup potensial yaitu penyertaan modal investasi. Berikut disajikan hasil analisis sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah kurun waktu tahun anggaran 2020-2024.

Analisis Neraca Daerah. Aset, kewajiban, dan ekuitas dana merupakan rekening utama yang masih dapat dirinci lagi menjadi sub rekening sampai level rincian obyek. Substansi dari Neraca Daerah adalah memberikan informasi kepada manajemen pemerintahan daerah mengenai likuiditas keuangan, memberikan informasi mengenai fleksibilitas keuangan dan menciptakan tata pemerintahan yang baik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2001, Neraca Daerah adalah neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah. Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumberdaya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Kondisi Aset daerah juga memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang.

Tabel 2.48
Neraca Daerah Tahun 2020-2024

Uraian	TAHUN ANGGARAN				
	2020	2021	2022	2023	2024
ASET	1.661.801.966.324,83	1.756.921.999.668,65	1.961.705.990.313,18	2.016.657.669.117,27	1.989.700.560.533,66
Aset Lancar	49.752.771.994,43	119.907.475.077,57	227.476.844.124,93	102.511.144.568,65	53.267.981.712,20
Investasi Jangka Panjang	34.727.307.685,00	34.727.307.685,00	36.727.307.685,00	40.727.307.685,00	43.227.307.685,00
Aset Tetap	1.529.962.549.154,18	1.577.467.413.158,38	1.673.153.685.452,87	1.848.579.426.411,56	1.870.016.834.506,42
Aset Lainnya	47.359.337.491,22	24.819.803.747,70	24.348.153.050,38	24.839.790.452,06	23.188.436.630,04
JUMLAH ASET	1.660.574.658.639,83	1.755.694.691.983,65	1.961.705.990.313,18	2.016.657.669.117,27	1.989.700.560.533,66
KEWAJIBAN	22.824.350.197,44	22.824.350.197,44	22.824.350.197,44	22.824.350.197,44	90.326.124.754,00
Kewajiban Jangka Pendek	33.208.439.512,33	26.544.063.609,23	21.230.161.937,34	22.824.350.197,44	90.326.124.754,00
Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	33.208.439.512,33	26.544.063.609,23	21.230.161.937,34	22.824.350.197,44	90.326.124.754,00
EKUITAS	1.628.593.526.812,75	1.730.377.936.059,82	1.940.475.828.375,84	2.035.244.580.919,83	1.899.374.435.779,54
Ekuitas	1.628.593.526.812,75	1.730.377.936.059,82	1.940.475.828.375,84	2.035.244.580.919,83	1.899.374.435.779,54
JUMLAH EKUITAS	1.628.593.526.812,75	1.730.377.936.059,82	1.940.475.828.375,84	2.035.244.580.919,83	1.899.374.435.779,54
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1.661.801.966.325,08	1.756.921.999.669,05	1.961.705.990.313,18	2.058.068.931.117,27	1.989.700.560.533,54

Sumber: Badan Keuangan Daerah, Bappelitbangda (data diolah), 2024

Untuk memahami kemampuan keuangan Kabupaten Bangka Selatan dapat dilakukan berdasarkan analisis rasio keuangan. Secara konseptual macam analisis rasio keuangan yang dapat digunakan, meliputi rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas.

1. Rasio likuiditas

Rasio Likuiditas bertujuan untuk melihat kemampuan organisasi dalam melunasi hutangnya pada saat jatuh tempo. Semakin tinggi rasio likuiditas berarti semakin tinggi kemampuan organisasi dalam melunasi hutangnya. Analisis rasio likuiditas dapat dilakukan berdasarkan rasio lancar, rasio quick, dan rasio kas. Ketiga rasio sama-sama bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah dalam membayar hutang lancarnya pada saat jatuh tempo, tetapi rasio kas lebih menunjukkan kemampuan riil berdasarkan kas yang dimiliki.

2. Rasio Solvabilitas

Analisis solvabilitas bertujuan untuk melihat kemampuan organisasi dalam melunasi seluruh hutangnya, baik hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang. Analisis solvabilitas ini secara tidak langsung juga dapat dilakukan melalui rasio leverage, dimana rasio leverage ini bertujuan untuk melihat sejauh mana organisasi menggunakan dana pinjaman (hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang) dalam menjalankan roda organisasinya. Analisis rasio solvabilitas dapat dihitung berdasarkan perbandingan total hutang dengan total aset, dan atau total hutang dengan modal. Kedua rasio ini sama-sama bertujuan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi seluruh kewajibannya seandainya seluruh aset dan atau modal digunakan.

3. Rasio Profitabilitas

Analisis rasio profitabilitas bertujuan menilai kemampuan menghasilkan laba. Karena organisasi pemerintah daerah tidak bertujuan laba maka rasio ini menjadi tidak relevan dilakukan. Karena rasio profitabilitas tidak relevan dilakukan pada organisasi pemerintahan, maka dalam pembahasan berikutnya, analisis rasio keuangan yang digunakan dalam menilai kemampuan keuangan Kabupaten Bangka Selatan hanya berdasarkan rasio likuiditas dan rasio solvabilitas saja.

Tabel 2.49
Analisis Rasio Likuiditas dan Rasio Solvabilitas
Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020 – 2024

NO	Uraian	TAHUN ANGGARAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
A	Rasio Likuiditas					
	Aset lancar	49.752.771.994,43	119.907.475.077,57	227.476.844.124,93	102.511.144.568,65	53.267.981.712,20
	Persediaan	27.589.636.309,76	19.521.636.506,66	36.183.717.022,00	24.674.163.565,62	23.177.583.420,01
	Kewajiban Jangka Pendek	33.208.439.512,33	26.544.063.609,23	2.123.016.193,34	22.824.350.197,44	90.326.124.754,12
1	Rasio lancar	1,50	4,52	107,15	4,49	0,59
2	Rasio Quick	0,67	3,78	90,10	3,41	0,33
B	Rasio Solvabilitas					
	Total Aset	1.660.574.658.639,83	1.755.694.691.983,65	1.961.705.990.313,18	2.058.068.931.117,27	1.989.700.560.533,66
	Total Hutang	33.208.439.512,33	26.544.063.609,23	21.231.161.937,34	22.824.350.197,44	90.326.124.754,12
	Total Ekuitas	1.628.593.526.812,75	1.730.377.936.059,82	1.940.475.828.375,84	2.035.244.580.919,83	1.899.374.435.779,54
1	DAR	0,020	0,015	0,011	0,011	0,045
2	DER	0,020	0,015	0,011	0,011	0,048

Sumber : BAPPELITBANGDA (data diolah dari Neraca Daerah), 2024

Rasio likuiditas dianalisis menggunakan analisis rasio lancar (current ratio) dan rasio cepat (quick ratio). Rasio lancar dihitung dengan membandingkan antara aset lancar dengan kewajiban lancar. Sedangkan, rasio cepat dihitung dengan membandingkan antara aset lancar dikurangi persediaan dengan kewajiban lancar. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa baik rasio lancar maupun rasio cepat Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan positif dan cenderung meningkat. Kedua rasio tersebut hanya pada tahun 2020, rasio cepat dibawah 1 yang artinya kondisi keuangan pada tahun tersebut mengalami tekanan. Sementara pada tahun 2021 dan 2022 kinerja kedua rasio tersebut menunjukkan tidak adanya gejala tekanan keuangan (financial distress) yang serius dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, dan cenderung meningkat, karena memang jika dilihat dari informasi kewajiban jangka pendek Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan cukup hati-hati dan tetap menjaga kondisi arus kasnya.

Sedangkan, analisis rasio solvabilitas dilakukan dengan menghitung analisis rasio Debt to Assets Ratio (DAR) dan Debt to Equity Ratio (DER). DAR bertujuan untuk melihat dan menganalisis kemampuan aset dalam memenuhi kewajiban entitas di masa mendatang. Sedangkan, DER bertujuan untuk melihat dan menganalisis komposisi sumber pendanaan entitas dan kemampuan ekuitas dalam memenuhi kewajiban entitas di masa mendatang. Hasil analisis DAR dan DER menunjukkan nilai di sekitar 1%, bahkan di bawah 1 per 100, yang menggambarkan bahwa aset sangat mampu untuk memenuhi dan menutup kewajiban di masa mendatang, serta komposisi sumber pendanaan entitas hampir seluruhnya dari

ekuitas. Secara keseluruhan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, dilihat dari kinerja Neraca Daerah, sangat sehat.

B. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan Keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah diatur oleh Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya ketentuan Pasal 293 dan Pasal 330 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan amanat untuk mengatur Pengelolaan Keuangan Daerah dengan sebuah peraturan pemerintah. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Keuangan Daerah selain diatur dengan Peraturan Pemerintah juga mengikuti Peraturan Menteri Keuangan. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing daerah yang ditetapkan setiap tahun disinkronkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dikelola secara otomatis. Selain itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah seperti yang disebut di atas didanai dari dana atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang merupakan pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran. Lebih lanjut, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rencana keuangan tahunan ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

Selain mendasarkan kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah juga mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja. Belanja Daerah adalah kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pengelompokan belanja daerah dibedakan dalam belanja langsung dan belanja tidak langsung. Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, sedang belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Pemerintah daerah Kabupaten Bangka Selatan diberikan kewenangan untuk mengelola secara luas Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten. Belanja daerah Kabupaten Bangka Selatan merupakan wujud pemerintah daerah dalam mengeluarkan uangnya untuk pelayanan publik yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh komponen masyarakat tanpa diskriminasi. Selanjutnya proporsi pengalokasian anggaran belanja daerah Kabupaten Bangka Selatan juga merupakan cerminan dari kebijakan anggaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan dan berkontribusi langsung terhadap pencapaian visi dan misi daerah sebagaimana tertera dalam dokumen perencanaan.

Adapun proporsi anggaran belanja Daerah Kabupaten Bangka Selatan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (Tahun 2021-2024) dapat dilihat pada tabel berikut:

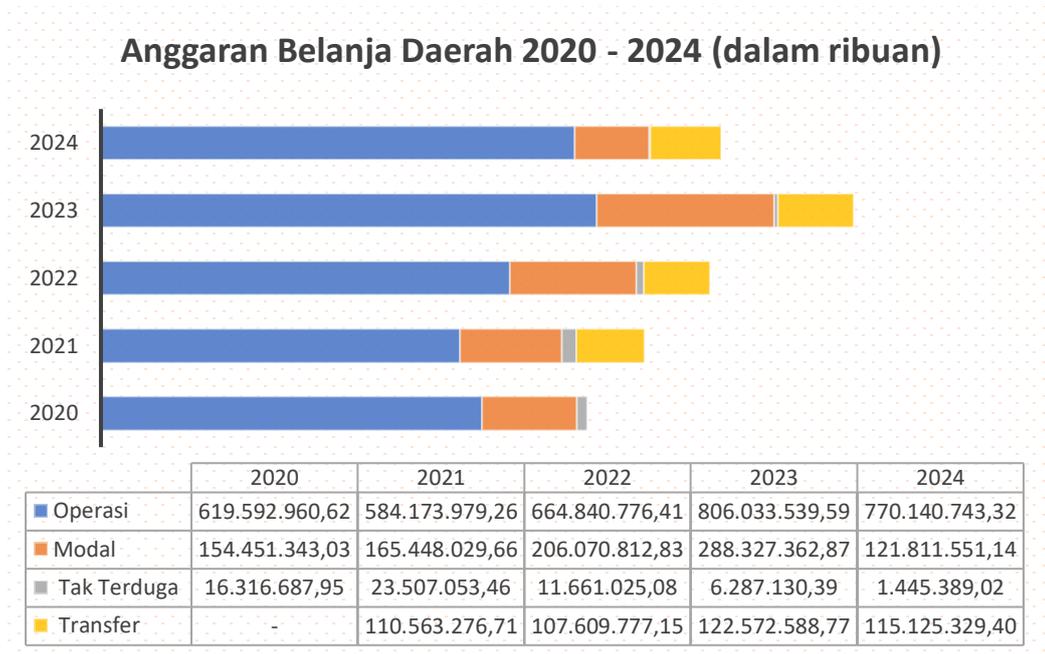
Tabel 2.50
Proporsi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020-2024

(dalam rupiah)

URAIAN	ANGGARAN									
	2020	% thd Total Anggaran	2021	% thd Total Anggaran	2022	% thd Total Anggaran	2023	% thd Total Anggaran	2024	% thd Total Anggaran
BELANJA	790.360.991.591,00		883.692.339.078,11		990.182.391.476,00		1.223.220.621.622,00		1.008.523.012.877,00	
<i>Belanja Operasi</i>	619.592.960.619,00	78,39	584.173.979.257,59	66,11	664.840.776.409,00	67,14	806.033.539.593,00	65,89	770.140.743.316,00	76,36
Belanja Pegawai	409.063.483.336,00	51,76	326.586.460.637,54	36,96	347.438.384.731,00	35,09	363.829.761.829,00	29,74	404.852.081.817,70	40,14
Belanja Barang dan Jasa	174.496.367.259,00	22,08	249.100.868.824,05	28,19	295.783.324.678,00	29,87	404.108.832.166,00	33,04	319.538.586.398,30	31,68
Belanja Subsidi	-		26.400.000,00		35.000.000,00		-		-	
Belanja Hibah	36.033.110.024,00	4,56	8.460.249.796,00	0,96	19.687.275.000,00	1,99	36.565.035.598,00	2,99	43.896.274.260,00	4,35
Belanja Bantuan Sosial	-		-		1.896.792.000,00	0,19	1.529.910.000,00	0,13	1.853.800.840,00	0,18
<i>Belanja Modal</i>	154.451.343.025,00	19,54	165.448.029.656,00	18,72	206.070.812.832,00	20,81	288.327.362.871,00	23,57	121.811.551.135,00	12,08
Belanja Modal Tanah	622.000.000,00	0,08	730.000.000,00	0,08	930.000.000,00	0,09	1.930.000.000,00	0,16	-	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.209.938.489,00	5,59	28.417.661.367,00	3,22	31.895.766.188,00	3,22	46.847.087.722,00	3,83	18.886.562.597,00	1,87
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	47.566.153.450,00	6,02	56.998.157.970,00	6,45	44.323.721.117,00	4,48	89.428.013.092,00	7,31	37.629.392.000,00	3,73
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	60.518.720.286,00	7,66	70.088.815.999,00	7,93	113.782.582.762,00	11,49	146.718.735.757,00	11,99	58.670.433.935,00	5,82
Belanja Modal Aset Tetap lainnya	1.534.530.800,00	0,19	9.213.394.320,00	1,04	15.138.742.765,00	1,53	3.403.526.300,00	0,28	6.625.162.603,00	0,66
<i>Belanja Tak Terduga</i>	16.316.687.947,00	2,06	23.507.053.457,52	2,66	11.661.025.082,00	1,18	6.287.130.387,00	0,51	1.445.389.024,00	0,14
Belanja Tak Terduga	16.316.687.947,00	2,06	23.507.053.457,52	2,66	11.661.025.082,00	1,18	6.287.130.387,00	0,51	1.445.389.024,00	0,14
<i>Belanja Transfer</i>	-		110.563.276.707,00	12,51	107.609.777.153,00	10,87	122.572.588.771,00	10,02	115.125.329.402,00	11,42
Belanja Bagi Hasil	-		3.505.911.007,00	0,40	5.426.461.431,00	0,55	3.720.625.380,00	0,30	4.234.600.472,00	0,42
Belanja Bantuan Keuangan	-		107.057.365.700,00	12,11	102.183.315.722,00	10,32	118.851.963.391,00	9,72	110.890.728.930,00	11,00
<i>Jumlah Belanja</i>	790.360.991.591,00		883.692.339.078,11		990.182.391.476,00		1.223.220.621.622,00		1.008.523.012.877,00	

Sumber: Badan Keuangan Daerah, Bappelitbangda, 2024 (data diolah)

Selanjutnya untuk grafik perkembangan proporsi anggaran belanja Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.41
Grafik Perkembangan Proporsi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020-2024



Sumber : Badan Keuangan Daerah, Bappelitbangda, 2024 (data diolah)

Gambar 2.42
Persentase Proporsi Belanja Daerah tahun 2020-2025

Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur. Analisis Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kebutuhan anggaran untuk operasional aparatur dan kebijakan apa yang perlu dilakukan untuk melakukan efisiensi dan efektivitas aparatur.

Tabel 2.51
Realisasi Belanja Aparatur
Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2019-2023

TAHUN	APBD	ANGGARAN BELANJA APARATUR	REALISASI BELANJA APARATUR	PERSENTASE REALISASI BELANJA APARATUR TERHADAP APBD (%)
2019	976.798.578.828,00	381.796.669.088,00	367.704.717.760,00	37,64
2020	997.723.208.945,00	402.971.059.156,00	389.964.800.414,00	39,09
2021	1.578.011.882.572,68	326.586.460.637,54	311.870.850.184,00	19,76
2022	1.077.793.285.730,00	347.438.384.731,00	338.157.936.391,00	31,38
2023	1.079.793.285.730,00	363.829.761.829,00	342.769.649.977,00	31,74

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Bangka Selatan

Analisis Pembiayaan Daerah. Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah ketika terjadi defisit anggaran. Dalam penganggarannya, Pembiayaan Daerah dibagi dalam 2 bagian yaitu Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Sumber pembiayaan Kabupaten Bangka Selatan sebagian besar berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu yaitu dengan Optimalisasi sumber tetap pendapatan daerah Kabupaten Bangka Selatan. Analisis Pembiayaan Daerah bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan pendanaan pembangunan daerah diluar kapasitas pendapatan daerah serta kewajiban-kewajiban yang menjadi beban pemerintah daerah. Analisis pembiayaan daerah tidak dapat terlepas dari kondisi defisit yang terjadi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sehingga diperlukan pendanaan dari penerimaan pembiayaan daerah. Defisit riil dalam APBD terjadi apabila pendapatan daerah dikurangi dengan belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah menimbulkan adanya defisit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Tabel 2.52
Surplus/Defisit Riil dan Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020-2024

No	Uraian	T.A. 2020	T.A. 2021	T.A. 2022	T.A. 2023	T.A. 2024
A	Realisasi Pendapatan Daerah	743.795.776.513,18	878.811.048.852,09	1.027.115.634.194,34	1.061.449.835.756,47	896.190.230.131,80
	Dikurangi realisasi					
B	Realisasi Belanja Daerah	791.089.295.192,00	811.979.590.371,00	932.143.094.492,20	1.162.792.806.756,91	948.537.967.087,00
C	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	-	2.000.000.000,00	4.000.000.000,00	2.500.000.000,00
	Surplus/(Defisit) Riil	(47.293.518.678,82)	66.831.458.481,09	92.972.539.702,14	(105.342.971.000,44)	(54.847.736.955,20)
D	Penerimaan Pembiayaan Daerah (Komposisi Penutup Defisit)	50.224.209.422,42	2.680.690.743,60	69.293.702.828,69	162.302.242.530,83	56.959.271.530,39
	Silpa TA Sebelumnya	50.224.209.422,42	2.680.690.743,60	69.293.702.828,69	162.302.242.530,83	56.959.271.530,39
	Silpa Anggaran Tahun Berkenaan	2.930.690.743,60	69.512.149.224,69	162.266.242.530,83	56.959.271.530,39	2.111.534.575,19

Sumber : Badan Keuangan Daerah, Bappelitbangda, 2024 (data diolah)

Besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada akhir tahun menjadi salah satu sumber pembiayaan pada tahun berikutnya untuk mendanai belanja daerah. Rasio Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap total belanja daerah diharapkan akan semakin turun mengingat tingginya SilPA yang terjadi bisa menunjukkan rendahnya penyerapan belanja daerah. Namun demikian, besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) juga disebabkan adanya dana dari pusat yang bersifat earmark dan tidak dapat terserap pada akhir tahun anggaran. Berdasarkan tabel Surplus/Defisit Riil dan Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020-2024 yang sudah ditampilkan sebelumnya, terlihat bahwa jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) fluktuatif dan cenderung menurun dimana pada tahun 2020 sebesar Rp 2.930.690.743,60 dan pada tahun 2021 sebesar Rp. 65.512.149.224,69 Selanjutnya pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 yaitu menjadi Rp 162.266.242.530,83.

C. KERANGKA PENDANAAN

Proyeksi Penerimaan dan Pendanaan Daerah. Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya. Perhitungan kemampuan anggaran Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan berkaitan erat dengan kapasitas daerah untuk melakukan pembangunan dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

Dalam upaya untuk mewujudkan pemerataan wilayah, kegiatan pembangunan di kabupaten ini dilakukan secara masif di berbagai bidang, pelaksanaan pembangunan tersebut akan sangat bergantung pada kemampuan penganggaran daerah. Perhitungan proyeksi APBD Kabupaten Bangka Selatan disusun berdasarkan histori penerimaan daerah dan belanja daerah dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024. Pada komponen penerimaan, proyeksi disusun dengan memperhatikan kebijakan penganggaran daerah maupun nasional. Proyeksi penerimaan daerah ini juga memperhitungkan perubahan besaran penerimaan daerah yang dipengaruhi oleh besaran dana perimbangan yang merupakan kewenangan pusat, dan sumber-sumber pendapatan daerah yang berubah karena adanya perubahan kebijakan pajak dan retribusi yang sifatnya dinamis. Kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai program kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan (2025-2029) dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Proyeksi Kerangka Pendanaan Tahun 2026-2030

Tabel 2.53

PROYEKSI KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026-2030

(dalam rupiah)

URAIAN	2024	APBD 2025	PROYEKSI				
	Realisasi		2026	2027	2028	2029	2030
PENDAPATAN - LRA	896.190.230.131,80	880.675.557.615,00	871.723.212.270,90	873.335.784.076,82	874.980.607.318,85	876.658.327.025,73	878.369.601.126,75
Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA	68.054.717.103,80	100.722.354.707,00	91.253.307.457,90	92.865.879.263,82	94.510.702.505,85	96.188.422.212,73	97.899.696.313,75
Pendapatan Pajak Daerah (PAD) - LRA	27.346.211.275,00	59.393.844.067,00	49.310.720.948,34	50.296.935.367,31	51.302.874.074,65	52.328.931.556,15	53.375.510.187,27
Pendapatan Restribusi Daerah (PAD) - LRA	5.680.300.711,00	30.703.793.478,00	31.317.869.347,56	31.944.226.734,51	32.583.111.269,20	33.234.773.494,59	33.899.468.964,48
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Restribusi Daerah (PAD) - LRA	6.620.277.861,36	6.805.082.162,00	6.805.082.162,00	6.805.082.162,00	6.805.082.162,00	6.805.082.162,00	6.805.082.162,00
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	28.407.927.256,44	3.819.635.000,00	3.819.635.000,00	3.819.635.000,00	3.819.635.000,00	3.819.635.000,00	3.819.635.000,00
Pendapatan Transfer - LRA	820.363.789.572,00	768.368.916.456,00	776.240.849.581,00	776.240.849.581,00	776.240.849.581,00	776.240.849.581,00	776.240.849.581,00
<i>Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Pusat - LRA</i>	<i>774.694.086.991,00</i>	<i>730.571.147.000,00</i>	<i>730.571.147.000,00</i>	<i>730.571.147.000,00</i>	<i>730.571.147.000,00</i>	<i>730.571.147.000,00</i>	<i>730.571.147.000,00</i>
<i>Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA</i>	<i>45.669.702.581,00</i>	<i>37.797.769.456,00</i>	<i>45.669.702.581,00</i>	<i>45.669.702.581,00</i>	<i>45.669.702.581,00</i>	<i>45.669.702.581,00</i>	<i>45.669.702.581,00</i>
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LRA	7.771.723.456,00	11.584.286.452,00	4.229.055.232,00	4.229.055.232,00	4.229.055.232,00	4.229.055.232,00	4.229.055.232,00
Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan	7.771.723.456,00	11.584.286.452,00	4.229.055.232,00	4.229.055.232,00	4.229.055.232,00	4.229.055.232,00	4.229.055.232,00
Jumlah Pendapatan	896.190.230.131,80	880.675.557.615,00	871.723.212.270,90	873.335.784.076,82	874.980.607.318,85	876.658.327.025,73	878.369.601.126,75
BELANJA	948.537.967.087,00	936.208.997.198,51	937.251.926.851,59	937.159.840.625,91	937.067.772.852,77	936.975.723.528,47	936.883.692.649,31
Belanja Operasi	730.042.410.369,00	756.545.284.331,51	757.588.213.984,59	757.496.127.758,91	757.404.059.985,77	757.312.010.661,47	757.219.979.782,31
Belanja Pegawai	396.151.475.267,00	459.642.613.596,51	459.550.508.914,59	459.458.422.688,91	459.366.354.915,77	459.274.305.591,47	459.182.274.712,31
Belanja Barang dan Jasa	289.264.600.070,00	288.129.565.735,00	289.264.600.070,00	289.264.600.070,00	289.264.600.070,00	289.264.600.070,00	289.264.600.070,00
Belanja Subsidi							
Belanja Hibah	42.776.596.432,00	6.440.605.000,00	6.440.605.000,00	6.440.605.000,00	6.440.605.000,00	6.440.605.000,00	6.440.605.000,00
Belanja Bantuan Sosial	1.849.738.600,00	2.332.500.000,00	2.332.500.000,00	2.332.500.000,00	2.332.500.000,00	2.332.500.000,00	2.332.500.000,00
Belanja Modal	110.550.018.362,00	65.566.477.500,00	65.566.477.500,00	65.566.477.500,00	65.566.477.500,00	65.566.477.500,00	65.566.477.500,00
Belanja Modal Tanah	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.299.199.066,00	22.839.720.500,00	22.839.720.500,00	22.839.720.500,00	22.839.720.500,00	22.839.720.500,00	22.839.720.500,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27.428.610.730,00	17.522.548.000,00	17.522.548.000,00	17.522.548.000,00	17.522.548.000,00	17.522.548.000,00	17.522.548.000,00
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	57.695.105.636,00	25.204.209.000,00	25.204.209.000,00	25.204.209.000,00	25.204.209.000,00	25.204.209.000,00	25.204.209.000,00
Belanja Modal Aset Tetap lainnya	7.127.102.930,00	-	-	-	-	-	-
Belanja Tak Terduga	907.170.000,00	2.095.000.000,00	2.095.000.000,00	2.095.000.000,00	2.095.000.000,00	2.095.000.000,00	2.095.000.000,00
Belanja Tak Terduga	907.170.000,00	2.095.000.000,00	2.095.000.000,00	2.095.000.000,00	2.095.000.000,00	2.095.000.000,00	2.095.000.000,00
Belanja Transfer	107.038.368.356,00	112.002.235.367,00	112.002.235.367,00	112.002.235.367,00	112.002.235.367,00	112.002.235.367,00	112.002.235.367,00
Belanja Bagi Hasil	1.233.314.307,00	6.566.992.527,00	6.566.992.527,00	6.566.992.527,00	6.566.992.527,00	6.566.992.527,00	6.566.992.527,00
Belanja Bantuan Keuangan	105.805.054.049,00	105.435.242.840,00	105.435.242.840,00	105.435.242.840,00	105.435.242.840,00	105.435.242.840,00	105.435.242.840,00
Jumlah Belanja	948.537.967.087,00	936.208.997.198,51	937.251.926.851,59	937.159.840.625,91	937.067.772.852,77	936.975.723.528,47	936.883.692.649,31
SURPLUS/(DEFISIT)	(52.347.736.955,20)	(55.533.439.583,51)	(65.528.714.580,69)	(63.824.056.549,09)	(62.087.165.533,91)	(60.317.396.502,73)	(58.514.091.522,56)

2.6 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Analisa permasalahan dan isu strategis merupakan bagian penting pada tahapan dalam proses penyusunan perencanaan sebuah entitas atau organisasi. Pada tahapan analisa permasalahan dan isu strategis merupakan bagian dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2025-2029. Kemampuan analisa permasalahan dan identifikasi isu strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan. Analisa isu strategis merupakan simpul atau kondisi atau hal yang memiliki dampak signifikan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dalam penyusunan perencanaan. Antisipasi isu strategis memberikan antisipasi terhadap risiko yang ditimbulkan dalam pencapaian pembangunan yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Dalam menentukan data atau informasi yang akan dijadikan isu strategis dilakukan dengan memperhatikan kriteria, yakni kriteria penetapan isu-isu strategis mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan disesuaikan dengan kebutuhan daerah. 1) memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan Nasional; 2) merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah; 3) dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat; 4) memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah; 5) kemungkinan atau kemudahan untuk ditangani; dan 6) memiliki kesesuaian dengan Tema Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

A. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Permasalahan Pembangunan merupakan tantangan atau hambatan yang menghambat proses pembangunan suatu daerah dalam mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan. Penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Bangka Selatan dalam kurun waktu 2020-2024 telah terlaksana dengan cukup baik dan lancar dengan segala permasalahan yang dihadapi, namun demikian masih terdapat permasalahan dan tantangan dari berbagai dimensi pembangunan pada masa yang akan datang. Berbagai permasalahan yang dihadapi Kabupaten Bangka Selatan dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal yang terjadi sebagai dampak interaksi dan dinamika perkembangan berbagai sektor baik pada skala lokal kabupaten, provinsi maupun nasional. Berikut merupakan permasalahan pembangunan daerah pada Kabupaten Bangka Selatan yang terbagi menjadi 4 (empat) aspek yakni permasalahan pembangunan aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, aspek tata kelola pemerintahan serta aspek lingkungan dan geografi.

Permasalahan Pembangunan Aspek Geografi dan Lingkungan. Tantangan pertumbuhan penduduk dan laju pembangunan yang semakin meningkat, menuntut peningkatan pemanfaatan sumber daya alam untuk dieksploitasi dan konsumsi. Perubahan bentang alam dan alih fungsi tata guna lahan menjadi salah satu dampak dari semakin masifnya pemanfaatan ruang untuk aktivitas ekonomi masyarakat. Kondisi tersebut akan menyebabkan kerusakan lanskap, pencemaran lingkungan, serta degradasi lahan yang akhirnya akan menurunkan kualitas lingkungan. Terdapat 2 (dua) permasalahan utama aspek geografi dan lingkungan di Kabupaten Bangka Selatan yakni sebagai berikut:

Tingginya Resiko Bencana. Wilayah Kabupaten Bangka Selatan memiliki potensi kebencanaan yang tinggi, yaitu bencana banjir, banjir bandang, bencana cuaca ekstrim, banjir bandang, gelombang ekstrim dan abrasi, kekeringan dan bencana kebakaran hutan dan lahan. Frekuensi dan intensitas kejadian bencana seperti banjir, kebakaran, abrasi, dan kekeringan dipengaruhi oleh kerusakan dan pencemaran lingkungan serta dipengaruhi oleh fenomena perubahan iklim. Mitigasi dan adaptasi terhadap bencana menjadi upaya meminimasi potensi kerugian bencana. Tantangan adaptasi dan mitigasi kebencanaan di Kabupaten Bangka Selatan yakni belum optimalnya kapasitas masyarakat dan aparatur pemerintah dalam manajemen kebencanaan, serta masih terbatasnya akses informasi rawan bencana bagi masyarakat.

Rendahnya Kualitas Lingkungan Hidup. Kurangnya kepedulian terhadap kualitas lingkungan merupakan permasalahan yang cukup serius di Kabupaten Bangka Selatan. Kurangnya kesadaran masyarakat menjadi faktor utama kurangnya kepedulian terhadap kualitas lingkungan. Selain itu, prioritas ekonomi yang tinggi seringkali mengesampingkan kepentingan lingkungan. Fokus pada pertumbuhan ekonomi dan keuntungan seringkali mengorbankan kualitas lingkungan. Fenomena alih fungsi lahan yang terjadi di Kabupaten Bangka Selatan akibat alternatif pemanfaatan sumberdaya alam yang beragam menjadi salah satu masalah penyebab terjadinya kerusakan lingkungan. Berdasarkan data lahan kritis, diketahui seluas 31.232 Ha lahan di Kabupaten Bangka Selatan termasuk kedalam kategori kritis dan sangat kritis. Kondisi tersebut mengindikasikan masih tingginya kerusakan lahan di Kabupaten Bangka Selatan. Hal tersebut pula yang mengakibatkan nilai Indeks Kualitas Bangka Selatan hingga saat ini (2024) masih di kategori cukup (68,62). Disamping itu, kondisi timbulan sampah yang belum terkola masih cukup tinggi yakni

pada tahun 2024 sebanyak 9.393,84 (Ton/Tahun) sehingga dapat mempengaruhi kualitas lingkungan di Kabupaten Bangka Selatan.

Permasalahan Pembangunan Aspek Kesejahteraan Masyarakat. Kesejahteraan merupakan suatu tolak ukur dalam menentukan apakah suatu individu ataupun kelompok masyarakat berada pada kondisi yang sejahtera. Kesejahteraan dapat diindikasikan ketika kondisi kesehatan baik, perekonomian yang meningkat, tingkat pendidikan yang tinggi serta kualitas hidupnya yang layak. Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan dari *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang menjadi gambaran dari keberhasilan pemerintah dalam membangun perekonomian sebuah negara. Berdasarkan hasil analisis data eksisting pada bab sebelumnya dirumuskan beberapa permasalahan pokok pada aspek kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Bangka Selatan yaitu:

Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia. Aspek pembangunan manusia menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan. Tingginya kualitas sumber daya manusia akan berpengaruh terhadap ketersediaan modal manusia dalam mendorong produktivitas dan inovasi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Tidak hanya berpengaruh terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, ketersediaan sumber daya manusia yang unggul juga secara keseluruhan akan mempengaruhi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat terwujud pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Salah satu permasalahan aspek pembangunan manusia di Kabupaten Bangka Selatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yakni masih rendahnya kualitas sumber daya manusia yang ditandai dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia yang mencakup 3 (tiga) dimensi utama yakni kesehatan, pendidikan dan standar hidup Masyarakat. Meskipun kinerja ketiga dimensi tersebut pada beberapa tahun terakhir sudah menunjukkan hasil yang positif namun masih dibawah target nasional maupun provinsi. Salah satu komponen pada dimensi pendidikan yang masih menjadi perhatian yakni nilai rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah yang masih cukup rendah. Pada Tahun 2024 rata-rata lama sekolah (RLS) di Kabupaten Bangka Selatan sebesar 6,93 dengan nilai harapan lama sekolah (HLS) yakni 11,71. Kondisi tersebut mengindikasikan masih perlunya strategi pemerintah yang komprehensif dan terintegrasi untuk meningkatkan kualitas layanan Pendidikan terutama dalam meningkatkan peran Pendidikan Non-Formal, penyediaan sekolah vokasi dan Pendidikan Tinggi di Kabupaten Bangka Selatan.

Dimensi lain yang berkaitan dengan kondisi rendahnya kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Bangka Selatan yakni aspek kesehatan. Tingginya derajat Kesehatan Masyarakat merupakan salah satu fondasi penting dalam pembangunan. Kondisi kesehatan yang baik akan mendorong meningkatnya produktivitas, perbaikan kualitas hidup, dan potensi individu sebagai motor penggerak pembangunan. Salah satu indikator kinerja aspek kesehatan yang masih belum optimal di Kabupaten Bangka Selatan yakni masih rendahnya angka Usia Harapan Hidup Masyarakat dengan skor UHH pada tahun 2024 yakni 71,74. Dalam perkembangannya nilai UHH Kabupaten Bangka Selatan terus meningkat pada beberapa tahun terakhir. Namun demikian, kinerja tersebut masih belum optimal jika dibandingkan dengan target nasional. Untuk itu, masih diperlukan upaya pemerintah untuk mendorong masyarakat menerapkan pola Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Kabupaten Bangka Selatan. Disamping permasalahan-permasalahan lain yang masih menjadi fokus utama seperti pemerataan ketersediaan layanan kesehatan pada seluruh wilayah di Kabupaten Bangka Selatan yang belum memadai, permasalahan jumlah tenaga kesehatan yang masih belum mencukupi, permasalahan stunting yang cukup tinggi dan lain sebagainya yang berpengaruh pada kondisi pembangunan aspek sumber daya manusia.

Kemiskinan. Kemiskinan merupakan persoalan yang kompleks, karena tidak hanya berkaitan dengan masalah rendahnya tingkat pendapatan dan konsumsi, tetapi juga berkaitan dengan rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan serta ketidakberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Kondisi kemiskinan di Kabupaten Bangka Selatan berdasarkan data BPS (2024) mengalami peningkatan yang sebelumnya 3,11 % (2023) menjadi 3,74 %. Meningkatnya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bangka Selatan salah satunya disebabkan melemahnya kondisi perekonomian baik secara global, regional maupun lokal. Terjadinya kontraksi sektor-sektor lapangan usaha penunjang PDRB di Kabupaten Bangka Selatan berdampak pada terjadinya peningkatan jumlah pengangguran dan menurunnya pendapatan masyarakat yang secara signifikan berpengaruh pada semakin meningkatnya jumlah penduduk miskin.

Belum Optimalnya Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Jaminan sosial adalah salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar setiap masyarakat agar layak sebagai bentuk perwujudan perlindungan sosial. Beberapa program sistem jaminan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah yakni Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),

Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Sosial Pensiun (JSP), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Asuransi Kecelakaan Kerja, dan Program Ketenagakerjaan. Salah satu program jaminan sosial di Kabupaten Bangka Selatan dengan kinerja yang cukup baik yakni program JKN & Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Berdasarkan data pada tahun 2024 cakupan jaminan kesehatan penerima bantuan iuran (PBI) dan Non PBI di Kabupaten Bangka Selatan berjumlah 212.781 Orang dengan persentase 99,50 persen. Angka cakupan jaminan Kesehatan tersebut sudah sangat baik karena melebihi target JKN pada tahun 2024 yakni 98 %. Sedangkan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan yang bekerja di sektor formal masih diangka 69,16 % (2024).

Berdasarkan data sakernas BPS (2023), jumlah angkatan kerja sektor formal di Kabupaten Bangka Selatan lebih sedikit dibandingkan Angkatan kerja pada sektor informal. Sebanyak 62,70 % penduduk di Kabupaten Bangka Selatan bekerja pada sektor informal. Sedangkan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan sektor informal masih belum terdata hingga saat ini. Hal tersebut tentunya akan menjadi tantangan pemerintah daerah dalam menerapkan sistem jaminan sosial yang merata pada seluruh masyarakat yang tentunya berimplikasi pada rentannya kelompok pekerja informal terhadap resiko sosial dan ekonomi.

Tingkat Pengangguran Masih Tinggi. Dalam periode lima tahun terakhir tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bangka Selatan terus meningkat. Hal tersebut akan berpengaruh pada kestabilan kondisi sosial masyarakat dimana ancaman terhadap ketertiban dan keamanan umum akan semakin tinggi disamping akan menambah jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bangka Selatan. Tingginya tingkat pengangguran di Kabupaten Bangka Selatan dipengaruhi oleh banyaknya angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja. Selain itu, rendahnya keterampilan (*skill*) dan jenjang pendidikan turut berdampak secara langsung dalam menyumbang tingginya angka pengangguran di Kabupaten Bangka Selatan. Disamping masih minimnya lapangan kerja yang menyerap tenaga kerja lokal seperti UMKM dan belum adanya jenis lapangan usaha sekunder dan tersier menjadi pemicu meningkatnya angka pengangguran.

Berdasarkan data, pada tahun 2024 tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bangka Selatan sebesar 4,94 %. Meningkatnya jumlah angka TPT di Kabupaten Bangka Selatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya disebabkan terjadinya

penurunan kondisi perekonomian terutama diakibatkan menurunnya aktivitas sektor pertambangan.

Permasalahan Pembangunan Aspek Daya Saing Daerah. Terjadinya pergeseran pendekatan pembangunan yang semula lebih menekankan pada keunggulan komparatif wilayah kemudian berkembang lebih komprehensif dengan meningkatkan nilai kompetitif yang tinggi memerlukan daya saing daerah yang lebih inovatif dan adaptif terhadap perkembangan global dan dinamika pembangunan. Beberapa tantangan di Kabupaten Bangka Selatan yang dapat menjadi penghambat kemampuan daerah untuk berkembang secara ekonomi dan bersaing dengan daerah lain yakni diantaranya:

Minimnya Ketersediaan Infrastruktur. Keterbatasan sarana prasarana dan infrastruktur wilayah akan menjadi salah satu aspek yang mengurangi daya saing daerah. Daerah yang tidak memiliki akses infrastruktur yang baik akan kesulitan dalam menarik investasi dan mengembangkan sektor-sektor produktif. Kabupaten Bangka Selatan sebagai kabupaten terluas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki hambatan yang paling kompleks terkait pemerataan pembangunan infrastruktur. Kondisi geografis wilayah kecamatan yang tidak hanya berada pada 1 (satu) daratan menjadi salah satu hambatan utama pembangunan infrastruktur wilayah. Disamping ketersediaan porsi anggaran pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bangka Selatan yang masih minim menjadi penghambat percepatan pembangunan infrastruktur wilayah.

Berdasarkan data capaian indeks infrastruktur Kabupaten Bangka Selatan hingga Tahun 2024 diketahui bahwa kondisi capaian penyediaan infrastruktur di sektor Pekerjaan Umum seperti jalan, drainase, penyediaan air baku dan konektivitas Perhubungan baik sarana prasarana perhubungan darat maupun laut sebesar 23,37. Kinerja nilai indeks tersebut masih belum baik yang mengindikasikan masih belum optimalnya kinerja pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bangka Selatan dalam kurun waktu 5 (tahun terakhir).

Minimnya Investasi. Investasi adalah faktor yang sangat penting dalam memperkuat daya saing daerah. Investasi tidak hanya meningkatkan sektor-sektor ekonomi secara langsung, tetapi juga memperbaiki kualitas infrastruktur, SDM, dan mendukung terciptanya inovasi yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi, daerah dapat mengoptimalkan

potensi yang dimilikinya untuk bersaing lebih baik di tingkat nasional maupun global. Namun, dalam perkembangannya gairah investasi di Kabupaten Bangka Selatan belum menunjukkan pergerakan yang cukup baik. Lesunya gairah investasi di Kabupaten Bangka Selatan salah satunya disebabkan oleh masih tingginya biaya logistik, minimnya ketersediaan tenaga kerja terampil serta kurangnya diversifikasi ekonomi.

Berdasarkan data BPS, nilai persentase Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Bangka Selatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir cenderung menurun. Persentase PMBT yang paling tinggi yakni pada tahun 2019 dan kemudian turun menurun hingga tahun 2023 (26,31 %). Kisaran persentase PMBT Bangka Selatan yakni di antara 26,31 % - 31,46 %. Kondisi tersebut menunjukkan adanya hambatan dalam pertumbuhan investasi dan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Lebih lanjut pada hasil analisis ICOR (*Incremental Capital Output Ratio*) Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020-2023 menunjukkan nilai yang fluktuatif. Nilai ICOR Kabupaten Bangka Selatan berkisar antara 0,25-8,17, yang pada Tahun 2023 turun sebesar 6,74. Kondisi ini mengindikasikan peningkatan nilai PDRB Kabupaten Bangka Selatan sebesar 1 Rupiah memerlukan investasi sebesar 6,74 Rupiah. Tingginya nilai ICOR tersebut menghambat masuknya investasi ke Bangka Selatan disebabkan tingginya modal yang harus dikeluarkan oleh investor untuk menghasilkan output ekonomi.

Tabel 2.54
Hasil Analisis ICOR (Incremental Capital Output Ratio)
Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020-2023

PDRB Pengeluaran	2020	2021	2022	2023
PDRB ADHK (dalam Juta)	6.057.880,00	6.276.800,00	6.469.200,00	6.708.160,00
Perubahan	6.051.703,16	218.920,00	192.400,00	238.960,00
Pembentukan Modal Tetap Bruto	1.496.360,00	1.525.500,00	1.572.430,00	1.610.780,00
ICOR	0,25	6,97	8,17	6,74

Sumber: Data BPS (diolah), 2025

Masih Lemahnya Inovasi. Masih lemahnya inovasi menjadi salah satu hambatan utama dalam meningkatkan daya saing daerah di Kabupaten Bangka Selatan. Kondisi infrastruktur teknologi yang belum merata, terbatasnya sumber daya manusia terampil, kurangnya akses pendanaan, serta regulasi yang kurang mendukung menjadi beberapa penyebab masih rendahnya nilai Indeks Kapabilitas Inovasi Kabupaten Bangka Selatan.

Pada tahun 2022, indeks kapabilitas inovasi Bangka Selatan hanya diangka 0,15 dan meningkat menjadi 1,72 di Tahun 2023. Nilai indeks tersebut belum menunjukkan kondisi yang optimal. Dimana semakin tinggi nilai indeks kapabilitas inovasi maka semakin tinggi kuantitas dan kualitas penelitian dan pengembangan formal dalam mendorong kolaborasi, konektivitas, kreativitas, keragaman, serta kapasitas suatu daerah untuk mengubah ide menjadi barang dan jasa yang mempunyai nilai tambah tinggi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem inovasi daerah untuk membangun koherensi kebijakan dalam pengembangan riset dan teknologi di daerah sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah.

Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi. Perkembangan perekonomian Kabupaten Bangka Selatan dari tahun 2020-2024 menunjukkan angka yang fluktuatif dan secara umum mengalami perlambatan. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Selatan pada Tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -1,93% disebabkan oleh lesunya perekonomian sebagai akibat dari memburuknya perekonomian global sehingga terjadi penurunan permintaan beberapa komoditas lokal seperti lada, karet dan kelapa sawit serta melemahnya keadaan perekonomian daerah sebagai efek yang ditimbulkan karena keadaan daerah yang kurang stabil pada masa pandemi covid-19.

Kinerja ekonomi Kabupaten Bangka Selatan mulai membaik Pada tahun 2021, dimana laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Selatan mencatat angka pertumbuhan di angka 3,61 persen, sedangkan pada tahun 2022 sedikit mengalami penurunan diangka 3,07 persen. Hal ini membuktikan bahwa kondisi ekonomi di Kabupaten Bangka Selatan yang ditopang oleh sektor primer seperti pertanian, perikanan dan pertambangan serta penggalian mulai menunjukkan geliat ekonomi yang positif namun cenderung mengalami perlambatan. Sedangkan pada tahun 2023, laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangka Selatan mengalami perkembangan yang positif dengan naik ke angka 3,69 %, dan kemudian kondisi tersebut melemah dengan ketidakstabilannya perkembangan perekonomian global yang secara langsung berpengaruh terhadap kondisi ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten Bangka Selatan pada khususnya di Tahun 2024. Pada TW III Tahun 2024, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangka Selatan tercatat di kisaran 0,3 %. Menurunnya kondisi perekonomian tersebut terutama disebabkan terjadinya kontraksi kontribusi sektor sekunder yang mempengaruhi menurunkan kinerja PDRB

Kabupaten Bangka Selatan. Walaupun demikian, kinerja sektor primer dan kenaikan kinerja sektor tersier masih cukup baik sehingga mampu menopang kondisi perekonomian Bangka Selatan tetap stabil ditengah melemahnya kondisi ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Permasalahan Pembangunan Aspek Pelayanan Umum, Tuntutan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik semakin menjadi prioritas perhatian pemerintah daerah. Pemerintah daerah melalui perangkat daerah penyelenggara pelayanan publik harus mampu memberikan pelayanan publik yang professional, efektif dan efisien kepada masyarakat. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Bangka Selatan permasalahan utama yang menjadi tantangan pemerintah daerah adalah belum optimalnya kualitas pelayanan yang berpengaruh terhadap derajat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan pemerintah daerah.

Belum Optimalnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi dasar dari pemerintah. Dimana pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya memberikan layanan kepada masyarakat baik berupa layanan penyediaan fasilitas umum dan sosial masyarakat maupun layanan-layanan yang bersifat jasa administratif. Beberapa kelemahan utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Bangka Selatan yakni:

- Masih kurangnya responsivitas penyelenggara pelayanan
- Masih belum efisiennya waktu pelayanan
- Masih minimnya informasi terkait pelayanan yang diterima oleh masyarakat
- Minimnya koordinasi antar penyelenggaraan pelayanan yang mengakibatkan terjadinya tumpang tindih kewenangan
- Masih belum meratanya akses pelayanan pada seluruh wilayah di Kabupaten Bangka Selatan.

B. ISU STRATEGIS

Identifikasi permasalahan merupakan bahan dalam perumusan dan isu strategis daerah yang akan mempengaruhi pengambilan kebijakan publik melalui dokumen perencanaan. Isu strategis akan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2025-2029 mempengaruhi kebijakan pembangunan yang akan diselenggarakan lima tahun yang akan datang.

1. Isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Peningkatan Kesetaraan Gender Dan Kebudayaan Masyarakat. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menggambarkan kesenjangan pencapaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. dengan mengukur partisipasi aktif laki-laki dan perempuan pada kegiatan ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Bangka Selatan Tahun tahun 2018 dengan IDG sebesar 48,46 persen, kemudian meningkat pada tahun 2019 sebesar 0,83 persen menjadi 49,29 persen. selanjutnya kembali meningkat pada tahun 2020 sebesar 0,64 persen menjadi 49,93 persen, namun pada tahun 2021 menurun 1,28 persen menjadi 48,65 persen. Sedangkan pada tahun 2022 kembali meningkat 1,49 persen menjadi 50,14 persen. Pada tahun 2023 menurun kembali menjadi 49,45 persen.

Kualitas Sumberdaya Manusia. Pembangunan pada dasarnya adalah suatu proses untuk melakukan suatu perubahan pada indikator sosial maupun ekonomi menuju ke arah yang lebih baik dan berkesinambungan. Keberhasilan pembangunan diukur dari berbagai hal, salah satunya yaitu dengan mengukur ketersedianya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Salah satu tolak ukur yang digunakan dalam melihat kualitas sumber daya manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diukur melalui kualitas tingkat pendidikan, kesehatan dan ekonomi (daya beli). Rendah-tingginya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan berakibat pada produktivitas kerja dari penduduk dan mempengaruhi aspek lainnya.

Peningkatan Kualitas Kesehatan Dan Pendidikan. Kesehatan dan Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam Pembangunan suatu daerah. Hal ini terkait dengan pengembangan sumberdaya manusia. Data Rata Lama Sekolah dan Angka harapan Hidup dapat menjadi indikator awal untuk melihat peningkatan kualitas kesehatan dan Pendidikan. Dari segi pendidikan, perkembangan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bangka Selatan sejak tahun 2019-2023 menunjukkan menunjukkan peningkatan, naik dari 6,89 tahun menjadi 6,91 tahun meskipun peningkatannya tidak mencapai 1 point. Namun RLS di Kabupaten Bangka Selatan belum melebihi RLS Provinsi Bangka Belitung yang telah mencapai 8,11 tahun. Sehingga rata-rata durasi pendidikan di Kabupaten Bangka Selatan mencapai 6, 91 tahun, dan hal ini menggambarkan bahwa rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas di Kabupaten Bangka Selatan menjalani jenjang pendidikan sampai tingkat SD (Kelas VI) hingga SMP (Kelas VII). Dari segi kesehatan, perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Bangka Selatan sejak tahun 2019-2023 menunjukkan peningkatan setiap tahun, naik dari 68,68 tahun menjadi 68,98 tahun. Namun, AHH di

Kabupaten Bangka Selatan belum melebihi AHH Provinsi Bangka Belitung yang telah mencapai 73,90 tahun. Dengan kata lain, secara keseluruhan, anak-anak yang lahir di Kabupaten Bangka Selatan dapat hidup hingga usia 68 tahun dan rata-rata AHH di Provinsi Bangka Belitung mencapai 73 tahun. Hal ini mencerminkan kualitas Kesehatan masyarakat belum cukup baik di Kabupaten Bangka Selatan secara keseluruhan.

Kesejahteraan Masyarakat. Fenomena kemiskinan terjadi oleh multi faktor seperti adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, faktor sosial dan budaya masyarakat, ketidaksetaraan dalam distribusi pendapatan, akses terbatas terhadap pekerjaan layak, serta kurangnya akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas. Kemiskinan masih menjadi permasalahan pembangunan di berbagai daerah, tidak terkecuali Kabupaten Bangka Selatan.

Penyediaan Infrastruktur Dasar. Pembangunan infrastruktur dasar di Kabupaten Bangka Selatan merupakan isu yang mencakup pengembangan berbagai fasilitas fisik atau sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, serta peningkatan kualitas hidup di wilayah tersebut. Kondisi Jalan merupakan salah satu indikator yang terkait dengan infrastruktur. Masih terdapat jalan dengan kondisi rusak berat di Bangka Selatan yaitu 187,36 km dan terdapat 76,78 hektar permukiman dengan kategori kumuh yang tersebar 8 kelurahan/desa dan 4 kecamatan.

Minimnya Investasi Dan Inovasi Dalam Pengembangan Ekonomi. Investasi adalah seluruh pendapatan yang dibelanjakan oleh perusahaan atau lembaga pemerintah untuk barang-barang modal modal yang akan digunakan dalam aktivitas produktif. Faktor investasi dapat dijadikan salah satu instrument atau factor utama untuk memacu dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Lebih jauh kebijakan investasi diharapkan dapat menjadi stimulan peningkatan kerja bagi masyarakat. Jumlah industri besar dan sedang di Kabupaten Bangka Selatan paling sedikit dibandingkan kabupaten/kota di Provinsi Bangka Belitung, yaitu hanya 3 unit. Bangka Barat mempunyai jumlah paling tinggi yaitu 36 unit. Hal ini perlu menjadi pertimbangan untuk pemerintah Kabupaten Bangka Selatan agar meningkatkan berbagai aspek agar investor tertarik menanamkan modal.

Pengembangan Sektor Unggulan Lokal. PDRB menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu, PDRB menyajikan komposisi data nilai tambah yang dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha sektoral) dan menurut komponen penggunaannya. Sehingga PDRB dapat

merepresentasikan sektor unggulan di suatu wilayah. Melalui nilai PDRB Kabupaten Bangka Selatan dapat diketahui sektor yang memberikan kontribusi terbesar di wilayah dalam kurun waktu tertentu. Terdapat 3 sektor yang memberikan kontribusi tertinggi di Kabupaten Bangka Selatan yaitu (1) Sektor Pertanian kehutanan dan perikanan dengan persentase tahun 2023 diperkirakan sebesar 41,67 %; (2) sektor pertambangan dan penggalian mencapai 15,25 % dan; (3) sektor perdagangan besar dan eceran mencapai 11,57 %.

Ketahanan Pangan. Kabupaten Bangka Selatan merupakan kabupaten dengan potensi produksi pangan tertinggi di Provinsi Bangka Belitung. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pada tahun 2023 mencapai angka 57.586 ton, merupakan produksi terbesar jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Hal ini menunjukkan betapa besar potensi pertanian di Kabupaten Bangka Selatan untuk dapat dipertahankan, bahkan jika memungkinkan untuk dapat ditingkatkan sehingga dapat menjadi lumbung pangan bagi Provinsi Bangka Belitung.

Degradasi Lahan. Balai Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Batu Rusa Cerucuk mencatat hingga 2021 terdapat lahan kritis di kawasan hutan 20.438,085 Ha di Bangka Belitung dengan rincian: luas lahan kritis di hutan lindung 9.379,436 Ha, luas lahan kritis di hutan produksi 7.805,503 Ha, luas lahan kritis di area penggunaan lain 2.557,30 Ha, dan luas lahan di hutan konservasi 23,59 Ha.

Kecamatan	Tidak Kritis	Agak Kritis	Potensial Kritis	Kritis	Sangat Kritis	Total
Airgegas	6,940.71	1,693.35	80,195.54	12,098.58	37.53	98,570.03
Kepulauanpongok	2,182.72	341.27	2,314.11	25.60		4,748.31
Lepar	8,178.66	473.11	14,040.46	496.69		22,638.70
Payung	8,618.22	552.93	27,843.54	3,070.46	19.70	39,153.25
Pulau Besar	18,328.73	977.00	13,716.03	571.53		32,796.20
Simpangrimba	35,746.69	2,309.53	25,857.54	1,667.48	285.15	64,303.53
Toboali	9,945.44	1,179.80	57,008.22	10,662.40		76,926.22
Tukaksadai	1,729.67	228.10	18,231.33	1,906.95		21,571.76
Total	91,670.84	7,755.09	239,206.78	30,499.69	342.38	360,708.00

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022

Pencemaran Lingkungan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberi penjelasan bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Selatan pada tahun 2023 mencapai 65,36 yaitu termasuk klasifikasi sedang. Nilai

Indeks Kualitas udara sebesar 89,72, termasuk klasifikasi baik, akan tetapi untuk Indeks Kualitas Air hanya 55,71 dan Indeks Kualitas Lahan 36,86, yang mana termasuk klasifikasi kurang. Hal ini dikarenakan berbagai tekanan terhadap lingkungan sehingga terjadi pencemaran, terutama di air. Kabupaten Bangka Selatan merupakan daerah yang kaya sumber daya alam berupa bijih timah, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi daerah luar. Masyarakat lokal maupun pendatang menjadikan sektor tambang sebagai mata pencaharian. Hal ini menyebabkan kerusakan lingkungan yang terjadi dimana-mana. Aktivitas tambang yang tidak memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan menyebabkan kerusakan tidak hanya pada lahan tetapi juga daerah aliran sungai.

Manajemen Bencana Dan Perubahan Iklim. Perubahan iklim mengacu pada perubahan suhu dan pola cuaca dalam jangka panjang. Pergeseran ini mungkin bersifat alami, tetapi sejak periode 1800-an, aktivitas manusia telah menjadi pendorong utama perubahan iklim, terutama dengan pembakaran bahan bakar fosil (seperti batu bara, minyak, dan gas) yang menghasilkan gas yang memerangkap panas. Mitigasi bencana adalah segala upaya untuk mengurangi risiko bencana. Program mitigasi bencana dapat dilakukan melalui pembangunan secara fisik maupun peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2022 terdapat berbagai bencana di kabupaten Bangka Selatan. Banjir, Angin puting beliung dan Kebakaran hutan merupakan bencana yang sering terjadi. Pada tahun 2022, banjir ada 3 kasus, angin puting beliung 6 kasus dan kebakaran 3 kasus. Tidak ada korban meninggal maupun luka dari bencana yang terjadi.

Kajian Risiko Bencana Provinsi Bangka Belitung menunjukkan bahwa Bangka Selatan mempunyai tingkat risiko tinggi untuk bencana banjir, cuaca ekstrim, kebakaran hutan dan lahan serta tanah longsor. Hal ini sesuai dengan kejadian bencana yang terjadi setiap tahunnya yaitu banjir, angin puting beliung dan kebakaran hutan. Kelas risiko sedang adalah bencana banjir bandang, gelombang ekstrim dan abrasi dan kekeringan. Bencana COVID, gempa bumi, epidemi wabah penyakit dan kegagalan teknologi termasuk dalam kelas risiko rendah. Hal yang perlu menjadi perhatian dalam penanganan bencana di Bangka Selatan adalah rendahnya kapasitas di semua bencana. Hasil kajian risiko bencana Provinsi Bangka Belitung menunjukkan bahwa Bangka Selatan mempunyai potensi paling besar kerusakan lingkungan akibat terjadinya bencana dibandingkan daerah lain. Lahan seluas 141.623 diprediksikan akan mengalami kerusakan. Nilai kerugian ekonomi dan total kerugian Bangka Selatan tertinggi di provinsi Bangka Belitung.

Pengelolaan Sampah. Timbulan sampah di kabupaten bangka Selatan selama 2021-2023 cenderung mengalami peningkatan. Timbulan sampah pada 2021 29.247 ton sedangkan tahun 2023 menjadi 30.710 ton. Penambahan timbulan seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Pengurangan sampah cenderung meningkat dari 2019-2023. Pengurangan sampah pada 2019 mencapai 4.741,75 ton/tahun atau 15,16 % sedangkan 2023 menjadi 5.728,49 ton/tahun atau 18,65 %. Persentase sampah terkelola cenderung fluktuatif, persentase pada 2019 mencapai 80,39 % sedangkan 2021 menurun menjadi 62,65 % kemudian kembali meningkat menjadi 69 %.

Tata Kelola Pemerintahan. Tata kelola merupakan proses interaksi melalui hukum, norma, kekuasaan, atau bahasa masyarakat yang tertata melalui sistem sosial. Hal ini dilakukan oleh pemerintah suatu negara, pasar, atau jaringan. Sedangkan pemerintahan merupakan satuan kelompok masyarakat yang diberikan wewenang secara hukum untuk mengatur kelompok masyarakat yang lain, termasuk dirinya. Sementara itu, The United Nations Development Program (UNDP, 1997) mendefinisikan tata kelola pemerintahan sebagai: Pelaksanaan kewenangan ekonomi, politik, dan administratif untuk menangani persoalan suatu negara dalam setiap tingkatan. Tata kelola (*governance*) tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utama. Good governance, diharapkan dapat membantu mengintegrasikan peran pemerintah, sektor pemerintah, dan masyarakat agar pelaksanaannya bisa menjadi lebih efektif, efisien, dan bisa dipertanggungjawabkan.

Data menunjukkan bahwa Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) mencapai 64,53%, sedangkan Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota) sebesar 64,67% pada tahun 2023.

2. Isu Global

Kesetaraan Gender. Pengurangan kesenjangan gender dalam lapangan kerja telah menunjukkan peningkatan pesat dari tahun 1990 hingga 2009, tetapi kemajuan selanjutnya cenderung lebih lambat. Secara umum, dalam aspek ketenagakerjaan, perempuan masih cenderung lebih tertinggal dibandingkan laki-laki. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan hanya mencapai 48,5% pada 2018, sedangkan laki-laki mencapai angka 75%. Hal ini khususnya berlaku bagi negara berkembang dengan persentase kesenjangan

sekitar 30,5 poin persentase pada 2018 (naik 0,5 poin persentase sejak 2009). Tren tersebut diproyeksikan akan berlanjut hingga 2021 (ILO, 2018). Kondisi ketimpangan gender di tingkat global yang bisa dilihat dari aspek ekonomi, sosial (pendidikan) maupun politik.

Pendidikan Inklusif. Pendidikan inklusif, mengacu pada pendekatan pendidikan yang memastikan setiap anak, tanpa terkecuali, dapat mengakses dan berpartisipasi dalam pendidikan yang berkualitas. Ini berarti tidak ada anak yang dikecualikan dari pendidikan, baik itu karena alasan kemampuan fisik, kecerdasan, status sosial-ekonomi, ras, agama, atau alasan lainnya. Pendidikan inklusif adalah upaya untuk mengurangi kesenjangan pendidikan dan memastikan bahwa semua anak, tanpa terkecuali, mendapatkan kesempatan yang adil untuk berkembang dan meraih potensi penuh mereka dalam masyarakat.

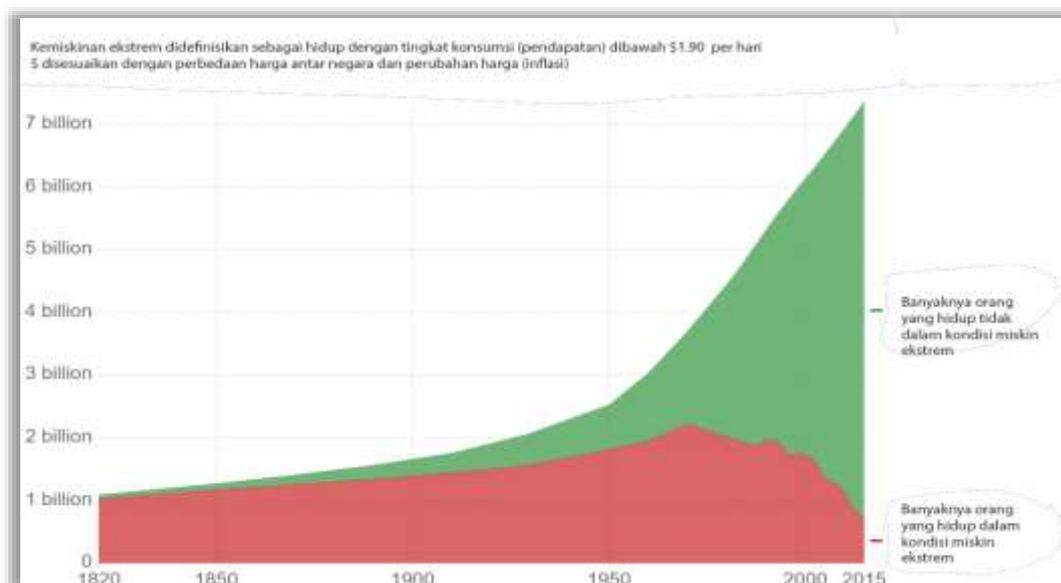
UNICEF menekankan beberapa prinsip utama dalam pendidikan inklusif, antara lain: Akses yang Setara, Penghargaan terhadap Keberagaman, Keterlibatan dan Partisipasi, Kualitas Pendidikan dan Pendekatan Holistik. Untuk mengimplementasikan pendidikan inklusif perlu didukung melalui kebijakan yang adaptif, serta pelatihan bagi para pendidik agar mereka bisa memenuhi kebutuhan beragam anak-anak. Pendidikan inklusif bertujuan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi oleh anak-anak yang kurang beruntung, termasuk mereka yang hidup dalam kemiskinan, anak-anak dengan disabilitas, anak perempuan, anak dari komunitas minoritas, atau anak yang terpengaruh oleh bencana dan konflik. Pendidikan inklusif tidak hanya mengutamakan penyediaan fasilitas fisik yang dapat diakses oleh semua anak, tetapi juga pendekatan yang mendukung perbedaan dalam cara belajar dan berinteraksi.

Kesehatan Publik. Pentingnya sektor Kesehatan publik tidak lepas dari fenomena pandemi COVID-19 yang muncul pada tahun 2019 dan yang masih terus menjadi tantangan global hingga hari ini. Berdasarkan data yang dikeluarkan WHO terdapat 170.426.245 kasus COVID-19 yang terkonfirmasi di seluruh dunia dan 3.548.628 kasus kematian akibat COVID-19 (WHO, 2021). Belum lama usai pandemi COVID-19 dunia kembali dibuat khawatir dengan merebaknya MPOX, atau yang sebelumnya dikenal sebagai monkeypox, telah berkembang dari penyakit yang awalnya terbatas pada wilayah Afrika menjadi ancaman kesehatan global yang patut diperhitungkan.

Kolaborasi internasional sangat penting dalam upaya melawan berbagai ancaman pandemic penyakit secara global. Pandemi COVID-19 yang telah berlangsung selama dua

tahun (2019–2021) telah memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya kesehatan publik sebagai basis ketahanan dan stabilitas, baik terkait aspek ekonomi maupun sosial. Kesehatan menjadi kunci bagi produktivitas manusia dalam berbagai aktivitas kehidupan ekonomi maupun sosial di berbagai level, dari tingkat individu hingga tingkat global. Namun demikian, masalah kesehatan publik di dunia bukan hanya diakibatkan oleh pandemi COVID-19 atau penyakit MPOX saja. Masalah kesehatan publik di banyak negara berkembang umumnya lebih banyak didominasi oleh penyakit akibat faktor lingkungan hidup yang buruk (kolera, demam berdarah, tipes, tuberkulosis) dan faktor gaya hidup (kanker, diabetes dan penyakit jantung).

Kemiskinan. Pengentasan kemiskinan masih menjadi agenda utama pembangunan internasional yang hingga hari ini masih mengalami tantangan berat. Angka kemiskinan dunia dalam kurun waktu 50 tahun terakhir (1950–2000) cenderung meningkat dengan signifikan – sampai dengan tahun 2015, terlihat angka kemiskinan secara umum sampai mencapai angka 7 miliar jiwa. Namun, angka kemiskinan ekstrem menurun sampai di bawah 1 miliar jiwa (Our World in Data, 2018). Adapun angka kemiskinan ekstrem dihitung dari jumlah penduduk yang berpenghasilan di bawah 1,9 Dolar AS per hari.



Gambar 2.43.
Grafik Tingkat Kemiskinan Ekstrem di Tingkat Global (1820—2015)

Sumber: Our World in Data. 2018. World Population Living in Extreme Poverty.
 (<https://ourworldindata.org/grapher/world-population-in-extreme-poverty-absolute>).

Pandemi COVID-19 dan kondisi melemahnya ekonomi setelahnya ikut berdampak peningkatan angka kemiskinan. Secara total, angka kemiskinan ekstrem di tahun 2020

bertambah sebanyak 88 juta–115 juta jiwa dan meningkat sebanyak 150 juta jiwa di tahun 2021. Kemunculan orang-orang miskin baru (“the new poor”) lebih berpotensi terjadi di negara-negara yang sudah memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Sejumlah negara yang masuk dalam kategori negara berpendapatan menengah (middle-income countries) bahkan menghadapi kenaikan angka kemiskinan hingga 82% (World Bank, 2020). Kemiskinan juga cenderung bertambah di negara-negara berpendapatan menengah, sebagian besar di Asia Selatan dan Asia Timur (United Nations University, 2020).

Pangan dan Malnutrisi. World Food Program (WFP) memperkirakan bahwa terdapat 272 juta orang yang sudah atau berisiko berstatus rawan pangan (World Bank, 2021). Berdasarkan data yang dihimpun oleh Economist Intelligence Unit’s 2020 Global Food Security Index di 113 negara, menunjukkan bahwa ketahanan pangan dunia memburuk. Hal ini disebabkan oleh perubahan iklim dan dampak pandemi yang signifikan. Adapun parameter pengukuran yang digunakan adalah keterjangkauan, ketersediaan, keamanan, sumber daya alam atau ketahanan dan kualitas makanan. Di sisi lain, kondisi ketahanan pangan juga akan berpengaruh terhadap pemenuhan gizi penduduk. Kondisi ketahanan pangan yang buruk (kerawanan pangan) akan menyebabkan penambahan penduduk yang termasuk dalam kategori kurang gizi/malnutrisi. Berdasarkan data global FAO, tercatat ada sebesar 132 juta jiwa manusia yang mengalami kekurangan gizi (FAO, 2020) per tahun 2020.

Permintaan dunia akan pangan sudah terus meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi. Populasi dunia diperkirakan akan tumbuh hampir 10 miliar pada tahun 2050 dan seiring dengan itu, permintaan akan produk pangan dan produk-produk agrikultur juga akan naik. Selain itu, pertumbuhan pendapatan di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah akan mempercepat transisi pola makan menuju konsumsi daging, buah-buahan dan sayuran yang lebih tinggi, menambah tekanan pada sumber daya alam (FAO, 2017). Kurangnya kemampuan mengakses pangan akan berdampak pada terjadinya kelaparan. Isu kelaparan dan malnutrisi dengan ketahanan pangan merupakan isu-isu yang saling tak terpisahkan. Dengan demikian, sektor pertanian harus terus meningkatkan produktivitasnya secara berkelanjutan. Namun, terdapat sejumlah tantangan yang harus diatasi dunia untuk menguatkan sektor pertanian. Tantangan pertama adalah keterbatasan sumber daya manusia di sektor pertanian. Secara global, penyerapan tenaga kerja oleh sektor pertanian terus menurun dari 43% pada 1991 menjadi 26% pada 2019 (World Bank, 2021). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ada semakin sedikit individu yang

bekerja di sektor pertanian dan secara khusus merujuk pada krisis regenerasi petani dunia.

Tata Kelola Ekonomi. Sektor ekonomi digital merupakan salah satu sektor lain yang dalam 5 tahun terakhir ini menunjukkan signifikansinya dalam perekonomian global. Diprediksi bahwa tingkat investasi di sektor ekonomi digital akan semakin pulih dari guncangan pandemi dan akan dapat menyusul kembali tren sebelum pandemi (pra- krisis) pada tahun 2022 nanti (UNCTAD, 2020). Sektor penting lain yang harus diperhatikan dalam tata kelola ekonomi global adalah UMKM. Peningkatan produktivitas UMKM penting dilakukan karena UMKM turut berkontribusi signifikan dalam isu ketenagakerjaan melalui perluasan lapangan kerja. Sektor lainnya yang juga perlu mendapat perhatian adalah ekonomi kreatif. Industri kreatif sangat penting untuk agenda pembangunan berkelanjutan karena peran sektor tersebut dalam merangsang inovasi, mengembangkan sektor jasa, mendukung kewirausahaan, berkontribusi pada keragaman budaya, dan mendukung transformasi digital (UNCTAD, 2021).

Ketenagakerjaan. Salah satu masalah lain yang juga berkontribusi pada angka kemiskinan dan melemahnya pertumbuhan ekonomi adalah meningkatnya jumlah pengangguran yang disebabkan oleh pandemi. Pandemi telah mengurangi sekitar 255 juta lapangan pekerjaan di negara-negara berkembang pada 2020 (ILO, 2020). Hilangnya pendapatan penduduk di negara-negara berkembang akibat pandemi diperkirakan melebihi 220 miliar Dolar AS (UNDP, 2020). Bahkan sebelum terjadinya pandemi, angka ketenagakerjaan, khususnya bagi pemuda, sudah menunjukkan tren menurun. Selama 1999–2019, populasi pemuda (individu berusia 15–26 tahun) secara global telah meningkat dari 1 miliar menjadi 1,3 miliar, tetapi pada periode yang sama, tingkat partisipasi angkatan kerja global terus mengalami penurunan. Mereka yang terlibat dalam angkatan kerja (mereka yang bekerja atau tidak menganggur) menurun dari 568 juta pada 1999 menjadi 497 juta pada 2019. Secara umum, tingkat partisipasi angkatan kerja terus menurun selama tiga dekade terakhir, khususnya dari 2009–2021 (World Bank, 2021).

Perubahan Iklim. Sektor lingkungan hidup pada dasarnya mencakup permasalahan-permasalahan yang sangat variatif dan memiliki cross-cutting yang kuat dengan isu-isu pembangunan sosial ekonomi, seperti kesehatan, kemiskinan, pendidikan, transportasi, industri dan lain sebagainya. Namun demikian, konsentrasi pada isu perubahan iklim didasarkan pada berbagai dampak strategis yang bersifat multilevel dan multidimensi. Perubahan iklim mempengaruhi setiap negara di setiap benua, bahkan sampai ke level

individu. Hal ini mengganggu ekonomi nasional dan global serta mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Pola cuaca berubah, permukaan laut naik, dan peristiwa cuaca menjadi lebih ekstrem. Oleh karena itu, diperlukan analisis multidimensional dalam mengkaji potensi-potensi solusinya, selain data faktual yang menunjukkan kecenderungan global yang masih mengkhawatirkan masyarakat dunia.

Geopolitik dan Geoekonomi. Dinamika geopolitik global ke depan akan menjadi tantangan bagi setiap negara, tak terkecuali Indonesia. Perkembangan risiko geopolitik dapat berdampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan dan tatanan global. Salah satu tantangan geopolitik yang perlu diantisipasi Indonesia adalah eskalasi persaingan antarnegara adidaya yang meluas dan memunculkan kekuatan baru. Kemunculan berbagai kekuatan baru telah memengaruhi perkembangan kondisi di kawasan maupun tatanan global, serta sikap Indonesia dalam dunia internasional. Perang antara Rusia dan Ukraina telah meningkatkan kewaspadaan global terhadap potensi konflik geopolitik ke depan di kawasan lainnya, seperti konflik di Selat Taiwan, Semenanjung Korea, Teluk Persia, dan Laut China Selatan. Perang menyebabkan kerugian, baik secara langsung maupun tidak langsung bagi negara-negara lainnya, seperti tekanan inflasi global yang tinggi serta adanya krisis energi dan pangan. Selain itu, perang juga mendorong negara-negara untuk mencari instrument militer demi melindungi kedaulatan mereka. Hal tersebut berpotensi meningkatkan ketegangan antarnegara sehingga memungkinkan terjadinya Kembali konflik atau perang di masa depan.

Persaingan geopolitik terutama di Kawasan IndoPasifik yang dekat dengan Indonesia Semakin meningkat dan meluas. Kawasan Indo-Pasifik muncul karena adanya dinamika geopolitik yang berkembang dan melibatkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik sebagai zona maritim. Nilai strategis Kawasan Indo-Pasifik yang diproyeksikan akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dunia telah menarik perhatian banyak pihak. Tentu saja hal tersebut berdampak pada penciptaan persaingan pengaruh antarnegara, baik yang berada di kawasan maupun di luar kawasan. Selanjutnya, ketidakstabilan geopolitik dapat menimbulkan krisis energi dan pangan, yang selanjutnya memicu ketidakpastian geoekonomi di tingkat global. Ekonomi dunia diproyeksikan tumbuh pada 3,2 persen selama 2024 dan 2025 (International Monetary Fund, 2024). Sementara itu, inflasi global diperkirakan menurun secara bertahap dari 6,8 persen pada 2023 menjadi 5,9 persen pada 2024 dan 4,5 persen pada 2025 (International Monetary Fund, 2024). Di sisi lain, prospek perekonomian Indonesia dipengaruhi oleh dinamika ekonomi global

melalui jalur keuangan dan jalur perdagangan, tecermin dari tingginya tingkat suku bunga global serta ketidakpastian akibat gejolak geopolitik.

Dalam jangka menengah, situasi suku bunga global yang relatif tinggi diperkirakan akan tetap berlanjut terlepas dari pemangkasan yang dilakukan oleh The Federal Reserve. Peningkatan laju inflasi mendorong Bank Sentral di seluruh dunia untuk menaikkan suku bunga acuan secara bersamaan sejak semester kedua tahun 2023, seperti Bank of England dan The Federal Reserve. Kenaikan suku bunga acuan tersebut juga dilakukan di negara-negara anggota G20, seperti Brasil, India, dan Indonesia. Kenaikan suku bunga acuan yang dilakukan secara bersamaan oleh bank-bank sentral di seluruh dunia akan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan berpotensi memicu resesi ekonomi global.

Faktor gejolak geopolitik, tekanan inflasi, suku bunga yang tinggi, penguatan dolar Amerika Serikat, pergeseran belanja konsumen dari barang ke jasa, penurunan harga komoditas, serta tekanan harga pangan akibat kenaikan biaya input pertanian dan pertumbuhan populasi global, serta perubahan iklim juga menyebabkan perlambatan aktivitas perdagangan global pada tahun 2023 dan menjadi tantangan berikutnya. Hal ini tecermin dari penurunan Baltic Dry Index level menjadi rata-rata indeks sebesar 1.393,56 dibandingkan rata-rata indeks 1.930,86 di tahun 2022. Adapun perlambatan aktivitas perdagangan pada tahun 2023 utamanya disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain perlambatan volume perdagangan pada tahun setelah mengalami pertumbuhan pada tahun 2021 dan 2022.

Dengan gambaran tersebut, tantangan-tantangan yang bersifat tanpa batas (*borderless*) membutuhkan kolaborasi yang erat dari berbagai pemangku kepentingan lintas sektor, baik di dalam negeri maupun internasional serta membutuhkan arah kebijakan yang solid untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah.

3. Isu Nasional



Bonus Demografi. Indonesia diperkirakan akan mengalami puncak bonus demografi pada sekitar tahun 2030 hingga 2040. Pada periode ini, jumlah penduduk usia produktif akan berada pada titik tertinggi dalam sejarahnya, yang memberi peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi jika dikelola dengan baik. Populasi besar ini memberikan peluang bagi Indonesia untuk meraih bonus demografi dan meningkatkan daya saing nasional. Kondisi ini membuka peluang besar menjadi penyedia sumber tenaga kerja dan pelaku ekonomi baik laki-laki dan perempuan yang mempercepat pencapaian tujuan pembangunan. Peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui pembentukan lingkungan pendukung ramah perempuan dan keluarga. Produktivitas tinggi akan menjadi landasan terbentuknya modal social sebagai pilar pembangunan yang dapat menjadi instrumen mencegah konflik dan memperkuat kerukunan dan persatuan. Jika dikelola dengan baik, bonus demografi dapat menjadi faktor pendorong utama untuk mendorong Indonesia menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan meningkatkan standar hidup masyarakat. Namun, tanpa perencanaan dan investasi yang tepat, tantangan ini bisa menjadi beban. Tantangan yang dihadapi dalam mengelola bonus demografi ini antara lain; Peningkatan Pengangguran, Kesenjangan Keterampilan, Tekanan pada Infrastruktur dan Layanan serta Ketergantungan pada Lansia di Masa Depan.

Daya Saing SDM yang Berkualitas. Berdasarkan Asian Productivity Organization (2024), produktivitas tenaga kerja Indonesia Tahun 2022 relatif rendah, yaitu sebesar US\$28.600 per pekerja. Angka tersebut masih tertinggal dan di bawah rata-rata kawasan Association of Southeast Asian Nations sebesar US\$34.800 per pekerja. Tantangan peningkatan produktivitas tenaga kerja di antaranya disumbang oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dicerminkan dari capaian rata-rata nilai Programme for International

Student Assessment siswa Indonesia untuk semua aspek (membaca, matematika, dan sains) sebesar 369,3 pada tahun 2022. Angka tersebut menurun dibanding tahun 2018 dengan nilai rata-rata 382 serta jauh tertinggal dibandingkan siswa dari negara-negara The Organisation for Economic Co-operation and Development sebesar 488,33.

Pembangunan manusia unggul juga dihadapkan pada tantangan rendahnya daya saing tenaga kerja yang ditunjukkan dengan rendahnya kualifikasi pendidikan tenaga kerja. Berdasarkan pada kualifikasi pendidikan, data Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2024 menunjukkan sebesar 52,32 persen penduduk yang termasuk angkatan kerja merupakan lulusan pendidikan rendah (Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah sederajat ke bawah), sedangkan penduduk yang termasuk angkatan kerja berpendidikan menengah (Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan sederajat) sebesar 34,82 persen, dan penduduk yang termasuk angkatan kerja berpendidikan tinggi sebesar 12,86 persen. Kualifikasi pendidikan tenaga kerja yang rendah berdampak pada keterserapan tenaga kerja di pasar kerja, hanya 41,23 persen pekerja yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi. Oleh karena itu, untuk mencapai pembangunan yang optimal, Indonesia harus mampu mengatasi berbagai dampak risiko ini dan melakukan investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Penurunan Kemiskinan. Angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Indonesia terus mengalami penurunan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2024, angka kemiskinan di Indonesia sebesar 9,03 persen. Angka ini telah mengalami penurunan sebesar 0,33 persen yang mana semula pada bulan Maret 2023 angka kemiskinan sebesar 9,36 persen. Pada September 2024 angka kemiskinan berhasil diturunkan kembali sebesar 0,46 % menjadi 8,57%. Sejalan dengan angka kemiskinan, kondisi kemiskinan ekstrem di Indonesia juga terus mengalami penurunan. Persentase penduduk miskin ekstrem Indonesia pada Maret 2024 sebesar 0,83 persen, berhasil turun 0,29 persen poin terhadap Maret 2023 sebesar 1,12 persen.

Untuk menurunkan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrim ini diperlukan intervensi dari tiga strategi, yaitu menekan angka pengeluaran keluarga miskin, menaikkan pendapatan melalui program pemberdayaan, dan mengoptimalkan penanganan kantong kemiskinan. Intervensi ini perlu berjalan secara konvergen dan terintegrasi. Hal ini dilakukan sebagai wujud nyata untuk melindungi kelompok-kelompok rentan agar tidak jatuh ke jurang kemiskinan dan mendapatkan akses kebutuhan dasar yang setara. Selain

itu, diperlukan strategi pentahelix melalui kolaborasi dan sinergi antara Pemerintah Pusat, Daerah, Akademisi, Organisasi Masyarakat, dan Media Massa, yang diharapkan dapat memperkuat upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan menurunkan angka kemiskinan. Selain itu, diperlukan intervensi yang serius dalam kualitas Pendidikan, karena rendahnya kualitas pendidikan akan menyebabkan produktivitas masyarakat yang juga rendah. Hal ini berdampak luas terhadap daya saing masyarakat yang akan berimbas kepada terciptanya siklus kemiskinan yang berulang.

Perkembangan Teknologi. Sebanyak 67 persen populasi dunia telah terhubung dengan internet pada tahun 2023 (UNDP, 2024). Teknologi digital berperan sebagai enabler yang mendorong kemajuan di berbagai sector termasuk pengembangan perluasan infrastruktur digital yang kokoh. Sebanyak 2.778 peneliti artificial intelligence (AI) diperkirakan dapat membantu pekerjaan manusia hingga sekitar 50% pada tahun 2047 (UNDP, 2024). Peluang ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Peluang ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui beberapa Langkah berikut: revolusi industry 4.0 berupa otomatisasi dan kecerdasan buatan yang akan semakin matang, industry 5.0 yang merupakan kolaborasi manusia dan mesin yang membuka peluang efisiensi tinggi di berbagai sector serta pemanfaatan AI dalam memprediksi dan mengelola resiko teknologi dan memprediksi potensi serta mitigasi risiko yang lebih baik. Disrupsi teknologi yang terjadi ini akan banyak mengubah cara hidup manusia, bisnis, dan industri. Disrupsi teknologi juga dapat menjadi tantangan pembangunan karena mengubah cara kerja, berkomunikasi, berbelanja dan aneka aktivitas dalam kehidupan lainnya. Pemerintah dalam hal ini harus siap untuk menghadapi dan beradaptasi serta mengadopsi disrupsi teknologi yang terjadi. Perlu disiapkan investasi pada riset dan pengembangan (R&D), pengembangan sumber daya manusia (SDM), Melakukan kemitraan dan kolaborasi strategis serta menguatkan karakter agar mampu beradaptasi dengan digitalisasi.

Ketahanan Pangan dan Energi. Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan adalah salah satu hak asasi manusia, sebagaimana tersebut dalam pasal 27 UUD 1945 dan Deklarasi Roma (1996). Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidak-stabilan ekonomi. Berbagai gejolak sosial dan politik dapat terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Indonesia memerlukan ketahanan pangan dalam jumlah mencukupi dan tersebar, memenuhi kecukupan konsumsi dan stok nasional yang cukup sesuai persyaratan operasional logistik yang luas dan tersebar.

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara dan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. UU No. 18/2012 berbicara tentang ketahanan pangan, namun memperjelas dan memperkuat pencapaian ketahanan pangan dengan mewujudkan kedaulatan pangan (*food sovereignty*), kemandirian pangan (*food resilience*), dan keamanan pangan (*food safety*).

Pada tahun 2024, status ketahanan energi Indonesia berada pada level 6,6. Hal itu mengindikasikan tingkat status ketahanan energi Indonesia berada pada dalam posisi "Tahan". Status tersebut didapatkan berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan yaitu *availability, accessibility, affordability, dan acceptability*. Faktor-faktor yang akan memperkuat indeks ketahanan energi nasional tersebut, yaitu dari sisi *availability* bagaimana Indonesia bisa mengeksplorasi sumber-sumber migas yang sudah bermunculan. Pemerintah saat ini juga tengah mengakselerasi program konversi diesel ke gas, mengingat penggunaan bahan bakar diesel yang cukup besar, yakni sekitar 3 juta Kilo liter (KL). Selain itu, konversi kendaraan roda dua berbasis bensin menjadi listrik juga telah dijalankan oleh Kementerian ESDM,

Pemerintah Indonesia saat ini sedang berusaha mengurangi ketergantungan yang tinggi terhadap energi fosil diantaranya karena pasokan dan harga energi fosil seperti bahan bakar minyak (BBM) sangat dipengaruhi, salah satunya, oleh kondisi geopolitik. Misalnya, Perang Rusia dan Ukraina yang dimulai pada 2022 menyebabkan kenaikan harga minyak dunia. Akibatnya, sejumlah jenis BBM di Indonesia mengalami kenaikan harga. Sementara itu sebagai energi yang tidak dapat diperbarui, energi fosil dapat habis, sementara kebutuhan manusia terus bertambah karena pertambahan jumlah penduduk beserta aktivitas dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Oleh karena itu, tanpa adanya penemuan cadangan energi fosil baru atau tanpa diversifikasi energi dengan energi terbarukan, Indonesia akan mengalami kekurangan suplai energi.

Transisi menuju energi terbarukan telah menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Transisi ini dilakukan seiring dengan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan memenuhi target internasional yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Paris. Sebagai negara yang telah meratifikasi

Perjanjian Paris melalui UU No. 16 Tahun 2016, Indonesia menyampaikan komitmennya untuk berkontribusi dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor-sektor yang paling banyak menghasilkan gas rumah kaca (GRK).

Pertumbuhan Berkelanjutan. Indonesia menikmati pertumbuhan ekonomi yang kuat dan konsisten sebesar sekitar 6% per tahun selama 15 tahun terakhir. Untuk dapat memberikan standar kehidupan yang layak bagi seluruh masyarakatnya, maka negara ini memerlukan pertumbuhan ekonomi yang pesat, namun juga memenuhi aspek inklusif dan berkelanjutan. Sebagai satu kesatuan, program pertumbuhan ekonomi hijau atau green growth merujuk pada suatu konsep dimana perekonomian suatu negara dijalankan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi untuk mewujudkan prinsip keberlanjutan sebagai salah satu tujuan utama. Konsep ini juga menjadi salah satu strategi pemerintah dalam memitigasi risiko lingkungan yang terdampak oleh perubahan iklim dengan berbagai bauran kebijakan, baik secara substansi, kelembagaan maupun pembiayaan.

Indonesia ingin menjadi negara maju dan berpendapatan per kapita tinggi pada 2045. Oleh karena itu, diperlukan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan senantiasa adaptif terhadap perkembangan global yang terjadi. Indonesia memiliki peluang dan tantangan pada saat bersamaan. Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, mempunyai 50 juta generasi milenial, dan menjadi negara kepulauan dengan lebih dari 17 ribu pulau, Indonesia harus mewujudkan pertumbuhan yang lebih berkualitas dan meningkatkan laju pertumbuhan menjadi 6%-7% dalam 20 tahun ke depan.

Untuk mencapai hal tersebut, Indonesia fokus pada 3 strategi yakni pertama, revitalisasi mesin pertumbuhan konvensional. Kedua, mendorong mesin ekonomi baru dan industri yang sedang berkembang. Dan, ketiga, memperkuat ketahanan dan pemberdayaan sosial. Utamanya ketiga strategi tersebut diarahkan untuk mewujudkan transformasi ekonomi Indonesia untuk menghadapi tantangan ekonomi dalam kurun waktu dua puluh tahun kedepan yang juga merupakan kunci Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (*Middle Income Trap*). Transformasi perekonomian diarahkan berorientasi pada ekspor nilai tambah tinggi dengan kebijakan pengembangan sektor ekonomi, terutama industri manufaktur dan pertanian, penerapan transformasi hijau dan biru, penerapan TI, riset dan inovasi serta didukung dengan pembangunan infrastruktur.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut memungkinkan masyarakat menikmati standar hidup dan kesejahteraan yang lebih tinggi. Konsep ini menggarisbawahi pertumbuhan ekonomi yang tidak merusak lingkungan, menjaga sumber daya alam, serta menjamin kesejahteraan sosial dalam jangka panjang. Selain itu, Ekonomi Berkelanjutan juga berusaha memastikan generasi mendatang mampu memenuhi kebutuhan mereka. Gagasan ini sejalan dengan 3 (tiga) pencapaian tujuan Sustainable Development Goals (SDG) yakni Pendidikan Berkualitas, Pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, serta Industri, Inovasi, dan Infrastruktur.

Krisis Iklim dan Pembangunan Rendah Karbon. Perkembangan dunia saat ini dihadapkan dengan tiga krisis lingkungan (*triple planetary crisis*) yang mengancam masa depan bumi dan manusia, yaitu perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati (*biodiversity loss*), serta polusi dan kerusakan lingkungan. Sekitar 50–75 persen dari populasi global berpotensi terdampak kondisi iklim yang mengancam jiwa pada tahun 2100 (Intergovernmental Panel on Climate Change, 2022). Kerugian ekonomi akibat risiko bencana diperkirakan sebesar Rp22,8 triliun per tahun (Kementerian Keuangan, 2023), sementara jumlah kematian selama 10 tahun terakhir mencapai 9.176 orang (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2024).

Sekitar satu juta spesies tumbuhan dan hewan menghadapi ancaman kepunahan (*Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services*, 2019). Sementara itu, risiko polusi udara merupakan penyebab penyakit dan kematian dini terbesar di dunia, serta menyebabkan hingga 4,2 juta kematian setiap tahun (*United Nations Framework Convention on Climate Change*, 2022). Indonesia merupakan negara dengan tingkat polusi tertinggi di Asia Tenggara dengan konsentrasi particulate matter 2,5 (*World Health Organization*, 2021). Sekitar 70 persen dari 20 ribu sumber air minum rumah tangga yang diuji tercemar (Badan Pusat Statistik, 2022). Pada tahun 2020, sebanyak 40,3 persen timbulan sampah merupakan sampah makanan dan diproyeksikan akan menghasilkan 344 kg/kapita/tahun pada tahun 2045 (*Proyeksi Business-As-Usual, Report Food and Loss Waste in Indonesia*, 2021). Perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati (*biodiversity loss*), dan polusi udara juga secara langsung akan menyebabkan krisis sumber daya alam.

Ekstraksi sumber daya alam di dunia meningkat tiga kali lipat dalam lima dekade terakhir dengan pertumbuhan lebih dari 2,3 persen per tahun. Indonesia sebagai negara dengan tingkat ekstraksi pertambangan terbesar ke-8 di dunia (*United Nations Environment*

Programme, 2023), turut berkontribusi dalam krisis tersebut. Data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2022 menunjukkan masih terdapat 2.741 lokasi tambang ilegal yang berpotensi merusak lingkungan. Pertumbuhan populasi dan aktivitas ekonomi yang tinggi serta kelangkaan dan persaingan untuk mengakses sumber daya alam (energi, air, dan pangan) di tingkat global berpotensi mendorong terjadinya kompetisi dan persaingan geopolitik di berbagai wilayah.

Risiko *Triple Planetary Crisis* berimplikasi pada pencapaian target pembangunan, baik jangka menengah maupun jangka panjang dan tuntutan untuk beralih ke aktivitas ekonomi yang rendah emisi gas rumah kaca di berbagai sektor, seperti sektor energi, industri, lahan, kelautan dan pesisir, pangan dan pertanian, serta limbah dan penerapan ekonomi sirkuler. Untuk itu, penyelarasan aspek pertumbuhan ekonomi dan lingkungan menjadi hal yang perlu diprioritaskan.

Tata Kelola Pemerintahan. Pemberantasan korupsi merupakan isu strategis yang membutuhkan sinergi dari semua pemangku kepentingan. Hal ini menjadi prasyarat upaya percepatan pencapaian sasaran pembangunan nasional, mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan, serta meningkatkan investasi. Hal ini merupakan pijakan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi.

Dalam lima tahun terakhir, Indeks Persepsi Korupsi/*Corruption Perception Index* Indonesia menunjukkan tren penurunan dari 40 pada tahun 2019 menjadi 34 pada tahun 2022 dan stagnan di angka yang sama pada 2023 (peringkat 115 dari 180 negara). Selain itu, Indeks Perilaku Anti Korupsi Indonesia juga mengalami penurunan, dari 3,92 pada tahun 2023 menjadi 3,85 pada tahun 2024 (Badan Pusat Statistik, 2024). Penurunan ini mencerminkan risiko dalam pencapaian pemberantasan korupsi. Tata kelola data memainkan peran kunci dalam mendukung pembangunan nasional, terutama dalam pengambilan keputusan yang lebih akurat, efektif, dan berkelanjutan. Tingkat keamanan data privasi dan siber untuk data pemerintah dan nasional belum sepenuhnya dapat mengantisipasi terjadinya risiko peretasan dan pembajakan serta pengelolaan data dalam skala besar yang dapat menciptakan potensi pelanggaran privasi dan ancaman keamanan.

4. Isu Regional

Daya Saing dan Kualitas SDM. Sumber daya manusia mempunyai peranan fundamental dalam pembangunan untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan produktif. Masyarakat yang produktif berperan dalam mendorong pembangunan ekonomi dan

pertumbuhan ekonomi, karena dengan peningkatan produktivitas, masyarakat dapat memanfaatkan faktor ekonomi yang tersedia dan dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Hubungan antara pendidikan dengan kualitas hidup manusia memiliki hubungan positif. Peluang seseorang dapat diperluas melalui pendidikannya. Kreativitas dan imajinasi dapat menunjang pendidikan. Selanjutnya, pendidikan menjadi nilai tambah dalam memperlebar keinginan. Manusia memiliki pendidikan tinggi lebih memprioritaskan kesehatan untuk dapat menikmati hidup. Selain memiliki pendidikan tinggi, kesempatan dalam memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang lebih baik. Oleh sebab itu, dalam peningkatan sumber daya manusia pendidikan merupakan hal fundamental bagi suatu bangsa.

Pada era revolusi industri 4.0 pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing tinggi merupakan kebutuhan yang mutlak dan mendesak. Hal ini disebabkan karena SDM merupakan salah satu sumber daya strategis yang dimiliki, yang harus terus menerus dibina dan dikembangkan secara berkesinambungan. Salah satu faktor penting untuk mencapai tujuan tersebut adalah optimalisasi pengelolaan SDM. Secara umum, paling tidak ada tiga strategi mewujudkan SDM yang berdaya saing tinggi yaitu peningkatan kompetensi SDM, sistem pendidikan dan pelatihan, serta perubahan budaya kerja SDM.

Pemerataan Infrastruktur Dasar. Kesenjangan antar wilayah menjadi tantangan yang harus diatasi dalam tahun-tahun mendatang. Penyebab utama kesenjangan adalah terpusatnya sumberdaya penggerak ekonomi seperti persebaran penduduk, tenaga kerja terdidik dan terampil, investasi dan kredit perbankan serta sarana dan prasarana di Jawa dan Sumatera. Selain itu, kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan juga merupakan tantangan yang memperlebar kesenjangan antar wilayah. Sekitar 78 persen dari kegiatan ekonomi nasional terpusat di Jawa dan Sumatera.

Kinerja sarana dan prasarana seperti konektivitas, ketenagalistrikan, telekomunikasi, perumahan dan permukiman dan sumber daya air, masih tertinggal. Jalur distribusi yang lebih kompleks di negara kepulauan mengakibatkan tingginya biaya pembangunan dan tingginya beban biaya hidup rumah tangga. Dalam tahun-tahun mendatang, pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas, adil dan berkelanjutan didukung dengan tata Kelola infrastruktur yang baik menjadi prasyarat Utama dalam mendukung transformasi sosial, ekonomi dan tata Kelola masa depan. Di Sumatera saat ini terjadi tingginya ketimpangan pembangunan terutama wilayah Sumatera bagian barat. Disparitas pembangunan dengan Provinsi lainnya masih sangat tinggi. Karenanya perlu meningkatkan konektivitas dan

integrasi infrastruktur antar daerah, peningkatan investasi di Wilayah Sumatera, kolaborasi dengan sektor swasta dalam pembangunan ekonomi serta berlanjutnya Pembangunan PSN di Pulau Sumatera (Jalan Tol, Bendungan, dan lain sebagainya).

Transformasi Struktur Ekonomi. Calon kelas menengah merupakan kelompok sosial ekonomi terbesar di Indonesia. Pada periode 2019–2024, jumlahnya meningkat sebesar 8,65 juta orang sehingga mencapai 137,5 juta orang atau sekitar 49,2 persen dari total populasi. Di sisi lain, jumlah warga yang rentan miskin juga meningkat sebanyak 12,72 juta orang dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2024, angka ini mencapai 67,69 juta atau 24,33 persen dari total populasi (Badan Pusat Statistik, 2024). Meskipun jumlah masyarakat calon kelas menengah dan yang rentan miskin terus bertambah, populasi kelas menengah justru mengalami penurunan. Risiko pergeseran status ini, dari kelas menengah menjadi calon kelas menengah dan rentan miskin, disebabkan oleh tingginya angka pemutusan hubungan kerja. Pada Agustus 2024, tercatat 46.420 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (Kementerian Ketenagakerjaan, 2024) dan angka ini diperkirakan akan terus meningkat.

Salah satu faktor yang memicu terjadinya pemutusan hubungan kerja adalah rendahnya daya beli masyarakat. Hal ini terlihat dari deflasi yang terjadi pada komponen harga yang diatur pemerintah dan harga bergejolak. Menurut Laporan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (2024), komponen harga yang diatur pemerintah mengalami deflasi dari 1,68 persen pada bulan Agustus 2024 menjadi 1,40 persen pada bulan September 2024. Sementara itu, komponen harga bergejolak mengalami deflasi yang signifikan, dari 3,04 persen pada Agustus 2024 menjadi 1,43 persen pada September 2024. Daya beli masyarakat yang rendah berimplikasi pada menurunnya permintaan terhadap barang-barang yang diproduksi oleh industri. Dengan permintaan yang lemah, industri tidak dapat memenuhi biaya operasional, yang pada akhirnya memaksa untuk mengurangi jumlah karyawan atau bahkan menutup usaha.

Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup. Kualitas lingkungan Pulau Sumatera yang merupakan penopang kedua perekonomian Indonesia terancam memburuk. Perkembangan kualitas lingkungan yang tidak menentu serta potensi kegiatan ekonomi yang mengancam kelestarian lingkungan membuat kualitas lingkungan provinsi di Pulau Sumatera memerlukan perhatian lebih. Karenanya diperlukan upaya untuk memperketat peraturan perlindungan lingkungan, memperkuat kebijakan investasi dan undang-undang perlindungan lingkungan, serta mensosialisasikan kepada pemangku kepentingan terkait

kepedulian lingkungan untuk menghindari kerusakan lingkungan dan degradasi lingkungan. Sektor-sektor ekonomi yang berbasis eksplorasi lahan seperti pertambangan dan perkebunan dapat memiliki dampak negatif pada lingkungan. Penebangan hutan untuk pembukaan lahan pertanian, perkebunan, pertambangan dan juga pembuatan jalan raya marak terjadi di pulau sumatera sehingga laju deforestasi berjalan dengan cukup tinggi. Masalah lingkungan lain yang juga belum teratasi hingga saat ini adalah masalah timbunan sampah, baik dari sampah rumah tangga ataupun sampah industri.

Tata Kelola Pemerintahan. Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di beberapa daerah belum berjalan dengan efektif. Hal tersebut dikarenakan pelaksanaan tata Kelola pemerintahan yang belum optimal serta penggunaan dan pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tidak efisien. Selain itu juga dirasakan terbatasnya tata Kelola pemerintah daerah. Hal ini diakibatkan oleh ketimpangan kuantitas dan kualitas aparatur daerah, regulasi yang tumpang tindih, serta kurang kondusifnya system politik daerah yang cenderung menguatkan kelompok kepentingan politik tertentu di daerah. Tantangan yang dihadapi daerah adalah membangun tata kelola pemerintah yang efektif dan memperkuat sinergi serta kolaborasi guna menghadapi berbagai isu strategis, sehingga pembangunan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah banyak daerah yang mengalami keterbatasan kapasitas fiskal yang mengakibatkan belum optimalnya kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan. Potret fiskal daerah menunjukkan ketergantungan terhadap Transfer ke Daerah (TKD) yang masing tinggi, rasio pajak dan pendapatan daerah yang masih rendah dan minimnya inovasi pembiayaan alternatif di daerah.

C. PENETAPAN ISU STRATEGIS DAERAH

Isu strategis pembangunan Kabupaten Bangka Selatan ditetapkan melalui pertimbangan permasalahan strategis dan pokok daerah. Disamping itu juga, isu strategis daerah memperhatikan potensi daerah, isu-isu global yang berkembang, isu nasional, isu regional serta identifikasi isu KLHS RPJMD Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2025-2029. Berikut merupakan isu strategis pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2025-2029:

Daya Saing Sumber Daya Manusia. Daya saing sumber daya manusia dapat dinilai dari berbagai aspek, yaitu aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan yang secara umum memberikan kontribusi dalam peningkatan produktivitas. Salah satu indikator yang banyak digunakan dalam mengukur pembangunan sumber daya manusia adalah Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) yang merupakan indeks komposit yang meliputi aspek pendidikan, kesehatan, dan aspek kesejahteraan melalui pengukuran daya beli. Belum optimalnya kualitas SDM Kabupaten Bangka Selatan berhubungan dengan permasalahan pokok antara lain belum optimalnya akses dan mutu pendidikan, belum optimalnya akses dan mutu pelayanan kesehatan, dan pendapatan per kapita yang dipengaruhi oleh sektor ekstratif skala besar. Pendidikan ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga tercipta sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan mutu pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan. Permasalahan berikutnya yang mempengaruhi SDM yang belum berkualitas adalah akses dan mutu pelayanan kesehatan. Peningkatan layanan kesehatan sangat perlu dilakukan mengingat kesehatan merupakan kunci utama individu dalam melaksanakan aktivitasnya.

Meskipun pertumbuhan ekonomi Bangka Selatan relatif stabil, namun kondisi ekonomi global dan regional yang tidak dapat diprediksi tepat, harus diantisipasi karena akan memberikan pengaruh pada kondisi perekonomian ke depan. Kondisi perekonomian daerah yang stabil akan memberikan peluang kesempatan kerja dan kesempatan berwirausaha yang semakin luas. Akan tetapi persoalan kualitas calon tenaga kerja dan tenaga kerja menjadi hal penting untuk diperhatikan. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat akan berdampak pada kualitas dan daya saing sumberdaya manusia yang berkaitan dengan kesiapan tenaga kerja untuk bersaing secara lokal, regional maupun global.

Untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia, juga dibutuhkan upaya penguasaan teknologi serta penguatan inovasi dan kreativitas yang salah satu dampaknya adalah perkembangan pertumbuhan ekonomi. Pengembangan Iptek saja tidak cukup, karena perlu diintegrasikan ke dalam perumusan kebijakan publik yang mencakup kultur, budaya, serta pembangunan manusia dan wilayah. Selain itu perlu disesuaikan pula pelaksanaan penelitian, penciptaan, dan inovasi yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah perlu mendorong pelaksanaan penelitian, penciptaan, dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat -baik dilakukan oleh pemerintah, swasta, individu ataupun lembaga sehingga dapat meningkatkan keunggulan komparatif masyarakat Bangka Selatan menjadi keunggulan kompetitif dalam pengelolaan sumber daya ekonomi dan lingkungan.

Pertumbuhan Ekonomi & Infrastruktur Kewilayahan. Isu lainnya bukan hanya tentang daya saing, namun juga ekonomi yang berkualitas dan inklusif, serta pemerataan ketersediaan infrastruktur kewilayahan yang berkualitas. Lambatnya laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangka Selatan salah satunya disebabkan belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam yang bernilai tambah tinggi. Optimalisasi sumber daya alam perlu dilakukan tidak hanya memfokuskan peningkatan produktivitas bahan baku primer namun harus ditingkatkan dengan nilai tambah setiap komoditi melalui hilirisasi dan pemanfaatan sumber daya alam secara terpadu. Kondisi ekonomi daerah yang produktif sangat sulit dicapai apabila tidak didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai. Dukungan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan dalam rangka percepatan dan pemerataan pembangunan daerah. Oleh karena itu, laju pertumbuhan ekonomi daerah tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur penunjang perekonomian daerah, diantaranya adalah infrastruktur jalan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, sanitasi, dan ketersediaan energi serta infrastruktur penunjang lainnya terutama dalam meningkatkan akses logistik dalam mengembangkan kawasan industri dan kawasan strategis lainnya di Kabupaten Bangka Selatan. Ketersediaan infrastruktur penunjang perekonomian yang baik dapat mendorong percepatan pertumbuhan investasi daerah. Sampai saat ini, berbagai pembangunan dan pengembangan infrastruktur di Bangka Selatan terus dipacu dan salah satunya adalah infrastruktur jalan, dimana panjang jalan semakin bertambah setiap tahunnya. Namun secara kualitas masih terdapat hambatan untuk menyediakan jalan dengan kualitas baik.

Selain infrastruktur jalan, infrastruktur kelistrikan juga merupakan kebutuhan vital yang harus dipenuhi daerah dalam menggerakkan roda ekonomi di masyarakat. Pengembangan industri dan bisnis lainnya sangat tergantung pada listrik. Persoalan lain terkait dengan ketersediaan infrastruktur adalah kebutuhan masyarakat terhadap air minum yang bersih dan sehat. Hal ini seiring dengan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan sektor swasta/industri yang semakin bertambah. Di samping itu juga terdapat kesenjangan antara wilayah desa dan kota. Kesenjangan pembangunan antara desa-kota perlu ditangani secara serius untuk mencegah terjadinya urbanisasi, yang pada gilirannya akan memberikan beban dan masalah sosial di wilayah perkotaan.

Ketahanan Pangan dan Energi. Produksi pertanian akan mempengaruhi pada penyediaan pangan bagi masyarakat. Perkembangan produksi pertanian di Bangka Selatan saat ini secara statistik mampu mencukupi kebutuhan pangan masyarakat utamanya beras,

bahkan mampu berkontribusi terhadap produksi beras Provinsi Bangka Belitung, namun belum mencukupi dalam sisi kontinuitas ketersediaan sepanjang tahun. Di sisi lain, tingginya produktivitas beras di Bangka Selatan belum dapat diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan bahan pangan masyarakat yang lainnya. Produksi sayuran, buah-buahan, tanaman pangan lainnya (misalnya jagung dan umbi-umbian), penyediaan daging dan unggas di Bangka Selatan belum dapat terpenuhi secara domestik. Bahkan tak jarang, pada masa tertentu jenis bahan pangan dan non pangan ini menjadi salah satu penyumbang tingginya inflasi di Bangka Selatan.

Isu lain adalah terkait dengan ketahanan energi. Kebutuhan energi masyarakat yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan pemakaian energi menunjukkan masih adanya kecenderungan yang sama sebagaimana dialami di tingkat nasional, yaitu ketergantungan terhadap sumber energi fosil, yang potensinya semakin lama semakin berkurang. Bangka Selatan khususnya dan Bangka Belitung pada umumnya sebagai sebuah wilayah kepulauan juga mengalami tantangan yang cukup besar dalam penyediaan energi fosil ini. Selain karena tidak tersedianya cadangan minyak dan gas di pulau Bangka, jalur distribusi bahan bakar ini acap kali bermasalah pada saat cuaca tidak baik. Sehingga sering kali Bangka Selatan mengalami kelangkaan sumber energi. Begitu pula jaringan listrik yang terkoneksi dari Sumatera Selatan melalui kabel bawah laut, selama beberapa tahun terakhir tercatat beberapa kali mengalami gangguan yang cukup menghambat pasokan listrik untuk kebutuhan masyarakat di Pulau Bangka.

Kualitas Lingkungan Hidup. Isu pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup menjadi isu yang penting baik secara global maupun nasional khususnya terkait dengan isu perubahan iklim. Adanya dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim seperti bencana banjir, longsor dan kekeringan menuntut adanya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan. Hal ini seiring dengan isu pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) di mana 3 dari 17 tujuannya adalah berkaitan dengan lingkungan, yaitu penanganan perubahan iklim, pemeliharaan ekosistem laut dan pemeliharaan ekosistem darat. Bangka Selatan dalam beberapa tahun terakhir mengalami perubahan lanskap alam secara cukup cepat, utamanya dipicu oleh alih fungsi lahan dalam skala besar untuk budidaya tambak udang dan budidaya perkebunan sawit oleh perusahaan. Perubahan lanskap tersebut tentunya diikuti oleh perubahan lingkungan yang berpotensi menurunkan kualitas lingkungan hidup dari sisi keanekaragaman plasma nutfah (bio diversity), daya dukung dan daya tampung lingkungan, perubahan luasan tutupan lahan, resiko terhadap erosi dan banjir serta dampak ikutan lainnya. Termasuk

tingginya resiko pencemaran lingkungan akibat buangan air limbah dari aktivitas perusahaan tambak dan perusahaan pabrik kelapa sawit, serta cemaran limbah bahan kimia.

Permasalahan sampah juga masih menjadi salah satu masalah utama di Bangka Selatan yang hingga ini belum dapat tertangani dengan optimal. Timbulan sampah belum semuanya dapat diangkat dan diolah di TPA, sehingga diperlukan upaya pengurangan dan pengelolaan sampah secara komprehensif yang dimulai dari rumah tangga, lalu dilakukan di lingkungan terkecil atau diselesaikan di desa masing-masing. Tentunya perlu diiringi dengan perubahan pola perilaku dan mindset masyarakat dalam urusan pengelolaan sampah.

Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi. Siklus manajemen pembangunan akan berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan, apabila didukung dengan tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi kualitas dan profesionalisme aparatur, akuntabilitas kinerja pembangunan, serta pelayanan publik yang prima. Pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, murah dan lebih baik harus selalu diupayakan dan diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan. Reformasi birokrasi adalah jalan utama dalam rangka mewujudkan pelayanan pemerintah yang lebih optimal. Reformasi birokrasi secara berkesinambungan menjadi mutlak untuk dilakukan dimana itu dapat terwujud jika aparatur pemerintah memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dengan memfokuskan pada aspek kelembagaan, aparatur serta tata laksana dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipatif. Tak kalah penting, hal ini akan mudah tercapai jika diiringi dan sejalan dengan pembangunan keagamaan yang menitikberatkan pembangunan mentalitas aparatur dan masyarakat. Pembangunan keagamaan sangat perlu karena keimanan dan mentalitas yang lemah menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya angka kejahatan.

Adapun permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi antara lain adalah masih perlunya penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi yang mengedepankan prinsip efisiensi, efektifitas dan transparansi, pembenahan birokrasi terkait perubahan budaya kerja yang mengutamakan profesionalisme dan akuntabilitas bagi seluruh aparat pemerintah secara terpadu dan berkesinambungan. Lebih lanjut diperlukan pula upaya harmonisasi peraturan perundang-undangan, penyesuaian struktur organisasi, serta ketersediaan aparatur diiringi peningkatan kapasitasnya untuk mewujudkan organisasi tepat ukuran dan fungsi yang lebih optimal dalam peningkatan kualitas dan akselerasi

pelayanan publik. Aspek penting lainnya adalah perlunya kebijakan dan pelayanan pemerintah yang berbasis data melalui optimalisasi penerapan e-government utamanya dalam sistem pengadaan barang dan jasa yang terintegrasi serta dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya, diperlukan upaya meminimalisir praktik KKN, konflik kepentingan, serta menghindari *high cost economy*. Hal tersebut diperlukan dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap hukum, pemerintahan daerah, dan sistem peradilan.



Gambar 2.44
Isu Strategis Kabupaten Bangka Selatan

Tabel 2.55
Perumusan Isu-Isu Strategis RPJMD Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020-2024

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH	
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL		
<ul style="list-style-type: none"> • Tingginya jumlah penduduk usia kerja • Sebagai Lumbung Pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung • Sektor Pertanian, Perkebunan dan Perikanan memiliki kontribusi paling besar dalam struktur ekonomi • Keunggulan Posisi Geografis Bangka Selatan • Pengembangan Kawasan Pariwisata (KTA) • Kawasan industri Sadai mendukung hilirisasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya Kualitas SDM • Kemiskinan • Belum Optimalnya Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masyarakat • Tingkat Pengangguran masih Tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> • Kesetaraan gender dan kebudayaan masyarakat • Kualitas Sumberdaya Manusia • Kualitas kesehatan dan Pendidikan • Kesejahteraan Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Kesetaraan Gender • Pendidikan Inklusif • Kesehatan Publik • Kemiskinan • Pangan dan Malnutrisi • Ketenagakerjaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Bonus Demografi • Daya Saing SDM yang Berkualitas • Penurunan Kemiskinan 	Daya Saing dan Kualitas SDM	Daya Saing Sumber Daya Manusia	
	<ul style="list-style-type: none"> • Minimnya Ketersediaan Infrastruktur • Minimnya investasi • Masih Lemahnya Inovasi • Masih rendahnya Laju Pertumbuhan Ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Infrastruktur dasar • Minimnya investasi dan inovasi dalam pengembangan ekonomi • Pengembangan Sektor unggulan lokal • Ketahanan pangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Tata Kelola Ekonomi • Ekonomi Hijau • Ekonomi Biru 	<ul style="list-style-type: none"> • Perkembangan Teknologi • Pertumbuhan Berkelanjutan • Swasembada Pangan dan Energi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerataan Infrastruktur Dasar • Transformasi Struktur Ekonomi 	Pertumbuhan Ekonomi & Infrastruktur Kewilayahan	Ketahanan Pangan dan Energi
	<ul style="list-style-type: none"> • Resiko Bencana Tinggi • Penurunan Kualitas Lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Degradasi Lahan • Pencemaran lingkungan • Manajemen Bencana dan perubahan iklim • Pengelolaan sampah 	Perubahan Iklim Mitigasi Bencana	Krisis Iklim dan Pembangunan Rendah Karbon	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Kualitas Lingkungan Hidup	
	Tata Kelola Pemerintahan	Tata Kelola Pemerintahan	Tata Kelola Pemerintahan	Tata Kelola Pemerintahan	Tata Kelola Pemerintahan	Tata Kelola Pemerintahan & Reformasi Birokrasi	

Sumber: Hasil Analisis, 2025

BAB III

VISI, MISI & PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1 VISI, MISI, TUJUAN DAN DAN SASARAN

A. VISI DAN MISI

Visi. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Sebagai arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*) untuk menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah, maka Visi Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2025-2029 adalah:

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bangka Selatan Yang Adil, Makmur,
Lestari dan Berkeadaban 2029"

Dengan arti Visi sebagaimana uraian berikut :

- Adil Makmur : Mengoptimalkan Seluruh Potensi Lokal Melalui Transformasi Ekonomi dari Penguatan Sektor Hulu ke Sektor Hilir (Hilirisasi)
- Lestari : Mewujudkan Pembangunan di Seluruh Sektor Kehidupan secara Berkeadilan dan Berkelanjutan
- Berkeadaban : Mewujudkan Masyarakat Bangka Selatan yang Beradab dan Berketahanan Sosial

Misi. Dalam rangka penjabaran Visi Kabupaten Bangka Selatan maka dirumuskanlah misi untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bangka Selatan Yang Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban 2029, dengan rincian sebagai berikut:

Misi 1. Mewujudkan Pembangunan Sosial Yang Inklusif

Misi ini memiliki makna bahwa pembangunan yang ada di Kabupaten Bangka Selatan merupakan Pembangunan sosial yang inklusif yaitu pembangunan yang menekankan pentingnya pelibatan seluruh segmen masyarakat terutama bagi kelompok marginal, miskin dan rentan, serta kepemilikan akses yang sama dan mendapatkan manfaat dari peluang yang tercipta dari inisiatif pembangunan. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi setiap individu masyarakat untuk berpartisipasi, dan berkontribusi serta menikmati manfaat pertumbuhan ataupun kemajuan sosial, tanpa memandang latar belakang, identitas, atau keadaan mereka.

Misi 2. Mewujudkan Pertumbuhan dan Produktivitas Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan

Misi ini berarti memastikan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga memastikan bahwa manfaatnya dirasakan secara merata oleh semua lapisan masyarakat, termasuk yang paling rentan, sambil tetap memperhatikan dampak terhadap lingkungan dan sumber daya alam. Ini melibatkan peningkatan produktivitas, menciptakan pekerjaan layak, dan mendorong inovasi, terutama di sektor UMKM dan daerah terpencil. Mewujudkan Pertumbuhan dan Produktivitas Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan juga dilakukan melalui peningkatan kualitas infrastruktur yang andal. Perencanaan pembangunan infrastruktur yang matang dan terpadu dari berbagai sektor demi menciptakan kawasan yang tidak hanya terbangun, melainkan juga terintegrasi sehingga mampu berkembang dan memberi manfaat yang maksimal kepada masyarakat. Untuk menjamin keberhasilan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, pemerintah daerah harus melakukan peningkatan keterpaduan rencana dan program berbasis pendekatan wilayah. Pengembangan infrastruktur harus mempertimbangkan rencana tata ruang wilayah dan kapasitas daya dukung lingkungan melalui kajian lingkungan hidup strategis.

Misi3. Mewujudkan Tata Kelola Yang Berintegritas, Inovatif dan Adaptif

Misi ini bermakna bagaimana agenda transformasi tata kelola dilaksanakan secara berkelanjutan untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang Berintegritas, Inovatif dan Adaptif sampai dengan level pemerintahan desa. Upaya yang perlu dilakukan antara lain adalah melalui peningkatan kualitas pelayanan publik; modernisasi manajemen kepegawaian; restrukturisasi, *downsizing* dan *rightsizing*, perubahan manajemen dan organisasi;

rekayasa proses administrasi pemerintahan; anggaran berbasis kinerja program dan proses perencanaan yang partisipatif. Dalam rangka mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efektif melayani rakyat, maka penting adanya pemanfaatan Teknologi Informasi secara lebih optimal. Perwujudan *e-government* sudah menjadi kebutuhan strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang mudah, murah, cepat dan transparan berbasis TIK serta membuka akses informasi publik dan mendorong partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan.

Misi 4. Mewujudkan Stabilitas Kewilayahan yang Berkualitas dan Berketahanan Ekologi
 Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan sumber daya alam. Stabilitas kewilayahan memiliki makna upaya meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kelanjutan sarana dan prasarana kewilayahan. Memantapkan ketahanan sosial budaya, Ketahanan energi, air dan kemandirian pangan serta berketahanan Ekologi dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan, serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam.



Gambar 3.1.
Visi Misi Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2025-2029

Perumusan visi dan misi merupakan penjabaran atau implementasi isu-isu strategis yang telah disusun pada bab sebelumnya. Keterkaitan antara visi dan misi dengan isu strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Keterkaitan antara Visi dan Misi dengan Isu Strategis

Visi: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bangka Selatan Yang Adil, Makmur, Lestari dan Berkeadaban 2029			
No	Isu Strategis	Misi	
1	Daya Saing Sumber Daya Manusia	Misi I	: Mewujudkan Pembangunan Sosial Yang Inklusif
2	Pertumbuhan Ekonomi dan Infrastruktur Kewilayahan	Misi II	: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan
3	Ketahanan Pangan dan Energi		
4	Kualitas Lingkungan Hidup	Misi IV	: Mewujudkan Stabilitas Kewilayahan yang Berkualitas dan Berketahanan Ekologi
5	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Misi III	: Mewujudkan Tata Kelola Yang Berintegritas, Inovatif dan Adaptif

Tabel 3.2.
Keselarasan Misi RPJPD Kabupaten Bangka Selatan 2025-2045 dan RPJMD Kabupaten Bangka Selatan 2025-2029

RPJPD 2025-2045			RPJMD 2025-2029		
Misi I	:	Transformasi Sosial untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang unggul serta menjamin keadilan dan perlindungan sosial	Misi I	:	Mewujudkan Pembangunan Sosial yang Inklusif
Misi II	:	Transformasi Ekonomi yang Inklusif berbasis Potensi Lokal dan Berkelanjutan	Misi II	:	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan
Misi VII	:	Mewujudkan sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan			
Misi III	:	Transformasi Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik yang berintegritas, responsif, adaptif dan inovatif	Misi III	:	Mewujudkan Tata Kelola Yang Berintegritas, Inovatif dan Adaptif
Misi IV	:	Stabilitas Kewilayahan	Misi IV	:	Mewujudkan Stabilitas Kewilayahan yang Berkualitas dan Berketahanan Ekologi
Misi V	:	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi			
Misi VI	:	Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan			
Misi VIII	:	Mewujudkan Kesisambungan Pembangunan			

B. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Tujuan dan Sasaran. Tujuan dan sasaran merupakan derivasi dari visi dan misi Kabupaten Bangka Selatan yang telah disusun. Tujuan diturunkan dari visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang merupakan rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan merupakan usaha yang dilakukan untuk dapat mewujudkan kondisi yang diharapkan pada akhir periode RPJMD, sementara sasaran merupakan kondisi yang diinginkan dapat terwujud pada akhir periode RPJMD. Berikut ini disajikan tujuan dan sasaran menurut masing-masing misi dalam RPJMD.

1. Mewujudkan Pembangunan Sosial Yang Inklusif

Misi I memiliki tujuan Mewujudkan Sumber Daya Manusia Unggul.

Tujuan misi ini diukur dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia. Misi I memiliki 4 (empat) Sasaran yaitu:

- a. Terjaminnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan (S1)
- b. Terjaminnya Penyediaan Pendidikan yang Berkualitas, Merata dan Berkeadilan (S2)
- c. Terwujudnya Perlindungan Sosial yang Adaptif (S3)
- d. Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif (S4)

2. Mewujudkan Pertumbuhan dan Produktivitas Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan

Misi II memiliki tujuan Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing & Pemerataan Infrastruktur yang Andal.

Tujuan misi ini diukur melalui indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Gini.

Misi II memiliki 3 (tiga) Sasaran yaitu:

- a. Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan & Daya Saing Daerah (S5)
- b. Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat (S6)
- c. Meningkatnya Akses dan Kualitas Infrastruktur Wilayah (S7)

3. Mewujudkan Tata Kelola Yang Berintegritas, Inovatif dan Adaptif

Misi III memiliki tujuan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan BerAKHLAK.

Tujuan misi ini diukur melalui Indeks Reformasi Birokrasi. Misi III memiliki 1 (satu) Sasaran yaitu Terwujudnya Regulasi & Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Bertintegritas dan Adaptif (S8).

4. Mewujudkan Stabilitas Kewilayahan yang Berkualitas dan Berketahanan Ekologi

Misi IV memiliki 1 (satu) tujuan yaitu Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berkualitas, Berbudaya & Berketahanan Ekologi. Tujuan pada misi ini diukur melalui Kontribusi Persentase Penurunan Emisi GRK dan Indeks Ketahanan Daerah.

Misi IV pada Tujuan I memiliki 3 (tiga) Sasaran yaitu

- a. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup (S9)
- b. Meningkatnya Resiliensi terhadap Bencana(S10)
- c. Terwujudnya Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya, Aman dan Harmonis (S11)

Tabel 3.3
Rumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2025-2029

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Visi: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bangka Selatan Yang Adil, Makmur, Lestari dan Berkeadaban 2029											
Mewujudkan pembangunan sosial yang inklusif (M1)	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Unggul (T1)		Indeks Pembangunan Manusia	70,01	70,34	70,68	71,03	71,39	71,76	72,14	
	Terjaminnya Akses dan kualitas pelayanan kesehatan (S1)	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	71,74	72,51	72,64	72,78	72,91	73,04	73,17		
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	24,6	18	17,3	16,6	15,9	15,2	14,50		
	Terjaminnya penyediaan pendidikan yang berkualitas, merata dan berkeadilan (S2)	Harapan Lama Sekolah (tahun)	11,71	11,91-11,93	11,93-11,95	11,95-11,97	11,97-11,99	11,99-12,01	12,01-12,10		
		Literasi Membaca SD/Sederajat	61,06	63,56	66,06	68,56	71,06	73,56	76,06		
		Numerasi SD/Sederajat	53,39	56,29	59,19	62,09	64,99	67,89	70,79		
		Literasi Membaca SMP/Sederajat	67,95	69,05	70,15	71,25	72,35	73,45	74,55		
	Numerasi SMP/Sederajat	59,79	61,29	62,79	64,29	65,79	67,29	68,79			
	Terwujudnya perlindungan sosial yang adaptif (S3)	Tingkat Kemiskinan (%)	3,74	3,30-3,65	3,04-3,56	2,78-3,47	2,52-3,39	2,26-3,30	2,01-3,21		
	Terwujudnya keluarga yang berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif (S4)	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,599	0,579	0,563	0,546	0,530	0,513	0,497		
Mewujudkan pertumbuhan	Mewujudkan Pertumbuhan		Rasio Gini	0,187	0.204 - 0.206	0.196 - 0.199	0.189 - 0.191	0.181 - 0.184	0.173 - 0.176	0.163 - 0.169	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Visi: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bangka Selatan Yang Adil, Makmur, Lestari dan Berkeadaban 2029											
ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (M2)	Ekonomi yang Berdaya Saing & Pemerataan Infrastruktur yang Andal (T2)		Pertumbuhan Ekonomi (%)	0,90	2.65 - 4.01	2.68 - 4.22	2.71 - 4.43	2.74 - 4.65	2.77 - 4.86	2.81 - 5.07	
		Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan & Daya Saing Daerah (S5)	Indeks Daya Saing Daerah	3,42	3,47	3,52	3,57	3,62	3,68	3,73	
			Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan & Perikanan terhadap PDRB (%)	42,83	42,9	43,42	43,75	43,85	44,05	44,25	
			IKP	84,87	84,97	85,07	85,17	85,27	85,37	85,47	
			PMTB (%)	25,37	27,31	27,49	27,68	27,86	28,04	28,22	
		Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat (S6)	PDRB per kapita (Rp Juta)	55,67	58.63 - 59.39	60.87 - 65.05	63.11 - 70.71	65.35 - 76.37	67.59 - 81.02	69.83 - 87.68	
			Tingkat Pengangguran Terbuka	4,94	4.70 - 4.87	4.60 - 4.84	4.50 - 4.80	4.41 - 4.77	4.31 - 4.73	4.22 - 4.69	
Meningkatnya akses dan kualitas infrastruktur wilayah (S7)	Indeks Infrastruktur	66,67	68,17	69,67	71,17	72,67	74,17	75,67			
Mewujudkan Tata Kelola Yang Berintegritas, Inovatif dan Adaptif(M3)	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan BerAKHLAK (T3)		Indeks Reformasi Birokrasi	70,89	71,5	72,5	73,5	74,5	75,5	76,5	
		Terwujudnya Regulasi & Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, bertintegritas dan Adaptif (S8)	Indeks Pelayanan Publik	3,92	4,04	4,063	4,085	4,108	4,13	4,15	
	SAKIP		64,88	64,89	64,91	64,93	64,95	64,97	64,98		
Mewujudkan Stabilitas Kewilayahan	Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang		Persentase Penurunan Emisi GRK Tahunan	N/A	51,31	51,79	52,28	52,77	53,25	53,74	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.	
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Visi: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bangka Selatan Yang Adil, Makmur, Lestari dan Berkeadaban 2029												
yang Berkualitas dan Berketahanan Ekologi (M4)	Berkualitas, Berbudaya & Berketahanan Ekologi (T4)		Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,28	0,36	0,375	0,390	0,405	0,42	0,44		
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup (S9)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	68,62	74,38	74,55	74,72	74,89	75,07	75,24		
		Meningkatnya Resiliensi terhadap Bencana(S10)	Indeks Risiko Bencana (IRB)	179,68	178,33	177,81	177,29	176,77	176,25	175,73		
	Terwujudnya Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya, Aman dan Harmonis (S11)	Indeks Pembangunan Kebudayaan (Proksi)										
		- Persentase benda, bangunan, struktur dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi (%)		14,49	18,84	21,74	24,64	27,53	30,43	33,33		
		- Persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi (%)		20,41	26,53	30,61	34,70	38,78	42,86	46,94		
		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	N/A	80	80,50	81,00	81,50	82	82,50			

3.2 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

A. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH

Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun periode waktu tertentu. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantaban pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya.

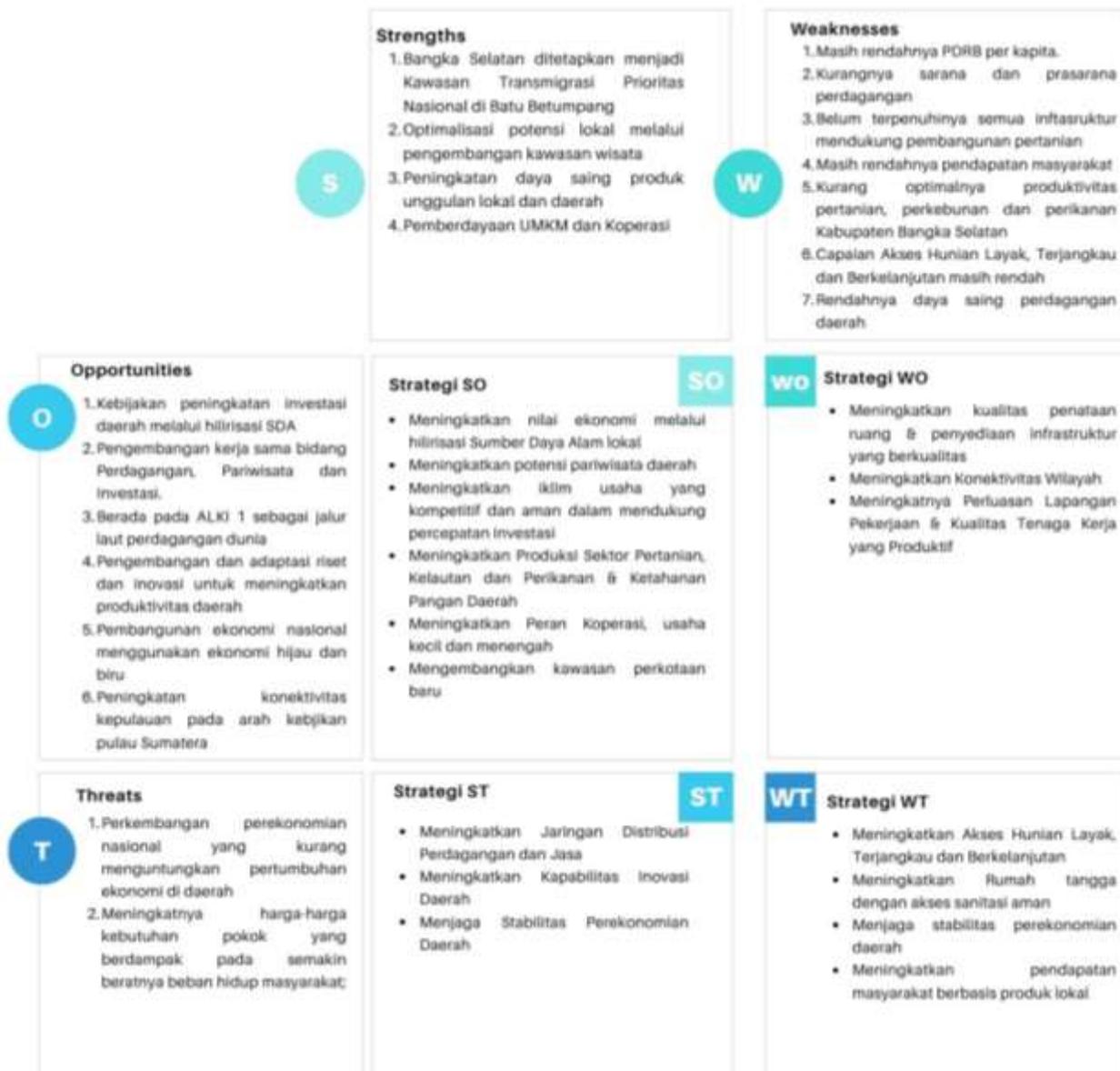
Dalam menentukan alternatif strategi yang tepat maka dilakukan analisis terhadap faktor internal dan faktor eksternal berupa kekuatan, kelemahan, peluang serta tantangan atau ancaman yang mempengaruhi Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dalam mengambil tindakan dalam rangka menjalankan fungsi untuk pembangunan, serta pemberian layanan publik menuju masyarakat Kabupaten Bangka Selatan yang sejahtera. Metode yang digunakan sebagai alat bantu dalam merumuskan strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2025-2029 yaitu analisis SWOT. Dengan menggunakan analisis SWOT, diharapkan dapat mengungkapkan faktor internal dan faktor eksternal yang dianggap penting dalam mencapai tujuan, yaitu dengan mengidentifikasi kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), kesempatan (*opportunity*), dan ancaman (*threat*). Maka dengan menggunakan analisis SWOT, Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan mampu memaksimalkan kekuatan dan peluang, dan sekaligus dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman yang ada, sehingga dapat dicapai keseimbangan antara kondisi internal dengan kondisi eksternal.



Gambar 3.2
Identifikasi SWOT Misi I
Mewujudkan Pembangunan Sosial Yang Inklusif

Beberapa strategi pembangunan untuk mendukung Misi I sebagai berikut:

1. Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan (ST1)
2. Menjamin Ketercukupan Jaminan Kesehatan Masyarakat (ST 2)
3. Meningkatkan Akses & Kualitas Layanan Pendidikan dan Kepemudaan (ST 3)
4. Meningkatkan Literasi & Numerasi (ST 4)
5. Mengintegrasikan Program Penanggulangan Kemiskinan (ST 5)
6. Meningkatkan kualitas kehidupan berkeluarga dan kesetaraan gender serta menjamin perlindungan perempuan dan anak (ST 6)

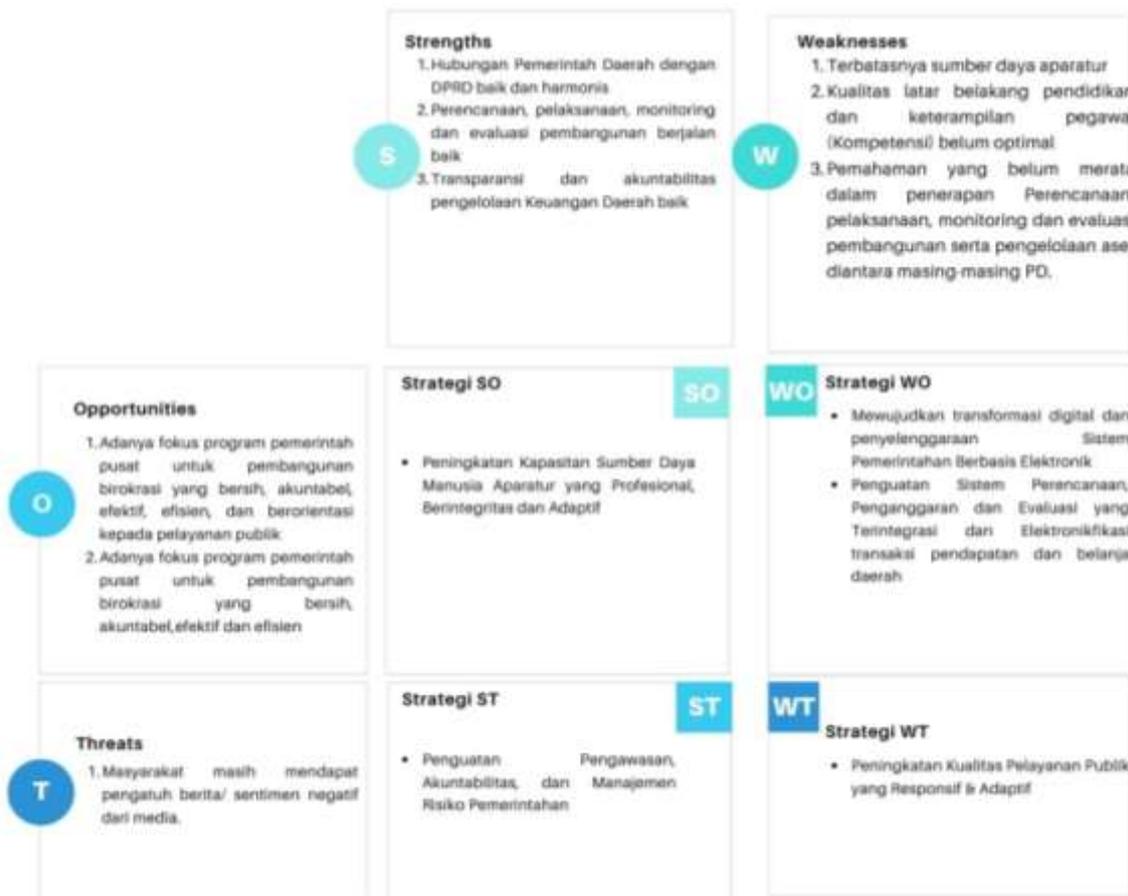


Gambar 3.3
Identifikasi SWOT Misi II
Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan

Strategi pembangunan untuk mendukung misi II sebagai berikut:

1. Meningkatkan nilai ekonomi melalui hilirisasi Sumber Daya Alam lokal (ST 7)
2. Meningkatkan potensi pariwisata daerah (ST 8)
3. Meningkatkan iklim usaha yang kompetitif dan aman dalam mendukung percepatan investasi (ST 9)
4. Meningkatkan Produksi Sektor Pertanian, Kelautan dan Perikanan & Ketahanan Pangan Daerah (ST 10)
5. Meningkatkan Jaringan Distribusi Perdagangan dan Jasa (ST 11)
6. Meningkatkan Kapabilitas Inovasi Daerah (ST 12)

7. Menjaga Stabilitas Perekonomian Daerah (ST 13)
8. Meningkatkan Perluasan Lapangan Pekerjaan & Kualitas Tenaga Kerja yang Produktif (ST 14)
9. Meningkatkan Peran Koperasi, usaha kecil dan menengah (ST 15)
10. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan desa (ST 16)
11. Mengembangkan kawasan perkotaan baru (ST 17)
12. Meningkatkan kualitas penataan ruang & penyediaan infrastruktur yang berkualitas (ST 18)
13. Meningkatkan Konektivitas Wilayah (ST 19)
14. Meningkatkan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (ST 20)
15. Meningkatkan Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (ST 21)



Gambar 3.4
Identifikasi SWOT Misi III
Mewujudkan Tata Kelola Yang Berintegritas, Inovatif dan Adaptif

Strategi pembangunan untuk mendukung Misi III sebagai berikut:

1. Mewujudkan transformasi digital dan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (ST 22)
2. Penguatan Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang Terintegrasi dan Elektronifikasi transaksi pendapatan dan belanja daerah (ST 23)
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur yang Profesional, Berintegritas dan Adaptif (ST 24)
4. Penguatan Pengawasan, Akuntabilitas, dan Manajemen Risiko Pemerintahan (ST 25)
5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang Responsif & Adaptif (ST 26)



Gambar 3.5
Identifikasi SWOT Misi IV
Mewujudkan Stabilitas Kewilayahan yang Berkualitas dan Berketahanan Ekologi

Beberapa strategi pembangunan untuk mendukung misi IV sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim (ST 27)
2. Meningkatkan Pencegahan dan Mitigasi Bencana (ST 28)
3. Meningkatkan keamanan dan ketertiban umum dan perlindungan bagi masyarakat (ST 29)
4. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang berbudaya (ST 30)

Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran selama periode 5 (lima) tahun, dengan demikian diharapkan dapat memberikan output hasil pembangunan yang lebih optimal. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Adapun rumusan visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan RPJMD Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel 3.4.

B. PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Program Prioritas Pembangunan Daerah. Program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan pembangunan kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Selanjutnya harus dapat diterjemahkan kedalam perencanaan operasional, dalam RPJMD yang disusun saat ini keselarasan antara visi, misi daerah serta sasaran pokok dan arah kebijakan dielaborasi dalam visi, misi kepala daerah serta strategi dan arah kebijakannya. Program Pembangunan Daerah merupakan program atau agenda strategis kepala daerah pada periode RPJMD yang akan menjadi prioritas atau target selama lima tahun yang secara langsung didedikasikan untuk mencapai sasaran daerah. Dalam implementasinya program pembangunan daerah dilaksanakan dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah.

Tabel 3.4
Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
RPJMD Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2025-2029

Visi : TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN BANGKA SELATAN YANG ADIL MAKMUR, LESTARI DAN BERKEADABAN 2029				
Misi I : Mewujudkan Pembangunan Sosial Yang Inklusif				
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
Terwujudnya pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial yang berkualitas, inklusif dan adaptif (T1)	Terjaminnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan (S1)	Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan (ST1)	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan layanan kesehatan primer dan rujukan secara merata melalui penguatan SDM, sarpras, dan digitalisasi. - Perluasan dan pemutakhiran kepesertaan JKN bagi seluruh kelompok masyarakat rentan. 	
		Menjamin Ketercukupan Jaminan Kesehatan Masyarakat (ST 2)		
	Terjaminnya penyediaan pendidikan yang berkualitas, merata dan berkeadilan (S2)	Meningkatkan Akses & Kualitas Layanan Pendidikan dan Kepemudaan (ST 3)		<ul style="list-style-type: none"> - Pemerataan layanan pendidikan dan penguatan kapasitas guru secara inklusif dan berkelanjutan. - Penguatan budaya literasi dan numerasi melalui pelatihan guru dan fasilitas pembelajaran adaptif.
		Meningkatkan Literasi & Numerasi (ST 4)		

	Terwujudnya perlindungan sosial yang adaptif (S3)	Mengintegrasikan Program Penanggulangan Kemiskinan (ST 5)	Sinergi program perlindungan sosial berbasis data P3KE dan intervensi multisektor.
	Terwujudnya keluarga yang berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif (S4)	Meningkatkan kualitas kehidupan berkeluarga dan kesetaraan gender serta menjamin perlindungan perempuan dan anak (ST 6)	Penguatan perlindungan dan pemberdayaan perempuan, anak, dan keluarga melalui pengarusutamaan gender
Misi II : Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya pertumbuhan dan produktivitas ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui ekspansi hilirisasi berbasis SDA dan penerapan Ekonomi Hijau (T2)	Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan & Daya Saing Daerah (S5)	Meningkatkan nilai ekonomi melalui hilirisasi Sumber Daya Alam lokal (ST 7)	Mendorong industrialisasi berbasis komoditas unggulan lokal melalui kemitraan dan teknologi tepat guna.
		Meningkatkan potensi pariwisata daerah (ST 8)	Pengembangan destinasi dan event pariwisata berbasis kearifan lokal yang terintegrasi dengan ekonomi kreatif.
		Meningkatkan iklim usaha yang kompetitif dan aman dalam mendukung percepatan investasi (ST 9)	Penyederhanaan perizinan dan kepastian hukum usaha melalui transformasi digital dan layanan terpadu
		Meningkatkan Produksi Sektor Pertanian, Kelautan dan Perikanan & Ketahanan Pangan Daerah(ST 10)	Peningkatan produktivitas dan hilirisasi Sektor Pertanian, Kelautan

			dan Perikanan & Ketahanan Pangan Daerah serta penguatan kelembagaan petani, nelayan, dan UMKM pangan.
		Meningkatkan Jaringan Distribusi Perdagangan dan Jasa (ST 11)	Penguatan infrastruktur logistik dan transformasi pasar rakyat agar efisien dan berdaya saing
		Meningkatkan Kapabilitas Inovasi Daerah (ST 12)	Fasilitasi riset terapan dan inkubasi inovasi melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan akademisi.
		Menjaga Stabilitas Perekonomian Daerah (ST 13)	Memperkuat ketahanan ekonomi daerah melalui diversifikasi sektor unggulan, stabilisasi harga kebutuhan pokok, dan penguatan sistem logistik daerah.
	Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat (S6)	Meningkatnya Perluasan Lapangan Pekerjaan & Kualitas Tenaga Kerja yang Produktif (ST 14)	Mendorong penciptaan lapangan kerja melalui penguatan sektor produktif, pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan industri, dan pengembangan wirausaha muda lokal.

		Meningkatkan Peran Koperasi, usaha kecil dan menengah (ST 15)	Digitalisasi dan penguatan kelembagaan koperasi serta akses pembiayaan dan pasar bagi UKM.
		Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan desa (ST 16)	Optimalisasi dana desa untuk pembangunan berbasis kebutuhan lokal, partisipatif, dan berkelanjutan.
		Mengembangkan kawasan perkotaan baru (ST 17)	Pengembangan pusat pertumbuhan baru berbasis rencana tata ruang wilayah dan layanan dasar yang berwawasan lingkungan.
	Meningkatnya akses dan kualitas infrastruktur wilayah (S7)	Meningkatkan kualitas penataan ruang & penyediaan infrastruktur yang berkualitas (ST 18)	Sinkronisasi rencana tata ruang dan pembangunan infrastruktur prioritas berbasis kebutuhan wilayah.
		Meningkatkan Konektivitas Wilayah (ST 19)	Pembangunan dan peningkatan jaringan jalan, jembatan, dan transportasi untuk menghubungkan pusat-pusat ekonomi.
		Meningkatkan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (ST 20)	Fasilitasi pembangunan rumah layak huni melalui kolaborasi pemerintah, swasta, dan masyarakat.

		Meningkatkan Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (ST 21)	Penyediaan infrastruktur sanitasi berbasis kawasan dan peningkatan kesadaran perilaku hidup bersih
Misi III : Mewujudkan Tata Kelola Yang Berintegritas, Inovatif dan Adaptif			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya Regulasi & Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, bertintegritas dan Adaptif (T3)	Terwujudnya Regulasi & Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, bertintegritas dan Adaptif (S8).	Mewujudkan transformasi digital dan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (ST 22)	- Mendorong adopsi teknologi digital secara menyeluruh melalui penguatan infrastruktur TIK, integrasi sistem layanan pemerintahan, serta peningkatan kapasitas SDM dalam tata kelola digital - Implementasi sistem e-planning dan e-budgeting terintegrasi serta digitalisasi transaksi keuangan daerah untuk transparansi dan efisiensi.
		Penguatan Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang Terintegrasi dan Elektronikfikasi transaksi pendapatan dan belanja daerah (ST 23)	
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur yang Profesional, Berintegritas dan Adaptif (ST 24)	Pengembangan kompetensi ASN
		Penguatan Pengawasan, Akuntabilitas, dan Manajemen Risiko Pemerintahan (ST 25)	Penguatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal serta

			penerapan manajemen risiko berbasis data.
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang Responsif & Adaptif (ST 26)	Peningkatan akses dan mutu layanan publik melalui inovasi digital dan pendekatan berbasis kebutuhan masyarakat

Misi IV : Mewujudkan Stabilitas Kewilayahan yang Berkualitas dan Berketahanan Ekologi

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berkualitas dan berketahanan ekologi (T4)	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup (S9)	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim (ST 27)	Memperkuat perlindungan dan rehabilitasi lingkungan serta mendorong transisi menuju pembangunan rendah karbon melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan peningkatan kapasitas adaptasi masyarakat terhadap risiko iklim.
	Meningkatnya Resiliensi terhadap Bencana(S10)	Meningkatkan Pencegahan dan Mitigasi Bencana (ST 28)	Mengembangkan sistem peringatan dini dan penguatan kapasitas kelembagaan serta masyarakat dalam pencegahan, kesiapsiagaan, dan mitigasi bencana berbasis risiko.
		Meningkatkan keamanan dan ketertiban umum dan perlindungan bagi masyarakat (ST 29)	Memperkuat nilai-nilai budaya lokal dan sosial dan peningkatan

	Terwujudnya Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya, Aman dan Harmonis (S11)		keamanan dan kerukunan sosial berbasis partisipasi masyarakat.
		Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang berbudaya (ST 30)	

Tabel 3.5
Perumusan Program Prioritas RPJMD Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2025-2029

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
1	2	3	4	5	6	7
Visi: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bangka Selatan Yang Adil, Makmur, Lestari dan Berkeadaban 2029						
Mewujudkan pembangunan sosial yang inklusif (M1)	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Unggul (T1)			Indeks Pembangunan Manusia		
		Terjaminnya Akses dan kualitas pelayanan kesehatan (S1)	Meningkatnya akses layanan kesehatan yang merata dan berkualitas dalam peningkatan derajat kesehatan dan harapan hidup masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
1	2	3	4	5	6	7
		Terjaminnya penyediaan pendidikan yang berkualitas, merata dan berkeadilan (S2)	Meningkatnya kualitas dan tingkat partisipasi pendidikan, dan meningkat literasi masyarakat	Harapan Lama Sekolah (tahun) Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun) Literasi Membaca SD/Sederajat Numerasi SD/Sederajat Literasi Membaca SMP/Sederajat Numerasi SMP/Sederajat	Program Pengelolaan Pendidikan Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Pembinaan Perpustakaan	
		Terwujudnya perlindungan sosial yang adaptif (S3)	Meningkatnya jaminan kesejahteraan bagi kelompok rentan dan penguatan ketahanan sosial masyarakat	Tingkat Kemiskinan (%)	Program Pemberdayaan Sosial Program Perlindungan Jaminan Sosial Program Rehabilitasi Sosial	
		Terwujudnya keluarga yang berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif (S4)	Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	
Mewujudkan pertumbuhan ekonomi	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing			Rasio Gini Pertumbuhan Ekonomi (%)		

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
1	2	3	4	5	6	7
yang inklusif dan berkelanjutan (M2)	& Pemerataan Infrastruktur yang Andal (T2)	Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan & Daya Saing Daerah (S5)	Meningkatnya kontribusi dan nilai tambah sektor unggulan daerah dalam memperkuat ketahanan pangan dan daya saing daerah	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan & Perikanan terhadap PDRB	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	
				Indeks Daya Saing Daerah	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	
				Indeks Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	
				PMTB (Milyar)	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	
		Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat (S6)	Pemerataan pendapatan melalui perluasan kesempatan kerja dan pemberdayaan ekonomi lokal	PDRB per kapita (Rp Juta)	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro	
				Tingkat Pengangguran Terbuka	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	
Meningkatnya akses dan kualitas infrastruktur wilayah (S7)	Tersedianya infrastruktur yang merata dan berkualitas dalam konektivitas dan	Indeks Infrastruktur	Program Penyelenggaraan Jalan			

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
1	2	3	4	5	6	7
			pertumbuhan ekonomi wilayah		Program Penataan Bangunan dan Lingkungan Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
Mewujudkan Tata Kelola Yang Berintegritas, Inovatif dan Adaptif(M3)	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan BerAKHLAK (T3)			Indeks Reformasi Birokrasi		
		Terwujudnya Regulasi & Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, bertintegritas dan Adaptif (S8)	Terwujudnya sistem tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan responsif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik SAKIP	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Program Pendaftaran Penduduk	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
1	2	3	4	5	6	7
					Program Pencatatan Sipil Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Program Kepegawaian Daerah Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Program Penyelenggaraan Pengawasan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	
Mewujudkan Stabilitas Kewilayahan, Ketahanan Sosial Budaya, Ketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan serta Berketahanan Ekologi (M4)	Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berkualitas, Berbudaya & Berketahanan Ekologi (T4)			Kontribusi Persentase Penurunan Emisi GRK (%) Indeks Ketahanan Daerah (IKD)		
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup (S9)	Terwujudnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Program Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatnya Resiliensi terhadap Bencana(S10)	Meningkatnya kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Program Penanggulangan Bencana Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	
		Terwujudnya Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya, Aman dan Harmonis (S11)	Meningkatnya ketahanan sosial dan budaya masyarakat	Indeks Pembangunan Kebudayaan - Persentase benda, bangunan, struktur dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi (%) - Persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi (%)	Program Pengembangan Kebudayaan Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	
				Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Program peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	

Selanjutnya dukungan program prioritas daerah Kabupaten Bangka Selatan terhadap Program Prioritas Nasional dan Program Prioritas Daerah Provinsi serta Program Strategis Nasional sebagai berikut:

Tabel 3.6
Keterkaitan Antara Program Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional

No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	PROGRAM PRIORITAS DAERAH KAB. BANGKA SELATAN
1	Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat	Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Kepulauan Bangka Belitung: Perluasan cakupan BPJS, penyediaan obat, penyediaan balai kesehatan santri.	Penguatan kualitas infrastruktur kesehatan dan akses kesehatan melalui pelayanan berobat gratis menggunakan KTP, serta fasilitasi & penyediaan makan bergizi gratis
		Penurunan stunting, penggalakan hidup bersih & sehat, serta insentif bagi ibu pasca melahirkan.	
2	Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi.	Penguatan pendidikan, sains, teknologi, digitalisasi, dan pelatihan vokasi, serta kolaborasi SMK dengan DUDIKA	Penguatan pendidikan melalui penyediaan prasarana dan sarana pendidikan serta penyediaan perlengkapan sekolah gratis bagi siswa baru
3	Pemberantasan kemiskinan	Pengentasan kemiskinan melalui bantuan sosial dan penguatan sosial masyarakat	Pengentasan kemiskinan melalui bantuan dan jaminan sosial serta penguatan sosial masyarakat
4	Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas keluarga, kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas	Penguatan kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan dan anak serta penyandang disabilitas
5	Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga	Pelestarian warisan budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan pembangunan kepemudaan	Peningkatan produktivitas melalui Pembangunan kepariwisataan, ekonomi kreatif, dan serta pemberdayaan UKM & koperasi

No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	PROGRAM PRIORITAS DAERAH KAB. BANGKA SELATAN
6	Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif karakteristik-mandiri lainnya.	Penguatan dan peningkatan produktivitas UKM & koperasi	
		Penciptaan kesempatan kerja di sektor formal	
7	Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani.	Peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan	Peningkatan produktivitas dan Hilirisasi produk pertanian, perkebunan dan perikanan
8	Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis SDA, termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi.	Hilirisasi dan industrialisasi berbasis komoditas unggulan	
		Mengembangkan ekosistem inovasi, riset dan teknologi yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah	
9	Penyempurnaan sistem penerimaan negara.	Menciptakan iklim investasi yang ramah cepat dan terbuka, dalam mendorong kemajuan dan pengembangan potensi daerah serta memperkuat sistem penerimaan daerah.	Menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk dalam mendorong kemajuan ekonomi dan potensi daerah
			Mendorong peningkatan Integrasi Ekonomi dan menjaga stabilitas Harga

No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	PROGRAM PRIORITAS DAERAH KAB. BANGKA SELATAN
10	Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/ perkotaan dan rakyat yang membutuhkan.	Membangun iklim investasi yang kondusif, cepat dan terbuka dalam mendorong kemajuan dan pengembangan potensi daerah	Peningkatan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan
11	Mencapai swasembada pangan, energi dan air.	Mencapai swasembada pangan	Penguatan dan peningkatan ketahanan pangan, energi dan air sebagai kawasan swasembada pangan nasional
12	Pencegahan dan pemberantasan korupsi.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik serta pencegahan dan pemberantasan korupsi	Meningkatkan kualitas pelayanan publik serta pencegahan dan pemberantasan korupsi
13	Reformasi politik, hukum dan birokrasi.	Reformasi birokrasi dan mendukung reformasi politik dan hukum	Reformasi hukum, birokrasi dan mendukung reformasi politik
		Pencegahan dan pemberantasan korupsi	
		Penguatan tata kelola pemerintahan melalui e-Government	
14	Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif.	Penguatan dan pemeliharaan hubungan sosial yang kondusif	Penguatan hubungan sosial masyarakat dan menjaga kondusifitas wilayah
15	Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, dan perawatan rumah ibadah.	Menjamin kerukunan antar umat beragama dan kebebasan beribadah	Menjamin kerukunan antar umat beragama mencegah penyalagunaan dan peredaran gelap narkoba
16	Pencegahan dan pemberantasan narkoba.		

No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	PROGRAM PRIORITAS DAERAH KAB. BANGKA SELATAN
17	Menjamin pelestarian lingkungan hidup.	Penataan tata kelola pertambangan yang berkelanjutan dan pelestarian lingkungan hidup	Menjamin upaya pelestarian lingkungan hidup
			Mewujudkan Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim

Tabel 3.7
Keterkaitan Antara Program Strategis Nasional, Program Prioritas Daerah dan Agenda Prioritas Kepala Daerah

No	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	AGENDA PRIORITAS KEPALA DAERAH
1	Kesehatan Untuk Semua 1) Jaminan Kesehatan Nasional 2) Makan Bergizi Gratis	Penguatan kualitas infrastruktur kesehatan dan akses kesehatan melalui pelayanan berobat gratis menggunakan KTP, serta fasilitasi & penyediaan makan bergizi gratis.	Pemenuhan Universal Health Coverage diatas 96%
2	Perluasan Akses Pendidikan	Penguatan pendidikan melalui penyediaan prasarana dan sarana pendidikan serta penyediaan perlengkapan sekolah gratis bagi siswa baru	Penyediaan perlengkapan siswa tingkat SD dan SMP
3	Penanggulangan Kemiskinan 1) Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan & Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 2) Sekolah Rakyat 3) Pembangunan 3 Juta Rumah	Pengentasan kemiskinan melalui bantuan dan jaminan sosial serta penguatan sosial masyarakat	Bantuan UMKM
		Peningkatan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	

No	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	AGENDA PRIORITAS KEPALA DAERAH
4	Pertumbuhan Ekonomi 1) Pengendalian Inflasi 2) Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih 3) Kemudahan Perizinan di Daerah	Menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk dalam mendorong kemajuan ekonomi dan potensi daerah	Penguatan sektor hilirisasi pertanian
		Peningkatan produktivitas melalui Pembangunan kepariwisataan, ekonomi kreatif, dan serta pemberdayaan UKM & koperasi	Penataan Wajah Kota Bantuan UMKM
		Mendorong peningkatan Integrasi Ekonomi dan menjaga stabilitas Harga	-
5	Ketahanan Pangan	Penguatan dan peningkatan ketahanan pangan, energi dan air sebagai kawasan swasembada pangan nasional	Penguatan Lumbung Pangan (PLP)

Program Pembangunan Daerah. Program pembangunan daerah memiliki peran strategis sebagai instrumen utama dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah. Melalui program-program ini, pemerintah daerah menerjemahkan isu strategis, kebutuhan masyarakat, serta potensi lokal ke dalam langkah-langkah operasional yang terukur dan berdampak langsung. Program-Program Pembangunan Kabupaten Bangka Selatan sebagai berikut:

Misi 1. Mewujudkan Pembangunan Sosial Yang Inklusif

- Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
- Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- Program Pengelolaan Pendidikan
- Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
- Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
- Program Pembinaan Perpustakaan
- Program Pemberdayaan Sosial
- Program Rehabilitasi Sosial
- Program Perlindungan Jaminan Sosial
- Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
- Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
- Program Perlindungan Khusus Anak
- Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
- Program Perlindungan Perempuan

Misi 2. Mewujudkan Pertumbuhan dan Produktivitas Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan

- Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
- Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
- Program Pemasaran Pariwisata
- Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Program Pelayanan Penanaman Modal
- Program Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal
- Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

- Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
- Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
- Program Penyuluh Pertanian
- Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- Program Perikanan Tangkap
- Program Perikanan Budidaya
- Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
- Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
- Program Penanganan Kerawanan Pangan
- Program Keamanan Pangan
- Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
- Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
- Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
- Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
- Program Perekonomian dan Pembangunan
- Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
- Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
- Program Penempatan Tenaga Kerja
- Program Hubungan Industrial
- Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
- Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro
- Program Administrasi Pemerintahan Desa
- Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
- Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi
- Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
- Program Penataan Bangunan Gedung
- Program Penataan Bangunan dan Lingkungan
- Program Pengembangan Jasa Konstruksi
- Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan
- Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- Program Penyelenggaraan Jalan

- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
- Program Pengelolaan Pelayaran
- Program Pengembangan Perumahan
- Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
- Program Kawasan Permukiman
- Program Perumahan dan Kawasan Permukiman kumuh
- Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Misi 3. Mewujudkan Tata Kelola Yang Berintegritas, Inovatif dan Adaptif

- Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
- Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
- Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- Program Kepegawaian Daerah
- Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
- Program Penyelenggaraan Pengawasan
- Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
- Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
- Program Pengelolaan Arsip
- Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
- Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
- Program Pendaftaran Penduduk
- Program Pencatatan Sipil
- Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- Program Pemerintahan & Kesejahteraan Rakyat

Misi 4. Mewujudkan Stabilitas Kewilayahan yang Berkualitas dan Berketahanan Ekologi

- Program Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup

- Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
- Program Pengelolaan Persampahan
- Program Perencanaan Lingkungan Hidup
- Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
- Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
- Program Penanggulangan Bencana
- Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
- Program penanganan Bencana
- Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
- Program peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
- Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
- Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
- Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
- Program Pengembangan Kebudayaan
- Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
- Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

3.3 TAHAPAN DAN TEMA PEMBANGUNAN DAERAH

A. TAHAPAN & TEMA PEMBANGUNAN

Pentahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kepala daerah. Pentahapan pembangunan dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.8
Pentahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Bangka Selatan 2025-2029

TAHAP 1 (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Penguatan akses dan	1. Penguatan sektor			

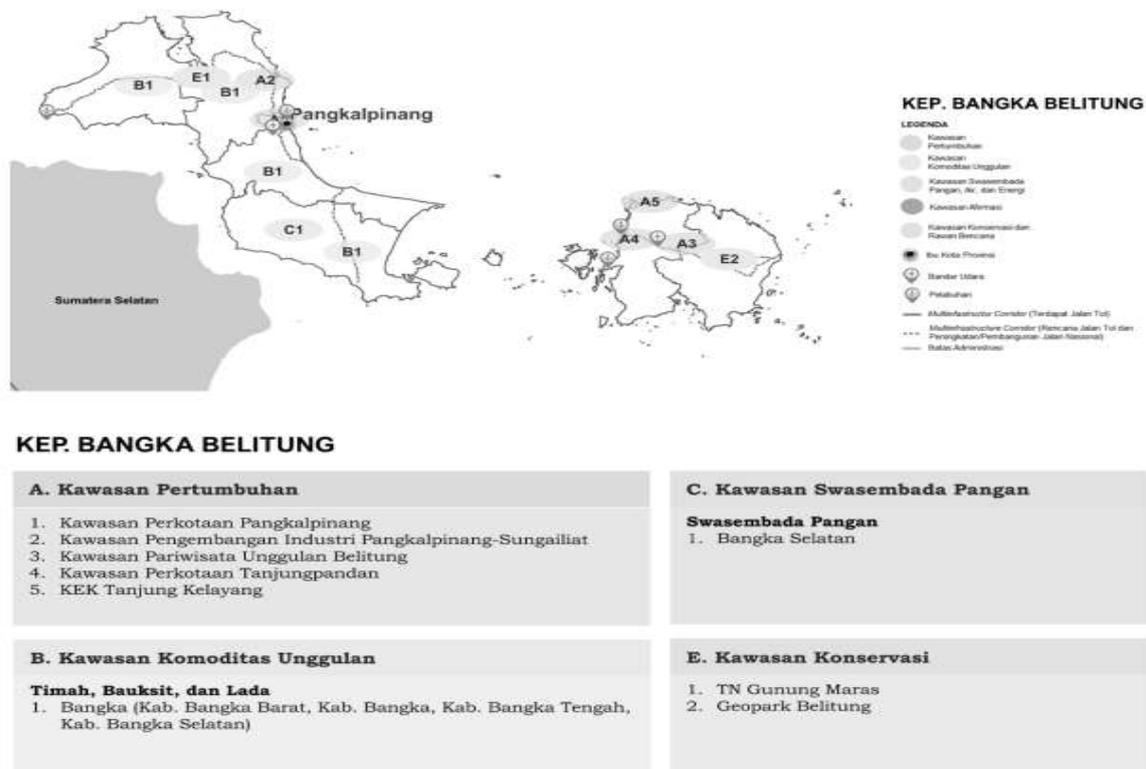
sapras pendidikan 2. Kesehatan untuk semua 3. Perlindungan sosial yang adaptif 4. Penguatan produksi sektor pertanian dan perikanan 5. Pembangunan infrastruktur kewilayahan	sapras pendidikan 2. Kesehatan untuk semua 3. Perlindungan sosial yang adaptif 4. Penguatan produksi sektor pertanian dan perikanan menuju <i>green economy dan blue economy</i> 5. Pembangunan infrastruktur kewilayahan	sapras pendidikan 2. Kesehatan untuk semua 3. Perlindungan sosial yang adaptif 4. Penguatan hilirisasi produk pertanian dan perikanan 5. Pembangunan sektor pariwisata bahari menuju blue tourism 6. Peningkatan infrastruktur kewilayahan	sapras pendidikan 2. Penguatan sektor kesehatan 3. Perlindungan sosial yang adaptif 4. Penguatan lumbung pangan regional 5. Pemantapan infrastruktur kewilayahan	pendidikan 2. Penguatan sektor kesehatan 3. Perlindungan sosial yang adaptif 4. Pemantapan infrastruktur kewilayahan pada simpul- simpul pelayanan ekonomi
---	---	---	--	---

Tabel 3.9
Tema Pembangunan RPJMD Kabupaten Bangka Selatan 2025-2029

TEMA PEMBANGUNAN				
Tahun I (2026)	Tahun II (2027)	Tahun III (2028)	Tahun IV (2029)	Tahun V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar yang Inklusif dan Optimalisasi Potensi Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan	Penguatan Pembangunan <i>Green Economy</i> dan <i>blue economy</i>	Peningkatan Daya Saing melalui Pembangunan Sosial yang Inklusif dan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	Penguatan Daya Saing Daerah melalui Pembangunan Sosial yang Inklusif dan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	Pemantapan Daya Saing Daerah

3.4 ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

Dalam kerangka RPJMN 2025–2029, Kabupaten Bangka Selatan ditetapkan sebagai kawasan swasembada pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mengingat kapasitas lahan, potensi sumber daya, dan kontribusi strategisnya terhadap ketahanan pangan daerah maupun nasional. Penetapan ini selaras dengan agenda Asta Cita yang menekankan penguatan ketahanan pangan, energi, dan sumber daya air secara berkelanjutan. Kabupaten Bangka Selatan memiliki keunggulan komparatif berupa ketersediaan lahan pertanian produktif, khususnya untuk padi, hortikultura, dan perkebunan, serta potensi perikanan tangkap dan budidaya yang signifikan di wilayah pesisir. Dengan posisi ini, Bangka Selatan berperan tidak hanya sebagai penyedia bahan pangan utama bagi kebutuhan internal provinsi, tetapi juga sebagai penopang pasokan antarwilayah, sehingga mengurangi ketergantungan impor pangan dan memperkuat kemandirian pangan daerah. Disamping itu juga, Kabupaten Bangka Selatan menjadi salah satu kawasan komoditas unggulan yakni timah, bauksit dan lada.



Gambar 3.5

Arah Pembangunan Kewilayahan Kabupaten Bangka Selatan Berdasarkan RPJMN Tahun 2025-2029

Sedangkan tema Pembangunan kewilayahan Kabupaten Bangka Selatan dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditetapkan sebagai simpul konektivitas kepulauan, pengembangan kawasan industri, lumbung pangan dan agromaritim. Dengan ditetapkannya peran dan posisi strategis Kabupaten Bangka Selatan tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi regional dan mengurangi disparitas antar wilayah.



Gambar 3.6

Arah Pembangunan Kewilayahan Kabupaten Bangka Selatan Berdasarkan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029

Dalam rangka mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan daerah sesuai dengan tema kewilayahan yang diamanatkan oleh pusat dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta arah pembangunan kewilayahan dalam RTRW Kabupaten Bangka Selatan dalam lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan kondisi geografis dirumuskan arah pembangunan kewilayahan prioritas dan intervensi kebijakan kewilayahan sebagai berikut:

1. Pembangunan Kawasan Ekonomi Biru di Kecamatan Lepar dan Kepulauan Pongok.
 Pembangunan Kawasan Ekonomi Biru (*Blue Economy*) adalah konsep pembangunan yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, namun tetap menjaga keberlangsungan ekosistem laut. Pembangunan Kawasan Ekonomi Biru berpusat di Kecamatan Lepar dan

Kepulauan Pongok. Konsep pengembangan ekonomi biru di Bangka Selatan menitikberatkan pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan. Berikut merupakan intervensi arah kebijakan dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Bangka Selatan:

Intervensi Kebijakan

a. Pengelolaan Sumber Daya Laut dan Pesisir Berkelanjutan

Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap dan budidaya dengan prinsip keberlanjutan, melalui pengaturan zona pemanfaatan, pengendalian penangkapan berlebih, dan rehabilitasi ekosistem pesisir seperti mangrove, terumbu karang, dan padang lamun.

b. Pengembangan Industri Perikanan Terintegrasi

Mendorong hilirisasi hasil perikanan melalui pengembangan industri pengolahan berbasis teknologi, peningkatan kapasitas rantai dingin (*cold chain system*), serta perluasan akses pasar domestik dan ekspor.

c. Ekowisata Bahari dan Pesisir

Mengembangkan destinasi wisata bahari yang ramah lingkungan, berbasis masyarakat, dan memadukan konservasi ekosistem dengan pemberdayaan ekonomi lokal.

d. Penguatan Infrastruktur dan Konektivitas

e. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

f. Mendorong adopsi teknologi ramah lingkungan dalam penangkapan ikan, budidaya, pengolahan hasil laut, dan pemantauan ekosistem.

2. Pembangunan Kawasan Ekonomi Hijau di Kecamatan Air Gegas, Payung, Pulau Besar dan Simpang Rimba

Pembangunan Kawasan Ekonomi Hijau adalah upaya untuk menciptakan zona ekonomi yang berkelanjutan dengan memprioritaskan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan yang melibatkan transformasi menuju model ekonomi yang lebih hijau, termasuk investasi pada energi terbarukan, efisiensi sumber daya, dan teknologi ramah lingkungan. Pembangunan Kawasan Ekonomi diarahkan pada kawasan agropolitan yang berkontribusi besar pada perekonomian Kabupaten Bangka Selatan terutama pada sektor pertanian dan perkebunan.

Intervensi Kebijakan

- a. Mengoptimalkan pemanfaatan lahan, hutan, dan pengelolaan sumber daya alam dengan prinsip keberlanjutan.
 - b. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis, pengendalian alih fungsi lahan yang tidak terkendali, serta perlindungan kawasan lindung dan sumber mata air.
 - c. Pemanfaatan energi terbarukan
 - d. Mendorong praktik pertanian organik, agroforestri, dan pemanfaatan pupuk serta pestisida hayati untuk menjaga kesehatan tanah dan kualitas hasil pertanian
3. Pengembangan Sentra Ketahanan Pangan di Kecamatan Toboali dan Kecamatan Pulau Besar

Pengembangan Sentra Ketahanan Pangan (KSP) bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, dan aksesibilitas pangan secara berkelanjutan yang melibatkan berbagai aspek, mulai dari peningkatan produksi, perbaikan infrastruktur, hingga edukasi konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang. Pengembangan Ketahanan Pangan berpusat di Kecamatan Toboali dan Kecamatan Pulau Besar, namun pembangunan kawasan pertanian lainnya yang mendukung Ketahanan Pangan terus dilakukan di kecamatan lain di Kabupaten Bangka Selatan merujuk pada potensi dan sumber daya yang ada terutama kawasan pertanian yang termasuk ke dalam deleniaasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Bangka Selatan. Pengembangan Sentra Ketahanan Pangan (KSP) dalam rangka mendukung arah kebijakan pengembangan kewilayahan nasional dilakukan melalui beberapa strategi diantaranya melalui Modernisasi Pertanian, Peningkatan Produktivitas Lahan, Penguatan Infrastruktur, Sinergi Lintas Sektor dan Dukungan Kebijakan.

Intervensi Kebijakan

- a. Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi (kewenangan pusat dan daerah)
- b. Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi)
- c. Peningkatan produktifitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan Kawasan peternakan)
- d. Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura
- e. Optimalisasi Lahan dengan pemanfaatan lahan tidur atau marginal untuk budidaya tanaman pangan, termasuk padi gogo

- f. Pembangunan dan pengelollan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan dan hortikultura
- g. Pengembangan Kawasan Transmigrasi Batu Betumpang
- h. Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan
- i. Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi
- j. Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi tani serta pengendalian pasar
- k. Pengembangan riset pertanian skala lokal
- l. Ekstensifikasi lahan pertanian

Pengembangan lahan rawa dan potensi lahan persawahan yang ada di Kabupaten Bangka Selatan termasuk potensi pertanian yang berada dalam kawasan hutan untuk diusulkan perubahan status kawasan hutan seperti lahan persawahan Batu Betumpang, Bukit Terap, Kepoh dan Serdang.

4. Pengembangan *Key Tourism Area* RIDPN di Kecamatan Lepar, Toboali, Tukak Sadai, Kepulauan Pongok, Air Gegas dan Kecamatan Pulau Besar

Visi pengembangan Destinasi Pariwisata Nasional Bangka Belitung pada tahun 2023-2044 berdasarkan Perpres 17 Tahun 2024, yaitu sebagai "Destinasi Pariwisata Kelas Dunia Berbasis Bahari dan Geopark yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat". Dalam RIDPN tersebut telah disepakati 13 (tiga belas) Kawasan Inti Pariwisata (KIP) atau *Key Tourism Area* (KTA) yang meliputi hampir seluruh kabupaten/kota dalam wilayah DPN Bangka Belitung, Untuk Kabupaten Bangka Selatan terdapat 2 KTA yaitu KTA Toboali-Lepar terdiri dari Sub KTA Toboali-Lepar dan Sub KTA Kepulauan Kelapan dan sekitarnya serta KTA Batu Betumpang yang terdiri dari Sub KTA Batu Betumpang. Pengembangan tahap pertama diharapkan dapat memperkuat hubungan dan kerja sama antara Pulau Bangka dengan Pulau Belitung. DTW yang akan dikembangkan terkonsentrasi di KTA Prioritas 1 di Kabupaten Belitung, KTA Prioritas 2 di Kabupaten Bangka Selatan, serta area kepulauan di antara dua area tersebut. Secara substantif, rangkaian pulau pada kedua kabupaten ini akan dikembangkan sebagai kawasan wisata dan kegiatan ekonomi lain yang berbasis wisata bahari.

Pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bangka Selatan secara umum tetap dilakukan pada seluruh Destinasi Tujuan Wisata (DTW) dan Sumber Daya Wisata (SDW) Kabupaten Bangka Selatan merujuk pada Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Kabupaten Bangka Selatan yang berada di seluruh kecamatan. Jumlah daya tarik wisata di Kabupaten

Bangka Selatan akan terus bertambah dikarenakan masih banyak sumber daya wisata (SDW) yang berada dan tersebar di seluruh Kabupaten Bangka Selatan. Saat ini total daya tarik wisata dan sumber daya wisata Kabupaten Bangka Selatan berjumlah 149. Dari total daya tarik wisata dan sumber daya wisata tersebut diantaranya terdapat 57 daya tarik wisata alam, 38 daya tarik wisata budaya, 24 sumber daya wisata budaya, serta 18 sumber daya wisata alam.

Intervensi Kebijakan

a. Pengembangan Destinasi Wisata Unggulan

Mengoptimalkan pengembangan destinasi prioritas seperti Pantai Nek Aji, Pantai Batu Perahu, Benteng Toboali, Pulau Kelapan, dan kawasan wisata Simpang Lima sebagai ikon pariwisata yang memiliki daya tarik lokal dan potensi pasar nasional-internasional.

b. Peningkatan Infrastruktur dan Aksesibilitas Wisata

Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur pendukung, termasuk jalan menuju destinasi, pelabuhan wisata, dermaga penyeberangan, fasilitas parkir, dan penunjang amenities.

c. Penguatan Daya Tarik dan Diversifikasi Produk Wisata

Mengembangkan paket wisata tematik berbasis alam, budaya, sejarah, kuliner, dan ekowisata pesisir, serta mengintegrasikannya dengan kegiatan olahraga, festival, dan even tahunan.

d. Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Kreatif

e. Promosi dan Branding Pariwisata

Menguatkan citra pariwisata Bangka Selatan melalui strategi pemasaran digital, promosi pada pameran pariwisata nasional, dan kolaborasi dengan pelaku industri perjalanan.

f. Kemitraan dan Investasi Pariwisata

Meningkatkan kerja sama dengan pihak swasta, dan investor dalam pengembangan fasilitas dan atraksi wisata dengan tetap mengedepankan aspek keberlanjutan dan kearifan lokal.

5. Pengembangan Kawasan Industri Sadai di Kecamatan Tukak Sadai

Rencana pengembangan industri di kawasan industri Sadai tidak terlepas dari potensi sumber daya alam dan ekonomi yang ada di Kabupaten Bangka Selatan, serta rencana pengembangan dan pemanfaatan ruang, letak geografi, prasarana dan sarana, serta luas

wilayah kawasan tersebut. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka sektor Industri yang dapat dikembangkan di kawasan industri Sadai antara lain:

1. Industri pengolahan hasil laut
2. Industri pengolahan produk perkebunan
3. Industri Galangan Kapal dan Logistik
4. *Cold Storage*

Industri-industri yang dikembangkan di kawasan industri Sadai diutamakan dalam bentuk industri berskala besar dan menengah, namun demikian tetap dimungkinkan berkembangnya industri yang berskala kecil utamanya yang dapat memiliki keterkaitan dengan industri berskala besar dan menengah.

Intervensi Kebijakan

- a. Peningkatan Infrastruktur Kawasan
 - b. Integrasi jaringan logistik dan konektivitas yang mendukung pengembangan Kawasan Industri Sadai
 - c. Peningkatan iklim investasi dan kemudahan berusaha dalam mendorong tumbuhnya kawasan industri
 - d. Mendorong kolaborasi multipihak (terutama BUMN)
6. Pengembangan Kawasan Transmigrasi Batu Betumpang yang berpusat di Kecamatan Pulau Besar

Kawasan Transmigrasi Batu Betumpang telah ditetapkan sebagai Kawasan Transmigrasi berdasarkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 tahun 2016 tentang Penetapan Kawasan Transmigrasi. Adapun deleniai Kawasan Transmigrasi Batu Betumpang ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Kecamatan	Desa	SKP
Pulau Besar	1.Batu Betumpang	KPB Batu Betumpang
Simpang Rimba	2.Gudang	SKP Simpang Rimba
	3.Sebagin	
	4.Rajik	
	5.Permis	
	6.Simpang Rimba	
	7.Bangka Kota	
Payung	8.Jelutung II	SKP Payung
	9.Bedengung	
	10.Irat	
	11.Ranggung	
	12.Sengir	
Pulau Besar	13.Nadung	SKP Payung
	14.Panca Tunggal	
	15.Fajar Indah	
	16.Sukajaya	
	17.Sumber Jaya Permai	

Kecamatan	Desa	SKP
Air Gegas	18.Pergam	SKP Air Gegas
	19.Bencah	
	20.Air Gegas	
	21.Delas	
	22.Sidoharjo	
	23.Nyelanding	
	24.Nangka	
	25.Ranggas	
26.Tepus		

Sumber : Lampiran Keputusan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2016.

Intervensi Kebijakan

- a. Meningkatkan kualitas jalan, irigasi, listrik, air bersih, jaringan telekomunikasi, sekolah, dan fasilitas kesehatan untuk mendukung kehidupan sosial-ekonomi masyarakat.
 - b. Optimalisasi pemanfaatan lahan produktif (pertanian, perkebunan, dan perikanan).
 - c. Pengembangan sentra produksi dan hilirisasi.
 - d. Penguatan kelembagaan ekonomi lokal
 - e. Peningkatan kapasitas SDM
 - f. Pengembangan konektivitas dan akses pasar dalam mendorong pengembangan kawasan transmigrasi
 - g. Diversifikasi pangan dalam mendukung ketahanan pangan daerah.
7. Pengembangan Komoditas Lada Putih di Kecamatan Air Gegas

Arah Pembangunan Kewilayahan dalam RPJMN 2025-2029 menetapkan Kabupaten Bangka Selatan menjadi lokus Pengembangan Komoditas Lada Putih. Lokus Pengembangan (Budidaya) Lada Putih adalah didasarkan pada Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor 188.45/241/BPPPD/2017 tentang Penetapan Lokasi Pengembangan Kawasan Perdesaan Berbasis Lada Putih yang terdiri dari Desa Air Gegas (sebagai Pusat Kawasan), Desa Nyelanding, Desa Delas dan Desa Air Bara.

Intervensi Kebijakan

- a. Peningkatan produktivitas dan mutu lada putih
- b. Pengembangan hilirisasi dan industri pengolahan lada putih
- c. Peningkatan akses pasar dan branding produk melalui promosi, sertifikasi mutu, penguatan merek dagang lokal, dan pengembangan jaringan distribusi yang efisien.
- d. Penguatan kelembagaan petani
- e. Peningkatan pemanfaatan teknologi dan inovasi pertanian

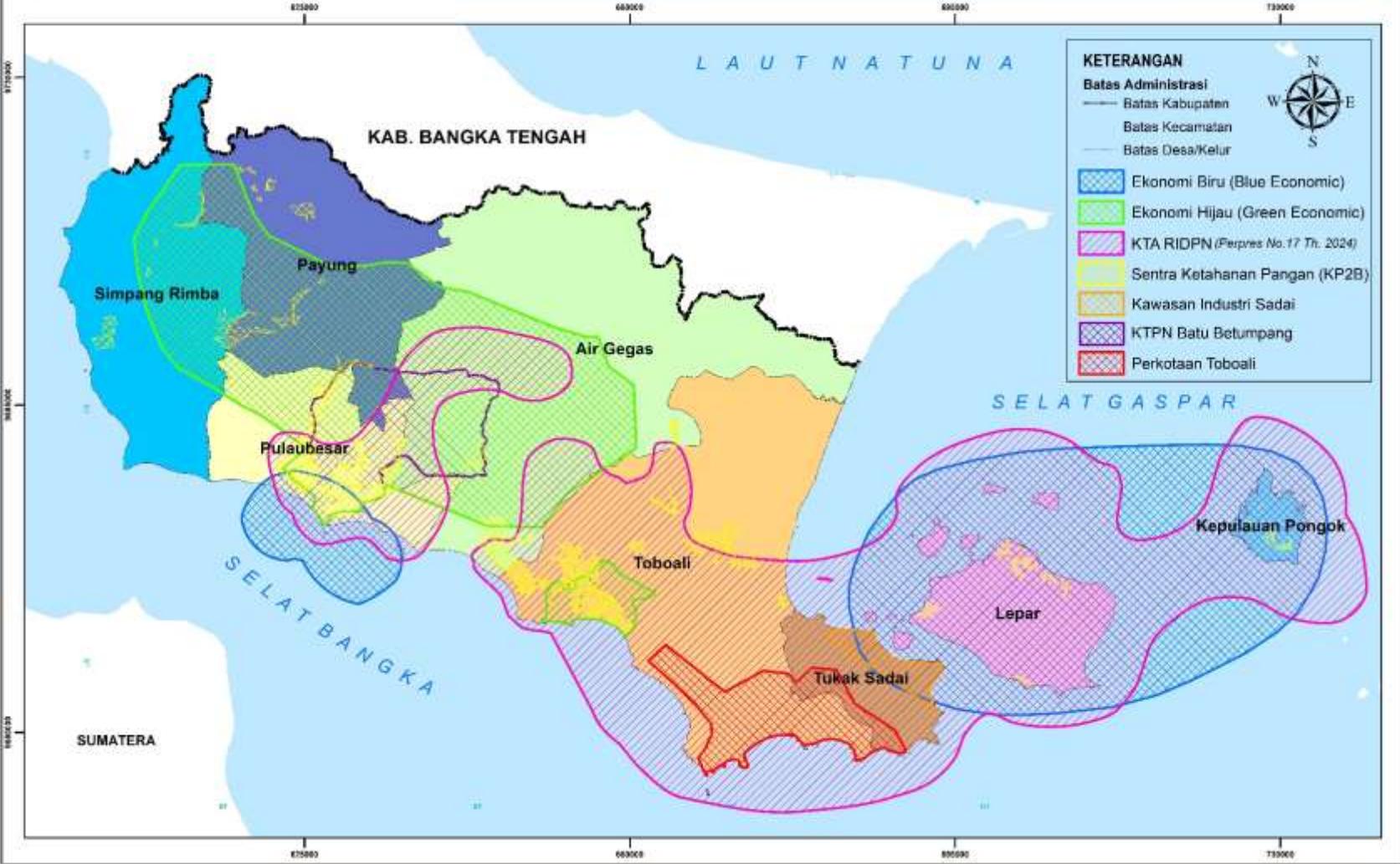
8. Pembangunan Kawasan Perkotaan Toboali

Kawasan Perkotaan Toboali merupakan Kawasan Strategis Berdasarkan Sudut Kepentingan Ekonomi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan No. 6 Tahun 2014 tentang RTRW Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2014-2034 meliputi bagian wilayah Kecamatan Toboali. Pembangunan Kawasan Perkotaan Toboali akan dilanjutkan melalui pembangunan sarpras publik perkotaan serta penataan kawasan perkotaan diantaranya lanjutan penataan Kawasan Simpang Lima, Jalan Jenderal Sudirman, Kawasan Jalan Merdeka, Lapangan Merdeka, Kawasan Jalan Ahmad Yani, Kawasan Pesisir Tanjung Ketapang, Kawasan Pecinan Batu Licin serta Kawasan Pendukung/ Pengembangan Perkotaan Toboali Lainnya.

Intervensi Kebijakan

- a. Peningkatan infrastruktur dan sarana prasarana perkotaan
- b. Penataan wajah kota dan pengelolaan lingkungan perkotaan yang berkelanjutan
- c. Pengembangan ekonomi dan daya saing perkotaan
- d. Memperkuat branding dan identitas kawasan perkotaan
- e. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan

PETA PENGEMBANGAN KEWILAYAHAN KABUPATEN BANGKA SELATAN 2025 - 2029



BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH & KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan di Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2025 – 2029 didukung dengan program perangkat daerah selama 5 (lima) tahun kedepan yang tertuang didalam Bab IV Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025 – 2029. Rencana program Perangkat Daerah dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030, yang merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah yaitu pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode 2030-2034.

Rencana program perangkat daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 - 2030 dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan, 2 (dua) unsur pendukung urusan pemerintahan, 6 (enam) unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur pengawasan urusan pemerintahan, dan 1 (satu) unsur pemerintahan umum.

Tabel 4.1
Program Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										OPD PENANGGUNG JAWAB	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan														
Program Pengelolaan Pendidikan	APS (5-6)	70,75	76,83	Rp6.500.000.000	79,87	Rp6.600.000.000	82,91	Rp6.700.000.000	82,88	Rp6.800.000.000	88,85	Rp6.820.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	APS SD/SMP (7-12)	96,88	97,73	Rp24.200.000.000	98,16	Rp24.500.000.000	98,59	Rp24.900.000.000	99,01	Rp25.500.000.000	99,44	Rp26.035.500.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	APS KESETARAAN (7-18)	13,74	15,27	Rp7.200.000.000	16,03	Rp7.500.000.000	16,79	Rp7.900.000.000	17,55	Rp8.000.000.000	18,32	Rp8.144.500.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										OPD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Pendidik dan Tenaga kependidikan	Persentase tenaga pendidik yang memiliki ijazah D IV/S1	87,07	88	Rp330.000.000	88,33	Rp335.000.000	89	Rp340.000.000	89,83	Rp345.000.000	96,83	Rp350.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan													
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	67,6	90	Rp14.241.534.684	90	Rp16.855.611.418	90	Rp18.327.240.363	90	Rp19.243.602.381	90	Rp19.554.039.625	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase Penderita Penyakit menular dan Tidak Menular prioritas yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar (%)	104,6	100	Rp674.113.000	100	Rp707.818.650	100	Rp743.209.583	100	Rp780.370.062	100	Rp819.388.565	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase Penderita Penyakit menular dan Tidak Menular prioritas yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar (%)	100	100	Rp10.000.000	100	Rp10.100.000	100	Rp10.201.000	100	Rp10.303.010	100	Rp10.406.040	RS Kriopanting

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										OPD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Persentase lanjut usia yang mandiri (%) (%)	82	87	Rp646.195.000	89	Rp678.504.750	90	Rp712.429.988	95	Rp748.051.487	100	Rp785.454.061	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	82	87	Rp66.963.723.300	89	Rp70.517.473.217	90	Rp73.417.024.755	95	Rp77.087.875.993	100	Rp81.596.512.662	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase Kompetensi Layanan Rumah Sakit	33	50	Rp5.002.505.118	62,5	Rp4.070.579.653	75	Rp3.622.152.804	87,5	Rp4.058.374.332	100	Rp3.894.958.075	RSUD Junjung Besaoh
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (%)	84	86	Rp373.200.000	88	Rp391.860.000	88	Rp411.453.000	92	Rp432.025.650	96	Rp453.625.933	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										OPD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	168,3	180,53	Rp75.000.000	181,27	Rp98.595.000	181,27	Rp103.524.750	181,78	Rp108.700.987,50	182,06	Rp114.136.036,88	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	7	50,22	Rp2.424.500.000	50,79	Rp2.545.725.000	50,79	Rp2.673.011.250	51,27	Rp2.806.661.813	51,67	Rp2.946.994.903	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Rasio Dokter Spesialis per 100.000 Penduduk (Angka)	10,84	11,28	Rp7.679.500.000	11,5	Rp7.756.295.000	11,73	Rp7.833.857.950	11,97	Rp7.912.196.530	12,21	Rp7.991.318.495	RSUD Junjung Besaoh
	Rasio Dokter Spesialis per 100.000 Penduduk (Angka)	21,95	22,95	Rp6.415.600.000	23,45	Rp6.479.756.000	23,95	Rp6.544.553.560	24,45	Rp6.609.999.096	24,95	Rp6.676.099.087	RS Kriopanting

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										OPD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Cakupan sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan makanan minuman (%)	90	91,10	Rp232.680.000	91,50	Rp244.314.000	92	Rp256.529.700	92,50	Rp269.356.185	93,00	Rp282.823.994	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan minimal 75% posyandu siklus hidup yang aktif (%)	25	36	Rp75.000.000	46	Rp79.000.000	66	Rp83.125.000	81	Rp87.381.250	90	Rp92.775.313	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase Puskesmas yang menerapkan indikator germas (%)	16	20	Rp88.213.500	22	Rp92.624.175	24	Rp97.255.384	26	Rp102.118.153	28	Rp107.224.061	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Urusan Pemerintahan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang													
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio Jaringan Irigasi (0-1)	0,2	0,24	Rp3.576.000.000	0,28	Rp3.593.880.000	0,32	Rp3.611.849.400	0,36	Rp3.629.908.647	0,4	Rp3.648.058.190	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										OPD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Cakupan Pelayanan Sistem Jaringan Drainase Permukiman	53,6	55,27	Rp1.075.000.000	56,1	Rp1.076.075.000	56,94	Rp1.077.151.075	57,77	Rp1.078.228.226	58,6	Rp1.079.306.454	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Penataan Bangunan Gedung	Gedung Negara Kondisi Baik (%)	97,55	98,37	Rp250.000.000	98,78	Rp250.250.000	99,18	Rp250.500.250	99,59	Rp250.750.750	100	Rp251.001.501	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Realisasi Pembangunan Wajah Kota (%)	38,46	59	Rp18.500.000.000	69,2	Rp16.500.000.000	79,5	Rp21.500.000.000	90	Rp16.500.000.000	100	Rp14.350.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Cakupan Pengawasan Pembinaan dan Penataan Usaha Jasa Konstruksi (%)	41	52,33	200000000	58,00	Rp210.000.000	63,67	220500000	69,33	231525000	75	243101250	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										OPD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap (%)	70,58	71,85	Rp23.547.600.000	72,83	Rp25.902.360.000	73,91	28492596000	75,11	31341855600	76,05	34476041160	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan 1000 Penduduk (Angka)	0,68	0,70	1576000000	0,73	Rp1.733.600.000	0,73	19069600000	0,74	2097656000	0,75	2307421600	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Memiliki Akses Air Limbah Domestik (%)	91,68	94,54	Rp2.128.372.093	95,84	Rp2.234.790.699	97,23	2346530233	98,61	2463856744	100	Rp2.587.049.581	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Ketaatan Terhadap RTRW (%)	55,58	100	500000000	100	Rp550.000.000	100	600000000	100	650000000	100	700000000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										OPD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Memiliki Akses Air Minum (%)	83,74	89,16	Rp1.517.600.000	91,87	Rp1.593.480.000	94,58	1673154000	97,29	1759811700	100	1844652285	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman													
Program Pengembangan Perumahan	Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Terdampak Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten (%)	0	100	600000000	100	Rp650.000.000	100	700000000	100	750000000	100	Rp800.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 (Sepuluh) Ha di kabupaten/kota yang ditangani	0	0,75	Rp400.000.000	1,5	Rp420.000.000	2,25	Rp441.000.000	3	Rp463.050.000	3,75	Rp486.202.500	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase jumlah rumah tidak layak huni (%)	5,13	5,1	Rp500.000.000	5,06	Rp525.000.000	5,03	551250000	4,99	Rp578.812.500	4,95	Rp607.753.125	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										OPD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase unit rumah dalam perumahan yang dilengkapi PSU (%)	0,14	0,16	Rp537.500.000	0,18	Rp564.375.000	0,19	Rp592.593.750	0,2	Rp622.223.438	0,25	Rp653.334.609	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat													
Program peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penegakan Perda dan Perkada (%)	80,7	81	Rp37.725.000	82	Rp38.668.125	83	Rp39.634.828	84	Rp40.625.699	85	Rp41.641.341	Satuan Polisi Pamong Praja
	Persentase Tingkat Penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) (%)	80	83	Rp82.475.000	83	Rp84.53.687	83	Rp86.650.297	85	Rp88.816.554	86	Rp91.036.968	Satuan Polisi Pamong Praja
Program Penanggulangan Bencana	Persentase Pelayanan Kebencanaan di 8 Kecamatan Yang Diintervensi Dalam Kedaruratan Penanggulangan Bencana (%)	90	90	Rp153.750.000	90	Rp157.593.000	90	Rp161.533.500	90	Rp165.572.000	90	Rp165.572.000	Satuan Polisi Pamong Praja

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										OPD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (%)	100	100	Rp250.000.000	100	Rp275.000.000	100	Rp300.000.000	100	Rp325.000.000	100	Rp350.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
Urusan Pemerintahan Bidang Sosial													
Program Pemberdayaan Sosial	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial Yang meningkat Kompetensinya dalam pelayanan sosial (%)	23	40	Rp257.500.000	60	Rp272.500.000	80	Rp281.250.000	100	Rp292.500.000	100	Rp292.500.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang meningkat kualitasnya dalam Pelayanan sosial (%)	38	50	Rp257.500.000	63	Rp272.500.000	75	Rp281.250.000	100	Rp292.500.000	100	Rp292.500.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar, dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Diluar Panti	100	100	Rp530.000.000	100	Rp557.500.000	100	Rp582.500.000	100	Rp615.000.000	100	Rp615.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										OPD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penduduk Miskin yang masuk Pendataan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DT-SEN) yang valid (%)	15.50	42.68	Rp1.324.250.000	42.22	Rp1.353.112.500	41.86	Rp1.407.604.375	41.44	Rp1.411.745.031	41.40	Rp1.411.745.031	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada saat dan setelah tanggap Darurat Bencana (%)	100	100	Rp160.000.000	100	Rp225.000.000	100	Rp225.000.000	100	Rp265.000.000	100	Rp265.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja													
Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	0	100%	Rp80.000.000	0	Rp0	0	-	0	-	1	Rp100.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terlatih (Orang)	29	48	Rp130.000.000	50	Rp150.000.000	64	Rp220.000.000	70	Rp250.000.000	80	Rp320.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										OPD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Penempatan Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Orang)	44	50	Rp70.000.000	50	Rp70.000.000	63	Rp80.000.000	75	Rp100.000.000	83	Rp120.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Hubungan Industrial	Persentase Terbinanya perusahaan yang menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS, Bipartit, Struktur Skala Upah dan Terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)	30,49	40	Rp80.000.000	45	Rp85.000.000	55	Rp100.000.000	60	Rp105.000.000	65	Rp120.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak													
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang aktif (%)	60	70	Rp115.000.000	80	Rp125.000.000	80	Rp135.000.000	90	Rp150.000.000	90	Rp150.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Perlindungan Perempuan	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPD yang mendapatkan layanan komprehensif (%)	100	100	Rp30.000.000	100	Rp35.000.000	100	Rp37.500.000	100	Rp37.500.000	100	Rp37.500.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										OPD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Anak Memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif (%)	100	100	Rp39.000.000	100	Rp44.000.000	100	Rp46.000.000	100	Rp50.000.000	100	Rp50.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Urusan Pemerintahan Bidang Pangan													
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	87,4	90,3	Rp80.000.000	90,5	Rp90.000.000	90,7	Rp100.000.000	91	Rp110.000.000	91,3	Rp120.000.000	Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Desa Rentan Rawan Pangan yang diintervensi (%)	84	87	Rp50.000.000	90.00	Rp60.000.000	95.00	Rp70.000.000	100	Rp80.000.000	100	Rp100.000.000	Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan.	90	90	Rp25.000.000	90	Rp25.000.000	90	Rp25.000.000	90	Rp25.000.000	90	Rp25.000.000	Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan
Urusan Pemerintahan Pertanahan													

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										OPD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Persentase Penanganan Masalah Penetapan Tanah untuk Pembangunan Fasilitas Umum (%)	0	100	Rp350.000.000	100	Rp357.000.000	100	Rp364.140.000	100	Rp371.422.800	100	Rp378.851.256	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Urusan Lingkungan Hidup													
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Yang ditinadlanjuti (%)	100	0	0	100	200000000	0	0	0	0	100	250000000	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan Persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	54,3	60,8	1250000000	63,8	Rp1.500.000.000	64,8	1750000000	66,8	2000000000	67,8	2500000000	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	IKA, IKU, IKL	59,05 93,74 38,6	72,02 83,14 63,01	305350000	72,42 83,54 63,15	Rp575.000.000	72,42 83,54 63,15	575000000	72,62 83,74 63,22	665000000	72,82 83,94 63,29	695000000	Dinas Lingkungan Hidup

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										OPD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Ruang Terbuka Hijau (%)	1,07	20	Rp2.500.000.000	20	Rp300.000.000	20	325000000	20	350000000	20	350000000	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang terkelola	76,74	77	Rp45.000.000	79	Rp50.000.000	81	Rp50.000.000	83	Rp50.000.000	85	Rp50.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	% Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUULH	66	67	Rp80.000.000	69	Rp144.500.000	70	Rp104.500.000	71	Rp116.000.000	71	Rp80.000.000	
Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil													
Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Identitas Dokumen Kependudukan (%)	82,9	85,6	Rp70.000.000	87,12	Rp80.000.000	90,2	Rp90.000.000	95,4	Rp95.000.000	99,1	Rp100.000.000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										OPD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil (%)	76,17	81	Rp510.000.000	87	Rp520.000.000	91	Rp530.000.000	94	Rp540.000.000	97	Rp550.000.000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang dimanfaatkan(%)	100	100	Rp55.000.000	100	Rp61.000.000	100	Rp68.000.000	100	Rp75.000.000	100	Rp79.000.000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Urusan Pemerintahan Desa													
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Maju yang berubah status menjadi Desa Mandiri (%)	20	28	Rp1.735.000.000	36	Rp1.827.000.000	44	Rp1.918.612.500	56	Rp2.014.543.125	60	Rp2.115.270.286	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang berperan aktif dalam membangun Desa (%)	80	84	Rp1.020.000.000	88	Rp1.071.000.000	92	Rp1.124.550.000	96	Rp1.180.777.500	100	Rp1.239.816.374	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										OPD PENANGGUNG JAWAB	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana														
Program Pengendalian Penduduk	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	63,6	76,4	Rp85.000.000	79,5	Rp89.250.000	81,5	Rp93.712.500	82,5	Rp98.398.125	83,6	Rp103.318.031	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri (%)	35,8	37,7	Rp30.000.000	38,5	Rp31.500.000	39,3	Rp33.075.000	40,1	Rp34.728.750	40,7	Rp36.465.188	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	58,30	64,92	Rp126.000.000	65,19	Rp132.300.000	65,46	Rp138.915.000	65,73	Rp145.860.750	66	Rp153.153.788	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Program Pembinaan Keluarga Berencana	Persentase kehamilan yang tidak direncanakan (KTD) (%)	11,50	6,8	Rp90.513.500	5,7	Rp94.613.425	5	Rp99.253.634	4,6	Rp104.216.315	4,4	Rp108.887.131	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										OPD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi (%)	94	94	Rp428.798.500	94	Rp450.238.425	94	Rp472.750.346	94	Rp496.387.864	94,1	Rp521.207.257	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase Keluarga yang mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (%)	90	91	Rp207.144.400	92	Rp215.001.620	93	Rp223.251.701	94	Rp231.914.286	95	Rp241.010.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja	82,10	84,7	Rp77.144.400	85,9	Rp81.001.620	86,9	Rp85.051.701	87,9	Rp91.704.289	88,8	Rp96.394.504	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Indeks Lansia Berdaya	57,00	59,2	Rp10.000.000	60,3	Rp10.500.000	61,3	Rp11.025.000	62,3	Rp11.576.250	63,2	Rp12.155.063	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Urusan Pemerintahan Perhubungan													

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										OPD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio Konektivitas Angkutan Jalan (0 -1)	0,64	0,64	Rp2.700.000.000	0,66	Rp2.800.000.000	0,69	Rp2.900.000.000	0,71	Rp3.000.000.000	0,76	Rp3.100.000.000	Dinas Perhubungan
Program Pengelolaan Pelayaran	Rasio Konektivitas Angkutan Pelayaran (0 -1)	0,31	0,34	1150000000	0,36	Rp1.178.750.000	0,39	Rp1.208.218.750	0,41	Rp1.238.424.219	0,43	Rp1.269.384.824	Dinas Perhubungan
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika													
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik (Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota)	6,97	60	Rp681.687.084	75	Rp690.000.000	80	Rp700.000.000	85	Rp750.000.000	90	Rp800.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase tata kelola e-lektronik government yang dikembangkan/dibangun	55	95	Rp681.687.084	96	Rp1.200.000.000	96,5	Rp1.300.000.000	97	Rp1.400.000.000	97,5	Rp1.500.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										OPD PENANGGUNG JAWAB	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Urusan Pemerintahan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah														
Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase Peningkatan Koperasi Berkualitas (%)	69 koperasi	10	75000000	20	Rp100.000.000	30	Rp100.000.000	40	Rp125.000.000	50	150000000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, Perdagangan	
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro	Persentase Usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke Formal (%)	23% (10,798)	24% (500 UKM)	Rp180.037.500	25% (500 UKM)	Rp205.500.000	26% (500 UKM)	Rp227.500.000	27% (500 UKM)	Rp257.500.000	28% (500 UKM)	Rp325.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, Perdagangan	
	Pertumbuhan Wirausaha	99% (46,543)	99%	Rp180.037.500	99%	Rp205.500.000	99%	Rp227.500.000	100%	Rp257.500.000	100%	Rp325.000.000		
Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal														

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										OPD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	100	100	Rp250.000.000	100	Rp275.000.000	100	Rp300.000.000	100	325000000	100	350000000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Jumlah Investor PMA dan PMDN	77%	80%	230000000	82%	Rp250.000.000	82%	250000000	82%	250000000	85%	250000000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal	Ketaatan Pelaporan Pelaku Usaha Terhadap LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)	55%	60%	Rp100.000.000	70%	Rp110.000.000	75%	Rp120.000.000	80%	Rp130.000.000	85%	Rp135.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga													
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan kepemudaan	3,95	3,99	Rp405.526.000	4,01	Rp455.526.000	4,03	Rp505.526.000	4,04	Rp555.526.000	4,06	Rp605.526.000	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										OPD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase atlit yang masuk Pelatda (%)	26,45	27,32	Rp4.642.784.200	27,75	Rp4.692.784.200	28,19	Rp4.742.784.200	28,62	Rp4.792.784.200	29,05	Rp4.842.784.200	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kepramukaan (%)	5,43	5,68	Rp200.000.000	5,80	Rp200.000.000	5,93	Rp200.000.000	6,05	Rp200.000.000	6,18	Rp200.000.000	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Urusan Pemerintahan Bidang Statistik													
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	85%	86%	Rp30.000.000	90%	Rp40.000.000	92%	Rp50.000.000	95%	Rp55.000.000	96%	Rp60.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
Urusan Pemerintahan Bidang Persandian													

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										OPD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian	10%	11%	Rp50.000.000	12%	Rp100.000.000	13%	Rp150.000.000	14%	Rp200.000.000	15%	Rp250.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan													
Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi (%)	20,41	30,61	Rp916.000.000	34,7	Rp1.212.000.000	38,78	Rp1.221.000.000	42,86	Rp1.230.000.000	46,94	Rp1.239.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase benda, bangunan, struktur dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	14,49	21,74	Rp140.000.000	24,64	Rp152.000.000	27,53	Rp164.000.000	30,43	Rp176.000.000	33,33	Rp188.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan													

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										OPD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	62,22	64,34	Rp50.000.000	66,56	Rp75.000.000	68,76	Rp100.000.000	70,12	Rp1.325.000.000	72,23	Rp1.400.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan													
Program Pengelolaan Arsip	Persentase OPD Pengelolaan Arsip Baku (%)	86,2	100	Rp20.000.000	100	Rp30.000.000	100	Rp40.000.000	100	Rp50.000.000	100	Rp60.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase Arsip Statis OPD yang tersimpan dan tertata (%)	37,93	86	Rp5.000.000	88	Rp15.000.000	90	Rp25.000.000	92	Rp35.000.000	94	Rp45.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Urusan Pemerintahan Kelautan Dan Perikanan													
Program Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)	41.019,6	41.844,11	Rp500.000.000	42.262,56	Rp525.000.000	42.685,18	550000000	43.112,03	Rp575.000.000	43.543,15	600000000	Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										OPD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	1.479,47	1509,21	Rp500.000.000	1524,3	Rp525.000.000	1539,54	550000000	1554,94	Rp575.000.000	1570,49	600000000	Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan (ton)	1.019,61	1040,1	150000000	1050,5	Rp155.000.000	1061,01	160000000	1071,62	165000000	1082,33	170000000	Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan
Urusan Pemerintahan Pariwisata													
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Peningkatan daya tarik destinasi wisata yang dikelola (%)	16,28	20,93	Rp900.000.000	23,26	Rp1.000.000.000	25,58	1100000000	27,91	1200000000	30,23	Rp1.200.000.000	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Program Pemasaran Pariwisata	Ketersediaan Media Pemasaran Pariwisata Sesuai Rencana (%)	66,67	80	Rp150.000.000	86,67	Rp160.000.000	93,33	Rp175.000.000	100	Rp185.000.000	100	Rp190.000.000	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										OPD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif (%)	37,69	40,23	Rp1.500.000.000	41,50	Rp1.550.000.000	42,77	Rp1.600.000.000	44,04	Rp1.650.000.000	45,30	Rp1.700.000.000	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian													
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (ton)	30290,18	33394,92	Rp1.000.000.000	35064,67	Rp1.250.000.000	36817,9	Rp1.500.000.000	38658,8	Rp1.750.000.000	40591,74	Rp2.000.000.000	Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan
	Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan (ton)	59712,97	65833,55	Rp350.000.000	69125,23	Rp400.000.000	72582,49	Rp450.000.000	76210,56	Rp500.000.000	80021,09	Rp550.000.000	Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan
	Peningkatan Produksi Holtikultura	126386,3	139340,9	Rp350.000.000	146307,94	Rp400.000.000	153623,34	Rp450.000.000	161304,5	Rp500.000.000	169369,73	Rp550.000.000	Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										OPD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Peningkatan Populasi Ternak (sapi)	2430	2528	Rp250.000.000	2578	Rp275.000.000	2630	Rp300.000.000	2682	Rp325.000.000	2736	Rp350.000.000	Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan
	Ketersediaan Sarana Pertanian (%)	80	80,80	Rp1.000.000.000	81,61	Rp1.250.000.000	82,42	Rp1.500.000.000	83,25	Rp1.750.000.000	84	Rp2.000.000.000	Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Luas LP2B yang produktif	6.600	6.700	Rp1.000.000.000	6.825	Rp1.200.000.000	6.975	1300000000	7.175	1350000000	7.425	1500000000	Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan
	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian	67,5	68,18	Rp1.000.000.000	68,86	Rp1.200.000.000	69,55	1300000000	70,24	1350000000	70,94	1500000000	Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										OPD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Cakupan Penanganan Bencana OPT (Ha)	245,8 Hektar	50%	Rp350.000.000	55%	Rp400.000.000	60%	Rp450.000.000	65%	Rp500.000.000	70%	Rp550.000.000	Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan
	Cakupan Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (Ha)	-	50%	Rp100.000.000	50%	Rp100.000.000	50%	Rp100.000.000	50%	Rp100.000.000	50%	Rp100.000.000	Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan
Program Penyuluhan Pertanian	Persentase SDM Pertanian yang Ditingkatkan	-	3,00%	Rp30.000.000	3,50%	Rp50.000.000	3,70%	Rp80.000.000	4,00%	Rp110.000.000	5,00%	Rp140.000.000	Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan
	Peningkatan kelas Kelembagaan Petani yang di bentuk dan beroperasi	-	5	Rp30.000.000	7	Rp50.000.000	10	Rp80.000.000	12	Rp110.000.000	15	Rp140.000.000	Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										OPD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Tingkat Pengendalian penyakit hewan menular Strategis (PHMS).	100%	100%	Rp100.000.000	100%	Rp100.000.000	100%	Rp100.000.000	100%	Rp100.000.000	100%	Rp100.000.000	Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan
	Jumlah Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang belum /sudah memiliki sertifikat NKV (Nomor Kontrol Veteriner) yang dilakukan pembinaan	-	1	Rp50.000.000	2	Rp100.000.000	3	Rp150.000.000	4	Rp200.000.000	5	Rp250.000.000	Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan
Urusan Pemerintahan Perdagangan													
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (%)	11 pasar (65%)	70%	100000000	77%	Rp150.000.000	82%	200000000	88%	250000000	94%	300000000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, Perdagangan
Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen(%)	500 uttp	5%	300000000	10%	300000000	15%	350000000	20%	400000000	25%	500000000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, Perdagangan
Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian													

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										OPD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri	0,5	1%	1500000000	1,25%	Rp160.000.000	1,50%	1700000000	1,75%	1800000000	2%	2000000000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, Perdagangan
Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi													
Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi	81,36	82,816	Rp30.000.000	83,544	Rp30.000.000	84,272	Rp30.000.000	85	Rp30.000.000	85	Rp30.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Urusan Perencanaan													
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi Program RPJMD ke Dalam RKPD (%)	100	100	Rp795.000.000	100	Rp808.000.000	100	Rp816.460.000	100	Rp835.000.000	100	Rp839.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Persentase Konsistensi Program RKPD ke Dalam APBD (%)	100	100	Rp355.000.000	100	Rp365.000.000	100	Rp375.000.000	100	Rp385.000.000	100	Rp385.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD Pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)	100	100	Rp400.000.000	100	Rp408.000.000	100	Rp416.160.000	100	Rp424.483.200	100	Rp432.972.864	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										OPD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Persentase Keselarasan RKPd dengan Renja PD Pada Bidang Perekonomian dan SDA (%)	100	100	Rp400.000.000	100	Rp408.000.000	100	Rp416.160.000	100	Rp424.483.200	100	Rp432.972.864	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Persentase Keselarasan RKPd dengan Renja PD Pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%) RKPd dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan(%)	100	100	Rp400.000.000	100	Rp408.000.000	100	Rp416.160.000	100	Rp424.483.200	100	Rp432.972.864	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Urusan Pemerintahan Keuangan													
	Persentase Konsistensi Tahapan dan Jadwal Penyusunan APBD sesuai dengan Ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan (%)	85,71	100	Rp826.000.000	100	Rp920.000.000	100	Rp920.000.000	100	Rp920.000.000	100	Rp920.000.000	Badan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan PD yang sesuai dengan standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Tepat Waktu	93,75	100	Rp280.000.000	100	Rp280.000.000	100	Rp280.000.000	100	Rp280.000.000	100	Rp280.000.000	Badan Keuangan Daerah

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										OPD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Persentase Kesesuaian Realisasi Belanja berdasarkan Sumber Pendanaan	98,52	100	Rp14.523.721.259	100	Rp115.583.388.771	100	Rp116.714.222.659	100	Rp117.856.364.886	100	Rp119.069.928.535	Badan Keuangan Daerah
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Aset Tanah Pemerintah yang Bersertifikat (%)	46,94	59,94	Rp80.000.000	72,94	Rp80.000.000	85,94	Rp80.000.000	92,96	Rp80.000.000	100	Rp80.000.000	Badan Keuangan Daerah
	Persentase Penghapusan aset rusak berat	3,65	14,16	Rp280.000.000	14,16	Rp280.000.000	17,95	Rp280.000.000	17,95	Rp280.000.000	17,95	Rp280.000.000	Badan Keuangan Daerah
Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pajak Daerah Terhadap PAD (%)	40,18	44,66	Rp610.500.000	44,67	Rp610.500.000	44,68	Rp660.500.000	44,7	Rp610.500.000	44,71	Rp610.500.000	Badan Keuangan Daerah
	Persentase Realisasi ETPD Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	52,83	88	Rp50.000.000	90	Rp50.000.000	92	Rp50.000.000	94	Rp50.000.000	95	Rp50.000.000	Badan Keuangan Daerah

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										OPD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Pertumbuhan Pajak Daerah	-10,3	2,31	Rp100.000.000	2,85	Rp100.000.000	4,73	Rp100.000.000	4,74	Rp100.000.000	5	Rp100.000.000	Badan Keuangan Daerah
Urusan Kepegawaian													
Program Kepegawaian Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	1,36	10	Rp101.000.000	10	Rp101.000.000	10	Rp101.000.000	10	Rp101.000.000	10	Rp101.000.000	Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	82,87	100	Rp157.000.000	100	Rp157.000.000	100	Rp157.000.000	100	Rp157.000.000	100	Rp157.000.000	Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya	1,36	10	Rp130.000.000	10	Rp130.000.000	10	Rp130.000.000	10	Rp130.000.000	10	Rp130.000.000	Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	Persentase pegawai dengan SKP bernilai baik	73,45	80	Rp85.000.000	85	Rp85.000.000	87	Rp85.000.000	89	Rp85.000.000	90	Rp85.000.000	Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										OPD PENANGGUNG JAWAB	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Urusan Pendidikan dan Pelatihan														
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial, dan fungsional (%)	0,16	10	Rp280.000.000	10	Rp280.000.000	10	Rp280.000.000	10	Rp280.000.000	19	Rp280.000.000	Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
	Persentase ASN yang memiliki sertifikasi kompetensi	19,23	20	Rp695.000.000	35	Rp695.000.000	40	Rp695.000.000	60	Rp695.000.000	70	Rp695.000.000	Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
Urusan Penelitian dan Pengembangan														
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase implementasi rencana kelitbangan	100	100	Rp79.376.000	100	Rp440.000.000	100	Rp381.000.000	100	Rp322.200.000	100	Rp101.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
Program Riset dan Inovasi Daerah	Persentase Kajian berbasis bukti dalam pengembangan PUD dan Permasalahan Daerah	100	100	Rp198.204.000	100	Rp511.725.500	100	Rp468.241.843	100	Rp486.449.503	100	Rp507.040.513	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										OPD PENANGGUNG JAWAB	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Urusan Pengawasan														
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Penyelesaian Pengawasan Sesuai Ketentuan	99	99	Rp850.000.000	99	Rp850.000.000	99	Rp850.000.000	99	Rp850.000.000	99	Rp850.000.000	Inspektorat Daerah	
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Penyelesaian Pendampingan/Asistensi Sesuai Ketentuan	99	99	Rp410.000.000	99	Rp410.000.000	99	Rp410.000.000	99	Rp410.000.000	99	Rp410.000.000	Inspektorat Daerah	
Urusan Sekretariat Daerah														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP PD	64,67	66	Rp6.500.000.000	67	Rp6.750.000.000	68	Rp7.000.000.000	69	Rp7.250.000.000	70	Rp7.250.000.000	Sekretariat Daerah	
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (%)	100	100	Rp3.200.000.000	100	Rp3.800.000.000	100	Rp4.400.000.000	100	Rp5.000.000.000	100	Rp5.350.000.000	Sekretariat Daerah	

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										OPD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Perekonomian Dan Pembangunan	Efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan (%)	100	100	Rp783.006.660	100	Rp861.307.326	100	Rp947.438.059	100	Rp1.042.181.864	100	Rp1.146.400.051	Sekretariat Daerah
Urusan Sekretariat DPRD													
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Ketetapan Penetapan Perda APBD Tahun N	0	2	Rp16.800.000.000	2	Rp18.800.000.000	2	Rp20.800.000.000	2	Rp22.800.000.000	2	Rp24.800.000.000	Sekretariat DPRD
	Persentase penetapan Ranperda Tahun N (%)	0	100	Rp12.600.000.000	100	Rp14.100.000.000	100	Rp15.600.000.000	100	Rp17.100.000.000	100	Rp18.600.000.000	Sekretariat DPRD
	Persentase pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang terfasilitasi	0	100	Rp12.600.000.000	100	Rp14.100.000.000	100	Rp15.600.000.000	100	Rp17.100.000.000	100	Rp18.600.000.000	Sekretariat DPRD
Urusan Pemerintahan (Kecamatan)													

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										OPD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelayanan Terpadu Kecamatan sesuai SP dan SOP (%)	100	100	Rp181.500.000	100	Rp190.000.000	100	Rp201.625.000	100	Rp214.381.250	100	Rp227.775.313	Kecamatan
	Persentase Partisipasi Desa dalam Musrenbangcam (%)	100	100	Rp168.000.000	100	Rp189.500.000	100	Rp193.075.000	100	Rp194.728.750	100	Rp196.465.188	Kecamatan
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kecamatan yang Aktif dan Kegiatan Kesejahteraan Sosial yang Difasilitasi	100	100	Rp1.111.000.000	100	Rp498.100.000	100	Rp1.272.405.000	100	Rp1.354.025.250	100	Rp1.427.076.493	Kecamatan
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pelanggaran Trantibum yang tertangani	100	100	Rp119.000.000	100	Rp127.000.000	100	Rp134.000.000	100	Rp173.000.000	100	Rp203.000.000	Kecamatan

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										OPD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Partisipasi Desa dalam kegiatan Hari Besar Kebangsaan dan Keagamaan	100	100,00	Rp1.222.500.000	100	Rp1.377.000.000	100	Rp1.519.200.000	100	Rp1.549.110.000	100	Rp1.597.240.000	Kecamatan
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi	100	100	Rp92.500.000	100	Rp115.500.000	100	Rp153.650.000	100	Rp167.457.500	100	Rp187.930.375	Kecamatan
Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum													
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah yang dilaksanakan (%)	100	100	Rp155.000.000	100	Rp180.000.000	100	Rp205.000.000	100	Rp230.000.000	100	Rp230.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Program Penguatan Ideologi pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase capaian penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan (%)	100	100	Rp1.630.000.000	100	Rp1.780.000.000	100	Rp1.930.000.000	100	Rp2.080.000.000	100	Rp2.080.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										OPD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (%)	100	100	Rp2.041.000.000	100	Rp2.055.000.000	100	Rp20.121.000.000	100	Rp20.135.000.000	100	Rp2.013.500.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Program pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif (%)	50	55	Rp110.000.000	60	Rp130.000.000	65	Rp150.000.000	70	Rp170.000.000	75	Rp180.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Konflik Sosial yang tertangani (%)	83,33	85	Rp820.000.000	86	Rp840.000.000	87	Rp860.000.000	88	Rp880.000.000	89	Rp880.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah capaian realisasi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi urusan dan kewenangan pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah diukur dan dianalisis dari masukan (input), proses, keluaran (output), hasil (outcome), manfaat(benefit), dan/atau dampak(impact) berdasarkan indikator kinerja daerah yang ditetapkan pada dokumen perencanaan strategis daerah baik dokumen perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan daerah.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan periode 2025-2029 yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Indikator kinerja utama pemerintah Kabupaten Bangka Selatan yang selanjutnya disebut IKU daerah, memuat indikator kinerja tujuan dan/atau sasaran sebagai tolok ukur penilaian kinerja Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan periode 2025-2029. IKU daerah dicapai dengan dukungan pencapaian IKU perangkat daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. IKU perangkat daerah yang secara langsung mendukung pencapaian IKU daerah memiliki makna bahwa perangkat daerah tersebutlah secara tugas dan fungsi memiliki peran lebih dominan dibandingkan dengan IKU perangkat daerah dalam pencapaian indikator kinerja tujuan dan/atau sasaran dari setiap misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bangka Selatan.

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pengukuran pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dilihat melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu indikator-indikator kinerja sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan yang menjadi core business dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah sebagai upaya membangun sistem manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD (2024)	TARGET TAHUN						SUMBER DATA
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Pembangunan Manusia	Capaian pembangunan manusia dalam suatu wilayah secara lebih menyeluruh yang dipengaruhi oleh dimensi pendidikan, kesehatan dan ekonomi (pengeluaran per kapita)	Indeks	70,01	70,34	70,68	71,03	71,39	71,76	72,14	Dinas Kesehatan PPKB
2	Harapan Lama Sekolah	Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang	Tahun	11,71	11,91-11,93	11,93-11,95	11,95-11,97	11,97-11,99	11,99-12,01	12,01-12,10	Badan Pusat Statistik
3	Usia Harapan Hidup	Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu,	Tahun	71,74	72,51	72,64	72,78	72,91	73,04	73,17	Badan Pusat Statistik
4	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005,	Persen	24,6	18	17,3	16,6	15,9	15,2	14,50	Dinas Kesehatan PPKB
5	Literasi Membaca SD/Sederajat	Jumlah kabupaten/kota di provinsi X yang memiliki capaian asesmen tingkat nasional mencapai standar kompetensi minimum dibagi jumlah kabupaten/kota di provinsi X,	Persen	61,06	63,56	66,06	68,56	71,06	73,56	76,06	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6	Numerasi SD/Sederajat	Jumlah kabupaten/kota di provinsi X yang memiliki capaian asesmen tingkat nasional mencapai standar kompetensi minimum dibagi jumlah kabupaten/kota di provinsi X,	Persen	53,39	56,29	59,19	62,09	64,99	67,89	70,79	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7	Literasi Membaca SMP/Sederajat	Jumlah kabupaten/kota di provinsi X yang memiliki capaian asesmen tingkat nasional mencapai standar kompetensi minimum dibagi jumlah kabupaten/kota di provinsi X,	Persen	67,95	69,05	70,15	71,25	72,35	73,45	74,55	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8	Numerasi SMP/Sederajat	Jumlah kabupaten/kota di provinsi X yang memiliki capaian asesmen tingkat nasional mencapai standar kompetensi minimum dibagi jumlah kabupaten/kota di provinsi X,	Persen	59,79	61,29	62,79	64,29	65,79	67,29	68,79	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD (2024)	TARGET TAHUN						SUMBER DATA
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
9	Tingkat Kemiskinan	Hasil Susenas (Survey Sosial Ekonomi Nasional) yang menunjukkan persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk dalam suatu wilayah	Persen	3,74	3,30-3,65	3,04-3,56	2,78-3,47	2,52-3,39	2,26-3,30	2,01-3,21	Badan Pusat Statistik
10	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari 3 (tiga) dimensi dan 5 (lima) indikator, yaitu dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari indikator proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan yang saat melahirkan hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun (MHPK20), dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari indikator persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA/ sederajat ke atas dan persentase anggota legislatif, serta dimensi pasar tenaga kerja yang diwakili dengan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan TPAK perempuan,	Indeks	0,599	0,579	0,563	0,546	0,530	0,513	0,497	Dinas Sosial PPPA
11	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Tingkat perkembangan perekonomian suatu wilayah dalam periode tertentu, yang diukur melalui peningkatan nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi. Secara operasional, laju pertumbuhan ekonomi dihitung dari persentase perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan dibandingkan tahun sebelumnya.	Persen	0,9	2.65 - 4.01	2.68 - 4.22	2.71 - 4.43	2.74 - 4.65	2.77 - 4.86	2.81 - 5.07	Badan Pusat Statistik
12	Indeks Gini	Tingkat ketimpangan distribusi pendapatan atau pengeluaran penduduk dalam suatu wilayah	Indeks	0,187	0.204 - 0.206	0.196 - 0.199	0.189 - 0.191	0.181 - 0.184	0.173 - 0.176	0.163 - 0.169	Badan Pusat Statistik

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD (2024)	TARGET TAHUN						SUMBER DATA
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
13	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan & Perikanan terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan & Perikanan terhadap PDRB	Persen	42,83	42,9	43,42	43,75	43,85	44,05	44,25	Badan Pusat Statistik
14	Indeks Daya Saing Daerah	Ukuran komposit yang menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya untuk meningkatkan produktivitas, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Indeks ini disusun berdasarkan empat pilar utama, yaitu kelembagaan, sumber daya manusia, infrastruktur, dan ekonomi daerah.	Indeks	3,42	3,47	3,52	3,57	3,62	3,68	3,73	BRIN
15	Indeks Ketahanan Pangan	Ukuran yang menunjukkan tingkat ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan di suatu wilayah. Indeks ini disusun untuk menilai kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan yang cukup, bergizi, aman, dan berkelanjutan. Semakin tinggi nilai IKP, semakin baik kondisi ketahanan pangan suatu daerah.	Indeks	84,87	84,97	85,07	85,17	85,27	85,37	85,47	Badan Pangan Nasional
16	Pembentukan Modal Tetap Bruto (%) PDRB)	Pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi,	Persen PDRB	25,37	27,31	27,49	27,68	27,86	28,04	28,22	Badan Pusat Statistik
17	PDRB per kapita (Rp Juta)	PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk, PDRB per kapita dihitung dengan cara membagi total PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun	Juta Rupiah	55,67	58.63 - 59.39	60.87 - 65.05	63.11 - 70.71	65.35 - 76.37	67.59 - 81.02	69.83 - 87.68	Badan Pusat Statistik
19	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja	Persen	4,94	4.70 - 4.87	4.60 - 4.84	4.50 - 4.80	4.41 - 4.77	4.31 - 4.73	4.22 - 4.69	Badan Pusat Statistik

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD (2024)	TARGET TAHUN						SUMBER DATA
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
20	Indeks Infrastruktur	Tingkat ketersediaan, kualitas, dan pemerataan sarana prasarana dasar di suatu wilayah, meliputi transportasi, energi, air bersih, sanitasi, serta telekomunikasi.	Indeks	66,67	68,17	69,67	71,17	72,67	74,17	75,67	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
21	Indeks Reformasi Birokrasi	Tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi di suatu instansi atau daerah, meliputi aspek struktur organisasi, tata laksana, manajemen SDM, dan pelayanan publik. Secara operasional, indeks ini dihitung dari berbagai indikator kuantitatif dan kualitatif yang mencerminkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas birokrasi.	Indeks	70,89	71,5	72,5	73,5	74,5	75,5	76,5	KemenPAN-RB
22	Indeks Pelayanan Publik	Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi,	Indeks	3,92	4,04	4,06	4,09	4,11	4,13	4,15	KemenPAN-RB
23	SAKIP	SAKIP diukur melalui kualitas perencanaan, tingkat ketercapaian indikator kinerja, kualitas laporan, hasil evaluasi, dan implementasi budaya kinerja dalam organisasi	Nilai	64,88	64,89	64,91	64,93	64,95	64,97	64,98	KemenPAN-RB
24	Persentase Penurunan Emisi GRK Tahunan	Persentase selisih jumlah total emisi GRK pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya	Persen	N/A	51,31	51,79	52,28	52,77	53,25	53,74	Dinas Lingkungan Hidup
25	Indeks Ketahanan Daerah	Ukuran komposit yang menilai kemampuan suatu daerah dalam menghadapi berbagai risiko dan tekanan, baik dari aspek ekonomi, sosial, lingkungan, maupun pemerintahan, sehingga tetap mampu mempertahankan pembangunan dan	Indeks	0,28	0,36	0,38	0,39	0,41	0,42	0,44	BNPB

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD (2024)	TARGET TAHUN						SUMBER DATA
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		kesejahteraan masyarakat. Secara operasional, IKD dihitung dari sejumlah indikator yang mencerminkan kapasitas adaptasi, resiliensi, dan daya tangkal daerah terhadap berbagai ancaman									
26	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	Indeks	68,62	74,38	74,55	74,72	74,89	75,07	75,24	Dinas Lingkungan Hidup
27	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang ada di suatu wilayah	Indeks	179,68	178,33	177,81	177,29	176,77	176,25	175,73	BNPB
28	Persentase benda, bangunan, struktur dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	Jumlah Persentase benda, bangunan, struktur dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	Persen	14,49	18,84	21,74	24,64	27,53	30,43	33,33	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
29	Persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	Jumlah Persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	Persen	20,41	26,53	30,61	34,70	38,78	42,86	46,94	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
30	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks yang menggambarkan sejauh mana tingkat kerukunan umat beragama	Indeks	-	80,00	80,50	81,00	81,50	82,00	82,50	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

B. INDIKATOR KINERJA DAERAH

Indikator kinerja daerah merupakan indikator kinerja yang ditetapkan sebagai ukuran kinerja seluruh penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2025-2030, yang terdiri dari Indikator Makro Pembangunan dan Indikator Kinerja Kunci. Berikut merupakan tabel penyalarsan indikator makro dan tabel Indikator kinerja Daerah Kabupaten Bangka Selatan:

Tabel 4.3

Sinkronisasi Indikator Makro Daerah dengan Indikator RPJMN dan RPJMD Prov Kepulauan Bangka Belitung

Indikator Makro	RPJMN		RPJMD PROV		RPJMD KAB BASEL	
	2025	2029	2025	2029	2025	2029
LPE (%)	5,3	8	2.80 - 4.46	2.96 - 5.50	2.65 - 4.01	2.77 - 4.86
GNI per Kapita (USD)	5410	8000	-	-	-	-
PDRB per kapita (Rp. Juta)	-	-	72.91 - 73.86	84.04 - 101.96	58.63 - 59.39	69.83 - 87.68
Kontribusi PDRB Provinsi (%)	-	-	0,490	0,500	-	-
Tingkat Kemiskinan (%)	7,0-8,0	4,5-5,0	4.40 - 4.95	2.79 - 4.40	3.30 - 3.65	2.26 - 3.30
Rasio Gini	0,378-0,382	0,372-0,375	0.239 - 0.242	0.204 - 0.208	0.204 - 0.206	0.173 - 0.176
TPT (%)	-	-	4.36 - 4.56	3.94 - 4.40	4.70 - 4.87	4.31 - 4.73
Indeks Modal Manusia/IPM (Kab)	0,56	0,59	0,560	0,590	-	-
Indeks Pembangunan Manusia	-	-	-	-	70,34	71,76
Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	35,53	45,17	48,97	62,21	-	-
IKLH Daerah	76,49	77,2	76,66	77,32	74,38	75,07

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI										
1	Konsumsi Listrik per Kapita	kWh	731,49	902,83	977,67	1052,51	1127,34	1202,18	1277,02	
2	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	Persen	10,95	12,16	11,7	11,25	10,79	10,33	9,87	
3	Kapasitas Air Baku	M3/Detik	0,6	0,63	0,65	0,68	0,70	0,73	0,76	
4	Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Bersih Perpipaan	Persen	28,89	32,92	36,95	40,97	45	49,03	53,06	
5	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman	Persen	3,05*	4,24	7,1	9,96	12,82	15,68	18,54	
6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	68,62	74,38	74,55	74,72	74,89	75,07	75,24	
7	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	38,6	62,92	62,98	63,05	63,12	63,19	63,26	
8	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Persen	70,22	72,05	72,65	73,25	73,84	74,44	75,04	
9	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	Persen RT	35	38	41,86	45,75	49,63	53,5	57,38	
10	Persentase Penurunan Emisi GRK Kumulatif	Persen	N/A	22,53	23,03	23,53	24,03	24,53	25,04	
11	Persentase Penurunan Emisi GRK Tahunan	Persen	N/A	51,31	51,79	52,28	52,77	53,25	53,74	
12	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	179,68	178,33	177,81	177,29	176,77	176,25	175,73	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks	0,28	0,36	0,38	0,39	0,41	0,42	0,44	
II. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT										
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	0,9	2.65 - 4.01	2.68 - 4.22	2.71 - 4.43	2.74 - 4.65	2.77 - 4.86	2.81 - 5.07	
2	Tingkat Kemiskinan	Persen	3,74	3,30 - 3,65	3,04 - 3,56	2,78 - 3,47	2,52 - 3,39	2,26 - 3,30	2.01 - 3.21	
3	PDRB per kapita (Rp Juta)	Juta Rupiah	55,67	58,59	60,86	63,14	65,42	67,7	69,98	
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,94	4.70 - 4.87	4.60 - 4.84	4.50 - 4.80	4.41 - 4.77	4.31 - 4.73	4.22 - 4.69	
5	Porsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	Persen	-	48	50,5	53	55,5	58	61,00	
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen	46,9	46,97	47,64	48,32	48,99	49,66	50,00	
7	Rasio Gini	Rasio	0,187	0.204 - 0.206	0.196 - 0.199	0.189 - 0.191	0.181 - 0.184	0.173 - 0.176	0.163 - 0.169	
8	Indeks Modal Manusia	Indeks	N/A	0,5	0,51	0,52	0,52	0,53	0,54	
9	Angka Kematian Balita (Per 1000 Kelahiran Hidup)	Angka	8,37	9,63	9,4	9,17	8,93	8,7	8,45	
10	Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,71	11,91-11,93	11,93-11,95	11,95-11,97	11,97-11,99	11,99-12,01	12,01-12,10	
11	Usia Harapan Hidup	Tahun	71,74	72,51	72,64	72,78	72,91	73,04	73,17	
12	Angka Kematian Ibu	Kasus	7	7	7	7	6	5	4	
13	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Persen	24,6	18	17,3	16,6	15,9	15,2	14,50	
14	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberculosis (Treatment Coverage)	Persen	98	98	98	98	98	98	98	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (Treatment Success Rate)	Persen	78,3	90	90	90	90	90	90,00	
16	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	Persen	98	98	98	98	98	98	98	
17	Literasi Membaca SD/Sederajat	Persen	61,06	63,56	66,06	68,56	71,06	73,56	76,06	
18	Numerasi SD/Sederajat	Persen	53,39	56,29	59,19	62,09	64,99	67,89	70,79	
19	Literasi Membaca SMP/Sederajat	Persen	67,95	69,05	70,15	71,25	72,35	73,45	74,55	
20	Numerasi SMP/Sederajat	Persen	59,79	61,29	62,79	64,29	65,79	67,29	68,79	
21	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	6,93	6,95	6,98	7,01	7,04	7,07	7,10	
22	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	Persen	6,71	8,55	9,38	10,21	11,04	11,87	12,70	
23	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	Persen	N/A	8,55	9,51	10,48	11,44	12,41	13,37	
24	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten	Persen	71,32	71,61	71,9	72,19	72,48	72,77	73,06	
25	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	Persen	0,12	7	8,15	9,3	10,45	11,6	12,75	
26	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	58,3	64,65	64,92	65,19	65,46	65,73	66,00	
27	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,599	0,579	0,563	0,546	0,53	0,513	0,497	
28	Persentase Potensi konflik yang terselesaikan	Persen	83,33	84	85	86	87	88	89,00	
29	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	-	80	80,5	81	81,5	82	82,50	
30	Persentase benda, bangunan, struktur dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	Persen	14,49	18,84	21,74	24,64	27,53	30,43	33,33	
31	Persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	Persen	20,41	26,53	30,61	34,7	38,78	42,86	46,94	
32	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	70,01	70,34	70,68	71,03	71,39	71,76	72,14	
III. ASPEK DAYA SAING DAERAH										

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase Kontribusi Perikanan Tangkap dan Budidaya terhadap PDRB	Persen	14,21	18,22	18,28	18,33	18,39	18,44	18,50	
2	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan & Perikanan terhadap PDRB	Persen	42,83	42,9	43,42	43,75	43,85	44,05	44,25	
3	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	Persen	4,96	8,86	9,04	9,23	9,42	9,6	9,79	
4	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	2,72	2,88	2,99	3,10	3,20	3,31	3,42	
5	Jumlah Kunjungan Tamu di Hotel Berbintang dan Non Bintang	Ribu Orang	9,029	10,029	11,029	12,029	13,029	14,029	15,029	
6	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki sertifikat HAKI (Orang) (Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif)	Orang	59	69	79	89	99	109	119	
7	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kabupaten	Persen	N/A	73,43	73,83	74,23	74,63	75,02	75,42	
8	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten	Persen	N/A	99,75	99,76	99,77	99,78	99,79	99,80	
9	Rasio Kewirausahaan Daerah	Persen	0,084	6,61	6,87	7,12	7,38	7,63	7,89	
10	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	Persen	N/A	0,3	0,4	0,49	0,59	0,68	0,78	
11	<i>Return on Asset (ROA) BUMD</i>	Persen	0	0	0,06	0,11	0,17	0,22	0,28	
12	Indeks Ekonomi Hijau Daerah (Green Economy Index)	Indeks	N/A	59,48	60,77	62,07	63,36	64,65	66,00	
13	Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Kabupaten	Angka	N/A	6,8	6,73	6,65	6,58	6,51	6,44	
14	Pembentukan Modal Tetap Bruto (%) PDRB	Persen PDRB	25,37	27,31	27,49	27,68	27,86	28,04	28,22	
15	NET Ekspor	Persen	2,17	2,5	3,53	4,56	5,58	6,61	7,64	
16	Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota terhadap total PDRB Kab/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Persen	11,18	11,29-11,57	11,48-11,71	11,67-11,91	11,86-12,11	12,05-12,32	12,24-12,52	
17	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Persen	0,4	0,5	0,55	0,6	0,65	0,7	0,75	
18	Tingkat Inflasi	Persen	0,76	2,85	2,845	2,84	2,835	2,83	2,825	
19	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	Persen	3,63	3,64	3,643	3,645	3,648	3,65	3,652	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Total Kredit/PDRB	Persen	3,48	3,61	3,74	3,86	3,99	4,11	4,24	
21	Persentase Penduduk yang Memiliki Rekening Tabungan baik atas nama Sendiri ataupun Bersama 5 tahun keatas	Persen	N/A	22,23	23,30	24,37	25,43	26,50	27,57	
22	Persentase Penduduk yang Memiliki Rekening Tabungan baik atas nama Sendiri ataupun Bersama usia produktif (15-64 tahun)	Persen	N/A	30,42	31,96	33,5	35,04	36,57	38,11	
23	Persentase Penduduk Yang Mengakses Internet	Persen	73,4	81,47	82,4	83,33	84,25	85,18	86,10	
24	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Persen	14,07	19,16	23,62	28,02	32,54	37,02	41,5	
25	Persentase Desa Mandiri	Persen	28	26	34	42	50	56	60	
26	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Indeks	2,88	2,98	3,04	3,09	3,14	3,19	3,22	
27	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	84,87	84,97	85,07	85,17	85,27	85,37	85,47	
28	PDRB per kapita (Rp Juta)	Juta Rupiah	55,67	58.63 - 59.39	60.87 - 65.05	63.11 - 70.71	65.35 - 76.37	67.59 - 81.02	69.83 - 87.68	
29	Indeks Infrastruktur	Indeks	66,67	68,17	69,67	71,17	72,67	74,17	75,67	
IV. ASPEK PELAYANAN UMUM										
1	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Indeks	3,42	3,47	3,52	3,57	3,62	3,68	3,73	
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	3,25	3,79	3,88	3,97	4,05	4,14	4,23	
3	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,92	4,04	4,06	4,09	4,11	4,13	4,15	
4	Indeks Integritas Nasional	Indeks	69,1	72	72,3	72,6	72,9	73,2	73,50	
5	Indeks Kapabilitas Inovasi	Indeks	1,72	1,72	1,79	1,86	1,93	2	2,07	
6	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	87,58	87,59	87,6	87,61	87,62	87,63	87,64	
7	Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	Persen	63,61	73,86	78,56	83,25	87,95	92,64	97,34	
8	Angka Kriminalitas	Persen	8,98	5,93	5,64	5,35	5,06	4,77	4,48	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks	-	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	
10	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	70,89	71,5	72,5	73,5	74,5	75,5	76,5	
11	SAKIP	Nilai	64,88	64,89	64,91	64,93	64,95	64,97	64,98	
Fokus Layanan Umum Urusan Wajib Dasar										
Pendidikan										
1	APK PAUD/RA	Persen	55,5	37,64	37,66	37,71	37,76	37,81	37,86	
2	APK SD/MI/Paket A	Persen	106,94	100	100	100	100	100	100	
3	APK SMP/MTS/Paket B	Persen	89,5	97,31	97,56	98,04	98,53	99,52	100	
4	APS (5-6)	Persen	70,75	73,79	76,83	79,87	82,91	85,88	88,85	
5	APS SD/SMP (7-15)	Persen	96,88	97,31	97,73	98,16	98,59	99,01	99,44	
6	APS Kesetaraan (7-18)	Persen	13,74	14,5	15,27	16,03	16,79	17,55	18,32	
7	Persentase Kualifikasi guru SI PAUD	Persen	75,2	83,58	84,08	84,58	85,08	85,58	86,08	
8	Persentase Kualifikasi guru SI SD	Persen	95,75	98,76	99	99,23	99,46	99,69	100	
9	Persentase Kualifikasi guru SI SMP	Persen	97,5	98,03	98,39	98,75	99,11	99,46	100	
10	Persentase Akreditasi sekolah PAUD	Persen	63,91	64,32	64,73	65,14	65,55	65,97	66,38	
11	Persentase Akreditasi sekolah SD	Persen	93	95	96	97	98	99	100	
12	Persentase Akreditasi sekolah SMP	Persen	97	97,5	98	98,5	99	99,5	100	
13	Nilai Survey kepuasan masyarakat	Nilai	76	77	80	83	86	90	95	
Kesehatan										
1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	per 1000 Penduduk	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	
2	Persentase Rumah Sakit Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota Yang Terakreditasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persen	68,71	70	72	75	77	80	82	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Persentase Ibu Bersalin Mendapat Pelayanan Persalinan	Persen	70,12	73	75	77	80	82	85	
5	Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persen	73,58	75	77	80	82	85	87	
6	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Persen	75,47	78	80	82	85	87	90	
7	Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	99,86	99	99	99	99	99	99	
8	Persentase Orang Usia 15 – 59 Tahun Mendapatkan Skrinning Kesehatan Sesuai Standar	Persen	95,76	96,01	96,26	96,51	96,76	97,01	97,26	
9	Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Keatas Mendapatkan Skrinning Kesehatan Sesuai Standar	Persen	83,97	84	85	86	87	88	89	
10	Persentase Penderita Hipertensi Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	97,62	97,82	98,02	98,22	98,42	98,62	98,82	
11	Persentase Penderita DM Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
12	Persentase ODGJ Berat Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
13	Persentase Orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan TBC Sesuai Standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
14	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	Persen	0	36	50	65	75	90	100	
15	Cakupan imunisasi bayi lengkap	Persen	94	95	95	97	98	99	99	
16	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	Persen	0	62	70	85	90	95	100	
17	Persentase Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
1	Persentase Rumah Memiliki Akses Air Minum	Persen	83,74	86,2	89,16	91,87	94,58	97,29	100	
2	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan 1000 Penduduk	Angka	0,68	0,69	0,70	0,73	0,73	0,74	0,75	
3	Persentase Rumah Memiliki Akses Air Limbah Domestik	Persen	91,68	92,6	94,54	95,84	97,23	98,61	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Cakupan Pelayanan Sistem Jaringan Drainase Permukiman	Persen	53,6	54	55,27	56,1	56,94	57,77	58,6	
5	Persentase Jumlah Realisasi Pembangunan Wajah Kota Berbanding Jumlah Rencana Pembangunan Wajah Kota	Angka	38,46	49,5	59	69,2	79,5	90	100	
6	Persentase Gedung Negara Kondisi Baik	Persen	97,55	97,75	98,37	98,78	99,18	99,59	100	
7	Ketaatan Terhadap RTRW	Persen	58,58	100	100	100	100	100	100	
8	Rasio Jaringan Irigasi (0-1)	Angka	0,2	0,4	0,52	0,56	0,61	0,65	0,69	
9	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	Persen	70,58	71	71,85	72,83	73,91	75,11	76,05	
10	Cakupan Pengawasan Pembinaan dan Penataan Usaha Jasa Konstruksi	Persen	41	47,5	52,33	58	63,67	69,33	75	
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman										
1	Persentase Kawasan Permukiman kumuh di bawah 10 (Sepuluh) Ha di Kabupaten/Kota yang ditangani	%	0%	0%	0,75%	1,50%	2,25%	3,00%	3,75%	
2	Persentase jumlah rumah tidak layak huni	%	5,13%	5,12%	5,10%	5,06%	5,03%	4,99%	4,95%	
3	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah yang terdampak korban bencana dan atau relokasi program Kabupaten	%	0%	0%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
4	Persentase unit rumah dalam perumahan yang di lengkapi PSU	%	0,14%	0,15%	0,16%	0,18%	0,19%	0,20%	0,25%	
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat										
1	Persentase Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	Persen	80,70%	81,00%	82,00%	83,00%	84,00%	85,00%	86,00%	
3	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	Persen	72%	73%	74%	75%	77%	80%	85%	
4	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persen	8%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	
5	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7	Waktu Tanggap (Response Time) Penanganan Kebakaran	Menit	14,11	14	14	13	12	11	10	
Sosial										
1	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Diluar Panti (Indikator SPM)	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
Fokus Layanan Umum Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar										
Tenaga Kerja										
1	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja (%)	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (%)	Persen	0,92	20	20	20	20	30	30	
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (%)	Persen	188.901.279.437,12	65,34	65,97	66,99	68,28	68,37	70,67	
4	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota (%)	Persen	18,88	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	
5	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)	Persen	30,49	35	40	45	55	60	65	
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										
1	Persentase ARG Pada Belanja Langsung APBD	Persen	0,43	0,6	1	1,1	1,2	1,3	1,5	
2	Persentase Anak Korban Kekerasan Yang Ditangani Instansi Terkait Kabupaten/Kota	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
3	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, Termasuk TPPO (Per 100.000 Penduduk Perempuan)	Persen	17	17,10	17,00	16,50	16,25	16	15,75	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pangan										
1	Skor PPH		90,3	90	90,3	90,5	90,7	91	91,3	
2	Presentase daerah rentan rawan pangan yang tertangani			84	87	90	95	100	100	
Pertanahan										
1	Persentase Penanganan Masalah Penetapan Tanah untuk Pembangunan Fasilitas Umum	Persen	0	100	100	100	100	100	100	
Lingkungan Hidup										
1	Indeks Kualitas Air	Indeks	59,05	71,82	72,02	72,22	72,42	72,62	72,82	
2	Indeks Kualitas Udara	Indeks	93,74	82,94	83,14	83,34	83,54	83,74	83,94	
3	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	38,60	62,94	63,01	63,8	63,15	63,22	63,29	
4	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks	54,3	56,3	60,80	63,80	64,80	66,80	67,80	
5	Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	Persen	66	67	69	70	71	73	75	
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil										
1	Perekaman KTP-EL	Persen	99,21%	99,25%	99,46%	99,68%	99,88%	99,90%	99,95%	
2	Persentase Anak Usia 0-17 Tahun Kurang 1 Hari Yang Memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)	Persen	69,72%	69,77%	72,10%	77,15%	82,18%	85,10%	88,12%	
3	Kepemilikan Akta Kelahiran	Persen	99,80%	99,81%	99,82%	99,83%	99,85%	99,87%	99,90%	
4	Jumlah Perangkat Daerah (PD) Yang telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama	Persen	15	17	17	18	19	20	23	
5	Rasio Kepadatan Penduduk	Rasio	60/1 km	60/1 km	62/1 km	64/1 km	66/1 km	68/1 km	70/1 km	
6	Persentase kepemilikan akta kelahiran usia balita (0-4 tahun)	Persen	99,92	99,92	99,94	99,95	99,96	99,97	99,97	
Pemerintahan Desa										
1	Persentase Desa Maju yang berubah status menjadi Desa Mandiri	Persen	20	26	28	36	44	56	60	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang berperan aktif dalam membangun Desa	Persen	80	82	84	88	92	96	100	
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana										
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	Rata-rata anak per wanita	0,23	2,13	2,12	2,12	2,11	2,11	2,1	
2	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalancee Rate/MCPR)	Persen	83,64	83,7	84	85	86	87	88	
3	Persentase Kebutuhan Ber KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	Persen	3,41	3,45	3,4	3,3	3,2	3,1	3	
Perhubungan										
1	Rasio Konektivitas Angkutan Jalan	Rasio	0,64	0,64	0,66	0,69	0,71	0,74	0,76	
2	Rasio Konektivitas Angkutan Pelayaran	Rasio	0,31	0,31	0,34	0,36	0,39	0,41	0,43	
Komunikasi dan Informatika										
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) Yang Terhubung Dengan Akses Internet Yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Persentase Layanan Publik Yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	Persen	93,33%	94%	94,50%	95%	95,50%	96,00%	97%	
3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, (Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota)	Persen	95%	96%	97%	98%	100%	100%	100%	
4	Persentase Perangkat Daerah (PD) Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Persentase Perangkat Daerah (PD) Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Evaluasi Pembangunan Daerah	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	Persen	52%	52,50%	53%	53,50%	54%	55%	56%	
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah										
1	Meningkatnya Koperasi Yang Berkualitas	Persen	51,61%	51,61%	54%	57%	60%	65%	70%	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Meningkatnya Usaha Mikro Yang Menjadi Wirausaha	Persen	98,33%	98,33%	99%	99%	100%	100%	100%	
Penanaman Modal										
1	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/Kota	Persen	-19%	50%	55%	64%	74%	84%	95%	
2	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	90	91	91	92	92	93	93	
Kepemudaan dan Olahraga										
1	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	Persen	3,15	3,16	3,17	3,18	3,19	3,20	3,21	
2	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan Dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Persen	32,13	32,14	32,15	32,16	32,17	32,18	32,19	
3	Peningkatan Prestasi Olahraga	Mendali	1 Medali	1 Medali	1 Medali	1 Medali	1 Medali	1 Medali	1 Medali	
Statistik										
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Perangkat Daerah (PD) Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Evaluasi Pembangunan Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
Persandian										
1	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	Persen	52	52,50	53	53,50	54	55	56	
Kebudayaan										
1	Persentase pelestarian budaya benda	Persen	14,49	14,49	18,84	21,74	24,64	27,53	30,43	
2	Persentase pelestarian budaya tak benda	Persen	20,41	20,41	26,53	30,61	34,7	38,78	42,86	
Perpustakaan										
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (%)	Persen	62,22	62,22	64,34	66,56	68,76	70,12	72,23	
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	79,48	79,48	80	80,15	80,2	80,25	80,3	
Kearsipan										

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti Yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
2	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Rakyat	Persen	4,69	4,69	4,79	4,89	4,99	5,09	5,19	
Fokus Layanan Umum Urusan Pilihan										
Pertanian										
1	Presentase ketersediaan sarana pertanian	Pesen	80	80,5	80,8	81,61	82,42	83,25	84	
2	Peningkatan produksi tanaman pangan	Ton	30.290,18	31.804,69	33.394,92	35.064,67	36.817,90	38.658,80	40.591,74	
3	Peningkatan produksi tanaman hortikultura	Ton	126.386,30	132.705,62	139.340,90	146.307,94	153.623,34	161.304,50	169.369,73	
4	Peningkatan produksi tanaman perkebunan	Ton	59.712,97	62.698,62	65.833,55	69.125,23	72.581,49	76.210,56	80.021,09	
5	Peningkatan produksi komoditas peternakan	Ton	2430	2478	2528	2578	2630	2682	2736	
6	presentase peningkatan luasan LP2B yang produktif	Persen	6.100	6.600	6.700	6.825	6.975	7.175	7.425	
7	Presentase ketersediaan prasarana pertanian	Persen	67,5	68	68,18	68,86	69,55	70,24	70,94	
8	Tingkat pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
9	Jumlah Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang belum/sudah Memiliki sertifikat NKV (Nomor Kontrol Veteriner) yang dibina	Jumlah	-	1	1	1	1	1	1	
10	Persentase penanganan bencana OPT pertanian	Persen	-	50	50	50	50	50	50	
11	Persentase penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian	Persen	-	50	50	50	50	50	50	
12	Peningkatan SDM pertanian	Persen	-	2	3	3,5	3,7	4	5	
13	Peningkatan kelas kelembagaan petani yang dibentuk dan beroperasi	Persen	-	5	5	5	5	5	5	
Pariwisata										

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Manca Negara Per Kebangsaan	Persen	-66,67	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
2	Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara Yang Datang Ke Kabupaten/Kota	Persen	-7,40	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
3	Tingkat Hunian Akomodasi	Persen	20,99	21,05	21,10	21,15	21,20	21,25	21,30	
4	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Harga Berlaku	Persen	2,72	2,88	2,99	3,10	3,20	3,31	3,42	
5	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	Persen	2,68	2,69	2,70	2,71	2,72	2,73	2,74	
Perikanan										
1	Jumlah produksi perikanan tangkap	Ton	40.019,62	41.429,82	41.844,11	42.262,56	42.685,18	43.112,03	43.543,15	
2	Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	1.479,47	1.494,26	1.509,21	1.524,30	1.539,54	1.554,94	1.570,49	
3	Jumlah produksi pengolahan perikanan	Ton	1.019,61	1.029,80	1.040,10	1.050,50	1.061,01	1.071,62	1.082,33	
Perdagangan										
1	Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Izin Sesuai Dengan Ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Persen	66,66%	66,66%	70%	72%	73%	74%	75%	
2	Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	Persen	116,59%	116,59%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah Yang Berlaku	Persen	18,24%	18,24%	20%	25%	30%	35%	40%	
Perindustrian										
1	Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten/Kota	Persen	5,42%	5,42%	3507 IKM (8,42%)	3.612 IKM (11,42%)	3.720 IKM (14,42%)	3.832 IKM (17,42%)	21%	
2	Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri Dalam RIPIN Yang Ditetapkan Dalam RPIK	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Usaha Industri (UI) Kecil dan Industri Menengah Yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Yang Lokasinya Di Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap dan Terkait	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Transmigrasi										
1	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Difasilitasi Penetapannya	Kawasan	1	1	1	1	1	1	1	
2	Jumlah Satuan Pemukiman Transmigrasi yang Difasilitasi Pembangunannya	Permukiman	13	15	17	19	21	23	26	
3	Jumlah Satuan Pemukiman yang Dibina	Permukiman	4	8	12	16	20	24	26	
Fokus Layanan Umum Fungsi Penunjang Urusan										
Sekretariat Daerah										
1	Persentase Jumlah Pengadaan Yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	Persen	93,02	93,5	94	94	94,5	95	95	
2	Persentase Nilai Belanja Yang Dilakukan Melalui Pengadaan	Persen	11,79	40	50	55	56	57	60	
3	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Persen	95,32	96	96	96	96	96	96	
Perencanaan										
1	Persentase Dokumen Perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD) yang disahkan tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Ketercapaian Target Sasaran Pembangunan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
Keuangan										
1	Rasio Belanja Pegawai Diluar Guru dan Tenaga Kesehatan	Persen	14,06	15,55	15,25	14,75	14,35	14,05	13,75	
2	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi Transfer Expenditures)	Persen	72,47	77,5	75,7	73,7	71,7	69,7	67,7	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Budget Execution : Deviasi Realisasi Belanja Terhadap Belanja Total Dalam APBD	Persen	8,69	8,49	8,29	8,09	7,89	7,69	7,49	
4	Revenue Mobilization : Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD	Persen	25,21	10,4	10,2	10	9,8	9,6	9,4	
5	Assets Management	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
6	Cash Management : Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	Persen	2,37	4,5	4,35	4,2	4,05	3,9	3,75	
7	Informasi Tentang Sumber Daya Yang Tersedia Untuk Pelayanan (Information On Resources Available To Frontline Service Delivery Units)	Persen	91,08	93,3	93,8	94,3	94,8	95,3	95,8	
8	Akses Publik Terhadap Informasi Keuangan Daerah (Public Acces To Fiscal Information)	Persen	83,33	100	100	100	100	100	100	
Kepegawaian, serta Pendidikan dan Pelatihan										
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	84,4	85,5	86,7	87,8	88,8	89,7	90,5	
2	Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	24,07	25,6	26	27,5	28,4	29,7	30,6	
3	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	16,74	17,7	18,5	19,6	20,5	21,5	22,7	
Penelitian dan Pengembangan										
1	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
Pengawasan										
1	Persentase laporan hasil pengawasan internal yang diterbitkan	Persen	99	99	99	99	99	99	99	
2	Persentase laporan pengawasan dengan tujuan tertentu yang diterbitkan	Persen	99	99	99	99	99	99	99	
3	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan yang diterbitkan	Laporan	3	3	3	4	4	5	5	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kecamatan										
1	Persentase Desa Tertib Administrasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Desa yang dibina dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Partisipasi desa dalam kegiatan Hari Besar Kebangsaan dan Keagamaan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
Kesatuan Berbangsa dan Politik										
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama		0	50	55	60	65	70	75	
2	Persentase Konflik Sosial, Agama, Politik dan Ekonomi Tertangani	Persen	100	100	100	100	100	100	100	

BAB V

PENUTUP

5.1 KAJIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan daerah yang memiliki kedudukan sebagai landasan yuridis formal dalam penyelenggaraan pembangunan daerah selama periode lima tahun. RPJMD memuat arah kebijakan pembangunan jangka menengah, serta menjadi acuan bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja yang terarah, terukur, dan terintegrasi. Dokumen ini memuat identifikasi atas isu-isu strategis yang dihadapi daerah, serta rumusan program-program prioritas yang dirancang untuk menjawab tantangan dan kebutuhan pembangunan ke depan. Di dalamnya juga tercantum secara jelas visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta target-target pembangunan yang ingin dicapai dalam lima tahun mendatang.

Dokumen RPJMD Kabupaten Bangka Selatan merupakan pedoman bagi pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan Kabupaten Bangka Selatan periode Tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Dengan adanya dokumen ini maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. RPJMD Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2025-2029 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pembangunan jangka panjang sebagaimana ditetapkan dalam RPJPD Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2025-2045. Selain itu, seluruh perencanaan dan penganggaran pembangunan diselaraskan dengan dokumen perencanaan nasional, provinsi, serta memperhatikan dinamika dan kebutuhan lokal.
2. RPJMD Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2025-2029 merupakan perencanaan pembangunan lima tahunan di Kabupaten Bangka Selatan yang akan dijabarkan menjadi rencana pembangunan tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangka Selatan. Selanjutnya RKPD akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
3. Seluruh program dan kegiatan pembangunan dilaksanakan secara efektif untuk mencapai tujuan pembangunan daerah secara maksimal, serta efisien dalam

penggunaan sumber daya, baik anggaran, waktu, maupun tenaga. Pemanfaatan teknologi informasi dan inovasi menjadi kunci untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja pelaksanaan pembangunan.

4. Kaidah pelaksanaan pembangunan menjunjung tinggi prinsip partisipasi aktif masyarakat dan inklusivitas. Masyarakat, organisasi sosial, akademisi, pelaku usaha, dan kelompok rentan dilibatkan dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
5. Pasca penetapan RPJMD, apabila terjadi perubahan struktur organisasi perangkat daerah maka struktur/kelembagaan baru tersebut harus menyesuaikan antara urusan pemerintahan yang diampunya dengan urusan pemerintahan yang tercantum dalam RPJMD ini dan harus membuat renstra baru.
6. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan program/kegiatan dalam renstra/renja serta konsistensinya dengan RPJMD dilakukan pengendalian, monitoring, dan evaluasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
7. RPJMD Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2025-2029 dimungkinkan diubah apabila hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan, hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan terjadi perubahan. yang mendasar seperti: terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, dan/atau perubahan kebijakan nasional.
8. Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD Kabupaten Bangka Selatan tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

Mekanisme pengendalian dilaksanakan melalui pemantauan rutin, pelaporan kinerja, serta koordinasi lintas perangkat daerah guna memastikan keterpaduan pelaksanaan program. Pengendalian ini bertujuan menjaga konsistensi pelaksanaan kebijakan, mengantisipasi potensi deviasi dari rencana, serta memberikan rekomendasi penyesuaian yang diperlukan agar pelaksanaan pembangunan tetap berada pada jalur yang telah ditetapkan.

Evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dilakukan secara periodik untuk mengukur tingkat capaian indikator kinerja, mengidentifikasi hambatan, dan

merumuskan langkah-langkah perbaikan. Hasil evaluasi ini menjadi masukan penting bagi penyusunan kebijakan selanjutnya, sehingga proses pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif, terukur, adaptif, dan berkesinambungan. Dengan pendekatan ini, diharapkan sasaran pembangunan Kabupaten Bangka Selatan dapat tercapai secara optimal, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah, dan keberlanjutan lingkungan.

Komitmen penuh terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2025–2029 sebagai pedoman strategis pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. RPJMD ini dirancang untuk mewujudkan visi dan misi daerah yang telah disepakati bersama masyarakat, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan, dengan berlandaskan prinsip efektivitas, efisiensi, partisipasi, dan keberlanjutan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang termuat dalam RPJMD secara konsisten, terukur, dan berkesinambungan, disertai pengendalian dan evaluasi yang sistematis guna memastikan tercapainya sasaran Pembangunan

RPJMD memiliki kesinambungan langsung dengan tahapan perencanaan berikutnya, yaitu Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025–2029 yang menjadi pedoman operasional masing-masing perangkat daerah dalam melaksanakan misi pembangunan. Selanjutnya, Renstra PD akan dijabarkan setiap tahun ke dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat prioritas, target, dan penganggaran secara rinci. Dengan kesinambungan ini, seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan akan terintegrasi dan selaras, sehingga visi pembangunan Kabupaten Bangka Selatan dapat diwujudkan secara efektif, terukur, dan berkelanjutan.

Sebagai penutup, RPJMD Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2025–2029 disusun sebagai dokumen perencanaan yang tidak hanya bersifat teknokratis, tetapi juga responsif terhadap dinamika sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Diharapkan dokumen ini dapat menjadi panduan utama bagi seluruh perangkat daerah, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Bangka Selatan yang berdaya saing, inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan sosial.

Dengan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, pengelolaan pembangunan lima tahun ke depan akan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan visi Kabupaten Bangka Selatan "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bangka Selatan Yang Adil, Makmur, Lestari dan Berkeadaban 2029". Semoga segala upaya dan kerja keras yang dilakukan dapat membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bangka Selatan.

BUPATI BANGKA SELATAN,



RIZA HERDAVID



2025

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian & Pengembangan Daerah

